KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, kami telah menyusun LKPJ Tahun 2022 untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan, semoga LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, Maret 2023

BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum 1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 2
1.2.1. Visi dan Misi 2
1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 3
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 8
1.3. Data Umum Daerah 8
1.3.1. Data Geografis Wilayah 8
1.3.2. Jumlah Penduduk 11
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk 13
1.3.4. Jumlah PNS 14
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 15
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 17
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan 17
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD 19
2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 20
2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah 22
2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 24
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 25
3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah 26
3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27
1. Urusan Pendidikan 27
2. Urusan Kesehatan 52
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86
4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 113
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 127
6. Urusan Sosial 144
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 162
1. Urusan Tenaga Kerja 162
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 170

3. Urusan Pangan 187
4. Urusan Lingkungan Hidup 197
5. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 227
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 241
7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 265
8. Urusan Perhubungan 279
9. Urusan Komunikasi Dan Informatika 295
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 300
11. Urusan Penanaman Modal 309
12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga 327
13. Urusan Statistik 333
14. Urusan Persandian 338
15. Urusan Kebudayaan 342
16. Urusan Perpustakaan 349
17. Urusan Kearsipan 355
18. Urusan Kelautan dan Perikanan 359
19. Urusan Pariwisata 377
20. Urusan Pertanian 383
21. Urusan Perdagangan 407
22. Urusan Perindustrian 415
23. Urusan Transmigrasi 419

3.1.3. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 423
1. Sekretariat Daerah 423
2. Sekretariat DPRD 437

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 457
1. Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan 458
2. Fungsi Keuangan 469
3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 482

3.1.5. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 493
1. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan 493

3.1.6. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan 499
1. Kecamatan dan Kelurahan 499

3.1.7. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum 728
1. Kesatuan Bangsa dan Politik 728

3.1.8. Evaluasi Capaian 742

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan 778

3.2.1. Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen 778
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 778
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 779

3.2.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah 780
1. Kualitas pelayanan publik 780
2. Kualitas sumber daya manusia 780

3. Kestabilan ekonomi 781
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim 782
5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada dan kesiapsiagaan terhadap bencana 783

3.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen 784

3.2.4. Inovasi Daerah 786

1. Pengembangan Inkubasi Kewirausahaan 786
2. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu 788
3. Pemanfaatan Aset Daerah untuk Kegiatan Produktif 789
4. Pengembangan Puskesos SLRT “Rumah Harapan” 790
5. Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah 792

3.3. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022 793

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 808

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 808

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya 808

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 810

4.2. Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 812

BAB V PENUTUP 813

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 5

Tabel 1. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 7

Tabel 1. 3 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2022 9

Tabel 1. 4 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 10

Tabel 1. 5 Persebaran CAT Kabupaten Kebumen 11

Tabel 1. 6 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 12

Tabel 1. 7 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen 13

Tabel 1. 8 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2022 14

Tabel 1. 9 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 16

Tabel 1. 10 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 17

Tabel 1. 11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 17

Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 21

Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 23

Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*) 24

Tabel 3. 1 Skala Penilaian 26

Tabel 3. 2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 28

Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 50

Tabel 3. 4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 53

Tabel 3. 5 Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2022 78

Tabel 3. 6 Data Kasus Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2022 80

Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 83

Tabel 3. 8 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 85

Tabel 3. 9 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 87

Tabel 3. 10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2022 110

Tabel 3. 11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 111

Tabel 3. 12 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2022 114

Tabel 3. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 123

Tabel 3. 14 Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s/d tahun 2022 124

Tabel 3. 15Capaian Penanganan Rumah Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022 126

Tabel 3. 16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 128

Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kebumen Tahun 2021-2022 142

Tabel 3. 18 Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 142

Tabel 3. 19 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2022 145

Tabel 3. 20 Perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen 160

Tabel 3. 21 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2022 161

Tabel 3. 22 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 163

Tabel 3. 23 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 170

Tabel 3. 24 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 172

Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja 187

Tabel 3. 26 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 188

Tabel 3. 27 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 196

Tabel 3. 28 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2022 199

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 225

Tabel 3. 30 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen 226

Tabel 3. 31 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen 227

Tabel 3. 32 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022 228

Tabel 3. 33 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 239

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022..... 239

Tabel 3. 35 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022 242

Tabel 3. 36 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 264

Tabel 3. 37 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2022 266

Tabel 3. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2022 279

Tabel 3. 39 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2021-2022 279

Tabel 3. 40 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 280

Tabel 3. 41 Perkembangan Indikator Kinerja 293

Tabel 3. 42 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen 294

Tabel 3. 43 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 296

Tabel 3. 44 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2022 299

Tabel 3. 45 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 301

Tabel 3. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 307

Tabel 3. 47 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 307

Tabel 3. 48 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022 308

Tabel 3. 49 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2022 310

Tabel 3. 50 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022..... 324

Tabel 3. 51 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2022 328

Tabel 3. 52 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan 332

Tabel 3. 53 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi..... 333

Tabel 3. 54 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 334

Tabel 3. 55 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2022 337

Tabel 3. 56 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 339

Tabel 3. 57 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2022 341

Tabel 3. 58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 343

Tabel 3. 59 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2022 347

Tabel 3. 60 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2022 ... 348

Tabel 3. 61 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan 348

Tabel 3. 62 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan 349

Tabel 3. 63 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 350

Tabel 3. 64 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 354

Tabel 3. 65 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 354

Tabel 3. 66 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 356

Tabel 3. 67 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2002 358

Tabel 3. 68 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 359

Tabel 3. 69 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 361

Tabel 3. 70 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan..... 376

Tabel 3. 71 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2022 378

Tabel 3. 72 Persentase Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 382

Tabel 3. 73 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 384

Tabel 3. 74 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 406

Tabel 3. 75 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 408

Tabel 3. 76 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 412

Tabel 3. 77 Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen Tahun 2022 413

Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 416

Tabel 3. 79 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022..... 418

Tabel 3. 80 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 420

Tabel 3. 81 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen 422

Tabel 3. 82 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 424

Tabel 3. 83 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 438

Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen..... 457

Tabel 3. 85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 460

Tabel 3. 86 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2021-2022..... 468

Tabel 3. 87 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022..... 468

Tabel 3. 88 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 470

Tabel 3. 89 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD 482

Tabel 3. 90 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 484

Tabel 3. 91 Perkembangan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan..... 491

Tabel 3. 92 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 494

Tabel 3. 93 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 498

Tabel 3. 94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 504

Tabel 3. 95 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2022 729

Tabel 3. 96 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum 741

Tabel 3. 97 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Kebumen Tahun 2022 743

Tabel 3. 98 Skala Pengukuran Ordinal 745

Tabel 3. 99 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 746

Tabel 3. 100 Realisasi IRB 2020-2022 746
Tabel 3. 101 Capaian IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022 748
Tabel 3. 102 Capaian Nilai SAKIP dan Opini BPK KAbupaten Kebumen Tahun 2022 750
Tabel 3. 103 Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2022 753
Tabel 3. 104 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2020 s.d. 2022 753
Tabel 3. 105 Capaian IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2022 754
Tabel 3. 106 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2022 755
Tabel 3. 107 Capaian RLS dan HLS Kabupaten Kebumen Tahun 2022 757
Tabel 3. 108 Capaian IPG dan CPA Kabupaten Kebumen Tahun 2022 758
Tabel 3. 109 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2022 759
Tabel 3. 110 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Kebumen Tahun 2022 760
Tabel 3. 111 Ketimpangan Pendapatan 761
Tabel 3. 112 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 762
Tabel 3. 113 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2022 763
Tabel 3. 114 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2021 dan Rencana tindak lanjut 793

Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022 809
Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 810

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Angka Kematian Bayi Tahun 2022 80

Grafik 3. 2 Angka Kematian Ibu Tahun 2016 s/d 2022..... 81

Grafik 3. 3 Capaian IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022 749

Grafik 3. 4 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen Tahun 2021 s.d. 2022 752

Grafik 3. 5 Perkembangan Indeks Pembengunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022..... 755

Grafik 3. 6 Realisasi Angka Harapan Hidup 2020-2022..... 756

Grafik 3. 7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahuhn 2022..... 762

Grafik 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 763

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 9

Gambar 3. 1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 197

Gambar 3. 2 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen 406

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Mendasari ketentuan diatas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Terhadap LKPJ Tahun 2022, memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : Suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;
2. Mandiri : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan

mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

3. Berakhlak : Pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;
4. Bersama Rakyat : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima)sasaran yaitu:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraanmasyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Tabel 1. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *opengov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan sektor pertanian, industri dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kabumen tahun 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *open-gov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 merupakan pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan tahun 2022 merupakan jawaban isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dirumuskan berdasarkan: Reformasi Birokrasi, Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Agrobisnis, Pengembangan Inkubasi Kewirausahaan, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha, Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri, Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen, Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong, Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Perdesaan, Kebumen Berakhlak, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sampai tahun 2030, Kebijakan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Penanggulangan Stunting, Kesetaraan Gender, serta aspirasi yang diperoleh dalam proses Musrenbangdes/kel, Musrenbang Kabupaten, dan pokok-pokok pikiran IV-4 DRPD. Selain itu, prioritas pembangunan daerah 2022 diselaraskan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7º27’-7º50’ LintangSelatan dan 109º22’-109º50’ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Kebumen, 2022

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahandengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km^2 atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km^2 atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km^2.

Tabel 1. 3 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	332
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	**449**	**11**	**1930**	**7127**

Sumber : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen,2022

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2022

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4(empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau

25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalirdi permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun.Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Persebaran CAT Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen,2022

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.409.951 jiwa, tumbuh sebesar 0,003% dari tahun 2021. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.284 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 694.667 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 6 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Desa/Kel.	%
1	33.05.01	AYAH	33,946	50,77%	32,922	49,23%	66,868	4,74%
2	33.05.02	BUAYAN	34,788	51,02%	33,401	48,98%	68,189	4,84%
3	33.05.03	PURING	33,076	50,50%	32,415	49,50%	65,491	4,64%
4	33.05.04	PETANAHAN	31,360	50,51%	30,725	49,49%	62,085	4,40%
5	33.05.05	KLIRONG	33,358	50,72%	32,414	49,28%	65,772	4,66%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	30,875	50,89%	29,798	49,11%	60,673	4,30%
7	33.05.07	AMBAL	33,277	51,10%	31,840	48,90%	65,117	4,62%
8	33.05.08	MIRIT	28,039	50,81%	27,141	49,19%	55,180	3,91%
9	33.05.09	PREMBUN	14,839	50,20%	14,720	49,80%	29,559	2,10%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25,159	50,83%	24,333	49,17%	49,492	3,51%
11	33.05.11	ALIAN	35,464	51,04%	34,022	48,96%	69,486	4,93%
12	33.05.12	KEBUMEN	68,046	50,63%	66,351	49,37%	134,397	9,53%
13	33.05.13	PEJAGOAN	28,823	51,04%	27,646	48,96%	56,469	4,01%
14	33.05.14	SRUWENG	31,973	50,45%	31,406	49,55%	63,379	4,50%
15	33.05.15	ADIMULYO	19,181	49,85%	19,294	50,15%	38,475	2,73%
16	33.05.16	KUWARASAN	26,669	50,96%	25,667	49,04%	52,336	3,71%
17	33.05.17	ROWOKELE	26,876	50,56%	26,281	49,44%	53,157	3,77%
18	33.05.18	SEMPOR	36,436	50,72%	35,406	49,28%	71,842	5,10%
19	33.05.19	GOMBONG	25,064	49,88%	25,182	50,12%	50,246	3,56%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19,252	50,44%	18,917	49,56%	38,169	2,71%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	31,503	51,04%	30,221	48,96%	61,724	4,38%
22	33.05.22	SADANG	12,253	51,48%	11,550	48,52%	23,803	1,69%
23	33.05.23	BONOROWO	11,358	51,01%	10,909	48,99%	22,267	1,58%
24	33.05.24	PADURESO	8,684	50,69%	8,446	49,31%	17,130	1,21%
25	33.05.25	PONCOWARNO	9,800	50,90%	9,454	49,10%	19,254	1,37%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25,185	50,99%	24,206	49,01%	49,391	3,50%
Jumlah			**715,284**	**50,73%**	**694,667**	**49,27**	**1,409,951**	**0.00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2022 berkisar antara 0,002%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 102 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.397 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 17.130 jiwa.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 capaian pertumbuhan sebesar 0,003%. Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 yaitu dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang berstatus kawin sejumlah 704.692 di Tahun 2021 dan 709.265 di Tahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 7 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2021	2022	
1	Ayah	66.287	66.868	0,008%
2	Buayan	67.742	68.189	0,006%
3	Puring	65.217	65.491	0,004%
4	Petanahan	61.618	62.085	0,007%
5	Klirong	65.393	65.772	0,005%
6	Buluspesantren	60.442	60.673	0,003%
7	Ambal	64.709	65.117	0,006%
8	Mirit	55.056	55.180	0,002%
9	Prembun	29.543	29.559	0,0005%
10	Kutowinangun	49.484	49.492	0,0001%
11	Alian	69.220	69.486	0,003%
12	Kebumen	134.651	134.397	-0,001%
13	Pejagoan	56.293	56.469	0,003%
14	Sruweng	63.410	63.379	-0,0004%
15	Adimulyo	38.393	38.475	0,002%
16	Kuwarasan	52.317	52.336	0,0003%
17	Rowokele	52.811	53.157	0,006%
18	Sempor	71.593	71.842	0,003%
19	Gombong	50.674	50.246	-0,008%
20	Karanganyar	38.291	38.169	-0,003%
21	Karanggayam	61.331	61.724	0,006%
22	Sadang	23.619	23.803	0,007%
23	Bonorowo	22.351	22.267	-0,003%
24	Padureso	17.056	17.130	0,004%
25	Poncowarno	19.122	19.254	0,006%
26	Karangsambung	49.021	49.391	0,007%
Jumlah		**1.405.644**	**1.409.951**	**0,003%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

1.3.4. Jumlah PNS

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat; 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima) Badan; dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 8 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	87	72	159
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	24	6	30
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	28	23	51
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	20	49
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	5	22
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	4	20
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	74	35	109
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20	11	31
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	13	20
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	15	35
11.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	484	1435	1919
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	9	29
13.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	95	30	125
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169	31	200
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	16	23
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3217	4808	8025
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80	20	100
18.	Dinas Pertanian dan Pangan	98	99	197
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	38	11	49
20.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	14	26
21.	Dinas Tenaga Kerja	24	15	39
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39	13	52
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	15	15	30
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	43	4	47
25.	Kecamatan Adimulyo	14	6	20

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
26.	Kecamatan Alian	14	2	16
27.	Kecamatan Ambal	11	3	14
28.	Kecamatan Ayah	12	5	17
29.	Kecamatan Bonorowo	11	5	16
30.	Kecamatan Buayan	12	3	15
31.	Kecamatan Buluspesantren	9	8	17
32.	Kecamatan Gombong	18	8	26
33.	Kecamatan Karanganyar	30	12	42
34.	Kecamatan Karanggayam	12	2	14
35.	Kecamatan Karangsambung	11	6	17
36.	Kecamatan Kebumen	23	19	42
37.	Kecamatan Klirong	11	3	14
38.	Kecamatan Kutowinangun	9	7	16
39.	Kecamatan Kuwarasan	16	3	19
40.	Kecamatan Mirit	10	6	16
41.	Kecamatan Padureso	9	4	13
42.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
43.	Kecamatan Petanahan	10	6	16
44.	Kecamatan Poncowarno	8	5	13
45.	Kecamatan Prembun	11	7	18
46.	Kecamatan Puring	10	5	15
47.	Kecamatan Rowokele	13	4	17
48.	Kecamatan Sadang	12	3	15
49.	Kecamatan Sempor	11	4	15
50.	Kecamatan Sruweng	11	4	15
	JUMLAH	4977	6866	11843

Sumber : BKPSDM Kab. Kebumen, 2022

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 (audited) dengan 2022 (unaudited) tumbuh sebesar 0,56%, dimana di tahun 2021 (audited) realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.832.035.015.733,00 dan di tahun 2022 (unaudited) realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.847.821.402.683,00, sedangkan capaian realisasi tahun 2022 terhadap target di tahun 2022 mencapai 102,61%, hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp. 2.775.254.283.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.847.821.402.683,00.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 512.784.782.154,00 atau tercapai 116,43% dari target sebesar Rp 440.433.051.000,00, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.329.703.641.941,00 dari anggaran sebesar Rp.2.326.694.694.000,00 atau sebesar

100,13% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp 8.126.538.000,00 tercapai Rp.5.322.978.588,00 atau 65,52%.

Untuk rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2022 (*unaudited*) dan realisasi tahun 2021 (*audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 9 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021 (Audited)
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	**2.760.699.783.000,00**	**2.847.821.402.683,00**	**102,61**	**2.832.035.015.733,00**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	1. Pajak Daerah	121.170.200.000,00	129.845.616.038,00	107,16	112.474.854.190,00
	2. Retribusi Daerah	32.501.085.000,00	28.374.432.9419,00	87,30	23.652.739.277,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	100,23	16.552.860.815,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	269.161.766.000,00	337.014.024.645,00	125,21	319.336.632.833,00
	JUMLAH (I)	**440.433.051.000,00**	**512.784.782.154,00**	**116,43**	**472.017.087.115,00**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.138.030.271.000,00	2.123.296.694.941,00	99,31	2.059.293.466.080,00
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.664.423.000,00	206.406.947.000,00	109,40	163.339.494.803,00
	JUMLAH (II)	**2.326.694.694.000,00**	**2.329.703.641.941,00**	**100,13**	**2.222.632.960.883,00**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
	1. Pendapatan Hibah	8.126.538.000,00	5.332.978.588,00	65,62	8.794.749.700,00
	2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	128.590.218.035,00
	JUMLAH (III)	**8.126.538.000,00**	**5.332.978.588,00**	**65,62**	**137.384.967.735,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

Dari tabel diatas untuk jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu Retribusi Daerah, kemudian apabila ditinjau dari sumber daya pendapatan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih merupakan faktor yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp 2.123.296.694.941,00 atau 74,56% dari seluruh realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 2.847.821.402.683,00.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2022 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan dibeberapa pos anggaran. Secara umum realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen mencapai 93,79%, dari pagu anggaran sebesar Rp.3.011.233.908.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 2.824.202.755.673,00.

Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 :

Tabel 1. 10 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**BELANJA OPERASI**	**2.081.973.665.200,00**	**1.918.114.686.009,00**	**92,13**
1	Belanja Pegawai	1.263.371.447.500,00	1.142.058.451.286,00	90,41
2	Belanja Barang dan Jasa	743.903.603.700,00	704.900.910.782,00	94,76
3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	313.864.348,00	62,77
4	Belanja Hibah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	97,86
5	Belanja Bantuan Sosial	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	83,27
II	**BELANJA MODA L**	**293.658.929.800,00**	**272.301.599.864,00**	**97,63**
1	Belanja Modal Tanah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	49,15
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	94,94
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	83,09
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	94,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.774.677.000,00	7.382.688.159,00	94,96
III	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.800.000.000,00**	**1.295.204.500,00**	**46,26**
1	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	46,26
IV	**BELANJA TRANSFER**	**632.801.313.000,00**	**632.491.265.300,00**	**99,95**
1	Belanja Bagi Hasil	12.420.118.000,00	12.402.615.800,00	99,86
2	Belanja Bantuan Keuangan	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	99,95
BELANJA DAERAH		**3.011.233.908.000,00**	**2.824.202.755.673,00**	**93,79**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2022 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos anggaran. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini:

Tabel 1. 11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**271.279.625.000,00**	**271.279.627.198,98**	**100,00**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	269.179.625.000,00	269.179.627.198,98	100,00
2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**35.300.000.000,00**	**35.300.000.000,00**	**100,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	100,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**235.979.625.000,00**	**235.979.627.198,98**	**100,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Mulai meredanya Pandemi pada tahun 2022 membuat perekonomian global, khususnya Indonesia dan Kabupaten Kebumen kembali bergerak. penguatan pengendalian pandemi yang dilakukan Pemerintah juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama. seperti sektor industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi membuat pendapatan daerah mengalami pertumbuhan pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dengan tetap mengendalikan inflasi daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan serta dengan prioritisasi dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman *disruptive* di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya

padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur

12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling substantif yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah akibat pandemi Covid-19 serta mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan maupun jangka menengah. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2022 juga dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2022, ditengah-tengah kondisi perekonomian yang bergerak ke arah positif Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah, dimana selain mendapat Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui:
    a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
    b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
    c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
    d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
    e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
    f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
    g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
    i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
    j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas

pelayanan perijinan dan investasi;

k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah; dan
3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Secara umum pendapatan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2022 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pendapatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**407.718.602.000**	**440.433.051.000**	**32.714.449.000**	**8**
1.	Pajak Daerah	111.305.200.000	121.170.200.000	9.865.000.000	9
2.	Retribusi Daerah	32.653.013.000	32.501.085.000	(151.928.000)	0
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	17.600.000.000	1.100.000.000	7
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	247.348.389.000	269.161.766.000	21.813.377.000	9
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.200.121.677.000**	**2.326.694.694.000**	**126.573.017.000**	**6**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.023.129.591.000	2.138.030.271.000	114.900.680.000	6
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.992.086.000	188.664.423.000	11.672.337.000	7
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**138.192.638.000**	**8.126.538.000**	**(130.066.100.00)**	**94**

NO	URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1.	Pendapatan Hibah	8.126.538.0000	8.126.538.0000	0	0
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	130.066.100.000	0	(130.066.100.00)	100
Pendapatan Daerah		**2.746.032.917.000**	**2.775.254.283.000**	**29.221.366.000**	**1**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Adapun kebijakan umum perubahan belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 antara lain:

1. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
3. Pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan tangguh serta pengendalian inflasi daerah;
4. Akselerasi pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
5. Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
6. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2022 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan. Perubahan anggaran belanja pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Belanja Operasi**	**1.999.548.267.000**	**2.081.973.665.200**	**82.425.398.200**	**4**
1.	Belanja Pegawai	1.272.005.749.000	1.263.249.947.500	(8.755.801.500)	1
2.	Belanja Barang dan Jasa	655.148.618.000	743.846.603.700	88.697.985.700	14
3.	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	0	0
4.	Belanja Hibah	60.503.947.000	61.060.802.000	556.855.000	1
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.389.953.000	13.316.312.000	1.926.359.000	17
II.	**Belanja Modal**	**211.166.683.000**	**293.658.929.800**	**82.492.246.800**	**39**
1.	Belanja Modal Tanah	5.318.881.000	2.823.562.000	(2.495.319.000)	47
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.762.128.000	107.595.993.800	54.833.865.800	104
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.361.800.000	41.830.252.000	10.468.452.000	33
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.213.480.000	133.634.445.000	18.420.965.000	16
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.654.000.000	7.774.677.000	2.120.677.000	38
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	856.394.000	0	(856.394.000)	100
III.	**Belanja Tak Terduga**	**6.527.609.000**	**2.800.000.000**	**(6.524.809.000)**	**100**
1.	Belanja Tidak Terduga	6.527.609.000	2.800.000.000	(6.524.809.000)	100
IV.	**Belanja Transfer**	**626.483.313.000**	**632.801.313.000**	**6.318.000.000**	1
1.	Belanja Bagi Hasil	12.420.118.000	12.420.118.000	0	0
2.	Belanja Bantuan Keuangan	614.063.195.000	620.381.195.000	6.318.000.000	1
Jumlah Belanja		**2.843.725.872.000**	**3.011.233.908.000**	**167.508.036.000**	**6**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diantaranya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Pengembalian Pinjaman Daerah dari Kelompok Tani untuk Dana Talangan Pangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2022 dan pemberian pinjaman kepada kelompok tani (gabungan kelompok tani). Perubahan dari pemberian dana bergulir kepada nelayan untuk antisipasi keterlambatan pelaksanaan lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,00 merupakan pengalihan dari belanja program/kegiatan.

Tabel 2. 3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Penerimaan Pembiayaan**	**132.992.955.000**	**271.279.625.000**	**138.286.670.000**	**104**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130,892,955.000	269.179.625.000	138.286.670.000	106
2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
II.	**Pengeluaran pembiayaan**	**35.300.000.000**	**35.300.000.000**	**0**	**0**
1.	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	18.200.000.000	3.200.000	21
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
3.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
Pembiayaan Netto		**97.692.955.000**	**235.979.625.000**	**138.286.670.000**	**142**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Tahun 2022 merupakan laporan realisasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dimana merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 diharapkan ekonomi Kabupaten Kebumen telah dalam kondisi berkembang melalui dukungan sektor agrobisnis yang berkualitas serta sektor unggulan lain seperti pariwisata sehingga mampu meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat yangberkeadilan. Pembangunan daerah tahun 2022 juga mempertimbangkan permasalahanglobal yang terjadi pada tahun 2021 lalu yaitu terjadinya pandemi Covid-19, sehingga tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2022 adalah “Pemulihan Perekonomian Daerah dan Kehidupan Sosial Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2022 antara lain:

1. Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Penentuan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah tahun 2022 tersebut di atas merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengukur ketercapaiannya maka telah dirumuskan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan 103 IKU Perangkat Daerah. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2022 dapat digambarkan dalam capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan hasil capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum menjelaskan hasil Capaian IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah terlebih dahulu digambarkan tentang capaian program, kegiatanserta sub kegiatan yang dilaksanan selama tahun 2022.

3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Indikator hasil programyang akan dicapai tertuang dalam RPJMD yang direncanakan atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Indikator keluaran dari setiap kegiatan bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.

Untuk mengetahui capaian kinerja urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari evaluasi kinerja tahun 2022 dengan mengidentifikasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, demikian pula dengan perhitungan analisis tingkat capaian antara kegiatan dengan target kinerja program dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Penilaian

SKALA NILAI		
1.	Sangat Tinggi	≥ 91%
2.	Tinggi	76 – 90,99%
3.	Sedang	66 – 75,99%
4.	Rendah	51 – 65,99%
5.	Sangat Rendah	≤ 50,99

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhitarget dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
b. Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyatdan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengelolaan Pendidikan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN		A PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	%	82,5	81,37	100		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	108,17	108,17		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Talud (DAU) : SDN 1 Banjararjo Ayah, SDN 2 Kalijoyo Alian, SDN 3 Selogiri Karanggayam, SDN Sidototo Padureso, SDN Pagebangan Kec. Karanggayam	Paket	5	5	100		
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun /Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK) : SD 1 Kalibening Karanggayam, SDN 2 Gunungsari Karanggayam, SDN 2 Jladri Buayan, SDN 2 kalibagor Kebumen, SDN Grogolbeningsari Petanahan, SDN Kedaleman Kulon Puring, SDN Sidorejo Ambal, SDN Sumberadi Kebumen	Ruang	8	8	100		
					Pembangunan Revitalisasi SDN 6 Panjer Kebumen (DAU)	Paket	1	1	100		
						Ruang	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 2 Giyanti Kec. Rowokele						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab (Banprov) : SDN 1 Purwosari Kecamatan Puring, SDN 1 Semanding Kecamatan Gombong, SDN 3 Demangsari Kecamatan Ayah, SDN Bagung Kecamatan Prembun	Ruang	7	7	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang dibangun talud (DAU) : SDN 1 Banjararjo Ayah, SDN 2 Kalijoyo Alian, SDN Sidototo Padureso, SDN 3 Selogiri Karanggayam	Paket	4	4	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab (DAU): MI Tarbiyatul Ulum Ds. Tirtomoyo Poncowarno, MI Nurul Islam Ds. Kawedusan Kebumen, MI Muhammadiyah Klopogodo Gombong, MI Ayyu Sufiyah Ds. Sangubanyu Buluspesantren, SDN 4 Tamanwinangun Kec. Kebumen, SDN 1 Plarangan Karanganyar,SDN Benerkulon Ambal, SDN Sidomulyo Ambal, SDN Sawangan Alian	Paket	16	16	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab ruang guru (DAU) : SDN Pencil Karangsambung	Paket	1	1	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab ruang kelas (DAK) : SDN Banioro Karangsambung, SDN Kalijoyo Alian, SDN Patemon Gombong, SDN Pujegan Karangsambung, SDN Tanjungsari Kutowinangun, SDN Tanjungsari Petanahan	Ruang	14	14	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab ruang kelas (DAU) : SDN 1 Somagede Sempor	Ruang	1	1	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab ruang perpustakaan (DAU) : SDN 1 Nogoroji Buayan	Ruang	1	1	100		
					Jumlah Sarpras dan Utilitas Sekolah yang direhab toilet/jamban (DAU) : SDN 1 Purwosari Puring, SDN 3 Pandansari Sruweng, SDN 4 Bumirejo Kebumen, SDN 4 Krakal Alian, SDN Wajasari Adimulyo, SDN Prasutan Ambal	Paket	7	7	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket pengadaan mebeler SDN 2 Giyanti Kec. Rowokele	Paket	8	8	100		
					Jumlah paket pengadaan peralatan TIK (Banprov): SDN 1 Karangduwur Kec. Ayah, SDN 1 Pohkumbang Kec. Karanganyar, SDN 2 Candirenggo Kec. Ayah, SDN 2 Kalibagor Kec. Kebumen, SDN 2 Tambakagung Kec. Klirong, SDN Argopeni Kec. Ayah, SDN Klegenwonosari Kec. Klirong	Paket	7	7	100		
					Jumlah paket pengadaan peralatan TIK (DAK): SDN 1 Gunungmujil Kuwarasan, SDN 1 Jatijajar Ayah, SDN 1 Selang Kebumen, SDN 2 Gombong, SDN 2 Gunungsari Karanggayam, SDN 2 Kritig Petanahan, SDN 2 Sangubanyu Buluspesantren, SDN 2 Sidoharjo	Paket	10	10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sruweng, SDN 2 Sidomoro Buluspesantren, SDN 2 Tambakmulyo Puring Jumlah paket pengadaan peralatan TIK SDN 3 Kutowinangun, SDN 4 Tamanwinangun Kebumen. SDN Clapar Karanggayam, SDN 1 Giyanti Rowokele, SDN Glontor Karanggayam, SDN Grogolpenatus Petanahan, SDN Mengkowo Kebumen, SDN Patukrejomulyo Mirit, SDN Sidomulyo Petanahan, SDN Tanuharjo Alian	Paket	10	10	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI (DTKS DINSOS)	Siswa	2000	2000	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi	f Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan, Asesmen Nasional dan Monev BOS	Sekolah	763	763	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peserta Didik							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi	Orang	838	838	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD, Bahasa Jawa)	Jenis	6	6	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan	i Sub Kegiatan Penyediaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagiSatuan	Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen	Orang	1603	1603	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Pendidikan Sekolah Dasar							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	k Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	3770	3770	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	j Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	765	765	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi	k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	736	736	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan								
				2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar	%	97,68	91,75	93,86	- Sebagian siswa usia SMP (13-15 th) masih ada di SD/MI dan ada yang sudah di SMA/SMK - Pernikahan dini - faktor kemiskinan - sebagian penduduk yang ada di pesantren tdk mengikuti pendidikan formal	- kebijakan PPDB mulai dari jenjang SD mengguna kan skla prioritas umur - Penguatan peran PKBM - Beasiswa kurang mampu (BKM) dan PIP - Gerakan kembali ke sekolah
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Pembangunan Talud : SMPN 4 Satap Karangsambung, SMPN 2 Sruweng	Paket	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Sekolah							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab (Rehabilitasi R Kelas Beserta Perabotnya) : SMPN 1 Ambal , SMPN 1 Karanggayam, SMPN 1 Karangsambung, SMPN 1 Klirong, SMPN 1 Puring, SMPN 1 Sruweng, SMPN 2 Buayan, SMPN 2 Kebumen, SMPN 4 Gombong, SMPN 5 Kebumen, SMPN 2 Buluspesantren	Ruang	30	30	100		
					Rehabilitasi R Guru Beserta Perabotnya : SMPN 1 Adimulyo, SMPN 2 Sruweng	Ruang	2	2	100		
					Rehabilitasi R Lab Komputer : SMPN 1 Adimulyo, SMPN 1 sruweng, SMPN 3 Kebumen, SMPN 4 Gombong	Ruang	5	5	100		
					Rehabilitasi R Tata Usaha Beserta Perabotnya : SMPN 1 Adimulyo, SMPN 1 Ambal, SMPN 1 Sruweng, SMPN 2 Sruweng	Ruang	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rehabilitasi Ruang Lab IPA : SMPN 1 Sruweng	Ruang	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP/MTs	Siswa	1000	969	100	31 usulan tidak sesuai kriteria	Sisa anggaran yang tidak terserap kembali ke kas daerah
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Lab. Komputer Pengadaan Media Pendidikan	Paket Paket	2 2	2 2	100 100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	e Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagiPeserta Didik	Boarding School Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Monev BOS	Sekolah Sekolah	1 120	1 115	100 95,8	5 SMP tidak melaksanakan USP dalam bentuk ANBK	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang berkeadilan							dikarenakan sekolah terkait tidak memiliki siswa kelas 2	
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	f Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi	orang	91	91	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP)	paket	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi dan jumlah GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen	Orang	348	348	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	I Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1320	1320	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	J Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	398	398	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				k Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Sekolah	59	59	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun ruang UKS (DAK) : TK Tunas Harapan PGRI Desa Kedungsari Kec. Klirong, TK Condorini Desa Klegenwonosari Kec. Klirong, TK Pertiwi 14.13.05 Desa Karangtanjung Kec. Alian, TK Istiqomah PGRI Desa Pujotirto Kec. Karangsambung	Lembaga	4	4	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang direhab : TK PGRI Tunas Karya 2 Desa Ngabean Kec. Mirit, KBIT Al Hikmah Desa Selokerto Kec. Sempor, RA Masyitoh Desa Ambarwinangun Kec. Ambal	Lembaga	7	3	42,86	Refocusing anggaran	Diupayakan didanai yayasan/ penyelenggara

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah paket penerima Siswa PAUD Berprestasi (hibah/bansos)	Paket	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah paket alat permainan edukatif (DAK) : TK Istiqomah PGRI Pujotirto Karangsambung	Paket	1	1	100		
					Jumlah paket alat permainan edukatif (DAU) :PP Asih Indah Sawangan Alian, PP Kuncup Mekar Tersobo Prembun, PP Miftakhul Khasanah Donorojo Sempor, PP Pelangi Bagung Prembun, PP Permata Hati Kuwaru Kuwarasan, TK Pertiwi 14.06.10 Ds. Sangubanyu, TK Tunas Harapan PGRI Ds. Indrosari, PP Sri Lestari Sidoluhur Ambal, TK Lestari PGRI Jatiluhur Karanganyar, TK Pertiwi Karangduwur Ayah, TK Pertiwi Kenoyojayan Ambal	Paket	11	11	100		
					PAUD Tunas Harapan Ds. Lajer,	Paket	10	10	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pos PAUD Harapan Ibu Ds. Pasarsenen Ambal, Pos PAUD Werdisiwi Ds. Sumberjati Ambal , TK Kasih Ananda Ds. Dukuhrejosari, TK Manggarsari Ds. Pasarsenen, TK Marsudisiwi Ds. Benerwetan, TK Pamardisiwi Ds. Kembangsawit, TK Perintis Ds. Peneket Ambal, TK Tunas Bhakti Ds. Lajer Ambal, TK Nusa Bhakti Ds Singosari Ambal						
					Pos PAUD Wijaya Kusuma Ds. Pagedangan Ambal, Pos PAUD Kasih Ibu Ds. Pucangan Ambal, KB Lintang Selatan Ds. Kaibon Ambal, Pos PAUD Mekarsari Ds. Plempukan Kembaran Ambal, Pos PAUD Permata Ibu Ds. Banjarsari Ambal, Pos PAUD Tunas Mandiri Ds. Ambarwinangun Ambal, TK Kartini Ds. Blengorkulon Ambal, TK Laras Asih Ds. Ambalkliwonan Ambal, TK Srikandi Ds. Kaibon Ambal, TK Bhakti Karya Ds. Gondanglegi Ambal, PP Bhakti Luhur Srati Ayah	Paket	11	11	100		
					TK Lestari 2 PGRI Ds. Buluspesantren, TK Hardikasiwi Ds. Sidomoro, TK Pertiwi 14.06.07 Ds. Tambakrejo, Pos PAUD Setulus Bunda Ds. Sangubanyu,	Paket	11	11	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					TK						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	d Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1152	1152	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dimonev, evaluasi Kepala dan Pengawas TK yang dievaluasi	Lembaga	68	68	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	f Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	orang	2473	2473	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajamen sekolah	Lembaga	27	27	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD negeri dan swasta yang dibina	Lembaga	1152	1152	100		
				4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang terkelola	%	100	100	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan	a Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetar	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung/ ruang kelas/ ruang guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan (SKB)	Unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	aan							
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	b Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan	Paket	1	1	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	c Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan perlengkapan pendidikan, bahan bacaaan dan rak taman bacaan (SKB Pejagoan, PKBM Lintang Selatan Desa Kaibon Ambal, PKBM Perkasa Desa Kutosari Kebumen, PKBM Assidiqiyah Desa Kaleng Puring, PKBM Handayani Gombong Desa Panjangsari Gombong, PKBM Al Barokah Desa Geblug Buayan)	Paket	6	6	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi	d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetar	Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Pusat (PKBM Al Furqon Desa Kemangguan Kec. Alian, PKBM Al	Lembaga	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	aan	Barokah Desa Geblug Kec. Buayan, PKBM Tut Wuri Handayani Desa Pandansari Kec. Sruweng, PKBM Handayani Gombong Desa Panjangsari Kec. Gombong, PKBM Lentera Nusantara Desa Sarwogadung Kec. Mirit	Lembaga	5				
					Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Pusat (PKBM Al Syarif Desa Kalipoh Kec Ayah,PKBM Handayani Sempor Desa kalibeji Kec.Sempor,PKBM Insan Cendeki Desa Bonorowo Kec.Bonorowo,PKBM Kawasan Candra Mandiri Desa Sadangkulon Kec Sadang,PKBM Perkasa Desa Kutosari Kec Kebumen)	Lembaga	6	5	100		
					Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Pusat (PKBM Giyanti Desa Giyanti Kec Rowokele, PKBM AL Multazam Desa Sidomukti Kec. Ambal,PKBM Sentosa Kel. Plarangan Kec. Karanganyar,PKBM Assidiqiyah			6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Desa Kaleng Kec.Puring,PKBM Maju Lancar Desa Pekunden Kec. Kutowinangun, PKBM Zidni Ilma Puring Desa Surorejan Kec. Puring) Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Pusat (PKBM Sukses mandiri Desa Sidogede Kec. Prembun,PKBM Luru Ilmu Desa Selogiri Kec. Karanggayam,PKBM Kridawiyata Desa Kuwaru Kec. Kuwarasan, PKBM Al Hikmah Desa Arjomulyo Kec Adimulyo,PKBM Al Mukhtar Desa Jatijajar Kec Ayah)	Lembaga	5	5	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan proses belajar Non Formal/Kesetaraan (Paket A Paket B dan Paket C)	Lembaga	61	61	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	f Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Anak Tidak sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan	Orang	5648	5648	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	g Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengikuti pemilihan PTK berprestasi dan parade dalam rangka Hari Jadi Kebumen	Orang	172	172	100		
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	h Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM yang difasilitasi akreditasi, Fasilitasi PNF,Peserta Bintek Pengurus Paguyuban Orang Tua dan Wali Murid (11 lembaga PKBM yang difasilitasi akreditasi SKB Kab.Kebumen, PKBM Al Mukhtar, PKBM Al barokah, PKBM Darussunnah, PKBM Al Multazam, PKBM Al Syarif, PKBM Sentosa, PKBMAssidiqiyah, PKBM	Lembaga	115	115	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Handayani Sempor, PKBM Lentera Nusantara, PKBM Maju Lancar)						
			Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	i Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM	lembaga	24	24	100		

b. Permasalahan

Dalam melaksanakan Program, kegiatan maupun sub kegiatan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun sub Kegiatan dapat tercapai dengan maksimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

-

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan pendidikan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022		TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	CAPAIAN	
1. Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100,02	100	100,68	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen, 2022

Indikator kinerja urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga meliputi persentase capaian SPM Pendidikan, persentase organisasi pemuda yang aktif, dan persentase prestasi olahraga. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal (Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen meliputi 4 (empat) jenis layanan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Menengah Pertama menggunakan indikator jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Kesetaraan menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra.

Persentase capaian SPM Bidang Pendidikan secara kumulatif di tahun 2022 sebesar 100,68%. Dengan rincian pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini (umur 5-6 tahun) sebesar 101,02%, Pendidikan Dasar umur 7-12 Tahun sebesar 103,92%, Pendidikan Dasar umur 13-15 Tahun sebesar 97,80%, dan Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun sebesar 100%. Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen usia 5-6 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 5-6 tahun ada di SD/MI dan sudah menyelesaikan jenjang PAUD). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun ada di SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar jenjang SD/MI/sederajat (angkanya melebihi 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun ada di SMP/MTs/sederajat dan sudah menyelesaikan jenjang SD/MI/sederajat). Penduduk Kabupaten Kebumen usia 13-15 tahun telah mendapatkan layanan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs/sederajat (angkanya 97,80 kurang dari 100% dikarenakan sebagian dari anak berusia 7-12 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs/sederajat atau tidak menyelesaikan pendidikannya di jenjang tersebut). Faktor penyebab Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah, pernikahan di usia dini, sebagian penduduk usia sekolah yang ada di pondok pesantren tidak bersekolah, dan faktor kemiskinan. Selanjutnya capaian untuk layanan pendidikan kesetaraan capaiannya 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai pembanding capaian kinerja yang telah disebutkan diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah anak sekolah yang menerima Program Indonesia Pintar 2022 tingkat Sekolah Dasar sebanyak 56.874 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama 26.909 siswa. Sementara jumlah siswa miskin yang menerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) Kelas Akhir tingkat Sekolah Dasar sebanyak 2000 siswa dan tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1000 siswa.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

1) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (khusus untuk Peningkatan Pelayanan BLUD); dan
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapatdilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	**Kesehatan**	**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				A Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	6	6	100		
				B Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangannya	Orang	2000	1890	94,5	Angka asumsi sesuai anjab dan ABK. Angka menyesuiakan kondisi keuangan daerah	Menyesuaikan kondisi riil dan kemampuan keuangan daerah
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Orang	58	58	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis Komponen Instalasi	Jenis	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah terlaksana	Kali	25	25	100		
				g Penyelenggaraan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pendukung arsip	Paket	2	2	100		
				4 Administrasi	Jumlah SDM	Orang	0	0	0		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kepegawaian Daerah	yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi						
				a Pendidikan dan pelatihan pegawai berdfasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	0	0		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	0	0		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur terbeli	Unit	0	0	0		
				b Pengadaan Sarana	Jumlah Sarana	Unit	6	5	83,33	Terdapat	Tidak dilakukan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Dan Prasarana Terbeli				%	Spesifikasi harga yang tidak sesuai dengan pagu	pembelanjaan
				c Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	28	28	100%		
				6 Penyediaaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100%		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100%		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100%		
				c Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100%		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	60	60	100%		
				a Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	30	30	100		
				b Pemeliharaan mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	Unit	3	3	100		
				c Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara (PC, Laptop, Printer, Scanner, Kabel), jumlah unit peralatan mesin lainnya (RS Prembun)	Unit	23	23	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				d Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Unit	4	4	100		
				8 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	Keg	4	4	100		
				a Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan Pelayan BLUD (Operasional BLUD DINKES, BLUD RSDS, BLUD RS PREMBUN, BLUD PUSK)	Keg	4	4	100		
				B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	99,18		
				1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Jumlah paket penyediaan fasilitas	Paket	35	35	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara						
				a Pembangunan Puskesmas	Jumlah paket pembangunan Pusk	Paket	1	1	100%		
				b Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket pembangunan faskes	Paket	5	5	100%		
				c Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah faskes yaang dikembangkan	Paket	0	0			
				d Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah paket rehabilitasi	Paket	5	5	100%		
				e Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah paket Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah dinas tenaga keshatan	Paket	0	0	0		
				f Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah paket Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Paket	0	0	0		
				g Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah paket Pengembanga	Paket	0	0	0		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					n Rumah Sakit						
				h Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	6	6	100%		
				i Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	8	8	100%		
				j Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pkaet Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	2	2	100%		
				k Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	2	2	100%		
				2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan Kesehatan utk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	%	100%	97,54%	97,54 %	Setiap kegiatan memiliki indakator sasaran dan capaian yang berbeda	Optimalisasi kegiatan SPM

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Daerah kab/kota						
				a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Prosentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standart	%	100	99,94	99,94	Kehamilan yang tidak diinginkan, masih ada fasyankes yang belum melaporkan pelayanan kehamilan, sosial budaya (percaya dukun)	Optimalisasi program sebelum hamil (KB, Peningkatan Puskesmas PKPR, Pelayanan khusus calon pengantin, Penyuluhan Kespro, Optimalisasi SIMKIA dan Ekohort, Kerjasama lintas sektor/
				b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Prosentase pelayanan ibu bersalin sesuai standart	%	100	99,94	99,94	Masih ada persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh dukun bayi karena kehamilan yang disembunyikan	Pendampingan 1 kader 1 ibu hamil, kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga/suami, kerjasama lintas sektor, sarana antar jemput ibu hamil/bersalin
				c Pengelolaan	prosentase	%	100	99,20	99.20	Kematian bayi	Peningkatan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	BBL dilayani sesuai standart					usia perinatal (I minggu pertama) tinggi sehingga tidak tercapai KN 3 (28 hari)	kelas ibu hamil/ibu balita,Pelatihan MTBS, MTBM, Integrasi KN dengan MTBM
				d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	prosentase pely balita sesuai standart	%	100	96,25	96,25	Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang, belum adanya integrasi antara SDIDTK dengan TK PAUD	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader dalam pelaksanaan SDIDTK, Peningkatan petugas kesehatan, kader, dan guru TK Paud dalam SDIDTK, pelatihan kader kesehatan, Kegiatan Lintas Sektor dan Lintas Program
				e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	prosestase pely pada usia pendidikan dasar sesuai standart		100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				f Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	prosentase pelayanan usia produktif sesuai standart		100	89,09	89,09	1. Skrining usia produktif dan usia sekolah belum optimal 2. Kesadaran masyarakat utamanya daerah dataran tinggi enggan dicek kesehatannya karen merasa sehat dan tidak ada keluhan 3. Integrasi antar program belum optimal 4. Jumlah sasaran sangat banyak 5. Beban petugas yang menanggani banyak program	1. Penentuan sasaran berdasarkan data riil penduduk dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran. 2. Penguatan kegiatan posbindu PTM dengan meingkatkan peran serta kader terlatih. 3. Pengingkatan peran serta tokoh masayarakat dalam penggerakan masyarakat dalam kegaiatan skrining usia produktif dan posbindu. 4. Integrasi

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										6. Kurang peran desa menggerakan masyarakat	kegiatan skrining usia produktif dengan kegiatan lain misalnya kegiatan UKS, posyandu.
				g Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	prosentase usia lanjut dilayani sesuai standart		100	93,39	93,39	Jumlah sasaran sangat banyak, beban petugas yang menangani banyak program, kurang peran desa dalam menggerakan masyarakatnya	Mendekatkan Pelayanan kesehatan lansia (kunjungan rumah, posyandu lansia keliling atau pindah lokasi pemeriksaan) pelatihan kader lansia, pemenuhan reagen pemeriksaan lansia
				h Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	prosentase penderita hipertensi dilayani sesuai standart		100	97,59	97,59	Belum optimalnya pelaporan penderita HT utamanya dari dokter/klinik swasta	Penguatan pelaporan dengan peningkatan jejaring PTM utamanya klinik/dokter swasta
				i Pengelolaan	prosentase		100	98,82	98,82	Pelaporan	-Meningkatkn

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM dilayani sesuai standart					dari Balai Pengobatan Swasta/klinik belum optimal, belum semua penderita terlapor	gerakan screning posbindu desa untuk screning penderita DM; -Meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, balai pengobatan swasta dll
				j Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	prosentase pely ODGJ sesuai standart		100	96,30	96,30	Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum obat, Kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga tidak enggan berobat dan dianggap tidak mengganggu	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakt, pemantauan minum obat
				k Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	prosentase pely orang terduga TB		100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Terduga Tuberkulosis	dilayani sesuai standart						
				l Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	prosentase pely orang beresiko terinfeksi HIV dilayani sesuai standart		100	100	100		
				m Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	prosentase KLB ditangani dalam waktu < 24 jam		100	100	100		
				n Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penddk terdampak krisis kesh	Keg	3	3	100		
				o Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase Balita stunting	%	<16	10,23	100%		
					Persentase Kasus Gizi Buruk	%	<0,02	0,04	50%	Adanya penyakit penyerta pada	Peningkatan kualitas surveilans gizi,

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										balita, BBLR, Pola asuh	pencegahan kurang gizi pada ibu hamil, peningkatan PHBS, Kelas Bumil dan Balita terkait pola asuh dan pemberian makan (PMBA) yang benar
				p Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelayanan kesorga	Lokasi	26	26	100		
				q Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prosentase Capaian desa STBM	%	18	18,2	100		
				r Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pusk	35	35	100		
				s Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pengelolaan survailans	Keg	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					kesh						
				t Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Keg	3	3	100		
				u Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penderita DBD ditemukan dan ditangani	%	100	100	100		
				v Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	%	87	90,31	103,8 %		
				w Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi	Keg	2	2	100%		
				x Operasional pel RS	Jumlah pegawai Non PNS dan THL yg mendapatkan gaji	Orang	343	343	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				y Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi	Puskesmas	35	35	100		
				z Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kegiatan investigasi (KIPI dan obat masal)	Keg	3	3	100		
				3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	%	100	100	100		
				a Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumentasi/publikasi data dan informasi tentang kesehatan	Dok	2	2	100		
				b Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Jumlah paket Sik	Paket	0	0	0		
				C PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Tenaga	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi						
				1 Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen perencnaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	Dokumen	2	2	100		
				a Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dok perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM Kesehatan	Dokumen	2	2	100		
				2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab / kota	%	100	100	100		
				a Pengembangan	Jumlah seleksi	Keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional						
				D PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100	100	100		
				1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT)	Dokumen	100	100	100		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang	Lokasi	135	135	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Tradisional (UMOT)	diawasi						
				2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT	%	315	315	100		
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti	Lokasi	259	259	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	71,43	95,40	133,56		
				1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100		
				a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	15	15	100		
				2 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kabupaten/ Kota	Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
				a Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Prosentase rumah tangga sehat	%	93,40	95,40	102%		
				3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
				a Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan	Prosentase Desa siaga aktif mandiri	%	47,72	58	121		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)							

b. Permasalahan

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 program urusan kesehatan ada 3 program yang mencapai target, sedangkan 2 program tidak mencapai target yaitu pada program penunjang urusan pemerintah daerah dan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Indikator Kinerja pada program ini yaitu persentase capaian SPM bidang Kesehatan dengan target 100% dan tercapai 97,54 %, hal ini dikarenakan:

1) Ketersediaan SDM kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan dari jumlah sasaran yang ada
2) Masih ada persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh dukun bayi karena kehamilan yang disembunyikan
3) Kematian bayi usia perinatal (I minggu pertama) tinggi sehingga tidak tercapai KN 3 (28 hari)
4) Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang
5) Belum adanya integrasi pelaksanaan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) dengan TK PAUD
6) Belum optimalnya skrining usia produktif dan usia sekolah
7) Belum optimalnya pelaporan penderita HT utamanya dari dokter/klinik swasta
8) Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum obat, Kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga malas berobat dan dianggap tidak mengganggu
9) Adanya penyakit penyerta pada balita, BBLR dan Pola asuh

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standart Penerapan Pelayanan Minimal bahwa ketepatan sasaran dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu, sehingga untuk selanjutnya penetapan sasaran atau target akan dilakukan validasi kembali (tidak *universal coverage*) tapi berdasarkan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan kesehatan adalah 99,74% atau kategori Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 99,74%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Sedangkan pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat disamping indikator pencapaian Standart Pelayanan Minimal juga terdapat indikator dari kegiatan antara lain Angka Kematian Ibu, angka Kematian bayi, dan kasus balita stunting. Target Angka Kematian Ibu tahun 2022 sebesar 27 kasus dengan realisasi 29 kasus, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 38 kasus. Sedangkan target angka kematian bayi sebanyak 148 kasus dengan realisasi 180 kasus, meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 164 kasus.

Tabel 3. 5 Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
1.	Ayah	8	BBLR 4, Kel. Kongenital 2, KJB 2
2.	Buayan	2	BBLR1, Ilius 1
3.	Puring	9	BBLR 5, Asfiksia 1, Kel. Kongenital 1, Pneumonia 1.
4.	Petanahan	6	BBLR 2, Kel. Kongenetal 2, Sepsis 2
5	Klirong	6	Infeksi, Hidroceplus, Anencepalus, BBLR, Asfiksia 2
6.	Buluspesantren	12	BBLR 3, Asfiksia 1, Infeksi 2, Kel. Kongenital 1, Meningitis 1, KJB 2,Sepsis 2.
7.	Ambal	13	BBLR 5,Asfiksia 2, Kelainan Kongenital 3, KJB 3
8.	Mirit	7	BBLR 3, Asfiksia 1, Kelainan Kongenital 1, Infeksi 1, Pneumonia 1.
9.	Bonorowo	2	Asfiksia 1, Ikterus 1
10.	Prembun	4	BBLR 1, Ilius 1, Kel Kongenetal 2.
11.	Kutowinangun	5	BBLR 1, Infeksi 1, Meningitis 1, KJB 2.
12.	Alian	7	BBLR 1, Asfiksia 2, Infeksi 1, KJB 1, Diare 1, Lainnya 1
13.	Padureso	1	BBLR
14.	Poncowarno	4	BBLR 1, Kel. Kongenetal 2, KJB 1.
15.	Kebumen	13	BBLR 4, Asfiksia 1, Infeksi 1, KJB 3, Aspirasi 2, Sepsis 1, Diare 1.
16.	Pejagoan	2	Asfiksia 1, Kel. Kongenital 1.
17.	Sruweng	11	Asfiksia 4, BBLR 2, Kel. Kongenetal 4,

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
			KJB 1.
18.	Adimulyo	4	Asfiksia 1, Kel. Kongenital 1, KJB 2.
19.	Kuwarasan	13	BBLR 3, Asfiksia 1, Kel. Kongenital 2, Kondisi Perinatal 1, KJB 5, Ileus 1.
20.	Rowokele	5	Asfiksia 1, Kel Kongenetal 1, Diare 1, KJB 1, Lain-lain 1.
21.	Sempor	11	BBLR 6, Asfiksia 2, Febris konvulsi 1, Kel Kongenetal 1, Perinatal 1.
22.	Gombong	9	Infeksi 2, Diare 1, BBLR 1, KJB, Kel Kongenetal 2, PN, Asfiksia 1, KJB 1, Pneumonia 1.
23.	Karanganyar	9	Asfiksia 2, BBLR 1, Kel. Kongenetal 3, Kondisi Perinatal 1, KJB 1, Diare 1,
24.	Karanggayam	12	Asfiksi 3, BBLR 4, Kel kongenetal 1,Pneumonia 1, KJB 2, Lainnya 1.
25.	Sadang	2	Infeksi 1, KJB 1.
26.	Karangsambung	3	KJB 1, Kel Kongenatal 1, Prematur 1
JUMLAH		180	

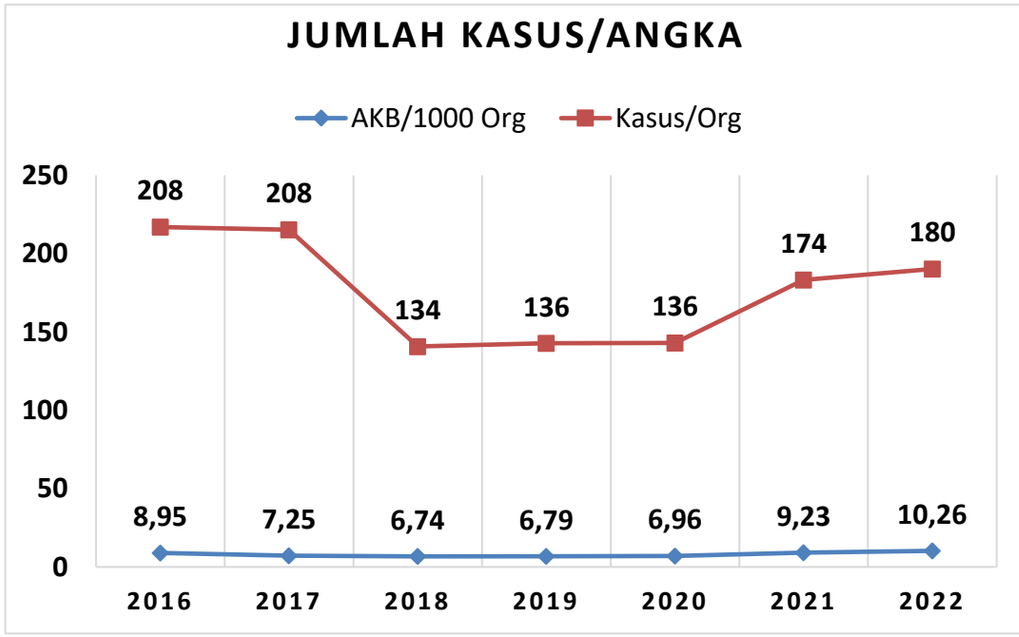
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, 2022

Selama periode 2017-2022 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan angka kematian bayi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 angka kematian bayi tahun 2022 yang ditargetkan 7,57/1000 KH, realisasinya 10,26/1000 KH atau pencapaian kinerja 135,53%.

Pada tahun 2022 angka kematian bayi sebanyak 180 kasus tersebar pada 26 kecamatan. Sebagian besar penyebab kematian bayi dikarenakan antara lain 27,78 % karena BBLR (Bayi dengan berat badan lahir rendah), 20% karena kelainan kongenital, 16,67% karena kelaianan jantung bawaan, 15% karena asfiksia, dan karena penyebab lain-lain. Berikut adalah realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Grafik 3. 1 Angka Kematian Bayi Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022



Tabel 3. 6 Data Kasus Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2022

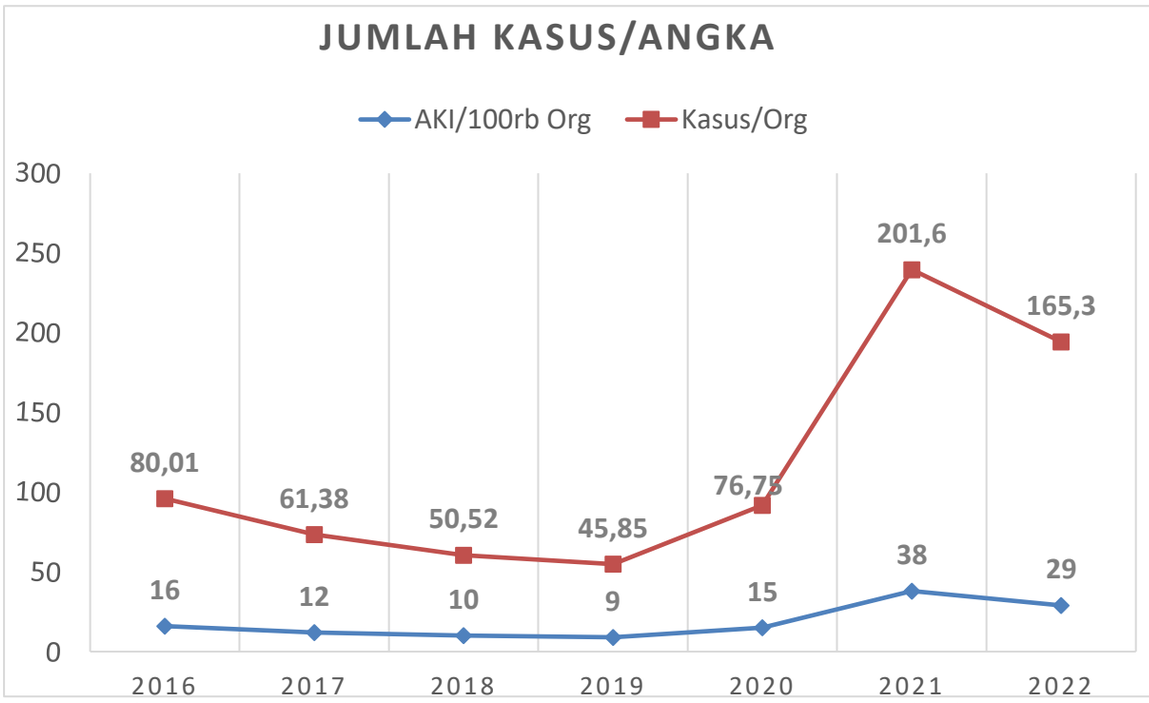
No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Keterangan (Penyebab)
1.	Ayah	0	
2.	Buayan	1	Asma
3.	Puring	2	Perdarahan 2
4.	Petanahan	5	Pre Eklamsia 3, Jantung, Tumor kepala
5	Klirong	2	Pre Eklamsia 2
6.	Buluspesantren	0	
7.	Ambal	2	Pre Eklamsia, Infeksi
8.	Mirit	2	Ginjal, efusi Pleura Dektra
9.	Bonorowo	0	
10.	Prembun	0	
11.	Kutowinangun	1	Asma
12.	Alian	2	Infeksi
13.	Padureso	0	
14.	Poncowarno	0	
15.	Kebumen	1	Perdarahan
16.	Pejagoan	0	
17.	Sruweng	1	Emboli
18.	Adimulyo	3	Pre eklamsia 2, Mioma polip jantung
19.	Kuwarasan	1	Perdarahan
20.	Rowokele	4	Perdarahan 2, Sepses, Jantung
21.	Sempor	0	
22.	Gombong	0	
23.	Karanganyar	0	
24.	Karanggayam	1	TBC
25.	Sadang	1	Covid 19

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Keterangan (Penyebab)
26.	Karangsambung	0	
JUMLAH		29	

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Pada tahun 2022 angka kematian Ibu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai angka 201,6/100.000 KH. Hal ini salah satunya sudah meredanya kasus Covid-19. Namun demikian kasus kematian ibu masih tergolong tinggi yaitu masih melebihi target dimana tahun 2022 angka kematian ibu mencapai 165,2/100.000 KH atau mencapai 29 kasus, dari target 138,12/100.000 KH atau 27 kasus. Adapun dari jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, meninggal dalam keadaan hamil 7 orang, keadaan bersalin 1 orang dan ibu nifas 21 orang. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 14 orang, kemudian pada kelompok umur >35 tahun sebanyak 14 orang dan pada kelompok umur <20 tahun sebanyak 1 orang. Dari total kematian Ibu (maternal) sebanyak 29 kasus terbanyak dikarenakan perdarahan sebanyak 6 orang, hipertensi pada kehamilan sebanyak 8 orang, asma 2 orang, jantung 3 orang, tumor 1 orang, infeksi 3 orang, ginjal 1 orang, efusi pleura 1 orang, emboli 1 orang, sepsis 1 orang, TBC 1 orang, dan Covid19 sebanyak 1 orang.

Grafik 3. 2 Angka Kematian Ibu Tahun 2016 s/d 2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

f. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	99
2. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	89	87	90,31	103	100
3. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	%	84,2	83	84,69	102,03	86
4. Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	%	99	100	100	100	100
5. Persentase Kasus Gizi Buruk	%	0,03	<0,02	0,04	50	0,03
6. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	100	100	100	100	90
7. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	%	100	100	100	100	100
8. Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	%	100	100	100	100	98
9. Nilai kinerja kesehatan BLUD	-	A	A	A	A	A

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Prosentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kesehatan. Tolak ukur ini dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, tingkat pelayanan kegawatdaruratan dan tingkat mutu pelayanan kesehatan dilihat dari semua Puskesmas dan Rumah Sakit sudah menerapkan manajemen kesehatan dalam hal ini akreditasi. Capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan berkat adanya dukungan anggaran yang cukup dan semua Puskesmas sudah menerapkan PPK BLUD.

Indikator penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan tolak ukurnya yaitu jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dibandingkan dengan total jumlah penduduk, dari target yang ditetapkan yaitu 87 % tercapai 89 %.

Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan (Indek Survay Kepuasan Masyarakat) dari target yang telah ditetapkan yaitu 83% telah mencapai 102,03%, hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan pada masyarakat sudah cukup maksimal. Terhadap Cakupan pelayanan ibu hamil resiko tinggi tercapai 100 %, hal ini diartikan bahwa semua ibu hamil yang mengalami resiko tinggi (tidak normal) sudah ditangani dan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Prosentase kasus Gizi Buruk tercapai (0,04%), Permasalahan gizi buruk dan balita stunting dipengaruhi oleh bermacam hal seperti masalah kesehatan adanya penyakit penyerta pada balita, bayi lahir dengan berat badan kurang, masalah pengetahuan masyarakat seperti pola asuh dan pemberian makanan balita kurang tepat serta peningkatan kualitas surveilans gizi sehingga semakin banyak ditemukan kasus-kasus baru. Pada saat yang sama, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami wasting (gizi kurang dan gizi buruk) akan lebih cenderung mengalami stunting, atau memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka.

Deteksi dini wasting anak adalah kunci keberhasilan pencegahan dan pengobatan. Meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi balita stunting dan wasting pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati wasting. Menghasilkan data dan informasi berkualitas tentang balita stunting dan wasting pada anak. Meningkatkan akses ke komoditas esensial yang diproduksi secara lokal untuk perawatan wasting anak. Meningkatkan pelayanan gizi untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi gizi mikro, dukungan bagi para ibu untuk pemberian makan bayi dan anak secara memadai, dan penapisan serta perawatan anak balita karena gizi buruk.

Upaya yang sudah dilakukan dalam menanggulangi masalah gizi, salah satunya dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui:

a. penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan melalui kelas ibu balita.
b. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
c. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
d. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
e. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin

tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan dan ibu hamil dan menyusui.

Percepatan perbaikan gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. rembug stunting
b. kampanye kesehatan;
c. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
d. dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
e. pelatihan bagi kader dan ibu balita;
f. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) untuk menangani masalah gizi;
g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) untuk melakukan pembangunan di luar sektor kesehatan;

Tabel 3. 8 Data Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Gizi Buruk
1.	Ayah	2
2.	Buayan	0
3.	Puring	6
4.	Petanahan	2
5	Klirong	0
6.	Buluspesantren	0
7.	Ambal	1
8.	Mirit	5
9.	Bonorowo	0
10.	Prembun	1
11.	Kutowinangun	3
12.	Alian	3
13.	Padureso	1
14.	Poncowarno	1
15.	Kebumen	2
16.	Pejagoan	0
17.	Sruweng	1
18.	Adimulyo	0
19.	Kuwarasan	3
20.	Rowokele	0
21.	Sempor	4
22.	Gombong	1
23.	Karanganyar	1
24.	Karanggayam	4
25.	Sadang	1
26.	Karangsambung	0
JUMLAH		42

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan tercapai 100%. Adanya kebijakan sesuai dengan SPM Pelayanan Kefarmasian pada Kementerian Kesehatan setiap unit pelayanan dasar minimal terdapat 20 item jenis obat mewajibkan semua Puskesmas mengalokasikan minimal 20 obat item tersebut tercapai 100 %, adanya dukungan dana DAK dan DBHCHT maka obat tersebut bisa terpenuhi. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan tercapai 100% bahwa semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu melayani pasien kegawatdarutatan. Terhadap tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan tercapai 100%. Tolok ukur indikator ini bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan yaitu dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian dan lulus akreditasi standart Nasional.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA);
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5) Program Penataan Bangunan Gedung;
6) Progran Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8) Program Penyelenggaraan Jalan;
9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan palayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	17	17	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	12	12	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN mendapatkan gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Bulan	12	12	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlahaset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	paket	1	1	100		
				a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	kegiatan	2	2	100		
				a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	kegiatan	2	2	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	1	1	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	bulan	12	12	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	bulan	12	12	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	12	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi	paket	1	1	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	%	77,8	76,31	98		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	%	6	3	50	Adanya pemutusan Kontrak pada sub kegiatan pembangunan embung dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	2	1	50		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
									SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)				
1	2	3	4	5				6	10	8	9	11	12		13	
						b	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terbangun	unit	1	0	0		Pemutusan Kontrak Embung Krakal		
						c	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	unit	3	1	33		Adanya Recofusing pada tahun berjalan		
						d	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev SDA yang dilaksnakan	kegiatan	2	2	100				
					2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	kegiatan	7	7	100				

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Kabupaten/Kota							
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT yang terbangun	paket	6	6	100		
				c Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terehabilitasi	daerah irigasi	10	9	90	Pemutusan Kontrak DI Kalisalak Kec. Puring	
				d Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	daerah irigasi	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Permukaan							
				e Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Komir/P3A/Petugas Alokasi Air yang Di Koordinasi	kegiatan	20	20	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan**	%	10,39	23,53	211		
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Posentase pelayanan air bersih	%	10,39	23,53	211		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Jumlah tenaga HL Pengelola Kegiatan, Monev yang dilakukan	dokumen	3	3	100		
				b Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terbangun	lokasi	17	23	135		
				c Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	lokasi	7	7	100		
				d Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terpelihara	lokasi	1	1	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik**	%	16	16	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	16	16	100		
				a Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/dibangun	Lokasi	10	10	100		
				b Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terbangun	Lokasi	3	3	100		
				c Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terehabilitasi	Lokasi	1	1	100		
				d Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik**	%	87,5	87,5	100		
				1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Capaian Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	87,5	87,5	100		
				a Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	Terlaksananya kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Penilik Bangunan dalam Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG	permohon	350	381	109		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							
				b Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen	kegiatan	8	8	100		
				c Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya bangunan gedung kantor pemerintah	unit	4	11	275		
				F PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani**	%	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	0	0	0		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	zak	55135	55135	100		
				G PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	%	74,12	73,289	0		
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian jalan dalam kondisi mantap	%	74,12	73,289	0		
				a Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	22	22	100		
				b Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraa	Jumlah tanah yang dibebaskan	lokasi	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				n Jalan							
				c Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan, Jumlah THL Bina Marga yang dibayar	dokumen	2	2	100		
				d Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang terbangun	km	2,25	2,8853	128		
				e Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan menuju standar	km	2,95	13,54	459		
				f Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala	km	9,67	12,6	130		
				g Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	km	50	18,6371	37,27	Menyesuaikan Anggaran yang tersedia	
				h Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	unit	5	6	120		
				i Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	unit	3	8	267		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				j Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	paket	48	91	190		
				H PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik**	%	45	47	104		
				1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	2	3	150		
				a Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan	Kegiatan	2	3	150		
				b Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah kegiatan yang diadakan	Kegiatan	1	2	200		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota	kwgiatan	62	0	0	Sudah Bukan wewenang Kabupaten (mekanisme OSS)	
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi	pemohon	0	0	0	Sudah Bukan wewenang Kabupaten (mekanisme OSS)	
				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	2	2	100	Sudah Bukan wewenang Kabupaten (mekanisme OSS)	
				3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	pemohon	0	0	0	Sudah Bukan wewenang	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Kecil dan Kecil)	(Non Kecil dan kecil)					Kabupaten (mekanisme OSS)	
				a Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah pemohon penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional	pemohon	0	0	0	Sudah Bukan wewenang Kabupaten (mekanisme OSS)	
				H PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW**	%	91,25	91,25	100		
				1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				a Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				b Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	kegiatan	12	12	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	umlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW	kegiatan	12	12	100 %		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				Kabupaten/Kota	yang terlaksana						
				b Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR yang terlaksana	%	75	75	100 %		
				c Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait penataan ruang kepada masyarakat yang terlaksana	kegiatan	3	3	100 %		
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen	110	229	208		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen KRK yang tersusun	dokumen	110	229	208		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	10	8	9	11	12	13
				b Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang terupdate	%	100	206	206		
				4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	kegiatan	12	49	408		
				a Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi TKPRD yang terlaksana	kegiatan	12	49	408		

b. Permasalahan

1) Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target pada Tahun 2022 yaitu 74,23 % dan realisasinya masih dibawah target yaitu 73,82%, hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang tinggi dan banyaknya kendaraan ODOL (Over Dimension/Overloading) yang melalui jalan kabupaten menyebabkan adanya titik lokasi baru yang mengalami rusak ringan dan berat.
2) Prosentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik memiliki target pada tahun 2022 yaitu 77,80% dan realisasi baru mencapai 76,31% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya pemutusan kontrak pembangunan irigasi, recofusing anggaran dan tingginya curah hujan sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor.
3) Prosentase pelayanan air minum sudah memenuhi target di tahun 2022 yaitu terealisasi 23,53% dari target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 20%, namun angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2022, dimana realisasi SPM mencapai 96,84%. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu terbatasnya sumber mata air bersih, sumber akses air minum belum layak dan kondisi geografis kabupaten Kebumen.
4) Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah memenuhi target RPJMD tahun 2022 yaitu 91,15% dan realisasi tahun 2022 yaitu 91,15%.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
b) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
c) Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar desa sangat membatu masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan dimana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air

Limbah, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 95,99% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan. Sementara rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 95,22%, terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,81% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapan perkembangan indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi matap	%	78,27	57,35	74,23	73,829	85,18
2. Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	75,17	77,80	76,31	98,08	87,50
3. Persentase pelayanan air bersih	%	23,91	20	23,53	117,65	25
4. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,95	91,15	91,15	100	91,55

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 4 (empat) indikator Kinerja Urusuan Perangkat Daerah, dengan penjelasan pencapaian target dan realisasi sebagai berikut :

1) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah 960,358 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 89.312 Km atau sebesar

9,30% yang lokasinya tersebar di 19 wilayah yaitu kecamatan Buayan, Gombong, Adimulyo, Ayah, Puring, Kuwarasan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Petanahan, Klirong, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit, Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	Kondisi awal	PANJANG JALAN (km)
		2021	2022
1	Kondisi Baik	365,191	292,179
2	Kondisi Sedang	337,400	414,841
3	Kondisi Rusak Ringan	124,364	162,026
4	Kondisi Rusak Berat	133,403	89,312
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358
Proporsi Kondisi Baik (%)		38,027	30,242
Proporsi Kondisi Sedang (%)		35,133	43,405
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		12,950	16,871
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		13,891	9,30

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 adalah sepanjang 709.020 kilometer atau mencapai sebesar 73,829 %. Kondisi ini mengalami penurunan , yaitu sebesar 4,441% atau ada penurunan sepanjang 31.487 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sepanjang 751,625 Kilometer atau mencapai 78,265 %. Sedangkan untuk target DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2022 sebesar 74,23 %.

2) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi skunder yang menjadi kewenangan kabupaten Kebumen yaitu 186.105 m dengan luas sasaran daerah irigasi 12.260 Ha. Adapun data panjang saluran irigasi sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	SATUAN	2021	2022
1	Irigasi Teknis Sekunder	M	184.418	186.105
2	Irigasi Kondisi Baik	%	75,17	76,31
3	Irigasi Kondisi Sedang	%	1,55	1,51
4	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	%	1,23	1,23
5	Irigasi Kondisi Rusak Berat	%	22,04	20,95

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalan kondisi baik tahun 2022 yaitu 76,31% dengan target RPJMD pada tahun 2022 sebesar 77,80%, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 75,17%. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 87,50%. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dibutuhkan kinerja yang optimal dari semua pihak serta dukungan anggaran dari pemerintah. Adapun kendala tidak tercapainya target disebabkan adanya beberapa titik bendungan dan saluran irigasi mengalami kerusakan dikarenakan tingginya curah hujan serta adanya recofusing penganggaran pada tahun 2022.

3) Persentase pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten Kebumen masih disalurkan oleh PDAM, SPAM Perdesaan dan Sumber Air lainnya. Namun dalam penghitungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga hanya memperhitungkan saluran perpipaan, sehingga untuk capaian tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 13 Capaian pelayanan air bersih perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2022 Jumlah Rumah Tangga yang berhak mendapat layanan	Sambungan s/d Tahun 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI			JUMLAH = (4)+(5)+(6)	CAPAIAN = (7): (2)x100%
			PDAM	SPAM PERDESAAN	SUMBER LAIN-LAINYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari untuk Rumah Tangga	461.823	385.618	34.440	48.509	364.269	447.218	96,84%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

4) Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Data Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mempunyai target RPJMD sebesar 91,15 % pada tahun 2022 dengan realisasi 91,15%. Tetapi kondisi ini belum menggambarkan kondisi rill 2022 dikarenakan untuk update kesesuaian penataan ruang masih menunggu update data dari BIG dan LAPAN.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

1) Program pengembangan perumahan ;
2) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
3) Program kawasan permukiman
4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 12 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	cakupan rumah layak huni	%	100	100	100		
				1 **Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	%	100	100	100		
				a Indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan dan Identifikasi Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	26	26	100		
				2 **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi di Kabupaten Kebumen terletak pada Desa Kedunggong Kec. Sadang sebanyak 4 Unit (3 Rehabilitasi, 1 Relokasi) , Desa Kali gending, Kec Karangsambung debanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Peniron Kec. Pejagoan sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Kedawung Kec. Pejagoan sebanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Jemur Kec. Pejagoan sebanyak 1 Unit (Rehabilitasi), Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno	Unit	21	21	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sebanyak 2 unit (Rehabilitasi), Desa Blater Kec. Ponowarno sebanyak 1 Unit (Relokasi) Desa Sidototo Kec. Padureso sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Kalijering Kec. Padureso sebanyak 2 Unit (Relokasi), Desa Pesuningan Kec. Prembun sebanyak 1 Unit (Relokasi), Desa Sekarteja Kec. Adimulyo sebanyak 1 unit (Relokasi), Desa Sampang Kec. Sempor sebanyak 3 Unit (Relokasi).						
				B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah	%	11,09 %	7,69%	69,34 %	Anggaran Tahun 2022 direfokusing sehingga hanya dapat	Mengupayakan usulan penanganan kawasana kumuh dengan luasan 15

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10 ha					menangani 1 desa kumuh	Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan skala kawasan pada pemerintah pusat
				1 **Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	6,5	0,5	7,69	Anggaran Tahun 2022 direfokusing sehingga hanya dapat menangani 1 desa kumuh	Mengupayakan usulan penanganan kawasana kumuh dengan luasan 15 Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan skala kawasan pada pemerintah pusat
				a Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	6,5	0,5	7,69	Anggaran Tahun 2022 direfokusing sehingga hanya dapat menangani 1 desa kumuh	Melakukan optimalisasi anggaran yang ada untuk menyelesaikan kawasan kumuh pada Desa Lundong Kec Kutowinangun, dan mengupayakan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											usulan penanganan kawasana kumuh dengan luasan 15 Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan skala kawasan pada pemerintah pusat
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah fasilitasi dan pendampingan penanganan kawasan kumuh	bulan/paket	12	12	100		
				C PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	11,09	16,07	144,91		
				1 **Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah**	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	52,64	54,46	103,46		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota							
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Penganggura n Berbasis Pembanguna n Perdesaan	a Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh (unit) (P2MKM 67 unit,terdiri dari reguler 50 unit dan Pokir 17 unit serta DAK 26 unit)	Unit	93	90	96,77	Terdapat 3 penerima bantuan yang mengundurka n diri karena tidak siap swadaya dan lahan serta lahannya terdampak bencana longsor.	Mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan dan lokasi aman dari bencana sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta melakukan pendampingan dalam pelaksaan dilapangan
				b Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Kec	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
				D **Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	Persentase peningkatan akses air limbah aman	%	1,17	1,18	100,85		
				a **Sub Kegiatan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)**	Persentase Peningkatan akses air limbah aman (%)	%	1,17	1,18	100,85		
				b **Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan sub sistem Pengelolaan Setempat**	Pembangunan tangki septik sekala individu (DAK Sanitasi)	Desa	12	12	100		
				c **Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	Jumlah pemeliharaan dan operasional pelayanan pengolahan air limbah domestik	Bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d **Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT**	Jumlah IPLT yang Terbangun	Unit	2	2	100		

b. Permasalahan

Untuk Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 ditargetkan sebesar 52,64%, namun realisasi mencapai sebesar 54,46% atau dengan tingkat capaiannya adalah 103,46%. Dalam target Renstra tahun 2022 sebanyak 67 unit dan yang terealisasi sebanyak 93 unit terdiri dari 50 unit reguler, 17unit pokir dan 26 unit DAK Perumahan. Namun dari 93 unit hanya terealisasi 90 unit karena terdapat 3 unit RTLH yang tidak terlaksana, disebabkan 2 penerima bantuan mengundurkan diri dengan alasan penerima bantuan tidak siap swadaya dan lahan, sedangkan 1 (satu) penerima bantuan lahannya terdampak bencana longsor.

Untuk Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh alokasi anggaran Tahun 2022 ditargetkan dapat menangani kawasan kumuh sebesar 6,5 Ha (11,09%), namun terjadi refocusing anggaran sehingga hanya dapat menangani kawasan kumuh sebesar 0,5 Ha di Desa Lundong Kec Kutowinangun. Dengan demikian, target penanganan kawasan kumuh seluas 6,5 Ha (11,09%) pada tahun 2022 tidak tercapai atau hanya tercapai sebesar 0,5 Ha (7,69 %)

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan mengidentifikasi dan memastikan pada saat survey awal terkait kesiapan swadaya penerima bantuan dan lahan aman dari bencana sehingga dalam pelaksanaan tidak mengundurkan diri serta melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dilapangan.

Untuk mengatasi permasalahan pada Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh dengan melakukan optimalisasi anggaran untuk menangani kawasan kumuh di Kabuapten Kebumen. Selain itu juga dilakukan usulan penanganan kawasan kumuh dengan luasan diatas 15 Ha melalui program DAK Integrasi / Penanganan Kumuh skala kawasan kepada Pemerintah Pusat.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Permukiman dengan Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 35,26% dari target 31,87% dengan capaian atau kategori sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah melalui Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja

program sebesar 103,46% atau kategori sangat tinggi.

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kawasan Permukiman diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah 16,07% dari target 11,09 % menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 144,91% atau kategori sangat tinggi. Capaian program dan kegiatan urusan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitias Umum (PSU) diketahui capaian kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah 1,18% dari target 1,17% menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100,85% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha (%)	%	2,3	6,5	0,5	7,69	100
2. Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	47,36	52,64	54,46	103,46	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2022

Dalam penanganan kawasan kumuh target tahun 2022 dapat menangani sebesar 4 Ha namun hanya terealisasi 2,30 Ha. Capaian kinerja Tahun 2022 penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, antara lain disebabkan bahwa target yang ditetapkan seluas 343,27 ha mencakup kewenangan kabupaten 154,62 ha, kewenangan provinsi 122,05 ha dan kewenangan pusat 66,59 ha, sehingga penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk tahun anggaran 2022 alokasi anggaran APBD Kabupaten dialihkan untuk penanganan Covid-19. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat (program kotaku/APBN dan DAK Bidang

Sanitasi).

Untuk sisa kawasan kumuh yang belum dapat ditangani pada periode Renstra 2016-2021 mencakup Desa Lundong di tahun 2021 dan Desa Kalibagor, Desa Mengkowo, Desa Karangkemiri, Desa wonosigro dan Kelurahan Panjer, Kebumen dan Bumirejo yang akan menjadi prioritas penanganan pada periode Renstra 2021-2026.

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 14 Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s/d tahun 2022

No	Kewenangan	Luas (Ha)	Penanganan s/d 2021	Penanganan Th 2022	Total Penanganan	%	Sisa (Ha)
I	**KABUPATEN**	**154,62**	**3,330**	**0,500**	**3,83**	**2,47**	**150,79**
1	Wonokriyo	0,74	0	0	0	0	0,74
2	Klopogodo	6,92	0	0	0	0	6,92
3	Wonosigro	3,36	0	0	0	0	3,36
4	Plarangan	2,21	0	0	0	0	2,21
5	Karanganyar	5,16	0	0	0	0	5,16
12	Kawedusan	8,03	0	0	0	0	8,03
13	Bumirejo	2,26	0	0	0	0	2,26
14	Kutosari	5,42	0	0	0	0	5,42
15	Kebumen	1,21	0	0	0	0	1,21
26	Kuwarisan	7,23	2,050	0	2,050	28,35	5,18
27	Lundong	5,81	0	0,5	0.5	8,60	5,31
28	Bagung	5,14	0,250	0	0,250	4,86	4,89

No	Kewenangan	Luas (Ha)	Penanganan s/d 2021	Penanganan Th 2022	Total Penanganan	%	Sisa (Ha)
II	**PROVINSI**	**122,05**	**2,000**	**0**	**2,000**	**1,63**	**120,05**
1	Gombong	12,96	0	0	0	0	12,96
2	Kedungpuji	13,64	0	0	0	0	13,64
3	Giripurno	11,42	0	0	0	0	11,42
4	Grenggeng	14,07	0,250	0	0,250	1,77	13,82
III	**PUSAT**	**66,59**	**30,13**	**0**	**30,13**	**45,24**	**36,46**
1	Selokerto	16,48	5,49	0	**5,49**	**33,31**	**10,99**
	JUMLAH	**343,27**	**35,46**	**0,5**	**35,96**	**10,47**	**307,31**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2022

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/385/2020 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 343,27 Ha, meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kec. Sempor (1 Desa), Kec. Gombong (2 kelurahan dan 3 desa), Kec. Karanganyar (4 kelurahan dan 6 desa), Kec. Sruweng (1 Desa), Kec. Pejagoan (1 Desa), Kec. Kebumen (4 kelurahan dan 13 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Belum tercapainya indikator penanganan kawasan kumuh terutama disebabkan anggaran penanganan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang relative besar dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sampai saat ini alokasi

anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat belum sesuai dengan rencana, disamping itu untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi (APBD provinsi) dan pusat (APBN dan DAK). Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya yaitu dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Berikut data perkembangan cakupan rumah layak huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022 :

Tabel 3. 15Capaian Penanganan Rumah Layak Huni Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah	306.885	354.807	354.807
2	Jumlah rumah layak huni	306.285	328.465	329.912
3	Jumlah rumah tidak layak huni	600	26.342	24.895
4	Persentase rumah layak huni	99,80	92,58	92,98
5	Persentase rumah tidak layak huni	0,20	7,42	7,02

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan,2022

Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 26.260 unit, sehingga masih tersisa 600 unit yang akan ditangani pada tahun 2021, sehingga prosentase rumah layak huni sampai dengan Tahun 2020 adalah 99,80%.

Pada Tahun 2020 dilakukan updating data RTLH dengan hasil jumlah rumah sebanyak 354.807 unit dengan jumlah RTLH 39.680 unit, namun setelah dilakukan cros cek dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 terdapat 28.035 unit RTLH yang masuk dalam data

DTKS, sehingga prosentase rumah layak huni diakhir Tahun 2020 adalah 99,80%. Penanganan RTLH Tahun 2021 adalah 2.293 unit terdiri dari 600 unit sisa database 2014 dan 1.693 unit data Tahun 2020, sehingga sisa jumah RTLH menjadi 26.342 unit dan prosentase rumah layak huni menjadi 92,58%. Pada Tahun 2022 penanganan RTLH 1.447 unit sehingga sisa jumah RTLH menjadi 24.895 unit dan prosentase rumah layak huni adalah 92,98%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penanggulangan Bencana;
2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Program prioritas di atas terbagi di dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		**A PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penegakan Perda; Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal;	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kegiatan	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah bulan terbayarnya bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 7 ptt Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli, penertiban dan pengawalan bupati Jumlah orang PTT terbayar honorariumnya Jumlah orang tenaga Banpol terbayar honorariumnya	bulan	12	12	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas meningkat ketrampilannya	orang	60	60	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	c Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumah Anggota satlinmas meniinggal yang mendapat Santunan Jumlah anggota satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan	orang	95	95	100		
			Sda	d Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru	kegiatan	3	3	100		
				2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	a Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi/penyuluhan/ pembinaan perda dan atau perkada untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada	kali	24	24	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan / atau perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha	kali	36	36	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan	jenis	18	18	100		
				3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegaitan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Kabupaten/Kota						
			Sda	a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan	orang	8	8	100		
				B PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kesiapsiagaan Damkar; Presentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran ;	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Daerah Kabupaten/Kota						
			Sda	a Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan thl damkar yang terbayar Jumlah terpenuhinya operasional pelayanan pemadaman kebakaran Jumlah THL damkar terbayar honorariumnya	Bulan	12	12	100		
				b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah bulan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	bulan	12	12	100		
				1 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase terlaksananys kegiatan inspeksi peralatan proteksi	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					kebakaran						
				a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kecamatan terdata sarana dan prasarana proteksi kebakaran	kecamatan	26	26	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat dibina dalam penanggulangan kebakaran	orang	80	80	100		
		2 BPBD		**C PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Desa Tangguh Bencana**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan**	**%**	**100**	**100**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					bencana						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah jenis sosialisai , komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan (sosialisasi, pemasangan rambu, Pengecekan EWS rutin, Apel Kesiapsiagaan)	jenis	4	4	100		
				2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**100**	**100**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar	a Sub KegiatanPelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	orang	80	80	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Masyarakat								
			Sda	b Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya petugas dan peralatan Bencana di PUSDALOPS	bulan	12	12	100		
			Sda	c Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis peraalatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jenis	3	3	100		
			Sda	d Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pengelolaan risiko bencana	Paket	1	1	100		
			Sda	e Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen	Desa	20	20	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	f Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BelanjaBahan baku bangunan / material unuk korban bencana, Bibir rumput akar wangi, Peningkatan Kapasitas JITUPASNA, Rekonstruksi Jembatan Argosari, REhabilitasi tebing sungai Arjowinangun puring, ayamputih buluspesantren, tanuharjo alian, tugu Buayan	Paket	8	8	100		
			Sda	g Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bagi TRC Kebencanaan (Kaji Cepat Penanganan Darurat)	orang	60	50	83,3	Peserta yang mengikuti pelatihan hanya 50 orang	Peserta yang belum mengikuti pelatihan akan dijadikan peserta pada tahun

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										dari target peserta 60 orang	berikutnya
				Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	500	420	84	Terdapat peserta Gladi yang berhalangan hadir sejumlah 80 orang	peserta yang belum mengikuti gladi bencana akan di iukutkan pada kegiatan tahun berikutnya
				3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100**	**100**	**100**		
			Sda	a Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Pelaksanaan respon cepat/darurat bencana	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					kabupaten						
					Pipanisasi dari sumber air	paket	1	1	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	bulan	12	12	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi bencana	Jenis	2	2	100		
				4 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana**	**%**	**100**	**100**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar	a Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana yang	Dok	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Masyarakat								
			Sda	b Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	bulan	12	12	100		
			Sda	c Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan	Sekolah	10	10	100		

b. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten Kebumen adalah jumlah desa yang memiliki hazard bencana dengan resiko sedang sampai tinggi berada di 218 desa, sementara belum dilakukan pendataan secara detail terhadap penduduk yang benar benar beresiko terdampak bencana.

Permasalahan pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran yakni belum seluruh wilayah Kabupaten Kebumen terjangkau respon cepat 15 menit pemadaman kebakaran, dikarenakan jarak wilayah dengan pos terdekat tidak bisa dijangkau dalam tempo 15 menit. Disamping itu kondisi sarpras Pemadam Kebakaran memerlukan penambahan dan peremajaan, dikarenakan saat ini anggaran pengadaan unit pemadam kebakaran terkena rasionalisasi.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Guna mengatasi permasalahan terkait pendataan penduduk di kabupaten Kebumen yang beresiko terdampak langsung akibat bencana maka pada tahun 2023 akan mulai di lakukan pendataan penduduk yang berada di desa-desa, dengan prioritas pada desa yang memiliki risiko tinggi dan sedang.

Dalam hal wilayah-wilayah yang tidak terjangkau respon cepat pemadam kebakaran, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tentang pemadaman bagi anggota Pelindungan Masyarakat (linmas) desa.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan, dimana urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Kebumen, diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%. Analisis kesesuain antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kebumen Tahun 2021-2022

NO	URAIAN KINERJA	CAPAIAN TAHUN	
		2021	2022
1.	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	49	21
2.	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9750	9750
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72,2	71,59
4.	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	195	307
5.	Jumlah Pelanggaran Perda	65	5525

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah Persentase Penegakan Perda, dengan target tiap tahun adalah 100% penegakan Perda tertangani. Kinerja Penegakan Perda tahun 2022 dengan hasil 22 jenis Perda yang ditegakkan, dengan rincian kasus sebagaimana Tabel 3 di bawah ini. Kasus-kasus tersebut telah tertangani secara keseluruhan atau dengan capaian 100%.

Tabel 3. 18 Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
1	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	21	0
2	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA TANDA DAFTAR GUDANG	21	0
3	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI	21	0
4	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, IZIN	21	0

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
	INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN, MINUMAN DAN IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL		
5	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA	21	0
6	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HOTEL	7	0
7	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK RESTORAN	21	0
8	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN	1	0
9	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME	21	0
10	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	21	0
11	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR	3	0
12	PERDA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	21	0
13	PERDA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	3	0
14	PERDA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	21	0
15	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	7	0
16	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	50	0
17	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	4	0
18	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	1	0
19	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN	1	0
20	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	59	0
21	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	5178	2
22	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	1	0
		5.525	2 kasus

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2022

6. Urusan Sosial.

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

1) Program Rehabilitasi Sosial;
2) Program Pemberdayaan Sosial;
3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5) Program Penanganan Bencana; dan
6) Program Pengelolaan Tempat Makam Pahlawan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapatdilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2022

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Sosial**	**1 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos**	**%**	69	69	100		
				1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Keg	3	3	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	Orang	26	26	100		
			sda	b Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan	Lembaga	2	2	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
			sda	c Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan	Orang	10	10	100		
				B PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**%**	100	100	100		
				1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	Orang	10	6	60	Jumlah migran yang difasilitasi sesuai dengan kejadian (6 kejadian)	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam hal ini Dinsos Provinsi Jawa Tengah, DISNAKER

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Asal							Kab. Kebumen, dan Desa. Selain itu bekerjasama dengan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat untuk selalu memantau terkait informasi pemulangan buruh migran ke Indonesia (Kebumen)memantau terkait informasi pemulangan buruh migran ke Indonesia (Kebumen)

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Orang	10	6	60	Fasilitasi dan jumlah migran yang difasilitasi sesuai dengan kejadian (6 kejadian)	Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam hal ini Dinsos Provinsi Jawa Tengah, DISNAKER Kab. Kebumen, dan Desa. Selain itu bekerjasama dengan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat untuk selalu memantau terkait informasi pemulangan buruh migran ke Indonesia (Kebumen)m

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											emantau terkait informasi pemulangan buruh migran ke Indonesia (Kebumen)
				C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani**	**%**	100	103,96	103,96		
				1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	orang	1003	1.043	103,98		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Penyediaan Permakanan	- Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan - Jumlah disabilitas	Orang	100 50	100 50	100 100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar Masyarakat		terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan - Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan - jumlah permakanan gepeng - Jumlah RTM yang mendapatkan bantuan permakanan		90 30 250	90 30 250	100 100 100		
			sda	b Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu	Orang	160	157	98,12	Ada beberapa Penerima Manfaat (PM) yang meninggal dunia	Di SILPAkan (sisa kembali ke Kas Daerah)
			sda	c penyediaan sandang	jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang (lansia terantar)	orang	90	90	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	d Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	133	133	100		
			sda	e Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	50	66	132		sesuai dengan data aduan yang masuk
			sda	f Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan	Orang	50	77	154		sesuai dengan data pelaporan yang masuk
				2 Rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	kegiatan	5	5	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan	Orang	45	60	133		sesuai dengan data aduan yang masuk
			sda	b Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan	Orang	140	140	100		
			sda	c Penyediaan sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso)	Orang	100	100	100		
			sda	d Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso)	Orang	100	100	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehbilitasi sosial kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang di fasilitasi	lambaga	1	1	100		
				D PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**cakupan perlindungan jaminan sosial**	**%**	75,75	64,93	85,72	bansos yang diberikan merupakan bansos komplementer (dimana 1 Keluarga Penerima Manfaat bisa mendapatkan lebih dari 1 jenis bansos)	melakukan usulan baru yang dilaksanakan oleh desa akan tetapi untuk penetapan berdasarkan keputusan pusdatin kesos dari kemensos
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	26	26	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kemiskinan	Dok	26	26	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar Masyarakat								
				b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	- jumlah desa yang mengikuti lomba cipta menu sehat - jumlah KK penerima kartu keluarga sejahtera - jumlah penerima BLT BBM - jumlah penerima BLT DBHCHT	Desa jiwa orang jiwa	460 16.000 850 734	460 41.149 850 734	100 257 100 100		menggunakan dana CSR
				E PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota**	**%**	100	100	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Keg	5	5	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	orang	1500	1500	100		
			sda	b Penyediaan Sandang	jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang	orang	350	350	100		
			sda	c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	tempat	2	2	100		
			sda	d Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket penanganan khusus bagi kelompok rentan	paket	2	2	100		

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	e Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	orang	250	250	100		
				2 **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana**	**Keg**	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi	lokasi	1	1	100		
			sda	b Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah taruna siaga bencana yang diberdayakan	orang	50	35	70	Jumlah Tagana yang memiliki NIAT (Nomor Induk Anggota Tagana) ada	Akan dilakukan perekrutan Tagana baru di tahun 2023 sebanyak 26

o.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										35 orang, 15 orang adalah relawan	orang.
				F **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**prosentase TMP yang di kelola**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang direhab	Unit TMP	1	1	100		
				b Pengamanan TMPN Kabupaten/Kota	Jumlah orang pengaman TMP	Orang	1	1	100		

b. Permasalahan

1) Bidang Rehabilitasi Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum komprehensif dan valid :

a) Ada beberapa PM yang meninggal dunia dan pindah domisili;
b) Data PPKS yang dinamis;
c) Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi;
d) Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera;
e) Banyaknya Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani.

2) Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):

a) Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu;
b) Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS;
c) DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA;
d) BNBA DTKS tidak bisa di download Excel, hanya bisa cek kepesertaan melalui entry NIK satu persatu melalui aplikasi.
e) Pembaharuan menu aplikasi oleh Pusdatin tidak disertai dengan sosialisasi ke pengelola DTKS Kabupaten/Kota
f) Kendala dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusdatin dikarenakan tidak adanya kontak person yang dapat memberikan solusi setiap permasalahan atau komplain.
g) Kabupaten/kota hanya bisa melakukan usulan, untuk berhasil atau tidaknya sepenuhnya keputusan Pusdatin Kesos Kemensos RI

3) bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan:

a. Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana

b. Kesulitan mencari relawan yang aktif berperan serta dalam penanggulangan bencana;
c. Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas selama tahun 2022 antara lain:

1. Bidang Rehabilitasi sosial
   a. Bekerjasama dengan aparat Kepolisian, TNI, Ormas dan Orpol untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana
   b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran berkala DTKS
   c. Dicarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat, seperti: berkoordinasi dengan BAZNAS dan Sentra
   d. Berkoordinasi dengan panti sosial milik Provinsi
   e. Memaksimalkan SDM dan PSKS yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait
   f. Mengeluarkan data KPM yang sudah mampu dari data penerima bantuan sosial
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Sosialisasi tentang permasalahan bencana sosial (korban tindak kekerasan), pemberian layanan kesehatan, pelayanan psikososial dan pelayanan psikologi bagi migran korban tindak kekerasan
   b. Kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada sekolah dari tingkat PAUD sampai SLTA kawasan pesisir, longsor dan banjir
   c. Pembentukan Kawasan Siaga Bencana (KWSB)
   d. Kesiapan logistik dan distribusi logistik ke penyintas
   e. Penyiapan lumbung sosial di 4 Kecamatan (Karanganyar, Gombong, Prembun dan Karangsambung) dan lumbung rumah
   f. Bimtek Tagana meliputi pengenalan karaktersitik bencana, PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan layanan dukungan psikososial
3. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Dayasos
   a. melaksanakan verval ketidaklayakan untuk menonaktifkan Program Bansos bagi KPM yang sudah mampu, meninggal dan pindah.
   b. melaksanakan verval Data Terpadu Jawa Tengah (Provinsi) yang didalamnya terdapat variabel-variabel untuk perankingan status kesejahteraan sosial

c. melalukan pengecekan DTKS melalui entry NIK satu persatu di aplikasi
d. pengelola DTKS Kabupaten/kota selalu memantau grup Watshapp untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran DTKS/Bansos
e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota lain

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Tabel 3. 20 Perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	100%	99,93%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Kebumen, 2022

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100%, dengan kriteria penilaian Baik. Sedangkan untuk capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian SPM Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 99,93% dengan kriteria penilaian Baik.

Dari hasil penilaian sendiri/*Self assessment* atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022, menunjukan rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran yang telah ditetapkan adalah 99,96% (baik).

e. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk Persentase capaian SPM Sosial tahun 2022 sebesar 99,93%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 capaian SPM Sosial sebesar 99,46%. Adapun hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, meninggal, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Adapun rincian capaian SPM Sosial dengan formulasi pengukuran persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai standar ditambah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sesuai standar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Persentase capaian SPM Sosial tahun 2022

NO	URAIAN	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	99,63%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti socia	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti social	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kab. Kebumen, 2022

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Koperasi (Usaha Kecil Dan Menengah), Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan. Keseluruhan urusan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Rencana Kerja Daerah Tahun 2022.

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penempatan Tenaga Kerja;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Hubungan Industrial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 22 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Tenaga Kerja**	**DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**	1 Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	A **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai"A"**	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetens	Jumlah Paket Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	paket	13	13	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah orang pencari kerja yang mengikuti pelatihan	paket	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah paket kerjasama dengan LPKS	paket	1	1	100		
				2 KegiatanPembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	orang	60	60	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPKS yang terbina A	orang	60	60	100		
				B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar**	persen	21,82	57,29	262,58		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.261	12.459	551,04		
			PemulihanPerekonomian Daerah BerbasisKomoditas danKawasan UnggulanDaerah BerbasisPertanian danPariwisata	a Sub KegiatanPelayanan antar Kerja Jumlah Kegiatan Pelayanan	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja	orang	14.000	15.104	107,89		
			Sda	b Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah orang Terserapnya tenagakerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga	Jumlah orang terserapnya tenagakerja dari masyarakat setengah menganggur dari keluarga miskin dan di PH	OH	1.425	4.980	349,47		
				2 KegiatanePelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungir	orang	2.130	3.329	156,29		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Sub KegiatanPeningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon PMI atau PMI yang terlindungii	orang	255	200	78,43	indikator sudah direvisi tidak bisa berupa di sipd	koordinasi bappeda
			Sda	b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah orang calon PMI yang mengurus paspor	Orang	1800	2.105	116,94		
			Sda	c Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	75	75	100		
				C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian**	Persen	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota	Jumlah perselisiha yang terselesaikanl	Kasusn	6	9	150		
			PemulihanPerekonomian Daerah BerbasisKomoditas danKawasan UnggulanDaerah BerbasisPertanian danPariwisata	a Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu)daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial	Kegiatan	6	6	100		

b. Permasalahan

1. Kondisi Pencari Kerja setiap Tahun Rata-rata diatas 14.000 orang, sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak banyak sehingga disparitas antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Era Revolusi Industri 4.0 berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada. Teknologi Informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara komputerisasi. Oleh karena itu pencari kerja juga harus respon terhadap perkembangan zaman.

c. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah dilakukan ditahun 2022 akan tetap dilaksanakan ditahun 2023 untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja antara lain:

1. Bersinergi dengan Sekolah dan Universitas dalam upaya mendorong transformasi/paradigma dalam era sekarang dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ketenagakerjaan melalui Rakor dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/MA yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa link dengan dunia kerja
    a. Tahun 2022 Rakor Ketenagakerjaan sebanyak 5 kali
    b. Tahun 2023 sebanyak 3 kali
2. Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta *Career Development center* (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi untuk mengupayakan alumni dapat bekerja
3. Intervensi Pencari Kerja dengan kegiatan *Mini Job Fair, Job Fair, serta Job Canvasing* (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja) kepada perusahaan
4. Fasilitasi Rekrut Tenaga Kerja oleh Perusahaan di Dinas Tenaga Kerja Kebumen di Tahun 2022 sebanyak 7 perusahaan
5. Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan yang dijalani dengan perjanjian kerja serta kondisi dan kelayakan pekerja di perusahaan tempatnya bekerja di Tahun 2022 di Kawasan Industri Batam
6. Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri ke Pencari Kerja dan Masyarakat
    a. Pertemuan di lokasi Kantong PMI sebanyak 3 kali

b. Melalui Media Cetak dan Elektronik : Ratih TV dan Radio In FM Kebumen sebanyak 6 kali

7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dengan bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten
   a. Tahun 2022 Pelathan di BBPVP Bekasi sebanyak 14 orang
   b. Tahun 2023 Pelatihan di BBPVP Makasar sebanyak 5 orang
   c. Tahun 2022 pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 488 orang (APBN), Prakerin siswa SMK 349 orang (APBD)
   d. Tahun 2022 pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 260 orang
8. Memaksimalkan Website dan Media Sosial Dinas Tenaga Kerja dalam menginformasikan tentang kegiatan Disnaker dan layanan kerja secara update
   a. Web Bursakerja.kebumen.go.id
   b. Medsos (Facabook,Instagram,Twitter dan You Tube)

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 154,19% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 250,34%, terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 88,63% atau kategori tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Hasil pelaksanaan program urusan tenaga kerja adalah Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah peningkatan keterserapan tenaga keja dihitung dengan rumus % (persentase) jumlahpenempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan % (Persentase) jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan, kemudiandibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja} = \frac{\text{\% jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata} + \text{\% jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan}}{}$$

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2022 sebesar 57,29%. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 82,48% ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 32,11% dibagi 2. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 23 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2021	2022
1	Pencaker	14.609	15.104
2	penempatan pencaker	7.569	12.459
3	prosentase penempatan	51,813	82,48
4	Pelatihan	576	576
5	penempatan pelatihan	185	185
6	prosentase penempatan pelatihan	32,11	32,11

Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2022

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen akan meningkat karena berhenti bekerja, buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan lock down di tempat bekerjanya akibat pandemi Covid-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya.

Pada tahun 2022 Jumlah pengangguran mencapai 5,92 persen. Angka ini diporoleh dari persentase jumlah angkatan kerja tahun 2022 sejumlah 658.337 orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja sejumlah 38.969 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak; dan
6. Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapatdilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 24 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
08	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.	A **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota**	**%**	**14,26**	**51,17**	**362**		realisasi kegiatan melibihi dari target (desa)
				1 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenanga kabupaten/kota	kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD/ke/desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG	instansi	59	262 (52 OPD dan 210 desa)	444		sasaran kegiatan (desa) melebihi dari target dalam DPPA
				2 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	kegiatan	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah kelompok organisasi wanita (GOW dan DWP) yang mendapatkan fasilitasi raker, sosialisasi dan pelatihan	Kelompok	29	30	103		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Pemenuhan hak perempuan anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak	**B PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**cakupan program perlindungan perempuan**	**%**	**100**	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan /TPPO	Dokumen	9	9	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	jenis	6	6	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah layanan penanganan kasus perempuan korban kekerasan	kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			3 Peningkatan kualitas perempuan dalam keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga	**C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**cakupan program peingkatan kualitas keluarga**	**%**	14,26	21	147,26		Ada pembentukan pokja BPTKI baru dengan rincian 2 desa dan 2 dikecamatan
				1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok kerja (pokja) bina keluarga tenaga kerja indonesia (BK TKI) tingkat kecamatan dan desa yang terfasilitasi pelaksanaan rapat	kelompok	4	4	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak**	**%**	100	100	100		
				1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan analisi dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi data terpilih gender dan anak tingkat kabuoaten	Dokumen	1	1	100		
				E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**kategori kabupaten layak anak (KLA)**	**madya**	madya	madya	100		
				1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	kegiatan	2	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan	a Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	jumlah desa yang mendapatkan forum anak desa	desa/kecmatan	52	52	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Penciptaan Kondusivitas Wilayah	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
				2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	kegiatan	2	2	100	Masih banyaknya kasus yang belum dilaporkan	Melakukan sosialisasi lebih luas baik melalui media offline maupun online
			Peningkatan TataKelolaPemerintahan yangbaik dan bersih danPenciptaanKondusivitasWilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Desa yangMendapatkan SosialisasiDRPA	Desa	2	2	100	masih rendahnya pemahaman dan upaya tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pemahaman dengan menghadirkan Narasumber (expert) tentang DRPPA dari Provinsi Jateng (Kepala BP3AP2KB Prov Jateng)

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah KPAD/ KPAK di 26 Kecamatan yang terfasilitasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kesehatan yg mendapat Bimtek KHA	Kelompok	52	52	100	Belum semua anggota KPAD, Pendidik dan tenaga Kesehatan mengerti tentang KHA dan Perlindungan Anak	Dilakukan Peningkatan Kapasitas bagi KPAD dan Bimtek KHA bagi Pendidik serta tenaga kesehatan
					Jumlah Rakor PPT Kecamatan di Tingkat Kabupaten	Orang/ Kali	60/ 1	60/ 1	100	Koordinasi pada tingkat Kecamatan belum terkoodinasi dengan baik	Dilakukan Rakor PPT yang dihadiri Ketua PPT Kecamatan untuk meningkatkan fungsi koordinatif

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				F PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan perlindungan khusus anak**	**%**	100	100	100		
				1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Konseling Informasi Edukasi (KIE)	Paket	1	1	100		
				2 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan	'Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.	Kasus	80	70	87,5	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sebanyak 70 kasus.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Anak dan
					Jumlah petugas P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen yang mengikuti Rakor	Orang	40	40	100	Rakor P2TP2A Kartika tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran	Melaksanakan Rakor P2TP2A Kartika pada tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Kasus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kasus	80	69	86,25	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sebanyak 69 kasus.	Capaian kinerja sebanyak 86,25%
				c Penguatan Dan Pengembanga Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan Dari Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Koordinasi dan sinkronasi peningkatan kapsitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	keg	1	1	100		

b. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ada pada Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Pada program Prosentase peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan (PUG) dan target kinerja sebesar 14,26% atau sebanyak 52 OPD Kabupaten dan Kecamatan serta penguatan PUG tingkat desa sebanyak 7 desa/kelurahan dengan realisasi 52 OPD Kabupaten dan Kecamatan serta 210 desa sehingga capaian sebesar 56,95%. Guna mempercepat PUG Tingkat Desa diadakan perubahan alokasi penguatan PUG tingkat desa yang semula diperuntukkan bagi 7 desa/kelurahan menjadi 210 desa pada tahun 2022 sehingga prosentase melebihi batas target menjadi 444%.
2. Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak
3. Masih tingginya angka pernikahan di usia anak
4. Belum optimalnya peran Gugus Tugas KLA
5. Masih rendahnya jumlah Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan
6. Belum optimalnya fasilitasi kesehatan yang ramah anak
7. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
8. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen
9. Rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak
10. Belum optimalnya peran lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
11. Belum optimalnya pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan
12. Terdapat kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang dihapus dan digabungkan dengan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan juknis DAK.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1. Mengingat belum semua desa/kelurahan mendapatkan sosialisasi PUG dan pelatihan PPRG, maka diperlukan upaya untuk merencanakan kegiatan dan mengusulkan anggaran kembali pada tahun berikutnya dan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.
2. Melihat kasus kekerasan di Kabupaten Kebumen belum semua melaporkan kasus kekerasan yang dialami atau diketahuinya, maka perlu melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media offline maupun online;

3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan menghadirkan narasumber (expert) tentang DRPPA
4. Optimalisasi Gugus Tugas KLA melalui rapat-rapat koordinasi dan Bimtek bagi Gugus Tugas KLA
5. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Kebumen
6. Rapat koordinasi pembina forum anak kecamatan
7. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas forum anak tingkat desa
8. Dilaksanakan Peningkatan Kapasitas bagi KPAD dan Bimtek KHA bagi Pendidik serta tenaga kesehatan
9. Dilakukan Rakor PPT KARTIKA Kecamatan yang dihadiri Ketua PPT Kecamatan untuk meningkatkan fungsi koordinatif;
10. Melaksanakan Rakor P2TP2A KARTIKA Kabupaten Kebumen pada tahun 2023
11. Melakukan persiapan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen
12. Pemberdayaan perempuan dibidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 151,54% atau kriteria sangat baik untuk capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100% atau kriteria baik untuk capaian kinerja. Tingkat capaian program dan kegiatan menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah melebihi target.

e. Capaian Kinerja Urusan

Target kinerja yang ditetapkan terkait urusan pemberdayaan perempuan adalah Prosentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada tahun 2022 kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 132 kasus yang terdiri kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 70 kasus dan kasus terhadap perempuan dewasa 62. Sedangkan jumlah penanganan kasus terhadap perempuan, baik anak dan dewasa sebanyak 110 kasus, terdiri dari kasus perempuan anak sebanyak 48 kasus dan perempuan dewasa sebanyak 62 kasus, yang mendapat penanganan atau pendampingan dari Dinsos P3A Kabupaten Kebumen.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terhimpun/terlaporkan di tahun 2022 meningkat, sehingga meningkat pula

layanan kesehatan yang diakses oleh korban. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar masyarakat lebih sadar untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi.

Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	2021	2022
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	115	132
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	41	52
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35	42
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	29	24
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0	1

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen, 2022

3. Urusan Pangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 (Empat) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 26 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**Dinas Pertanian dan Pangan**	Meningkatkan kemampuan ekonomi dan keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin	A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	%	18,69	20,22	108,19		
				1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	%	18,69	20,22	108,19		
				a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatakan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa	9,00	9,00	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Desa/Keluraha n yang mendapatkan penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Desa	8,00	8,00	100,00		
				c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa/Keluraha n yang mendapat Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Desa/K eluraha n	10,00	10,00	100,00		
				B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	%	43,17	43,17	100,00		
				1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Persentase Kelompok sasaran Pengembanga n Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	%	18,40	18,74	101,85		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
				a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan penentuan harga minimum daerah untuk pangan pokok lokal	Dokumen	4,00	4,00	100,00		
				b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok	27,00	27,00	100,00		
				2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	10,00	8,30	83,00	Penyesuaian pagu anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG)	Ton	20,00	20,00	100,00		
				3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	%	67,60	73,47	108,68		
				a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan	Desa	12,00	12,00	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					dan bantuan alat pengembangan pangan lokal						
				C PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	54,96	54,96	100,00		
				1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1,00	1,00	100,00		
				a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1,00	1,00	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	16,00	11,00	68,75	Penyesuaian pagu anggaran	
				1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	Desa	11,00	11	100,00		
				D PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88,23	88,28	100,06		
				1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1,00	1	100,00		
				a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	170,00	256	150,59		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				b. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	4,00	8	200,00		

b. Permasalahan

Berdasarkan tabel diatas, dari 4 program urusan pangan semua mencapai target, tetapi dilihat dari capaian kegiatan dari 7 kegiatan 5 indikator kinerja kegiatan tercapai dari target dan 2 indikator kegiatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Persentase cadangan pangan yang dikelola hanya terealisasi 8,30% atau 83% dari target renstra . Hal ini dikarenakan adanya refocusing sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran dimana target pengadaan cadangan pangan pemerintah sebanyak 50 Ton GKG sedangkan anggaran yang tersedia untuk 20 Ton GKG;
2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya, pada tahun 2022 hanya tercapai 68,75% dari target renstra, yaitu target 16 desa dapat terealisasi 11 desa, hal ini dikarenakan penyesuaian pagu anggaran dengan adanya refocusing.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalah adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat serta berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila terjadi rawan pangan transien;
2. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang menjadi prioritas.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 tercapai rata – rata 98,06% dengan gradasi nilai sangat tinggi, capaian indikator kinerja empat program rata – rata 102,06 % dengan gradasi nilai sangat tinggi, dan capaian indikator kinerja tujuh kegiatan rata – rata 95,78% dengan gradasi nilai sangat tinggi. Dalam penilaian kinerja tersebut bahwa gradasi nilai sangat tinggi menunjukkan pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program yang telah disampaikan, telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan berkurangnya penduduk miskin, dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut:

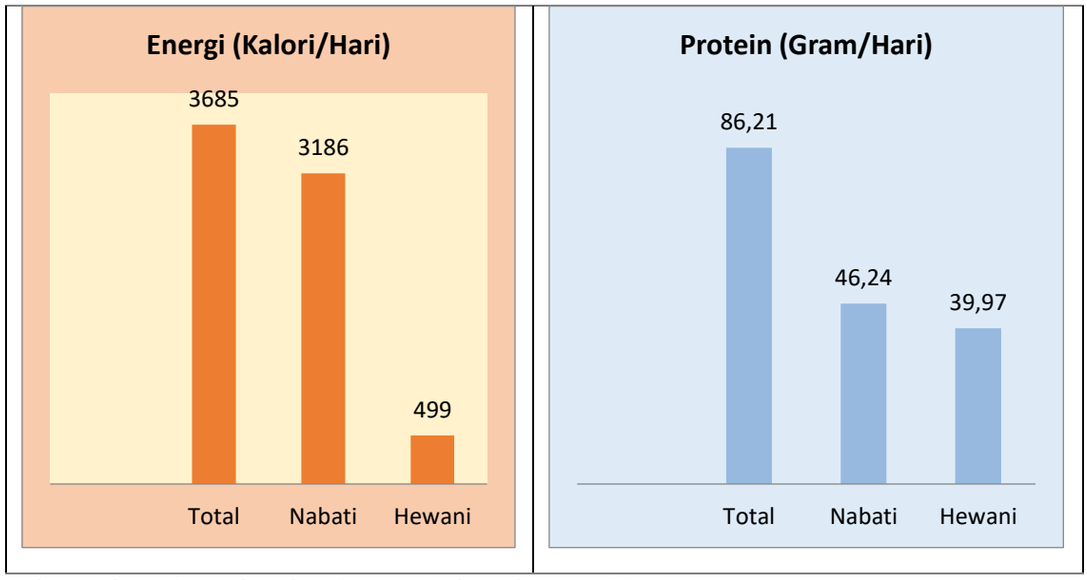
Tabel 3. 27 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	1,99	2	5,62	281	6

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kebumen, 2022

Capaian kinerja indikator Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan dengan target 2% terealisasi sebesar 5,62%. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan : (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2022 - jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020) / jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100%. Dimana hasil perhitungan tersebut yaitu: (3685+86,21) - (3477+93,55)/ (3.477 + 93,55) * 100% = 5,62%. Nilai ketersediaan energi pangan dan ketersediaan protein pangan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar.....



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kebumen, 2022

Gambar 3. 1 Ketersediaan Energi dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Dilihat dari gambar di atas di ketahui kontribusi ketersediaan energi pangan Tahun 2022 dari kelompok bahan pangan nabati sebesar 86,46% yang terdiri dari padi - padian 1.357 Kalori/ Hari, Gula 1.003 Kalori/ Hari, Buah biji berminyak 161 Kalori/ Hari, Sayur-sayuran 109 Kalori/ Hari, Makanan berpati 75 Kalori/Hari, dan Buah-buahan 31 Kalori/Hari. Sedangkan dari kelompok bahan pangan hewani 13,54% terdiri dari Telur 406 Kalori/ Hari, Daging 62 Kalori/ Hari, Ikan 18 Kalori/ Hari, dan Susu 11 Kalori/ Hari.

Kontribusi protein kelompok bahan pangan nabati sebesar 53,64% lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein kelompok bahan pangan dari hewani sebesar 46,36%. Ketersediaan protein kelompok bahan pangan nabati meliputi padi – padian 32 Gram/ Hari, buah biji berminyak 6 Gram/ Hari, sayur – sayuran 5 Gram/ Hari, dan Gula 2 Gram/ Hari. Ketersediaan protein hewani terdiri dari telur 32 Gram/ Hari, daging 4 Gram/ Hari, ikan 3 Gram/ Hari, dan Susu 1 Gram/ Hari.

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program prioritas yang meliputi:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 28 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**Linkungan Hidup**	**Dinas Laingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)**		**A PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**%**	**50**	**58,33**	**116,66**		
				1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**2**	**4**	**200**		**Terdapat penyusunan KLHS kawasan perkotaan Prembun dan kawasan perkotaan Kebumen (dijelaskan di uraian)**
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH/RPPLH)	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terselesaikannya Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RPPLH	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD)	dokumen	1	3	300		
					Terselesaikannya Penyusunan Dokumen IKPLHD Kab. Kebumen	%	1	3	300		
				B PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	**74,10**	**68,17**	**91,99**	**Data IKL belum memiliki dasar hukum yang mendukung (SK Bupati belum ada) yang berdasarkan penelitian (dilakukan oleh dinas). unsur-unsur IKL sehingga tidak divalidasi oleh Tim dari Kementerian. Data realisasi berdasarkan data**	**Melakukan penelitian dan tindaklanjut terkait unsur-unsur IKL yang selanjutnya ditetapkan dengan SK Bupati**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										yang sudah tervalidasi oleh Kementerian LH pada triwulan IV.	
				1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan	paket	1	1	100		
					Pelatihan Pemahaman ISO/IEC 17025:2017 dan Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian Kimia	paket	1	1	100		
					Pembelian alat uji udara emisi (gas detector)	paket	1	1	100		
					Penyusunan laporan pengujian air	laporan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyusunan laporan pengujian udara	laporan	1	1	100		
					Tetrsedianya laporan IKLH	dokumen	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca	paket/ dokumen	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Subkeg. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan laboratorium lingkungan hidup	bulan/ paket	12	12	100		
					Terealisasinya Surveilance dan penambahan ruang lingkup akreditasi	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah pengambilan sampel uji kualitas air sungai untuk data IKLH	Titik sampel	50	50	100		
					Jumlah dokumen hasil uji kualitas air sungai data IKLH	dokumen	50	50	100		
					Jumlah dokumen uji kualitas air yang terverifikasi pada aplikasi IKLH Kementerian LHK	dokumen	50	50	100		
					Jumlah pengambilan sampel uji kualitas udara ambien untuk data IKLH	Titik sampel	8	8	100		
					Jumlah dokumen hasil uji kualitas udara ambien data IKLH	dokumen	8	8	100		
					Jumlah dokumen hasil uji kualitas udara ambien yang terverifikasi pad aplikasi IKLH KLHK	dokumen	8	8	100		
					Tersedianya data uji kualitas air dan data uji kualitas udara ambien untuk perhitungan IKLH Kabupaten/ Kota	dokumen	58	58	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah sampel uji kualitas air (air tanah, air sungai dan air limbah) permintaan pelanggan laboratorium	Titik sampel	270	270	100		
					Jumlah sampel uji kualitas udara ambien permintaan pelanggan	Titik sampel	35	35	100		
					Jumlah dokumen hasil uji kualitas air (air tanah, air sungai dan air limbah) pelanggan laboratorium	dokumen	270	270	100		
					Jumlah dokumen hasil uji kualitas udara ambien pelanggan laboratorium	dokumen	35	35	100		
				2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**kegiatan**	**7**	**7**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Subkeg. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan	paket	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar Masyarakat								
					Jumlah kegiatan penyuluhan polusi dan pencemaran lingkungan	kali	4	4	100		
					Jumlah papan edukasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup (pioritas Geopark) dan papan informasi lingkungan mendukung GNKK	paket	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun	paket	5	3	60	Refocusing anggaran	Menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
				3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	**Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atu**	**kegiatan**	**16**	**16**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hidup Kabupaten/Kota	**kerusakan lingkungan hidup**						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi	paket	12	12	100		
					Jumlah Fasilitasi Program Pembentukan Kampung Iklim	lokasi	4	4	100		
					Jumlah Fasilitasi Forum Pegiat Lingkungan/Forum DAS	kegiatan	1	1	100		
					Jumlah lokasi Penyediaan Sarpras Budidaya Lebah Klanceng	lokasi	1	5	500		5 desa Proklim (Desa Giritirto, Gunungsari, Kec.Karanggayam Wonodadi Kec.Buayan, Desa Rowokele Kec.Rowokele), Desa Pakuran Kecamatan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Sruweng (dijelaskan di uraian)
					Jumlah Paket Penyediaan Bibit Kebun Plasma Nutfah	paket	1	1	100		
					Jumlah Paket Penyediaan Bibit Tanaman Buah	paket	1	1	100		
					Jumlah Paket Bantuan Bibit Tanaman Konservasi Pesisir	paket	1	1	100		
					Jumlah Paket Bibit Tanaman Sumber Daya Air	paket	1	1	100		
					Jumlah Paket Belanja Bibit Tanaman Pakan Lebah Klanceng	paket	1	1	100		
					Jumlah Peringatan Hari LH	kali	1	1	100		
					Terlaksananya Kegiatan Studi Model Ekologis Pemanfaatan Kawasan Sempadan dan Kawasan Penyangga Sungai Lukulo Segmen Perkotaan	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah fasiltiasi pembinaan/sosialis asi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN	paket	1	1	100		
					Jumlah Kegiatan Peringatan HCPSN	kali	1	0	0	Tidak ada instruksi dari kementerian Lingkungan Hidup	Digantikan dengan kegiatan lain yang sejenis
				C PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah**	**%**	**26,27**	**26,27**	**100**		
				1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati**	**dokumen**	**1**	**1**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyaraka	a Subkeg. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			t								
					Terselesaikannya DED Pemeliharaan dan Pembangunan Alun-alun Kebumen	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH	bulan	12	12	100		
					Terawatnya kendaraan pengelolaan RTH (Mobil tangga 1 unit, pick up 2 unit, kendaraan operasional 1 unit dan motor roda tiga/ Viar 3 unit	unit	7	7	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Terawatnya alat operasional pengelolaan RTH (Mesin Chainsaw 9 unit, mesin potong rumput 11 unit, Pompa air mancur 6 unit)	unit	26	26	100		
					Jumlah TPU yang terkelola	unit	13	13	100		
					Terawatnya trotoar jalan di Kabupaten Kebumen	%	100	100	100		
					Terawatnya taman Kota	%	100	100	100		
					Terawatnya Alun-alun Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun	lokasi	4	4	100		
					Terawatnya Hutan Perkotaan	unit	2	2	100		
					Terawatnya Taman median jalan dan turus jalan	unit	100	100	100		
					Terawatnya Pohon-pohon ayoman jalan	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Pembangunan Taman Depan Disdukcapil	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Pembangunan TPU	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Ambal						
					Terselesaikannya Pembangunan TPU Kaliputih	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Pembangunan taman di kawasan polres	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Pembangunan trotoar di seputar polres	%	100	100	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Subkeg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah	paket	3	3	100		
					Jumlah Lembaga dalam Pendampingan Kelembagaan Kehati	lembaga	3	3	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	d Subkeg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati	paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat								
					Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Pendukung Taman Kehati	paket	1	1	100		
					Jumlah Pelatihan Sosialisasi/Pembinaan Pengelolaan Sarpras Kehati	kali	2	2	100		
				D PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3**	**%**	**35,00**	**35,00**	**100**		
				1 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3**	**kali**	**30**	**30**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3	kali	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar Masyarakat	Elektronik							
					Tersedianya laporan pengelolaan dan fasilitasi Perijinan LB3	dokumen	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	kali	26	26	100		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan**	**%**	**7,36**	**7,73**	**105,03**		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	**Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan**	**unit**	**125**	**140**	**112,00**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**pengawasan kegiatan usaha**						
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC)	unit	100	115	115		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi	unit	25	25	100		
				F PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup**	**%**	**13,26**	**13,48**	**101,66**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UNTUK MASYARAKAT							
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	**Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata**	**Lokasi**	**13**	**46**	**353 ,85**		(diberikan penjelasan di uraian)
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes	Desa	7	15	214,29		(diberikan penjelasan di uraian)
					Jumlah pendampingan perdes lingkungan hidup yang dicapai sampai tahun ini	Perdes	60	62	103,33		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	b Subkeg. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya	sekolah	6	31	516,67		(diberikan penjelasan di uraraian)

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat		Lingkungan Hidup di Sekolah						
				G PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup**	**%**	**33,33**	**33,33**	**100**		
				1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup**	**Lokasi**	**16**	**16**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup	Lokasi	16	16	100		
					Jumlah penerima penghargaan yang ditargetkan	trophy	4	6	150		
				H PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase penanganan Pengaduan**	**%**	**100**	**100**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					masyarakat						
			6	**1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH**	**kasus**	**10**	**12**	**120**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasai pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	kasus	10	12	120		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup	kasus	10	12	120		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentaase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R**	**%**	**26,00**	**26,65**	**102,5**		
				1 Kegiatan Pengolahan Sampah	**Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah**	**Kegiatan**	**5**	**5**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Subkeg. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada	dokumen	1	1	100		
					Menyelesaikan Entri data SIPSN	laporan	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Subkeg. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah	Lokasi	9	16	177,78		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	kegiatan	9	16	177,78		
					Pembentukan Bank Sampah	unit	90	90	100		
					Recruitment Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	orang	9	9	100		
					Jumlah pendampingan bank sampah	unit	90	90	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	c Subkeg. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR)	bulan	12	12	100		
					Cakupan pelayanan sampah perkotaan	%	65	60,51	93,09		
					Jumlah sampah perkotaan terangkut	ton	29.074	42.157,50	145		
					Jumlah kecamatan terlayani	kec.	6	6	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah desa/kelurahan terlayani	desa/ kel.	88	88	100		
					Jumlah UPTD Pengelolaan sampah	lokasi	2	2	100		
					Jumlah TPA terpelihara	unit	2	2	100		
					Jumlah TPS terpelihara (Bak Sampah Permanen)	unit	221	221	100		
					Jumlah landasan kontainer terpelihara	unit	58	58	100		
					Jumlah transfer depo terpelihara	unit	1	1	100		
					Jumlah Dumtruck Pengangkut sampah terpelihara	unit	15	15	100		
					Jumlah Armroll Truck Terpelihara	unit	18	18	100		
					Jumlah Kendaraan Roda tigaterpelihara	unit	18	18	100		
					Jumlah Alat berat terpelihara	unit	4	4	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan	d Subkeg. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R	kec	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Layanan Sosial Dasar Masyarakat								
					Praktek pengolahan persampahan	kegiatan	5	5	100		
					Koordinasi Forum Peduli Lingkungan	kegiatan	3	3	100		
					Koordinasi Pengelola TPS3R	kegiatan	3	4	133		
					Bimtek/Pelatihan/ Sosialisasi	kegiatan	5	5	100		
					Tersedianya laporan Bank Sampah dan TPS3R	laporan	1	1	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	e Subkeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan	unit	12	12	100		
					Konsultan Perencana Peningkatan Fasilitas TPA dan Konsultan Perencana	paket	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan TPST/ Depo Sampah						
					Konsultan Pengawas Peningkatan Fasilitas TPA Kaligending	paket	1	1	100		
					Penyusunan Naskah Akademik Perda Jam Buang Sampah/ra revisi perda Pengelolaan Sampah	paket	1	1	100		
					Pemeliharaan Fasilitas TPA/ Landasan Kontainer/ TPS	paket	1	1	100		
					Pemeliharaan Kontainer sampah	paket	1	1	100		
					Pemeliharaan/kali brasi alat timbang sampah TPA	paket	1	1	100		
					Pengadaan Motor Roda Tiga	unit	2	2	100		
					Pengadaan Sarpras Komposting (Mesin Pencacah) Sampah dan Sarpras Bank Sampah	unit	2	2	100		
					Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	paket/ unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					untuk Peningkatan Fasilitas TPA						
					Peningkatan Fasilitas TPA Kaligending	paket	1	1	100		

b. Permasalahan

1. Adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan.
2. Adanya Program Pemerintah Pusat untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang secara tidak langsung akan mengurangi anggaran Daerah dan berpengaruh terhadap refocusing anggaran dan capaian Program Urusan Lingkungan Hidup.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1. Sosialisasi dan kerjasama antar instansi terkait secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen;
2. Meningkatkan akurasi kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD dan RPJPD secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan keadaan Kondisi Alam dan Sosial Ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah;
4. Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah dan TPS3R di sebagain besar wilayah Kabupaten Kebumen;
5. Melakukan konservasi lahan secara massif, melalu gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan “ nandur wit kanggo anak putu”;
6. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbukan pencemaran/kerusakan lingkungan; dan
8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui Perda Lingkungan Hidup Kabupaten.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi, oleh sebab itu pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja adalah 100%, atau

kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa capaian kinerja kegiatan yang cukup tinggi, antara lain Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 200%, dikarenakan dari target penyusunan KLHS sebanyak 2 (dua) dokumen (RPPLH dan IKPLHD) terdapat tambahan realisasi 2 (dua) dokumen KLHS, yaitu penyusunan KLHS kawasan perkotaan Prembun dan kawasan perkotaan Kebumen.

Selain hal tersebut, capaian kegiatan yang tinggi juga disebabkan oleh beberapa indikator sub kegiatan yang capaiannya lebih dari 100%, indikator kinerja tersebut antara lain Jumlah lokasi Penyediaan Sarpras Budidaya Lebah Klanceng dengan capaian sebanyak 500% dikarenakan jumlah lokasi Penyediaan Sarpras Budidaya Lebah Klanceng yang semula ditargetkan 1 (satu) lokasi, terealisasi sebanyak 5 desa atau 5 lokasi desa Proklim (Desa Giritirto, Gunungsari, Kec. Karanggayam Wonodadi Kec. Buayan, Desa Rowokele Kec. Rowokele), Desa Pakuran Kecamatan Sruweng.

e. Capaian Kinerja Urusan

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai misi keempat RPJMD yaitu “peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan sasaran empat poin dua yaitu “meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	2022			TARGET AKHIR RPJMD 2026
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,43	74,10	68,17	91,99	74,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan

informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3) Sebagai instrument indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), didukung dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen nomor 421/1683 Tahun 2022, mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) mencakup dua variabel yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup Pusat dan DLH Provinsi) dengan cara memanfaatkan aplikasi pemetaan luas tutupan lahan yang diperoleh dengan cara digitasi gambar peta/ citra satelit terbaru kemudian memasukkan hasil pemgukuran ke dalam aplikasi. Dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 74,10 (RPJMD 2021-2026), realisasi mencapai 68,17 (prosentase capaian sebesar 91,99%). Adapun capaian IKLH tahun 2022 dengan menggunakan 3 variabel berdasarkan standar perhitungan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Tutupan Lahan.

Dengan indikator Predikat IKLH: <40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80= sangat baik. Pada tahun 2022, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 68,17 atau masuk kategori “CUKUP BAIK”.

Tabel 3. 30 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2021	2022	
1.	Indeks Kualitas Udara	89,99	90,94	Sangat Baik

2.	Indeks Kualitas Air	52,37	54,49	Sedang
3.	Indek Tutupan Lahan	37,86	49,53	Kurang
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,44	68,17	Cukup Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2022

Selanjutnya jumlah produksi sampah dengan cakupan pelayanan pada tahun 2022 meliputi wilayah perkotaan Kecamatan Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun dan Prembun, sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	JUMLAH (2021)	JUMLAH (2022)
Wilayah perkotaan yang dilayani : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, Prembun			
1.	Jumlah Desa/Kelurahan kawasan perkotaan	126	126
2.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan Terlayani s/d 2022	74	86
3.	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan (Jiwa)	350.050	462.181
4.	Timbulan Sampah Yg Dihasilkan (m3/hr)	671,65	1.649,36
5.	Timbulan Sampah Yg Terangkut ke TPA (m3/hr)	397,20	996,00
6.	Sampah Yg Terangkut Ke TPA (%)	59,14	60,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen 2022

5. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil; dan
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Pendaftaran Penduduk**	%	100	100	100		
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP, KIA)	kegiatan	7	7	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Pencatatan, Pentatausahaan, dan penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP,KIA)	Dokumen	110.000	113.265	102.9		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wilayah								
			Sda	b Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kegiatan	4	4	100		
			Sda	c Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan	Lokasi	27	27	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan	kegiatan	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jenis	2	2	100		
				B PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Pendaftaran Penduduk**		100	100	100		
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Percepatan capaian IKU penerbitan akta kematian dan penerbitan dokumen pencatatan sipil lainnya	dokumen	1.000	1.000	100		
			sda	b Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Dokumen	27.000	26.101	96.6		
				2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyelenggarakan urusan administrasi kependudukan	kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan	Jumlah Koordinasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Institusi Lainya	Kali	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Pencatatan Sipil K							
				C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan**	%	100	100	100		
				1 Pengumpulan Data Kependudukan dan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Buku	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah agregat buku kependudukan	Buku	2	2	100		
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lokasi Penerima pengadaan sarana dan prasarana fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Lokasi	19	19	100		
			Sda	b Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	lembaga	5	7	100		
			Sda	c Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Orang	75	75	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Masyarakat							

b. Permasalahan

1. Pada indikator cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya tapi pada indikator capaian penerbitan Akta Kematian sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100% namun pada pencapaiannnya ada sebagian akta kematian yang memiliki status terlambat melapor sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap data yang harus selalu update agar kantor, lembaga dan pihak-pihak yang memanfaatkan data dukcapil dapat terintegrasi dengan baik;
2. Pada indikator capaian kartu keluarga sudah mencapai target yang di tetapkan namun dalam pelaporannya masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat hanya melaporkan perubahan data kependudukan jika dibutuhkan saja;
3. Pada indikator capaian KTP-el sudah mencapai target yang ditetapkan namun masih ada sebagian jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman;
4. Adanya pandemi covid-19, diberlakukan pembatasan kegiatan pelayanan adminduk (sosialisasi dan jemput bola).

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen maka dapat dilakukan upaya mengatasi permasalahan diantaranya :

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
    a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;
    b. Perkembagan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;
    c. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan adminduk;
2. Satu data kependudukan secara nasional atau NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas

tunggal administrasi.

a. Implementasi integrasi *big data* kependudukan dalam semua proses kepemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi *big data* ini memudahkan dalam semua proses kepemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi terhadap data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi-instansi pelayanan publik.
b. *Big data* mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik;

3. Administrasi kependudukan menuju *Go-Digital*.
   a. Implementasi *Go-Digital* bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan memudahkan masyarakat;
   b. Mulai tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data administrasi kependudukan (Adminduk).
   c. Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan enter dan data kependudukan yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat, bisa di-print out sendiri aktanya oleh penduduk dari rumah.
4. Semua penduduk memiliki identitas.

   Salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen k e pendudukan tersebut maka penduduk tercatat dalam *database* kependudukan sehingga kementerian/lembaga (K/L) hingga swasta dapat memanfaatkan data administrasi kependudukan, khususnya Nomor IndukKependudukan (NIK) dan KTP-elektronik untuk segala keperluan pelayanan publik maupun penegakan hukum.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori Sangat Tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Tahun 2022 ini tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 33 Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan (%)	Tahun 2022	
			Target	Realisasi
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	Dihitung berdasarkan Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan + Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil : 2		94,85	99,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

Dapat dilihat bahwa pencapaian masing-masing indikator kinerja pada tahun 2022 telah memiliki penilaian kinerja yang tinggi. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi	Target awal Renstra (2022)
		(%)	2022	
Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan : Jumlah Penduduk wajib KTP x 100%		99,26	94,50
Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan akta kelahiran 0-17 Tahun : Jumlah anak usia 0-17 Tahun x 100%		99,15	95,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022

Capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,4 % pada indikator Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yaitu 99,22 % dari data awal capaian tahun 2022 sebesar 99,20%.

Dari indikator tersebut capaian indikator Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 sudah melapaui target yang di tetapkan namun masih terdapat beberapa kendala dalam hal perekaman, dimana masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan KTP elektronik karena belum semua masyarakat sadar untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

Pada Indikator Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun 2022 yaitu 99,15 %. Pada indikator tersebut terdapat sedikit kendala dalam hal pelaporan, dimana masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan akta kelahiran atau melaporkan kelahiranya karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Indikator Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil khususnya

penduduk yang memiliki akta kelahiran pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2022 memperoleh angka capaian yang baik, namun sangat disayangkan dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan masih sangat rendah, dimana mereka melaporkan peristiwa penting dan kependudukan hanya pada saat insidentil saja.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 35 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		A. PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0,22	0,66	300		
				1. Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda Penataan desa dan Jumlah Perubahan Perda Pilkades yang tersusun	Kegiatan	2	2	100		
				a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.	Jumlah Perda Penataan desa yang tersusun dan Junlah Perubahan Perda Polkades yang tersusun	dokumen	2	0	0	belum masuk propem perda	Diagendakan 2023 masa siding III

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa**	**%**	100	100	100		
				1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama desa	Kegiatan	3	3	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa	Desa	7	229	3.271,4		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Penciptaan Kondusivitas Wilayah								
			Sda	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD	Desa	3	3	100		
					Jumah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Desa	1	1	100		
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD Karya Bhakti Manunggal	Desa	6	5	83,33	kurang dukungan dana	sisa diusulkan lagi pada 2023

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Desa	22	34	154,5		
					Jumlah kegiatan TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP kawasan	Kegiatan	1	1	100		
				C. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya**	**lembaga**	46	68	147,8		
				1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi	Kegiatan	13	13	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	Desa/ Orang	449/ 130	449/ 178	136,9		
					Jumlah Kegiatan Penghargaan Desa Award/ Lomba Desa penilaian 1 tahun periode April 2021 s/d April 2022.	Kegiatan/ Kegiatan	1/1	1/1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Sda	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur kecamatan (26 orang), pendamping desa (26 orang) dan perangkat desa sampling (26 orang) yang mendapat Bimtek Penyusunan Perdes	orang	78	78	100		
					Jumlah desa yang menindaklanjuti hasil Bimtek Penyusunan Perdes bagi Kecamatan	desa	449	449	100		
			Sda	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Pembangunan Desa							
					Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pendampingan perencanaan	Desa	2	2	100		
					Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes	Desa;/ Kelurahan	460	460	100		
			Sda	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan APBDes Perubahan	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat pelatihan Siskuedes Online (bagi petugas yang belum lancar/baru)	Desa	50	50	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah Ikhisar Pelaporan PertanggungjawabangAPBDes yang disusun	dokumen	1	1	100		
					Jumlah Pedoman Penyusunan APBDes yang Disusun	dokumen	1	1	100		
			Sda	e. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa, aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	Orang	182	312	171,4		
			Sda	f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraa	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan	Kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				n Musyawarah Desa	Musdes						
			Sda	g. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang mendapatkan fasilitasi kelayakan usaha	Unit	10	25	250		
					Jumlah BUMDesma yg terfasilitasi	Desa	5	31	620		
					Jumlah BUMDesa yang medapatkan pelatihan legalitas	Unit	20	25	125		
					Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifiikasinya dari tumbuh menjadi berkembang dan betrkembang	Unit	9	18	200		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					menjadi maju						
					Jumlah Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	Unit	10	10	100		
					Jumlah Unit Usaha UPK ((Bumdesa Bersama LKD) yang terfasilitasi	Unit	26	26	100		
					Jumlah Desa Berdikari yang mendapat pendampingan kebetlanjutan Program Desa Berdikari	Desa	39	39	100		
			Sda	h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan	Jumlah kegiatan Fasiitasi Pemilihan, Pengangkatan dan	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemberhentian Kepala Desa						
			Sda	i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	1	1	100		
			Sda	j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah perangkat desa, pendmaping desa dan aparatur kecamatan yang mengikuti Bimtek Penyusunan SID dan Desa online	Orang	501	501	100		
					Jumlah perangkat desa dan aparatur Kecamatan serta pendamping desa yang mengikuti	Orang	501	501	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Bimbingan Teknis Indeks Membangunan (IDM)						
			Sda	k. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa mendapat fasilitasi inventarisasi dan tukar menukar aset	orang	449	449	100		
					Jumlah perangkat desa mendapat Bimtek Pengelolaan Aset Desa	orang	104	348	334,6		
					Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mengikuti rapat koordinasi	orang	52	52	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					terkait dengan aset desa						
			Sda	l. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD (130 orang), aparatur kecamatan (26orang) pendamping desa (26 orang) yang mengikuti Bimtek	Orang	182	182	100		
			Sda	m. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilotasi DD (Dana Desa APBN)	Desa	449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap)	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi BPJS bagi Kades dan Perangkat Desa	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah desa yang mendapat afsilitasi Bantuan Keuangan Provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan Bantuan keuangan lainnya	Desa	449	449	100		
				D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi**	**%**	**13,04**	**13,04**	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat.	Kegiatan	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa dan kecamatan yang mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan lembaga adat	sa/Kecamatan	26/26	49 desa/26	188,46		
					Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan KP SPAMS	Kelompok	60	112 Kel+8 Kel = 120 kelompok	200		
					Jumlah aparatur kecamatan (26 orang),	Orang	52	52	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					pendamping desa (26 orang) yang mendapat pembinaan KP SPAMS						
					Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, PLL dan LPMD)	desa	70	120	171,4		
					Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK	orang	52	52	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					dan LPMD)						
			Sda	b. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	Unit	3	3	100		
			Sda	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	lokasi	30	36	120		
			Sda	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang mendapat pendampingan Lomba Gotong Royong Provinsi Jawa Tengah	Desa	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM	Desa	449	449	100		
					Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pembukaan BBGRM Tingkat Kabupaten	Desa	1	1	100		
			Sda	e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan kegiatan Evaluasi TP.PKK	Desa/Kelurahan	47	52	110,6		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					Jumlah TP PKK Desa/ Kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Desa/Kel	460	460	100		
					Jumlah TP PKK Kabupaten yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kabupaten	1	1	100		
					Jumlah TP PKK Kecamatan yag mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kecamatan	26	26	100		

b. Permasalahan

Pelaksanaan Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang belum mencapai target adalah Program Penataan Desa. Pada program ini terdapat Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa terutama pada sub kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan indikator keluaran yakni Jumlah Perda Penataan Desa yang tersusun dan Jumlah Perda Perubahan atas Perda Pilkades yang tersusun belum tercapai targetnya, yakni dari target 2 Perda, realisasinya masih 0. Selain itu, pada Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa, pada sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, yakni pada indikator keluaran Jumlah desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD Karya Bhakti Manunggal, yang semula ditarget 6 desa, realisasinya 5 desa.

Pada kedua program tersebut tidak tercapai targetnya dikarenakan adanya beberapa kali refocusing anggaran, sehingga target 2 Perda dan terlaksananya kegiatan Karya Bhakti Manunggal terkurangi, sehingga anggaran yang teralokasi tidak mampu dalam pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran pada tahun yang akan datang (2023), agar target dapat terealisasi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 100% sehingga tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Tabel 3. 36 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	21,38	24,05	44,32	184,3	42,09

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, 2022

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka Renstra/RPJMD menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada tahun 2022, yang merupakan tahun kedua RPJMD/ Renstra 2021 - 2026, pendirian Bumdes sejumlah 449 desa yang telah tercapai di tahun 2021, dilakukan pembinaan atau pada akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak 100% atau sebanyak 449 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 449 Bumdes atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa. Untuk tahun 2022 Dinas PMD Kabupaten Kebumen telah menargetkan sebanyak 182 orang aparatur pemerintah desa, dan terealisasi sejumlah 312 aparatur pemerintah desa telah difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur. Tahun 2022 merupakan tahun awal dengan Renstra Dinas PMD yang baru, sehingga pencapaian dalam peningkatan kapasitas aparatur telah memenuhi target.

Penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tertangani 100%, meskipun ada beberapa kasus yang masih dalam kondisi mediasi maupun masuk pada Aparat Penegak Hukum. Jumlah pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2022 sejumlah 31 kasus, dengan 5 kasus dalam proses penyelesaian. Dari jumlah kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, hampir sebagian besar adalah kasus mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun yang berkaitan dengan etika Perangkat Desa.

7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1) Program Pengendalian Penduduk;
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3. 37 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana**	**1 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**A PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**	**%**	25	25	100		
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah lembaga yang melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Lembaga	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah pendidikan kependudukan formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependudukan	Lembaga	5	5	100		
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Dok	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen kajian dampak kependudukan yang tersusun	Dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang tersusun	Dok	1	1	100		
				B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS**	**%**	**65**	68,84	105,91 %		- -

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											-
				1 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Penyediaan sarana dan prasarana KIE program KKBPK, Promosi dan Advokasi serta sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK**	**Kegiatan** -BKB -BKR -BKL -UPPKA	**4**	**4**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	jumlah advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan	kali	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat		mitra kerja						
			Sda	b Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	Kecamatan	26	26	100		
			Sda	c Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang dalam promosi dan KIE program KKBPK	Paket	1	1	100		
			Sda	d Pengelolaan Operasional an Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	jumlah lokasi tersedianya sarana dan operasional di balai penyuluh KKBPK	Kecamatan	26	26	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional PKB/PLKB dalam menggerakan kader IMP**	**%**	**100**	**100**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	- Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia - Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit Kecamatan	5 26	5 26	100 100		
			Sda	b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	2.647	2.647	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah fasilitasi kesehatan terfasilitasi alat dan dan obat kontrasespi dan sarana penunjang pelayanan KB dalam meningkatkan kesertaan penggunaan MKJP, serta kesehatan dan hak-hak reproduksi**	**Klinik/unit**	57	57	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial	a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan	jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya yang difasilitasi distribusi alat dan obat kontrasespi	Alat	57	57	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar Masyarakat	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	dan sarana penunjang pelayanan KB						
			Sda	b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi	Akseptor	9.353	9.040	96,65	Kepesertaan KB untuk metode kontrasepsi MOW masih rendah	Perlu Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi untuk KB Metode MKJP MOW
			Sda	c Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang difasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan yang terfasilitasi promosi dan konseling dan hak-hak reproduksi	Orang	750	750	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kebumen/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**jumlah kampung KB yang terfasilitasi**	**Desa**	72	72	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Desa	72	72	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera**	**%**	**32,27**	45,25	140,2		
				1 **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan**	**Kegiatan**	2	2	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /	- Jumlah BKB KIT Stunting - Jumlah KIT Nikah Anti Stunting	Paket	10 10	10 10	100 100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UPPKS)							
			Sda	b Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan / Kader Keahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	jumlah anggota kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R) yang di bimtek	Orang	104	104	100		
			Sda	c Promosi dan Sosialisai Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /	Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orang	80	80	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UPPKS)							

b. Permasalahan dan Kesesuaian

Capaian peserta KB aktif sebesar 68,84% dari target 65% dimana capaian pada tahun 2022 memanfaatkan momentum dengan mitra kerja Aisiyah dan Muslimat dalam melakukan pelayanan KB.

Capaian lainnya yang 100% karena dikerjakan sesuai dengan target. Kepesertaan KB MKJP (MOW) belum mencapai target dikarenakan kesertaan KB metode MOW masih rendah.

Kesesuaian yang di hadapi selama pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan urusan PPKB adalah :

1. Belum adanya fasilitasi permodalan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
2. Pelayanan KB metode MKJP terutama yang MOW belum banyak peminatnya.
3. Kepesertaan KB untuk metode kontrasepsi MOW masih rendah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang ditempuh di tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membantu kelompok UPPKS dalam pemasaran produk;
2. KB pasca salin dan pasca keguguran untuk bisa dimaksimalkan;
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 93,59% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaiankegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 93,59% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Adapun capaian kinerja urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	70,60	65,00	68,84	105,91	65,00
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	44,04	32,27	45,25	140,22	32,31

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, 2022

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2022 sebesar angka 68,84%. Realisasi 2022 sebesar 105,91% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 131.040 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 190.343 jiwa. Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 39 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2021-2022

NO.	URAIAN KINERJA	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	133.723	131.040
	a. Laki-Laki	6.703	8.731
	b. Perempuan	127.020	122.309
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	193.660	190.343
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	133.723	131.040

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, 2022

8. Urusan Perhubungan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 40 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**Perhubungan**	**DINAS PERHUBUNGAN**	1	A **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	72,22	73,55	101,84		
				1 ` ` Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	50	53,99	107,98		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjuta	a Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan	Dok	7	15	214,29		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n								
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjuta	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n								
				2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjuta	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pengawasan parkir; Jumlah monev pengawasan; Jumlah rapat pengawasan	Kali	34	26	76,47	Pada saat pandemi membatasi pelaksanaan monev pengawasan parkir	Peninjauan langsung ke lapangan untuk lokasi yang bermasalah atau urgen

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n								
				3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Cakupan Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Bulan	12	12	100	.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Unit	9 unit	9 unit	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan	c. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Paket pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Paket	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Berkelanjutan								
				4 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi lintas sektoral (forum lalu lintas)	Kali	11	2	18,18	Forum Lalu Lintas dan Operasi laik jalan tidak dapat memenuhi target yang ditentukan dalam RKPD 2021	Angaran pada oprasi laik jalan dialihkan untuk pengendalian dan pengaturan lalu lintas karena pada saat pandemi giat banyak terfokus pada operasi simpatik,

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pengamanan insidentil dan lain-lain
					Jumlah Operasi laik jalan	Kali	48	15	31,25	Forum Lalu Lintas dan Operasi laik jalan tidak dapat memenuhi target yang ditentukan dalam RKPD 2021	Angaran pada oprasi laik jalan dialihkan untuk pengendalian dan pengaturan lalu lintas karena pada saat pandemi giat banyak terfokus pada operasi simpatik, pengamanan insidentil dan lain-lain
					Jumlah pelaksanaan posko lebaran, natal dan tahun baru	Kali	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah pengamanan pengendalian arus lalu lintas (pengamanan carfreeday dan carfreenight)	Bulan	12	12	100		
				5 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio-Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kebijakan Andalalin yang ditetapkan	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah pengawasan Andalalin	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah Rakor Penilaian Hasil Andalalin Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	Kali	18	10	56	Persetujuan pengesahan andalalin sesuai ijin yang diajukan ke dinas	Berkoordinasi dengan DPMPTSP dan DLHKP
				6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan audit inspeksi dan pamantauan keselamatan transportasi	Kali	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Cakupan KebijakanPenyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan angkutan gratis	Kec	0	0	0	Refocusing anggaran di triwulan I	Menganggarkan kembali ditahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	b Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pengendalian angkutan umum; angkutan sungai dan kereta api	Kali	12	12	100		
					Jumlah sosialisai dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (paguyuban, agen bus)	Kali	4	4	100		
				8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	Rasio Cakupan Kebijakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	%	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dlm Trayek Kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi	Dok	80	80	100		
					Jumlah Unit Fasilitas yang terbangun	Unit	1	1	100		

b. Permasalahan

Beberapa sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal di tahun 2022 antara lain :

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
   - kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran rekening LPJU sebanyak Rp. 265.545.363,- dikarenakan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL),
   - kurangnya sumber SDM ketenagalistrikan untuk pemeliharaan perlengkapan jalan
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
   - Kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen andalalin
   - Masih banyak bangunan yang belum mempunyai dokumen andalalin
3) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan
   - Adanya bantuan sosial bahan bakar minyak bagi armada angkutan umum yang tidak dapat terealisasikan sebesar
     Rp. 1.435.328,- dari target Rp. 297.045.000
4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.
   - Jumlah Pos PJL pada tahun 2022 berjumlah 17 Pos dengan 14 Pos Permanen dimiliki Disperkimhub, sedangkan 3 Pos belum permanen
5) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Banyaknya KBWU yang tidak melakukan uji berkala
   - Salat satu Alat Uji ada yang berfungsi kurang maksimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Menganggarkan kembali ditahun berikutnya untuk sub kegiatan diatas :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota didalamnya yaitu pembangunan Pintu Perlintasan Kereta Api Kuwarisan, Kutowinangun sebagai poros penghubung antar desa (terdapat 5 desa) dan sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (penyediaan angkutan gratis) dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi sebesar 2,3% (sesuai hasil kajian studi).

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perhubungan, dapat diketahui capaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari target 72,22 dengan realisasi sebesar 73,55 atau dengan tingkat capaian sebesar 101,84% dengan kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 101,84% atau kategori sangat tinggi. Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Kualitas Layanan transportasi. Adapun dalam pelaksanaan urusan dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 41 Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	71,89	72,22	73,55	101,84	80,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2022

Indeks Infrastruktur Perhubungan diperoleh dengan cara menghitung persentase dari perbandingan (persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik) : 3

Keterangan: Persentase ketersediaan perlengkapan jalan = jumlah perlengkapan jalan (LPJU,rambu dan APILL) yang tersedia / jumlah perlengkapan jalan yang ideal x 100%

Persentase ketersediaan terminal tipe-C = jumlah terminal yang terbangun / jumlah terminal yang ideal x 100%

Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik = jumlah alat uji KIR dalam keadaan baik / jumlah total alat uji KIR x 100%

Tabel 3. 42 Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Kebumen

No	Kelengkapan Jalan	Jumlah	Kebutuhan	%
1	LPJU	5465	14.000	39,04
2	APILL	54	60	90,00
3	Rambu	2638	8.000	32,98
	Prosentase I			54,00
4	Terminal	4	6	66,67
	Prosentase II			66,67
5	Alat Uji Kir	9	9	100,00
	Prosentase III			100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Kebumen, 2022

Dengan demikian perhitungan Capaian kinerja adalah sebagai berikut :(54,00+66,67+100)/3= 73,55%.

9. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Aplikasi Informatika.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 43 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Komunikasi dan Informatika**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks PPID**	%	25,88	26,47	102,28		
				1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	%	132	135	102,28		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	jam	11.315	11.315	100		
			Sda	b Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	OPD dan desa	132	135	102,28		
			Sda	c Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	kali	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Media dan Kemitraan Komunitas							
				B PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE**	Nilai	3,85	4,39	114,02		
				1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	13	13	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan infrastruktur	Paket	13	13	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan e government Di	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	aplikasi	96	120	125		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	aplikasi	96	120	125		
			sda	b Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	Desa	100	100	100		

b. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika adalah masih lemahnya domain manajemen SPBE, yang meliputi pedoman manajemen SPBE dan audit TIK.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilaksanakan adalah segera menyusun pedoman manajemen SPBE dan melaksanakan audit TIK. Audit TIK meliputi pelaksanaan audit keamanan SPBE, pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 108,15% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 109,09%, sehingga tingkat kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program adalah 108,62% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola SPBE. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks SPBE	Indeks	3,05	3,43	3,44	100,30%	3,60

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pada tahun 2022 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi

47 indikator berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selama periode 2022 adalah nilai indeks SPBE 3,44 atau sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
5) Program Pengembangan UMKM

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 45 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**		**A PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Sehat**	persen	33,33	33,33	100		
				1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota	Unit	140	140	100		
				a Sub.Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/ Kota	Unit	140	140	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**	persen	17,53	17,53	100		
				1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan	Keg	4	4	100		
				a Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Kompeten	orang	150	150	100		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Advokasi kepada Koperasi**	persen	22,19	22,19	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	orang	50	50	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub.Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	orang	50	50	100		
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas**	persen	10,27	10,27	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang terbina	Unit	284	284	100		
				a Sub.Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang teridentifikasi berpotensi	Unit	200	200	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Naik Kelas						
				b. Sub Kegitan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	Unit	75	75	100		
				c. Sub Kegitan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bimtek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas UMKM	Kegiatan	7	7	100		
				E PROGRAM PENGEMBANGAN UMKMM	**Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya**	Unit	35	35	100		
				1 Kegaiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terselenggaranya Jumlah UMKM yang meningkat skala Usahanya	UMKM	200	200	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub.Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Nasabah yang Mendapatkan Subsidi bunga Melalui Penyalur (BUMD/ BUMS)	Nasabah	1.000	1.000	100		
					Jumlah UMKM yang meningkat usahanya	UMKM	225	225	100		

b. Permasalahan

1. Kualitas SDM koperasi baik pengurus maupun pengawas mayoritas masih kurang dalam mengelola koperasi, sehingga pertumbuhan koperasi lambat dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota menjadi lambat pula.
2. Keberpihakan stakholder koperasi, dimana di era sekarang ini koperasi dituntut untuk mandiri dan berdaya saing serta harus bisa mengikuti perkembangan jaman. Disisi lain stakeholder harus memaksa agar koperasi bisa mengubah mindsitenya tidak terlalu bergantung pada pihak luar dan harus mandiri.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1. Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.
2. Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya gerakan koperasi di Kabupaten Kebumen. Selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan pengkajian, pengembangandan pembinaan personil serta penggalian dukungan dana yang proporsional.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Dan UMKM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Presentase Koperasi Sehat	%	26.67	33.33	36.67	110.02	63.33
Prosentase Usaha Kecil menengah yang berkualitas	%	8.75	10.27	10.41	101.36	13.22

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Adapaun rincian persentase jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 47 Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
1	KUD	22	1	23
2	Kop. Pertanian	12	0	12
3	Kop. Perkebunan	0	0	0
4	Kop. Peternakan	0	0	0
5	Kop. Perikanan	14	0	14
6	Kop. Kehutanan	0	0	0
7	Kopti	1	0	1
8	Kopra	0	0	0
9	Kopinkra	1	0	1
10	Koppontren	12	5	17
11	Kopkar	10	2	12
12	Kop. Angkatan Darat	2	0	2
13	Kop. Angkatan Laut	0	0	0
14	Kop. Angkatan Udara	0	0	0
15	Kop. Kepolisian	1	0	1
16	Kop. Serba Usaha	77	9	86
17	Kop. Pasar	3	2	5
18	Kop. Simpan Pinjam	46	0	46
19	Kop. Angkutan Darat	1	0	1
20	Kop. Angkutan Laut	0	0	0
21	Kop. Angkutan Udara	0	0	0
22	Kop. Angkutan Sungai	0	0	0
23	Kop. Angkutan Penyeberangan	0	0	0
24	Kop. Wisata	0	0	0
25	Kop. Telkom	0	0	0
26	Kop. Perumahan	0	0	0
27	K.B.P.R	0	0	0
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	89	3	92
29	Kop. Listrik Perdesaan	0	0	0

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
30	Koperasi Asuransi Indonesia	0	0	0
31	Kop. Wanita	7	0	7
32	Kop. Profesi	0	0	0
33	Kop. Veteran	1	0	1
34	Kop. Wredatama	7	0	7
35	Kop. Pepabri	3	0	3
36	Kop. Mahasiswa	0	0	0
37	Kop. Pemuda	0	0	0
38	Kop. Pertambangan	0	0	0
39	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	0	2
40	Kop. Jamu Gendong	0	0	0
41	Kop. Lainnya	2	1	3
42	KJKS/KSPPS	36	6	42
43	Koperasi sekunder Kabupaten	2	0	2
Jumlah KOPERASI		351	29	380

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel 3. 48 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	1.973
2	Ambal	1.113
3	Ayah	885
4	Buayan	39
5	Buluspesantren	3.381
6	Gombong	4.478
7	Karanganyar	767
8	Kebumen	7.612
9	Klirong	3.967
10	Kutowinangun	1.114
11	Kuwarasan	1.205
12	Mirit	1.169
13	Padureso	457
14	Petanahan	1.527
15	Poncowarno	1.041
16	Prembun	1.106
17	Puring	2.002
18	Rowokele	1.461
19	Sempor	1.505
20	Sruweng	1.791
21	Bonorowo	878
22	Pejagoan	857
23	Karangsambung	1.388
24	Alian	3.504
25	Sadang	667
26	Karanggayam	503
	Total	**46.390**

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

11. Urusan Penanaman Modal

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang meliputi:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal
3) Program Pelayanan Penanaman Modal;
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapatdilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 49 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
18	**Penanaman Modal**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		**A**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Milyar Rupiah	397	564,646.202.367	142,22		
				1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	1	1	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan	a	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dok	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			Pariwisata								
			sda	b Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	kegiatan	1	1	100		
				2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	Dok	2	2	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah RUPM daerah kabupaten/kota	Dok	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			sda	b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasidan peluang usaha kabupaten / kota	dokumen	1	1	100		
				B. Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	dokumen	45	45	100		
				1 **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/ Kota**	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	kegiatan	4	4	100		
				a **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal**	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kabupaten / kota	dokumen	2	2	100		
				b **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	kegiatan	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
				C	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen	100	100	100		
				1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	persen	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan	a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	jumlah dokumen perizinan dan non- perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan	dokumen	1	1	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
			Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Terintegrasi secara Elektronik	berusaha terintegrasi secara elektronik						
			sda	b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Dok	650	650	100		
			sda	c Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	kali	10	10	100		
			sda	d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif	Keg	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
					daerah						
				D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	**persen**	100	100	100		
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	persen	100	100	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal	kali	60	60	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
			sda	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	kali	8	8	100		
			sda	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	kali	40	40	100		
				E	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi**	persen	100	100	100		
				1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6			7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Dok	2	2	100		
				F	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100		
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	dok	13	13	100		
				a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	7	7	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dok	6	6	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
					evaluasi kinerja perangkat daerah						
				2 Admiistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	47	47	100		
				a pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	47	47	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	80	80	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah BUlan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjnag urusan pemerintahan daerah	Jumla unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	21	21	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah pemeliharaan, jumlah biaya pajak kendaraan bermotor	unit	20	20	100		
				b Pemeliharaan	Jumlah unit	unit	10	10	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12
				Mebel	Mebel yang dipelihara						
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	50	50	100		
				d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	unit	1	1	100		

b. Keberhasilan

1. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA yang merupakan capaian IKU DPMPTSP dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 397.000.000.000 dan realisasi investasi sebesar Rp. 564.646.202.367atau prosentase capaian realisasi mencapai 142,22%. Peningkatan nilai investasi tahun 2022 naik 56,46% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp.488.529.005.110.
2. Adanya jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha melalui system OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau perizinan usaha berbasis resiko.
2. Peningkatan instrumen layanan yang memadai terimplementasi pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.
3. Peningkatan pemahaman mengenai informasi dan pemenuhan persyaratan dalam memperoleh izin berusaha serta melangsungkan kegiatan usahanya melalui peningkatan intensitas kegiatan pendampingan dan pembinaan perizinan berusaha.
4. Program penguatan tata kelola iklim usaha DPMPTSP Kab Kebumen (alur pengaduan dan penyelesaian kendala kegiatan usaha melalui satu pintu)

c. Permasalahan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 503/168 Tahun 2021 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, pelayanan pada masyarakat mempunyai SOP, memiliki durasi waktu tertentu dan penyelesaiannya merupakan unsur prioritas pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada penyelesaian tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 2163 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis yang didalamnya telah tersusun alur tahapan setiap kegiatan baik kegiatan penunjang IKU maupun kegiatan prioritasnya. Peta Proses Bisnis telah memiliki dokumen turunannya yaitu SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor 5003 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mencakup alur, waktu, dan tahapan setiap kegiatan/aktivitas yang sering terlaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah dilakukan publikasi dan legalitas melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP

Nomor 168 Tahun 2021 yang telah mencakup perizinan berusaha dan nonperizinan. Permasalahan lain yang terjadi adalah belum adanya aturan pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan kurangnya sinkronisasi penetapan atas pelaksanaan tersebut. Hal yang menjadi akar permasalahan diantaranya belum maksimalnya penyebarluasan informasi terkait pemberian fasilitas/insentif daerah, kurang selarasnya regulasi satu dengan lainnya, dan keterbatasan dokumen publik terkait peta potensi investasi dikarenakan keterbatasan fungsi penyusun data peta tersebut. Mempromosikan potensi daerah khususnya terkait dengan investasi merupakan salah satu pintu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, akan tetapi inovasi dari kemasan promosi penanaman modal yang masih flat dan kurang mendapat effort dari calon penanam modal, tetapi dalam usahanya DPMPTSP selalu melakukan pengembangan setiap tahunnya agar terciptanya strategi dalam mempromosikan Kabupaten Kebumen yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan teknologi yang semakin maju.

d. Upaya Mengatasi Permasalahan

. 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Telah dilaksanakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen berupa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan telah ditertibkan Keputusan Bupati Nomor 503/512 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal;

Telah dibangun Aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan SIPERI (Sistim Informasi Perizinan Terintegrasi) berupa GALAKSI (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi).

Telah diberikan apresiasi dalam rangka AUT (Anugrah Usaha Terbaik) Tahun 2022 kepada Kategori usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Telah diselenggarakan kegiatan promosi penanaman modal berupa IBIF (*International Business Invesment Forum*) Tahun 2022 dalam rangkaian kegiatan KIE (*Kebumen International Expo*) tahun 2022 dan diselenggarakan mini expo serta bisnis maching dan bisnis klinik pada kegiatan Invesment Centre.

Telah diikuti CJIBF (*Central Java Invesment Business Forum*) tingkat International yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Telah diikuti *Invesment Chalenge* yang diselenggarakan oleh BI (Bank Indonesia) Perwakilan Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berkontribusi pada CJIP (*Central Java Invesment Platform*) berupa IPRO (*Invesment Project Ready to Offer*) yang potensial di Pengembangan Investasi Kabupaten Kebumen.

. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan:

- Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen.
- Sosialisasi Fasilitasi Layanan Izin usaha bagi UMKM di Kecamatan Pejagoan
- Fasilitasi Perizinan Nomor Induk Berusaha dan Pangan Industri Rumah Tangga kepada Pelaku Usaha UKM di wilayah Kecamatan Sruweng,
- Perizinan dalam kegiatan Mubeng Kebumen Bupati Kebumen di wilayah Kecamatan Padureso.
- Penyelesaian Layanan Pengaduan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

e. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram padaPerjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Penanaman modal, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

f. Capaian Kinerja Urusan

Capaian indicator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 1 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang tetapkan di dalam RPJMD 2021-2026, dengan 1 indikator kinerja yang melampaui target RPJMD 2021-2026. Secara lengkap capaian kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 50 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Miliar	488.529.005.110	397.000.000.000	564.646 202.367	142,22%	413.000 000.000.
2. Nilai Survey (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai rata-rata tertimbang	89,49	0	93,01	93,01	0
3. Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	Izin	2415	0	0	0	0

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2022

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Target nilai investasi PMA/PMDN tahun 2022 adalah Rp.397.000.000.000 dengan Realisasi Rp. 564.646.202.367, hal ini menggambarkan Investasi di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan.

Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi utama Pemerintah Daerah adalah melayani masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal yang penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat, memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

Atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sehingga dengan kecepatan dalam penanganan keluhan tersebut, dapat ditangani dengan baik untuk memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Daerah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara.

Berbagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan oleh Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara dalam memberikan

pelayanan prima (excellent service) kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah mengukur kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik melalui IKM yang ditunjukan sesuai tabel diatas ada peningkatan 1,039% (93,01) dari tahun 2021 (89,49)

Dalam rangka memperoleh Indeks Pelayanan Publik Daerah dengan memperhatikan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang beragam, maka dalam melaksanakan SKM diperlukan metode survei yang sama. Prestasi penghargaan WBK KemenPANRB: Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik nilai A (Prima) atau Kategori Pelayanan Prima di tahun 2021 dan tahun 2022

- Zona Integritas KemenPANRB: mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) tahun 2022 oleh KemenPANRB yang merupakan langkah akselerasi capaian sasaran reformasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- Ombusman Kepatuhan Standar Pelayanan Publik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022 dengan nilai: 90.04, Zona Kepatuhan: Hijau, Kategori: A, Opini: Kualitas Tertinggi
- MCP: sampai dengan triwulan 3 mendapat nilai 89%

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan persyaratan; system,mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; tariff / biaya; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.Survei dilakukan secara online melalui web skm.kebumenkab.go.id setelah selesai mengurus perizinan yang diajukan, pemohon yang datang mengajukan perizinan secara langsung di DPMPTSP mengisi SKM di ajungan yang sudah disediakan dalam pengambilan data atau responden berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan secara prima dapat segera dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
3. Program Pengembangan Kepramukaan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 51 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**%**	**3,07**	**34,42**	**1.121,17**		
				1 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Keg	18	18	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Orang	725	725	100		\

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase prestasi Olahraga (persen)**	**%**	55	59,37	107,94		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	6	6	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lokasi	50	64	128		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	Kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				Kabupaten/Kota							
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	100	135	135		
				3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	10	17	170		
			peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	15	15	100		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	b Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	60	69	115	i	
				4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	Keg	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah unit organisasi yang dibina	Unit	3	3	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Cakupan prestasi kepramukaan**	**%**	**60**	**60**	**100**		
				1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Keg	13	12	92,31	Kegiatan estafet tunas kelapa tidak dapat dilaksanakan (dari provinsi diundur tahun 2023)	Koordinasi dengan provinsi
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan.	Orang	6.491	4.143	63,82	Kegiatan estafet tunas kelapa tidak dapat dilaksanakan (dari provinsi diundur tahun 2023)	Koordinasi dengan provinsi

b. Permasalahan

Kegiatan estafet tunas kelapa tidak dapat dilaksanakan (dari provinsi diundur Tahun 2023).

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara koordinasi secara intensif dengan provinsi dikarenakan estafet tunas kelapa yang diagendkan merupakan kegiatan tingkat provinsi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kepemudaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 430,36% atau kategori hasil sangat tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 112,46%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja adalah 112,46 atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan kepemudaan dan olahraga melalui pelaksanaan program diatas adalah persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga, yang kesemuanya mencapai target, bahkan persentase organisasi pemuda yang aktif melebihi target RPJMD, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 52 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	34,42	3,07	34,42	1.121,17	4,60
Persentase Prestasi Olahraga	%	66,66	55	59,37	107,94	70

Pada indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif realisasinya sebesar 34,42% dari target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 3,07% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 1.121,17%, Sedangkan sasaran persentase prestasi olahraga realisasinya

sebesar 59,37% atau dengan kata lain capaian kinerjanya sebesar 107,94%.

Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dihitung dengan rumus jumlah organisasi pemuda yang aktif/ jumlah seluruh organisasi pemuda x 100%. Selanjutnya untuk persentase prestasi olahraga dihitung dengan rumus jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi (mendapat medali emas/perak/perunggu ditingkat provinsi dan nasional)/ jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga x 100%.

Tabel 3. 53 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi

Tahun	Capaian Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		Capaian Prestasi Olahraga	
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi **(**mendapat medali emas/perak/perunggu ditingkat provinsi dan nasional)	Jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga
2020	42	122	-	-
2021	42	122	16	24
2022	42	122	19	32

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2022

13. Urusan Statistik

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 54 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Statistik**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1**	**A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	dokumen	1	1	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	OPD	51	51	100		

b. Permasalahan

Belum semua produsen data (OPD) mengumpulkan data tepat waktu.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan statistik.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Statistik dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan *website* satu data. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 55 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase OPD yang Mengisi *Website* Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100

Sumber : *DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2022*

Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2022 adalah seluruh OPD di Kabupaten Kebumen mengisi portal satu data sesuai SOP dan tersedianya Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

14. Urusan Persandian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Prioritas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 56 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Persandian**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		A **PPROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan**	%	**38,91**	39,56	101,68		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	38,91	39,56	100,68		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Desa dan Kelurahan	179	182	101,68		
			Sda	b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda	Desa dan Kelurah	179	182	101,68		

				Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	an						

b. Permasalahan

Beberapa desa belum mempunyai SSL (*Secure Socket Layer*) yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara website dan browser.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Persandian dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 101,68% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 101,68%, dengan demikian tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 101,68% atau sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 57 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	35,65	38,91	39,56	101,67	100

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2022

Capaian kinerja urusan persandian selama periode 2022 antara lain terlaksananya penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala OPD dan 182 Kepala Desa/Kelurahan serta implementasi tanda tangan elektronik pada Tata Naskah Dinas Elektronik dalam aplikasi e letter.

15. Urusan Kebudayaan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pengembangan Kebudayaan; dan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 58 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALA
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	**Kebudayaan**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**		**A**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Kesenian yang Dikembang kan (%)**	**%**	**28,13**	**42,86**	**152,36**		
				1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	%	26	33,33	128,19		
			Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan opengov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaaan Kampung Jawa Kebumen	Paket	1	1	100,00		
						Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen	Kali	1	1	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALA
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			sda	b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina	Orang	50	50	100,00		
						Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen	Orang	50	50	100,00		
						Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan	Orang	50	50	100,00		
				2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	%	100	100	100,00		
			sda	a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggara kan (kali)	kali	17	17	100,00		
				b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jenis)	jenis	25	25	100,00		
22	**Kebudayaan**	**Dinas Pariwisata**		**A**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Kesenian**	**%**	**28,13**	**42,86**	**152,36**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALA
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		dan Kebudayaan				**yang Dikembang kan (%)**						
				1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	%	26	33,33	128,19		
			Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan opengov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaaan Kampung Jawa Kebumen	Paket	1	1	100,00		
						Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen	Kali	1	1	100,00		
			sda	b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina	Orang	50	50	100,00		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	%	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALA
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen	Orang	50	50	100,00		
						Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan	Orang	50	50	100,00		
				2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	%	100	100	100,00		
			sda	a	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggara kan (kali)	kali	17	17	100,00		
				b	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (jenis)	jenis	25	25	100,00		

b. Permasalahan

Dalam melaksanakan Program, kegiatan maupun sub kegiatan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun sub Kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Mengembangkan kesenian dan kebudayaan asli Kabupaten Kebumen serta melestarikan dan mengelola cagar budaya Kabupaten Kebumen.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian program adalah 137,42% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 118,09%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 127,76% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2022 sebanyak 130 buah dibandingkan tahun 2020-2021 hanya 91 buah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kebumen.

Tabel 3. 59 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2022

NNo	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	30,00	5,05	34,89	139,28%	43,05

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2022

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 34,89% dengan capaian kinerja 139,28% atau kategori capaian BAIK SEKALI (BB)

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase budaya yang dilestarikan tahun 2022 lebih tinggi 122,49% dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 81,04 % Indikator Persentase budaya yang dilestarikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 60 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2022

Tahun	persentase kesenian yang dikembangkan	persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Capaian %
2020	40,00	21,98	30,99
2021	60,00	0,00	30,00
2022	42,86	26,92	34,89

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan , dengan Rumus : jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 61 Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan

Tahun	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata	Capaian %
2020	20	91	21,98
2021	0	91	0
2022	35	130	26,92

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Dari tabel diatas pada tahun 2020 yang terpasang papan nama ada 20 objek cagar budaya/diduga cagar budaya dari 91 objek yang terdata. Pada tahun 2021 karena ada pandemi Covid19 jadi hampir semua kegiatan terhenti, karena ada recofusing anggaran. Dan ditahun 2022 objek yang terpasang papan nama sejumlah 35 objek cagar budaya/ diduga cagar budaya , dari 130 objek yang terdata. Jadi jumlah yang objek cagar budaya/ diduga cagar budaya yg sudah terpasang sampai dengan tahun 2022 sejumlah 55 objek cagar budaya/diduga cagar budaya.

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan, dengan rumus: Jumlah kebudayaan /jumlah kegiatan x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 62 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan

Tahun	Jumlah kebudayaan	Jumlah kegiatan	Capaian %
2020	2	5	40,00
2021	3	5	60,00
2022	3	7	42,86

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

Capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum kinerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan penyesuaian pelaksanaan kegiatan utamanya yang berupa festival dan kegiatan dalam bentuk fisik dilaksanakan mengikuti protap kesehatan dan tepat waktu.

16. Urusan Perpustakaan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pembinaan Perpustakaan; dan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 63 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Perpustakaan**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		**A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa.**	%	12,89	18,69	144,99	-	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah / Kabupaten	%	32,2	32,2	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi.	unit	5	5	100	-	-
				b Sub kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM perpustakaan binaan yang meningkat kapasitas/kompetensinya.	orang	25	25	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	c Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	Buku	1.000	1.000	100	-	-
				2 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan	%	19,4	19,4	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.	Jumlah pelayanan perpustakaan ekstensi	kali	60	60	100	-	-
				b Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pemasyarakatan Minat Baca	kegiatan	16	16	100		
				B PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno**	%	40	40	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah naskah kuno yang terdaftar di perpustakaan	%	100	100	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas	a Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.	Jumlah Naskah kuno yang dialihmediakan	1	1	1	100	-	-

b. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan yaitu adanya refokusing anggaran, sehingga terjadi penurunan target dari perencanaan awal. Hal tersebut mempengaruhi unsur pembangun pada indeks Pembangunan Literasi masyarakat kebumen.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu dengan melaksanakan penguatan di unsur pembangun indeks literasi pembangunan masyarakat yang lain sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima oleh Perpustakaan Binaan/Pustakawan/Penggiat literasi yang dibina Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. adapun penghargaan yang dicapai sebagai berikut pada Tahun 2022 :

1. Juara I Tingkat Nasional Lomba Inovasi Literasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Dr Azam Syukur R Pengasuh Ponpes Al Kamal Kuwarasan)
2. Juara 1 Lomba Menulis Puisi Jenjang SMP/MTs Tingkat Nasional (NYalanesia) Tahun 2022 (Krensa Jacinda Listyanto, Pelajar SMPN 1 Gombong)
3. Juara 1 Lomba Menulis Puisi Jenjang SD/MI Tingkat Nasional (NYalanesia) Tahun 2022 (Fara Lintang Kiani, Pelajar SDN 4 Kutosari)
4. Juara Harapan II Pustakawan Madrasah terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah.(Puji Astuti, S.Pd,M.Pd)
5. Juara 2 Pengembangan Website Literasi Sekolah Nasional (Nyalanesia) Tahun 2022 (SMPN 5 Kebumen)
6. Perpustakaan Terakreditasi secara nasional antara lain:
    - Perpustakaan MTSN 1 Kebumen
    - Perpustakaan MTsn 5 Kebumen

- Perpustakaan SMPN 2 Kebumen
- Perpustakaan SMPN 3 Gombong
- Perpustakaan SMKN 1 Puring
- Perpustakaan SDN 4 Kutosari

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan 12,89 dan terealisasi 18,69 atau telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. hal ini dikarenakan banyak melakukan inovasi layanan perpustakaan (Lomba video Literasi, Kerjasama dengan Penggiat literasi, Komunitas, Aktif dimedia sosial) Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 64 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	18,41	12,89	18,69	144,99	13.06

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2022

Cara menghitung capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah (Jumlah Semua Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek masyarakat x 100). Semakin banyak unsur pembangun Literasi Masyarakat maka semakin baik pula Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan. dari target Kinerja tahun 2022 yaitu 12,89 terealisasi menjadi 18,69 sehingga capaian yang didapat 144,99%.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 65 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	993	998
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang)	286.211	287.364
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	45.844	46.844
4	Prosentase Pengunjung Perpustakaan %	29,33	29,42

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2022

17. Urusan Kearsipan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Program Pengelolaan Arsip. Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 66 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Kearsipan**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		**A PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku**	%	71,57	72,35	101,53	-	-
				1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	46	46	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan	OPD	30	30	100	-	-
			Sda	b Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	Kegiatan	3	3	100	-	-
				2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaam arsip statis Daerah Kabupaten Kebumen	Kegiatan	4	4	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	kali	4	4	100	-	-
				3 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	Arsip	24	24	100	-	-
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi Arsip	kegiatan	5	5	100	-	-

b. Permasalahan

Belum ditemui adanya permasalahan yang menghambat pencapaian target.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya peningkatan tata kelola kearsipan di obyek binaan dilakukan dengan peningkatan Sarpras dan SDM kearsipan serta pendampingan secara intens baik secara tatap muka atau langsung dan melalui layanan konsultasi via Whatshap grup.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kearsipandapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori HasilSangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku dan Prosentase peningkatan layanan informasi arsip.

Tabel 3. 67 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2002

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	68,94	71,57	72,35	101,53	80,20

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2022

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2021-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip baku hanya 68,94 % atau 353 unit kerja, Namun pada tahun 2022, unit kerja yang telah menerapkan arsip baku telah mencapai 369 unit kerja atau 72,35%. **Dari target yang telah direncanakan,**

Urusan Kearsipan telah mencapai 101,53.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk terwujudnya unit kerja yang menerapkan arsip secara baku yaitu melalui pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomatis kepada para pengelola arsip di OPD. Selain itu, untuk mengembangkan serta meningkatkan kapasitas pengelola kearsipan di desa juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan dan pendampingan kearsipan kepada Sekretaris Desa. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 68 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

URAIAN	2021	2022
1. Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	353	369
2. Jumlah OPD	512	510
3. Presentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	68,94%	72,35%

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2022

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Propinsi Jawa Tengah sebagai Peringkat I, dengan nilai 81,58 atau kategori A (memuaskan). Prestasi tersebut juga menempatkan Kabupaten kebumen di peringkat 9 besar sebagai Kabupaten / Kota terbaik hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2022.

18. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan;
4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 69 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**	**Dinas Laingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan (DLHKP)**		**A PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**2,5**	**2,16**	**86,49**		
				1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**ton**	**9.136,73**	**9.138,32**	**100,02**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Subkeg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun/ direhabilitasi	lokasi	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Unit penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	unit	2	2	100		
					Terselesaikannya Pembangunan TPI Perintis TPI Tegalretno Kec. Petanahan-Kebumen	%	0	0	0	Lokasi pembangunan tidak layak untuk dibangun karena terjadi abrasi	Anggaran untuk pembangunan TPI Tegalretno dihapuskan di anggaran perubahan
					Terselesaikannya Perluasan Area dan Pembangunan TPI Argopeni	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Perluasan parkir motor dan kapal TPI Karangduwur	%	100	100	100		
					Terselesaikannya Pembangunan Rumah Mesin TPI Tegalretno	%	0	0	0	Lokasi pembangunan tidak layak untuk dibangun karena terjadi abrasi	Anggaran untuk pembangunan TPI Tegalretno dihapuskan di anggaran perubahan
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis	b Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap	unit	23	23	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata								
				2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan**	Kelompok	**37**	**37**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian	a Subkeg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Kelompok	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Pari wisata								
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pari wisata	b Subkeg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pemantauan	Kelompok	25	20	80	Refocusing anggaran	Dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
				3 Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional**	**unit**	**8**	**8**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya	a Subkeg. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana	unit	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat		operasional						
					Tersedianya laporan pelayanan TPI	Dokumen	1	1	100		
				4 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kapal perikanan yang berijin**	**%**	**31,05**	**34,79**	**112**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar	a Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang diterbitkan	Dokumen	476	476	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat								
				B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**10,00**	**9,64**	**96,36**		
				1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan**	Dokumen	**100**	**100**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Subkeg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	Dokumen	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah bulan pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya	bulan	12	12	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Peningkatan produksi perikanan budidaya**	**ton**	**92,66**	**93,62**	**101,03**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Subkeg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan	Kelompok	78	78	100		
					Jumlah total benih ikan yang disediakan/ dihibahkan	ribu ekor	826	826	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Subkeg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan	Kelompok	50	50	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	c Subkeg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan	Kelompok	50	50	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Peserta Kursus Pelatihan Tambak udang	orang	75	75	100		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	d Subkeg. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas yang mendapatkan sarana operasional	lokasi	2	2	100		
					Tersedianya benih dengan mutu terjamin	juta ekor	8,6	5,37	62,44	Dampak banjir, induk dan benih ikan banyak yang hilang	Melakukan verifikasi lokasi kelompok pembudidaya ikan secara lebih cermat untuk menghindari resiko banjir dan melalkukan sosialisasi terhadap Pokdakan agar tidak membuat

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kolam ikan yang tidak berlokasi di daerah rawan banjir
					Nilai Produksi Benih Ikan di BBI Kab.Kebumen	juta rupiah	137	87,60	63,94	Dampak banjir induk dan benih ikan sebagian banyak yang hilang	Melakukan verifikasi lokasi kelompok pembudidaya ikan secara lebih cermat untuk menghindari resiko banjir dan melalkukan sosialisasi terhadap Pokdakan agar tidak membuat kolam ikan yang tidak berlokasi di daerah rawan banjir
					Jumlah unit Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	unit	5	5	100		
				C PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian**	**%**	**71,43**	**71,43**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sumberdaya perikanan						
				1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan**	**lokasi**	**2**	**2**	**100**		
			Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	a Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	lokasi	2	2	100		
					Tersedianya Laporan Pengawasan/ Pelestarian Sumberdaya Ikan	Dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					di Perairan Umum Daratan (PUD)						
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan**	**%**	**25,50**	**110,54**	**433,49**		
				1 Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	**Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan**	Kelompok	**18**	**18**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pari	a Subkeg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	Kelompok	18	18	100		

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wisata								
				2 Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam**	**ton**	**90,54**	**335,729**	**370,81**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Subkeg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN	Kegiatan	3	5	167		
			Pemulihan Perekonomian Daerah	b Subkeg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan	Kelompok	18	1	5,56%	Refocusing Anggaran	Menganggarkan kembali di tahun berikutnya

No.	URUSAN PEMERINTA-HAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Daerah Kabupaten/Kota	pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana usaha						
					Jumlah Poklahsar yang terfasilitasi	paket	1	1	100		
					Jumlah produksi Garam Kab. Kebumen	ton	151,851	136,265	89,74	Dampak banjir	Melakukan pengendalian banjir
					Jumlah Nilai Produksi Pengolahan hasil perikanan Kab. Kebumen	Milyar Rupiah	8,612	38,314	444, 89		

b. Permasalahan

Permasalahan sektor perikanan budidaya yang dialami adalah rendahnya kemampuan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan. Keterbatasan ini mencakup permodalan usaha yang terbatas dan pengetahuan teknis yang kurang memadai. Hal ini tentu membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya pengalokasian bantuan bagi para pembudidaya ikan, baik untuk sarana dan prasarana pengembangan budidaya ikan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat teknis budidaya ikan di lingkungan internal Dinas serta pengiriman sejumlah personel ke Balai Latihan Kerja Jepara untuk pembudidayaan udang.

c. Upaya Mengatasi Masalah

Guna mengatasi permasalahan berkurangnya anggaran pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran kembali pada tahun 2023 bagi para pelaku pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dibatalkan tahun 2022. Dengan demikian diharapkan para pembudidaya ikan dapat mengatasi permasalahan permodalan. Selain itu upaya meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar anggota kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) dengan melakukan Penilaian secara rutin dan evaluasi guna meningkatkan produktivitas dan akses informasi pemasaran.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Keluatan dan Perikanan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 183,38% atau kategori Hasil Sangat Tinggi, hal ini menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian program yang capaiannya sangat tinggi atau lebih dari 100%, antara lain program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan yaitu sebesar 433,39% hal tersebut dikarenakan jumlah pengolah produksi usaha perikanan bertambah, di tahun 2021 sebanyak 70 kelompok pada tahun 2022 menjadi sebanyak 200 kelompok. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan

Garam, capaian melebihi 100% 370,81% dikarenakan metode perhitungan berubah dari sensus Poklahsar menjadi sensus Unit Pengolahan Ikan (UPI) Perorangan dengan total 300 UPI.

Rata-rata capaian kegiatan adalah 127,99%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 155,69% atau kategori sangat tinggi.

Capaian kegiatan yang sangat tinggi antara lain disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang capaiannya lebih dari 100%, sub kegiatan tersebut antara lain Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN capaian sebanyak 167%, hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi kepada masyarakat, antara lain pada saat pelaksanaan Kebumen International Ekspo (KIE), Gemarikan (2 kali), Pelatihan pemberian bantuan ikan (Peduli Sosial BKIPM), serta Sosialisasi Gemarikan Provinsi. Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Kebumen, capaian sebesar 444,89% hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah kelompok pengolahan ikan.

e. Capaian Kinerja Urusan

Terdapat 4 indikator Capaian kinerja Urusan kelautan dan perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026, akan tetapi 1 indikator sejak tahun 2016 berperpindahan kewenangan dari daerah ke propinsi). Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja adalah :

Tabel 3. 70 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	REALISASI 2021	TAHUN 2022			T.AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Peningkatan produksi benih ikan	Juta Ekor	37,19	36,23	35,47	97,90	36,23
2	Peningkatan Produksi ikan	ton	12.867,53	12.368,71	12.493,43	101,01	12.055,59
	- Perikanan Tangkap	ton	9.646,66	9.136,73	9.138,32	100,02	9.025,59
	- Perikanan Budidaya	Ton	3.220,87	3.231,98	3.355,11	103,72	3.030
3	Peningkatan produksi hasil olahan ikan	Ton	452,17	371,37	722,69	194,60%	316,80

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	REALISASI 2021	TAHUN 2022			T.AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
4	Angka Konsumsi Makan Ikan	Kg/ka/ta	24,54	24,77	27,19	110%	23,58
5	Peningkatan Produksi Garam	Ton	155,95	151,851	136,26	90%	138

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2022

19. Urusan Pariwisata

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1. Program Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 71 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UP MENG PERMA
										TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
26	**Pariwisata**	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**		**A**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata**	**%**	82,77	82,77	100		
					1		**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)**	**Keg**	**1**	**1**	100		
			Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan opengov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana			a	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	orang	450	450	100		
					2		**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana destinasi**	**unit**	**9**	**9**	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UP MENG PERMAS
										TARGET	REALISASI	%		
								pariwisata yang dikelola						
			sda			a	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota	Dokumen	2	2	100		
			sda			b	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola	destinasi	5	5	100		
			sda			c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					3		**Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan**	%	100	100	100		
			sda			a	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terbina/ sosialisasi (bidang)	bidang	2	2	100		
			sda			b	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis)	obwis	8	8	100		
				B			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	%	19	67,94	357,58		
					1		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara**	orang	1.200.130	1.623.865	135,31		
			sda			a	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang	Keg	10	10	100		

							Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	dilaksanakan (kegiatan)					
				C			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina**	**%**	**20**	**20**	100	
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Keg**	**1**	**1**	100	
			sda			a	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar (orang)	orang	150	150	100	

b. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan wisatawan berkunjung ke obyek wisata yang baru
2. Pengelolaan obyek wisata yang dikelola oleh non-pemerintah (wisata pantai hanya dipungut retribusi parkir)
3. Masih adanya pungli oleh oknum diluar petugas pemerintah yang mengakibatkan potensi pendapatan hilang tidak masuk kas pendapatan daerah

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Menggencarkan kegiatan event promosi melalui media jejaring sosial, media cetak/elektronik, maupun pertunjukan event-event/festival di obyek-obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan utamanya pada *peak season* pada Idul fitri dan liburan sekolah.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata dapat diketahui rata-rata capaian program adalah 185,86% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 107,06%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 146,46% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan pariwisata ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata.

Tabel 3. 72 Persentase Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
		Target	Realisasai	Capaian	
Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	1,9	3,55	186,84	2,24

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2022

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 jumlah kontribusi PAD meningkat 3,55% dari target 1,9% Hal ini disebabkan mulai pulihnya dari Pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, serta kebijakan penutupan obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah dan yang dikelola oleh masyarakat sudah dibuka untuk umum.

20. Urusan Pertanian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (Enam) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5) Program Perizinan Usaha Pertanian
6) Program Penyuluhan Pertanian

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 73 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pertanian. Mengembangkan kluster/ kawasan pertanian	A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	11,20	15,75	140,63	-	-
				1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	%	63,00	64,18	101,87	-	-
				a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian	Unit	196,00	196,00	100	-	-
				b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah dokumen pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida	Dokumen	2	2	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	%	0,79	0,15	18,99	Sudah tidak tersedianya bibit kelapa GEK yang bersertifikat pada triwulan IV, selain itu terdapat bantuan bibit Kelapa GEK dari anggaran APBN dengan indeks harga yang lebih tinggi dari APBD Kebumen	Pengadaan bibit kelapa GEK mulai akan dilakukan pada triwulan III sehingga bibit masih lebih tersedia dan mengajukan usulan perubahan indeks harga bibit Kelapa GEK Tersebut
				a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah lokasi sumber bibit Kelapa GEK	Lokasi	9	9	100	-	-
				b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas areal tanam pertanian yang mendapatkan fasilitasi	Ha	203	178	87,68	tidak terealisirnya pengadaan Bibit Kelapa Genjah Entog Kebumen (GEK) sebanyak 2.500 batang untuk luasan 25 hektar dikarenakan pada saat pengadaan ditriwulan IV sudah tidak tersedia bibit yang bersertifikat	Pengadaan bibit kelapa GEK mulai akan dilakukan pada triwulan III sehingga bibit masih lebih tersedia dan mengajukan usulan perubahan indeks harga

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan juga disebabkan bantuan bibit Kelapa GEK dari anggaran APBN dengan indeks harga yang lebih tinggi dari APBD Kebumen	bibit Kelapa GEK Tersebut
				c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitasi pasca panen	Kelompok	21	21	100	-	-
				3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	%	122,33	139,70	114,20	-	-
				a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas Gizi pakan ternak	Kelompok	6	6	100	Tidak semua peternak memiliki lahan rumput/HNPT unggul; HPT yang tersedia sebagian besar berupa	Pemberian Bantuan Bibit Rumput/HPT Unggul kepada KTT penerima bantuan ternak; Pelatihan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										limbah pertanian seperti Jerami padi	pengolahan pakan dengan bahan pakan HPT Limbah (jerami dll)
				4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	%	10	14,50	145,00	Keterbukaan pengecer obat hewan masih kurang	pendekatan dan pembinaan
				1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah dokumen pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Dokumen	1	1	100	-	-
				5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	%	3,62	3,81	105,25	-	-
				a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak	Buah	2.000	2.000	100	-	-
				b. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Bibit Ternak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat	Ekor	500	503	100,60	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					keterangan layak bibit (SKLB) dan LS Pro						
				B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	20	17,52	87,60	Penyesuaian pagu anggaran	
				1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen laporan prasarana pendukung pertanian lainnya	Dokumen	2	2	100	-	-
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen laporan prasarana pendukung pertanian lainnya	Dokumen	2	2	100	-	-
				2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	65	46	70,77	-	-
				a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah unit Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	Unit	1	1	100	-	-
					Jumlah unit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	13	13	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jaringan Irigasi Usaha Tani						
					Jumlah unit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Unit	3	3	100	-	-
				b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	2	2	100	-	-
					Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	19	19	100	-	-
				c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah unit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Unit	4	4	100	-	-
				d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	2	100	-	-
				e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai	Jumlah Balai Penyuluh/Puskeswan di Kecamatan	Unit	6	2	33,33	Pengalihan nomenklatur	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	serta sarana pendukungnya yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan						
				f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah unit Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	4	5	125	-	-
				3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100	-	-
				a. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kecamatan	26	26	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	2,81	- 2,93	-104,27	Meningkat jumlah kasus PHM karena adanya PMK membuat penurunan kasus menjadi minus	Melaksanakan program nasional penanganan PMK sesuai aturan berlaku (Pencegahan, Sosialisasi, Pengobatan, vaksinasi dan surveylans)
				1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	1.901	1.967	103	Meningkatnya Kasus penyakit Hewan menular pada tahun 2022 karena adanya PMK dimana virus PMK sangat mudah dan cepat menular yang terjadi skala nasional	Melaksanakan program nasional penanganan PMK sesuai aturan berlaku (Pencegahan, Sosialisasi, Pengobatan, vaksinasi dan surveylans)
				a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya	Ekor	7.500	6.855	91,40	Adanya kasus PMK petugas Keswan fokus pada penanganan dan vaksinasi PMK, sehingga pelayanan kesehatan hewan	Target vaksinasi 90% diupayakan, sehingga kasus PMK bisa terkendali dan kegiatan puskeswanlink

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										lainnya menurun karena petugas berhati-hati agar tidak menjadi media penular PMK	dapat dilaksanakan kembali.
				2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	Ekor	3.200	2.526	78,94	Jumlah pemeriksaan hewan untuk sampel PHM secara anggaran sudah digeser utk penanganan PMK namun untuk fisiknya dapat tercapai dari target 500 tercapai 980 dengan biaya APBN, sedangkan penmeriksaan hewan untuk SKKH target 2400 hanya terealisasi sebanyak 1546 karena SKKH dikeluarkan sd bulan Mei saja dan sejak juni sd akhir desember tdk	Melaksanakan program nasional penanganan PMK sesuai aturan berlaku (Pencegahan, Sosialisasi, Pengobatan, vaksinasi dan surveylans)

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dikeluarkan SKKH karena adanya wabah PMK untuk pembatasan lalin ternak	
				a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner	Buah	500	980	196	Anggaran untuk uji sampel dihapus untuk penanganan PMK (untuk sarpras vaksinasi, sosialisasi), sehingga tidak dilakukan uji sampel (500 sampel ternak SKLB), tetapi terdapat anggaran dari APBN untuk pengujian sampel PMK, yang terealisasi 980 sampel	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diawasi	Ekor	2.400	1.546	64,42	Adanya pembatasan Lalu lintas hewan berdampak pada tidak diterbitkannya SKKH sejak bulan Mei sehingga target SKKH hanya terealisasi sampai dengan Mei 2022	syarat penerbitan SKKH sesuai Surat Edaran Satgas PMK nomor 8 Tahun 2022 bahwa sapi yang boleh dilalulintaskan adalah yang sudah di vaksin 1 dan vaksin 2 (untuk ternak yang akan dikembangbiakan atau dibibitkan)
				3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	1.810	1.270	70,17	Penyesuaian pagu anggaran	-
				a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	Kali	500	1.270	254	Medik veteriner terfokus pada penanganan PMK sehingga untuk kasus penyakit lain menjadi tidak mencapai target	penyesuaian kondisi

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit	4	4	100	-	-
				a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang didampingi	Unit	4	4	100	-	-
				b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	Buah	100	100	100	-	-
				5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan	Kali	6	6	100	-	-
				a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan	Kali	6	6	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	8,83	2,30	26,05	Tidak terealisirnya luas area yang dijamin AUTP dikarenakan ada refocusing. Dasar dari Surat Distanbun Provinsi Jawa Tengah No 005/23260 tanggal 27 Juni 2022	Untuk mencapai target diharapkan untuk mengusulkan anggaran dari APBD Kabupaten
				1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	7.850	2.150	27,39	Tidak terealisirnya luas area yang dijamin AUTP dikarenakan ada refocusing. Dasar dari Surat Distanbun Provinsi Jawa Tengah No 005/23260 tanggal 27 Juni 2022	Untuk mencapai target diharapkan untuk mengusulkan anggaran dari APBD Kabupaten
				a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas area yang dikendalikan dari serangan OPT	Ha	350	350	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	Ha	7.500	1.501	20,01	Tidak terealisirnya luas area yang dijamin AUTP dikarenakan ada refocusing. Dasar dari Surat Distanbun Provinsi Jawa Tengah No 005/23260 tanggal 27 Juni 2022 yang tadinya 7600 ha menjadi 5218 ha dan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No B-175/SR.210/B/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022 menjadi 1400 ha.	Untuk mencapai target diharapkan untuk mengusulkan anggaran dari APBD Kabupaten
				E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100	100	100	-	-
				1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	-	-
				2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	%	100	100	100	-	-
				a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	%	100	100	100	-	-
				F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	%	56	56	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	skor	2,4	2,4	100	-	-
				a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh	Kegiatan	69	69	100	Anggaran hibah Loan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan di TW IV banyak dikurangi karena adanya potensi tidak dapat di-Reimburst (diganti oleh DJPK) di tahun 2023, sehingga beberapa kegiatan IPDMIP tidak dilaksanakan dan penyesuaian belanja pada pelaksanaan kegiatan IPDMIP	Efisiensi belanja dan mensinkronkan belanja pada kegiatan IPDMIP dengan belanja pada kegiatan Reguler, sehingga Output kegiatan tetap dapat dilaksanakan
				b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani dan gapoktan yang mengikuti kegiatan kapasitas dan kualitas	Kelompok	233	233	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kelembagaan taninya						
				c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pendataan Pertanian	Dokumen	26	26	100	-	-
				d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah kelompok tani/gapoktan yang membentuk Badan Usaha Milik Petani yang berbadan hukum	Kelompok	2	-	-	Tidak bisa di-spj-kan karena rekening belanja tidak sesuai	Akan dilakukan penyesuaian rekening belanja Tahun Anggaran 2023
				e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang	Unit	42	42	100	Anggaran hibah Loan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan di TW IV banyak dikurangi karena adanya potensi tidak dapat di-Reimburst (diganti oleh DJPK) di tahun 2023, sehingga beberapa kegiatan Sekolah Lapang (SL)	Kegiatan SL tetap dilaksanakan meskipun beberapa kegiatan SL tidak dianggarkan melalui anggaran APBD (IPDMIP) dengan cara swadaya petani

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										IPDMIP tidak dapat dibiayai/ dianggarkan.	
				e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang	Unit	42	42	100	Anggaran hibah Loan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan di TW IV banyak dikurangi karena adanya potensi tidak dapat di-Reimburst (diganti oleh DJPK) di tahun 2023, sehingga beberapa kegiatan Sekolah Lapang (SL) IPDMIP tidak dapat dibiayai/ dianggarkan.	Kegiatan SL tetap dilaksanakan meskipun beberapa kegiatan SL tidak dianggarkan melalui anggaran APBD (IPDMIP) dengan cara swadaya petani

b. Permasalahan

Berdasarkan tabel diatas, dari 6 (enam) program urusan pertanian, 3 (tiga) program tidak mencapai target, sedangkan dilihat dari capaian kegiatan dari 17 (tujuh belas) kegiatan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan tidak mencapai target.

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, capaian persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terealisasi 15,75% atau 140,63% dari target. Namun Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi terealisasi hanya 0,15% atau 18,99% dari target hal ini karena dikarenakan adanya penyesuaian anggaran (refocusing) dan tidak terealisirnya pengadaan Bibit Kelapa Genjah Entog Kebumen (GEK) sebanyak 2.500 batang untuk luasan 25 hektar disebabkan pada saat pengadaan ditriwulan IV sudah tidak tersedia bibit yang bersertifikat dan juga disebabkan bantuan bibit Kelapa GEK dari anggaran APBN dengan indeks harga yang lebih tinggi dari APBD Kebumen;
2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan indikator persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak hanya terealisasi 17,52% atau capaian 87,60% dari target 20%, dimana panjang pembangunan/ rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terealisasi 107.482 meter dari kebutuhan sepanjang 613.500 meter, hal ini dikarenakan adanya refocusing sehingga perlu menyesuaikan pagu anggaran.
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, indikatorprogram tersebut yaitu presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular dengan target 2,81% dari tahun sebelumnya ternyata realisasi capaiannya -2,93% (-104,27% dari target) yang artinya pada tahun initidak terjadi penurunan kasus tetapi justru terjadi peningkatan kasus sebesar 2,93% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kasus terjadi karena pada tahun ini terjadi wabah nasional Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hamper semua daerah di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Kabupaten Kebumen. Penyakit yang disebabkan virus ini muncul di kebumen sejak Mei 2022 dan sampai dengan akhir tahun terhitung kasus terlapor sebesar 802 kasus. Untuk kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) rutin jumlah kejadiannya sebesar 1.165 kasus namun karena penambahan kasus

PMK sebesar 802 sehingga kejadian kasus menjadi bertambah sehingga secara total kejadian kasus PHM menjadi 1.967 kasus, sedangkan pada Tahun 2021 hanya terdapat 1.911 kasus. Dengan adanya kasus PMK pelayanan kesehatan hewan juga menurun, hal tersebut disebabkan petugas kesehatan hewan fokus pada penanganan dan vaksinasi PMK, karena petugas berhati-hati agar tidak menjadi media penular PMK yang akan mengakibatkan wabah meningkat;

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terealisasi hanya 2,3% atau 26,05% dari target 8,83%, dimana hanya 2.150 Hektar dari luas lahan pertanian 93.448,53 Hektar. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya luas areal yang dijamin Asuransi Usahatani Padi (AUTP), dikarenakan ada refocusing atas dasar surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No 005/23260 tanggal 27 Juni 2022 bahwa yang tadinya kuota AUTP di Kabupaten Kebumen seluas 7.600 Hektar menjadi hanya 5.218 Hektar, dan kuota dikurangi kembali hanya menjadi 1.400 Hektar berdasarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No B-175/SR.210/B/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022;
5) Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan indikator kinerja persentase rekomendasi izin usaha pertanian tercapai 100%, bahwa ajuan rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan sejumlah 243 telah dikeluarkan juga rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang dikeluarkan sejumlah 243 (Data bersumber dari www.oss.go.id data diolah);
6) Program Penyuluhan Pertanian, dengan indiaktor kinerja Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian, tercapai 100% dari target skor 56%. Merupakan hasil rata – rata persentase skor rata-rata nilai prestasi kerja penyuluh 67% dan persentase skor rata-rata penilaian kelas kelompok tani tercapai 45%. Namun dengan beberapa sub kegiatan dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan diantaranya:
    a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dan sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, terdapat anggaran hibah Loan kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan di TW IV banyak dikurangi karena adanya potensi tidak dapat di-Reimburst (diganti oleh DJPK) di tahun 2023, sehingga beberapa kegiatan IPDMIP tidak dilaksanakan dan penyesuaian belanja pada pelaksanaan kegiatan IPDMIP.

b) Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, jumlah kelompok tani/gapoktan yang membentuk Badan Usaha Milik Petani yang berbadan hukum 2 kelompok tidak terealisasi karena tidak bisa di-spj-kan karena rekening belanja tidak sesuai.

c) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, untuk rehab gedung BPP Ayah, Kebumen dan Klirong bersumber dana DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan pembangunannya karena terlambat pengajuan tender.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 mendukung upaya capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian, dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian, melaksanakan program dan kegiatan secara optimal diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan mengoptimalkan kegiatan dengan kegiatan penyediaan sarana pertanian untuk melaksanakan demplot sehingga dapat menambah luas area tanaman pertanian/ perkebunan. Pengadaan bibit kelapa GEK akan dilakukan pada triwulan III, agar bibit masih tersedia dan melakukan usulan perubahan indeks harga bibit kelapa.
2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, difokuskan dengan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung program Bupati Banyu Mili,
   a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
   b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
   c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, yaitu pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan melaksanakan Sosialisasi terus menerus oleh dinas dan Dukungan pemerintah desa terhadap program-program pemerintah termasuk vaksinasi PMK sangat diperlukan agar kasus PHM dapat ditekan. Melaksanakan program nasional penanganan PMK sesuai aturan berlaku (Pencegahan, Sosialisasi, Pengobatan, vaksinasi dan surveylans). Upaya pencapaian target 90% vaksinasi, sehingga kasus

PMK dapat terkendali dan kegiatan *puskeswanling* dapat terlaksana kembali.

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan mengoptimalkan pengadaan bahan pengendalian/ perlindungan tanaman pangan sesuai kebutuhan, gerakan pengendalian, sosialisasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan usulan anggaran dari APBD Kabupaten Kebumen untuk AUTP.
5) Program Penyuluhan Pertanian, pada indikator sub-sub kegiatan yang tidak tercapai karena tidak dapat dilaksanakan, untuk dapat diusulkan kembali dan perlu pencermatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Efisiensi belanja dan mensinkronkan belanja pada kegiatan IPDMIP dengan belanja pada kegiatan Reguler, serta dukungan swadaya masyarakat dalam kegiatan Sekolah Lapang, sehingga Output kegiatan tetap dapat dilaksanakan.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 tercapai 82,00% dengan gradasi nilai tinggi, capaian indikator kinerja program rata – rata hanya 58,34% dengan grandasi nilai rendah, dan capaian indikator kinerja kegiatan rata – rata 90,36% dengan grandasi nilai tinggi. Rata – rata capaian program dan kegiatan dengan grandasi tinggi, menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan rata – rata kinerja program gradasi rendah , menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

e. Capaian Kinerja Urusan

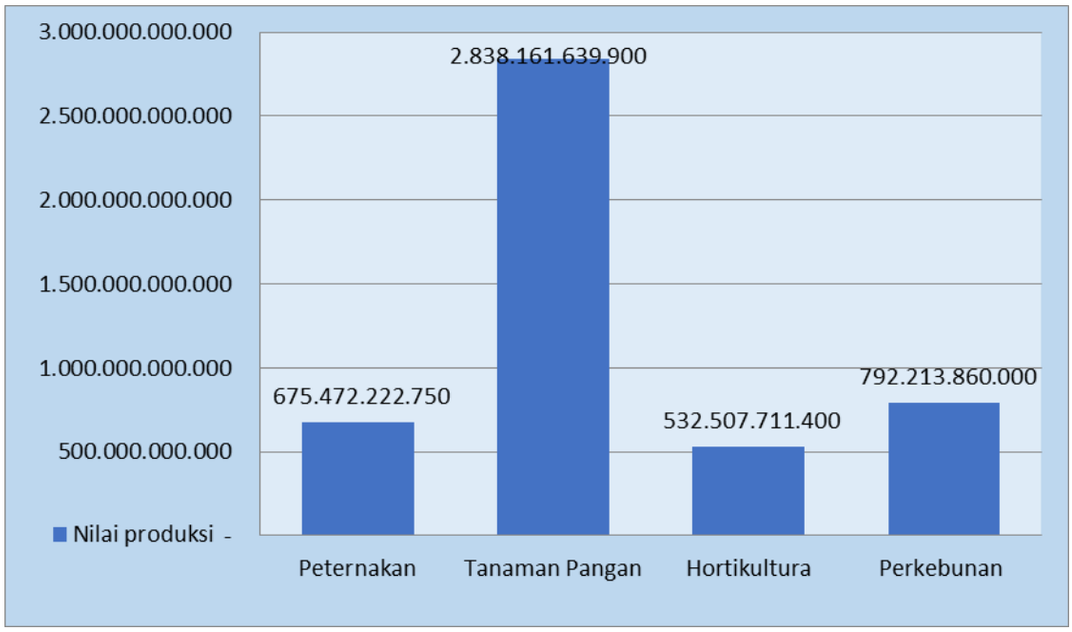
Keseluruhan program yang telah disampaikan, telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya nilai produksi pertanian Tahun 2022 untuk mendukung capaian tujuan yang merupakan sasaran daerah yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer, dengan capaian kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3. 74 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	Capaian	
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	Persen	12,89	2	6,68	334	6

Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2022

Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai melebihi target, yaitu sebesar 6,68% dari target 2%. Realisasi indikator tersebut diperoleh dengan perhitungan: (Nilai produksi tahun 2022-Nilai produksi pertanian Tahun 2020 sebesar Rp.4.535.602.068.918,- dan nilai produksi Tahun 2022 sebesar Rp.4.838.355.434.050,- yang terdiri dari nilai produksi peternakan (daging dan telur), tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, biofarmaka), dan perkebunan. Nilai produksi hasil pertanian Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2022

Gambar 3. 2 Nilai Produksi Pertanian di Kabupaten Kebumen

Dilihat dari tabel di atas diketahui kontribusi terbesar nilai produksi pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah dari komoditas

tanaman pangan sebesar 58,66 %, sedangkan untuk komoditas perkebunan sebesar 16,37%, komoditas peternakan sebesar 13,96%, dan komoditas hortikultura sebesar 11,01% dari total nilai produksi pertanian sejumlah Rp.4.838.355.434.050,-.

21. Urusan Perdagangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3) Program Pengembangan Ekspor;
4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 75 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Perdagangan**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**		**A PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola**	**Unit**	**4**	**4**	**100**		
				1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola**	**Unit**	**4**	**4**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Unit sarana dan distribusi perdagangan yang tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)		4	6	100		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	b Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM Pengelola	UPTD	6	4	100		
				2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Nilai pendapatan retribusi pasar, Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**UPTD**	**4**	**4**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keg	4	4	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	b Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keg	**4**	**4**	**100**		
				B PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar**	**%**	**1,50**	**1,50**	**100**		
				1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting**	**Kali**	**277**	**277**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Kali	277	277	100		
				2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar**	**%**	**1,5**	**1,5**	**100**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terinformasinya Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Hari	365	365	100		
				C PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Jumlah Nilai Ekspor IKM**	**Juta Rupiah**	**1,900**	**1,900**	**100**		
				1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Jumlah Pembinaan dan promosi pengembangan produk ekspor**	**keg**	**2**	**2**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Berkembangnya Jumlah Pembinaan dan promosi pengembangan produk ekspor	keg	2	2	100		
				D PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar luar negeri dan terciptanya eksportir (pameran trade ekspor indonesia)**	**%**	**53,97**	**53,97**	**100**		
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Terlaksananya alat UTTP yang tertera/ tera ulang**	**keg**	**2780**	**2780**	**100**		
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang	buah	2780	2780	100		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				E PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Cakupan Pemasaran Produk UMKM**	**%**	**68,77**	**68,77**	**100**		
				1 **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Terlaksananya peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri**	**keg**	**4**	**4**	**100**		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	a Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi akses pasar dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	keg	4	4	100		

b. Permasalahan

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Koordinasi lebih lanjut terkait penambahan anggaran dengan OPD terkait;
2) Melakukan optimalisasai promosi dan pemasaran melalui media online.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 76 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1. Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	10,3	5,42	6,26	115,50	4,45

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Persentase peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan dari target 5,42 telah terealisasi 6,26 atau 115,50%.

Adapun Data Pasar Tradisional di Kabupaten Kebumen disertai dengan kondisi pasar, sebagai berikut:

Tabel 3. 77 Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
1	Pasar Jatiluhur	Desa Jatiluhur Kec. Rowokele	2000	APBD	Rusak Berat
2	Pasar Karangjambu	Desa Karangjambu Kec. Sruweng	2005	APBD	Rusak Berat
3	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kec. Klirong	2000	APBD	Rusak Berat
4	Pasar Banyumudal	Desa Banyumudal Kec Buayan	2015	DAK	Baik
5	Pasar Ayah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	2011	TP	Baik
6	Pasar Karangsari	Desa Karangsari Kec. Buayan	2019	DAK	Baik
7	Pasar Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kec. Petanahan	2005	APBD	Rusak Berat
8	Pasar Candirenggo	Desa Candirenggo Kec. Ayah	2011	DAK	Baik
9	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kec.Rowokele	2015	DAK	Baik
10	Pasar Kritig	Desa Kritig Kec. Petanahan	2018	DAK	Baik
11	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kec. Kebumen	2012	TP	Baik
12	Pasar Kelapa Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2016	APBD	Rusak
13	Pasar Sruni	Desa Sruni Kec. Alian	2014	TP	Baik
14	Pasar Jogosimo	Desa Jogosimo Kec. Klirong	2018	APBD	Baik
15	Pasar Caruban	Desa Caruban Kec. Adimulyo	2017	DAK	Baik
16	Pasar Sidomulyo	Desa Sidomulyo Kec. Adimulyo	2019	DAK	Baik
17	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kec. Sruweng	2015	TP	Baik
18	Pasar Tamanrejo	Kel Tamanwinangun Kec. Kebumen	2007	APBD	Rusak Berat
19	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kec. Alian	2011	TP	Baik
20	Pasar Hewan Purbowangi	Desa Purbowangi Kec Buayan	2019	APBD	Baik
21	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kec. Ayah	2016	DAK	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
22	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan	2017	APBD	Baik
23	Pasar Ungaran	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun	2017	DAK	Baik
24	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kec. Puring	2017	TP	Baik
25	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kec. Kebumen	2018	APBD	Baik
26	Pasar Bocor	Desa Bocor Kec. Buluspesantren	2016	TP	Baik
27	Pasar Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2012	TP	Baik
28	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto Kec. Mirit	2012	APBD	Baik
29	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kec. Ambal	2011	TP	Baik
30	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kec. Petanahan	2013	APBD	Baik
31	Pasar Kabekelan	Desa Kabekelan Kec. Prembun	2018/2020	TP	Baik
32	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2012	APBD	Baik
33	Pasar Kutowinangun I	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2013	TP	Baik
34	Pasar Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2012	TP	Baik
35	Pasar Wonokriyo	Kel Wonokriyo Kec. Gombong	2018	APBD	Baik
36	Pasar Karanggayam	Desa Karanggayam Kec Karanggayam	2014	APBD	Baik
37	Pasar Burung dan Klithikan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2019	APBD	Baik
38	Pasar Kayu Gombong	Desa Plumbon Kec. Karangsambung	2011	TP	Baik
39	Pasar Hewan Karanganyar	Kel Karangayar Kec. Karanganyar	2015	DAK	Rusak
40	Pasar Kutowinangun 2 (Ps Lama)	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2022	TP	Rusak Berat

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Kenaikan Usaha Perdagangan berizin khususnya di bidang industri menggambarkan kesadaran pelaku usaha/industri akan pentingnya Izin usaha. Dengan ijin usaha yang dimiliki menandakan peluang pasar semakin besar, dikarenakan untuk produk produk IKM yang ingin masuk atau diperjualbelikan ke Pasar/toko Modern dipersyaratkan untuk memiliki izin sepertti SP-PIRT yaitu Sertifikat Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga yang dalam hal ini masuk ke kategori Usaha Mikro. Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengadakan fasilitasi SP-PIRT berikut uji lab yang dipersyaratkan.

22. Urusan Perindustrian

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 78 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Perindustrian**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**		**A PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Meningkatnya Pertumbuhan Industri IKM di wilayah Kab Kebumen**	**%**	**80**	**80**	**100**		
				1 **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan Industri Kab Kebumen**	**%**	**80**	**80**	**100**		
				a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi Sinkronasi dan pemantauan perwilayahan Industri	Keg	20	20	100		
				b Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya kegiatan perencanaan/ pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan)	Keg	2	2	100		
				c Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah perencanaan/ pembangunan kawasan Industri hasil tembakau (kegiatan)	%	2	2	100		
				d Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku Industri yang terbina (orang)	Kelompok	100	100	100		
				B PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya jumlah dokumen perijinan industri industri yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**100**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	STATUS	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi**	Dokumen	**160**	**160**	**100**		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang terfasilitasi perizinan	Dokumen	160	160	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Terinformasikannya Jumlah Dokumen Informasi Industri**	**Dok**	**1**	**1**	**100**		
				1 **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terinformasikannya IKM yang mendapatkan**	**IKM**	**1**	**1**	**100**		

b. Permasalahan

1) Pengalihan penggunaan/peruntukan lahan yang semula untuk Kawasan industri menjadi Shrimp Estate, dan penanggungjawab pelaksana kegiatan beralih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Perikanan dan Kelautan;

2) Keterbatasan SDM dalam rangka update data IKM

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait penggantian peruntukan penggunaan lahan;
2) Penambahan tenaga pendata untuk melaksanakan update data

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perindustrian, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Perindustrian ditunjukkan dengan indikator Capaian Perindustrian sebagai berikut :

Tabel 3. 79 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	8.31	6.15	3.07	45.92	4.93

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri dan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 masih ada Pandemi Covid-19 yang menyebabkan PPKM,

sehingga banyak industri yang berhenti atau beralih produk. Dampak lain yaitu banyaknya pekerja yang di PHK atau dirumahkan dan daya beli masyarakat menurun. Pada tahun 2022 para pelaku usaha baru mulai bangkit, membenahi usahanya, hal tersebut mempengaruhi Nilai PDRB industri pengolahan yang dari tahun 2019 sampai tahun 2021 turun dan mulai naik di tahun 2022.

23. Urusan Transmigrasi

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui program prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 80 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Transmigrasi**	**DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**		**A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Keluarga Miskin daerah bencana yang difasilitasi perpindahannya ke daerah transmigrasi**	**KK**	7	10	142,85		
				1 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Keg	7	10	142,85		
			Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Komoditas dan	a Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah	jumlah peserta Transmigrasi	Orang	7	10	142,85		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
			Kawasan Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kabupaten/ Kota							

b. Permasalahan

Terbatasnya Kuota alokasi penempatan transmigrasi pada tahun 2022 Kebumen mendapat alokasi sebanyak 7 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (2 KK)
- UPT Rano Kab.Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (5 KK)

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait Kuota transmigrasi dengan mempertimbangkan tingginya animo masyarakat yang mendaftar Program Transmigrasi:

1. Kebumen mendapat tambahan 2 Kepala Keluarga untuk tujuan UPT Watutinawu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena ada pengembalian kuota dari Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang.
2. Menempatkan 1 Kepala Keluarga ke UPT Bukit Aren Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 142,85% atau kategori sangat baik dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

e. Capaian Kinerja Urusan

pada tahun 2022 dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi, capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk Kabupaten Kebumen. Jumlah KK yang difasilitasi pada kurun waktu 2021-2026 cukup fluktuatif. Secara lengkap capaian kinerja urusan transmigrasi tersaji dalam tabel di berikut ini:

Tabel 3. 81 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertranmigrasi	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, 2022

3.1.3. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen tahun 2022 meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. Sekretariat Daerah

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
3) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 82 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Sekretariat Daerah**			**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Setda**	**nilai**	83	86,53	104		
				1 Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	dok	4	4	100		
				A Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	dok	2	2	100		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	dok	2	2	100		
				C Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	dok	1	1	100	-	
		Bagian Umum		1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	159	159	100		-
				B Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dok	4	4	100	-	-
		Bagian Umum		2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100	-	-
				A Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi kepegawaian	kegiatan	2	2	100	-	-
		Bagian Umum		3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100	-	-
				A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100	-	-
				B Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga	paket	1	1	100		
				C Penyediaan Bahan	Jumlah bulan	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik kantor						
				D Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dok	2	2	100		
				F Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	bulan	12	12	100		
				G Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang/kali	200	200	100		
		Bagian Umum		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	60	60	100		
				A Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebelair	unit	5	5	100		
				B Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	30	30	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	25	25	100		
		Bagian Umum		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				C Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	100		
				D Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
		Bagian Umum		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	136	136	100		
				A Penyediaan jasa	Jumlah unit	unit	109	136	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pemeliharaan, biaya pemelihar, pajak dan Perizinan aan dinas operasional atau lapangan	kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara						
				B Pemeliharaan mebel	Jumlah unit mebel terpelihara	unit	4	4	100		
				C Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peraatan dan mesin lainnya terpelihara	unit	15	15	100		
				D Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara	unit	8	8	100		
		Bagian Umum		7 Adminisrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	2	2	100		
				B Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya	paket	2	2	100		
				C Pelaksanaan Medical	Jumlah DH/WKDH	orang	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan keluarganya yang melaksanakan medical chek up						
				D Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional KDH dan WKDH	bulan	12	12	100		
		Bagian Umum		8 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah	bulan	12	12	100		
				A Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	bulan	12	12	100		
				B Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12	100		
		Bagian Prokopim		1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	layanan	8	8	100		
				A Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan Kegiatan Keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	layanan	3	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah publikasi Kegiatan Bupati dan Wakil	layanan	3	8	100		
				C Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen	layanan	3	8	100		
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				A Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	iklan layanan masyarakat tentang ketentuan bidang cukai di media cetak	kali	8	8	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	**B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai EKPPD**	**Nilai**	**2,61**	**3,3226**	127		
		Bagian Pemerintahan		1 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi tata Pemerintahan	kegiatan	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Penataan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	dok	1	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan	administrasi pemerintahan						
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan	dokok	2	3	100		
				C Sub KegiatanFasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	dok	2	3	100		
		Bagian Pemerintahan		2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama dengan pihak lainnya	dok	5	5	100		
				A Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen kerjasama daerah dengan pihak lain	dok	5	5	100		
		Bagian Kesra		1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	kegiatan	15	15	100		
				A Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan fasilitasi evaluasi,pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	keg	6	6	100		
				B Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	Jumlah Fasilitasi kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan	keg	7	7	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						
				C Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Pembinaan Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dok	5	5	100		
		Bagian Hukum		1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	kegiatan	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah	dok	550	550	100		
				B Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	perkara	12	12	100		
				c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	keg	6	6	100		
				C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Indeks kualitas kebijakan pembangunan**	**%**	**87**	88,73	102		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bagian perekonomian dan SDA		1 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	dokumen	4	4	100	1	
				A Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan monev pelaksanaan kebiajkan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Hasil Monitoring Kegiatan DBHCHi	dok	2	2	100		
				B Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	dok	1	1	100		
				C Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan energi da n air	dok	1	1	100		
				2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasipelaksanaan kebijakan perekonomian	dok	3	3	100		
				A Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Jumlah laporan monev pengelolaan BUMD dan BLUD	dok	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD							
				B Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen laporan monev pengendalian dan distribusi perekonomian	dok	1	1	100		
		Bag. Adm. Pebangunan		1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	dok	2	2	100		
											j
				A Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring Pengendalian Pembangunan	dokumen	12	12	100		
				B Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	dokumen	12	12	100		
		Bagian PBJ		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa	dokumen	4	4	100		
				A Pengelolaan	Jumlah laporan	dokumen	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang dan Jasa	fasilitasi pengadaan melaui SPSE						
				B Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik	dokumen	1	1	100		
				C Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	1	1	100		

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dialami dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan sebagaimana tabel diatas antara lain:

1) Alih informasi pengetahuan antar pejabat (ketika mutasi) terkait SAKIP dan RB tidak maksimal;
2) Adanya pembahasan di DPRD mengenai Perda yang melampaui tahun anggaran;
3) Penyelesaian perkara utamanya yang berperkara di pengadilan baik TUN atau perdata tidak mesti selesai dalam satu tahun anggaran, karena masih ada proses lebih lanjut ke pengadilan yang lebih tinggi. Adanya pandemi Covid-19 sehingga ada pembatasan kegiatan penyuluhan hukum;
4) PPKM karena adanya pandemi covid-19 berdampak beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
5) Adanya gangguan Sistem LPSE yaitu dengan rusaknya server LPSE sehingga menyebabkan kegagalan layanan dan mundurnya proses tender;

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah diatas sehingga capaian kinerja Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dapat maksimal antara lain:

1) Fasilitasi, Pendampingan dan Bimbingan Teknis;
2) Koordinasi dengan pihak terkait;
3) Koordinasi dengan para pihak terkait dan selalu memantau perkembangan kasus, penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media Ratih Tv sehingga sasaran masyarakat lebih luas, serta materi dapat diakses tidak terbatas waktu dan tempat;
4) Koordinasi dengan Kominfo, serta penataan arsip softfile pada Bagian Hukum;
5) Beberapa kegiatan dilakukan secara daring;
6) Perlunya kualitas server LPSE yang sesuai standar LKPP dan SOP back up data server;

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan fungsi penunjang lainnya diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan

demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Selama tahun 2021-2022 kinerja pelayanan publik Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2022 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 86,53. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta perbaikan prosedur pelayanan.

2. Sekretariat DPRD

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 83 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Sekretariat**	**Sekretariat DPRD**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah**	A **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	8	8	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja	jumlah dokumen	dok	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun						
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	31	31	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dok	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kali Diklat/Seminar/ Workshop yang diikuti oleh ASN Sekretariat DPRD	kali	3	3	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi	kali	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perundang-undangan yang diikuti oleh ASN Setwan						
				b bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	31	31	100		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis	bulan	12	12	100		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang	unit	390	390			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabat yang dipelihara	unit	34	34	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	unit	25	25	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	unit	220	220	100		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	bulan	12	12	100		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	orang	50	50	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD	stel	6	6	100		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up	orang	50	50	100		
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan	bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Administrasi DPRD						
					Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan pemenuhan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	bulan	12	12	100		
					Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12	100		
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100		
					Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	Dokumen	32	27	81,8		
					Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Propemperda yang tersusun						
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas	Dokumen	18	13	72,2	terdapat 5 Raperda yaitu raperda tentang RTRW, Sistem Kesehatan Daerah, Digitalisasi PAD, Penyelenggaran Adminduk dan Pilkades tidak terselesaikan pada tahun	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											2022. Raperda RTRW belum turun rekomendasi dari Kemendagri, sedangkan 4 raperda lainnya diperpanjang sampai 16 Februari 2023.	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji	Dokumen	6	6	100		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah	**Dokumen**	**6**	**6**	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan/atau Naskah Akademik	Akademik yang tersusun						
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	Dokumen	6	6	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembahasan Laporan Semester	Laporan Semester yang dibahas				100		
				Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Dokumen	7	7	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang	Dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Infrastruktur	tersusun						
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun	Dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	Kegiatan	6	6	100		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan	Kali	6	6	100		
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kegiatan	2	2	100		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok	Jumlah Alat Kelengkapan DPRD	AKD	7	7	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pakar dan Tim Ahli	(AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli						
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	Orang	7	6	85,7		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Hubungan Masyarakat DPRD	Kegiatan	4	4	100		
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan	3	3	100		
				Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah untuk Anggota	Bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						DPRD						
					Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Dokumen	2	2	100		
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD	Kali	3	3	100		
					Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		
					Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
					Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	Dokumen	1	1	100		
					Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Bulan	12	12	100		
					Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	Kegiatan	3	3	100		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100		

b. Permasalahan

1) Pada tahun 2022, Dokumen Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) berisi 18 Raperda yang diagendakan selesai pada tahun 2022. pada perjalanannya, terdapat 5 (lima) Raperda yang tidak dapat terselesaikan. Kelima Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. untuk Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan 4 Raperda lainnya, pembahasannya dilanjutkan pada masa persidangan I tahun 2023 dan direncanakan selesai pada bulan Februari 2023. hal ini terjadi karena Panitia Khusus pembahas empat Raperda tersebut masih membutuhkan waktu pembahasan sebagai hasil dari konsultasi/studi referensi/ maupun dinamika yang terjadi selama pembahasan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

4 (empat) Raperda pembahasannya dilanjutkan pada tahun 2023, dan 1 (satu) Raperda masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

e. Capaian Kinerja Urusan

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sehingga pada tahun ini kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen secara umum telah tercapai.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. formulasi penghitungannya adalah :
Capaian fasilitasi pengawasan+Capaian fasilitasi pembahasan dokumen anggaran+fasilitasi pembentukan dan pembahasan peraturan daerah/peraturan DPRD+Fasilitasi penyerapan aspirasi+Fasilitasai

peningkatan Kapasitas DPRD dibagi 5.

Sebagaimana disebutkan diatas, meskipun 5 (lima) raperda tidak dapat terselesaikan pada tahun 2022, namun Sekretariat DPRD telah secara optimal memfasilitasi proses pembahasan raperda-raperda tersebut melalui fasilitasi rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan, serta konsultasi ke pemerintah pusat/provinsi maupun studi referensi ke daerah-daerah lain.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2021			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kebumen, 2022

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, mempunyai kedudukan sebagai urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 129 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. BPKPD mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 128 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPSDM mempunyai kedudukan melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan, dinamika dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal melaksanakan fungsi kelitbangan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerjasama dengan Perguruan tinggi, diantaranya dalam hal penyusunan kajian yang dibutuhkan dan pelaksanaan riset unggulan daerah dengan melibatkan beberapa pakar di Perguruan Tinggi yang ada. Berikut uraian terkait pelaksanaan urusan fungsi lainnya.

1. Fungsi Perencanaan, Penelaitian dan Pengembangan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pada tahun 2022 telah disusun aplikasi SEMARAK yang merupakan integrasi dari 3 aplikasi yaitu E-SAKIP yang berisi pelaporan kinerja instansi pemerintah (dikelola oleh Bagian Organisasi), aplikasi SIMPEL yang berisi capaian realisasi fisik dan keuangan (dikelola oleh Bagian Pembangunan) dan aplikasi SIMDALEV yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah (dikelola oleh Bappeda). Semangatnya adalah untuk memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja serta pelaporan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Perencanaan**	**BAPPEDA**		A **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**%**	**90**	**99,22**	**110,24**		
				1 **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan**	**Dok**	**2**	**2**	**100**		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Keg	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	2	2	100		
				2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dok	2	2	100		
				3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan	Dok	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Daerah	pembangunan daerah						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	dok	1	1	100		
				B **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan**	**Jumlah urusan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**urusan**	**16**	**16**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Manusia							
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	urusan	8	8	100		
			sda	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	urusan	8	8	100		
				2 **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Jumlah urusan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Urusan**	**13**	**13**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Sumber Daya Alam)							
			Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Berbasis Pembangunan Perdesaan	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang perekonomian	Urusan	9	9	100		
			Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	b Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam	Urusan	4	4	100		
				3 **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Urusan**	**4**	**4**	**100**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Urusan	4	4	100		
2	**Penelitian dan Pengembangan**		1 **Peningkatan partisipasi masyarakat dan OPD Teknis dalam pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan**	A **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan**	**%**	**75**	**77,08**	**102,77**		
				1 **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**	**Jumlah dokumen penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian**	**Dok**	**4**	**6**	**150**		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan	**Peraturan yang disusun**						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dok	4	6	150		
				2 **Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah produk pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah**	Produk	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi	Produk	6	6	100		

b. Permasalahan

1) Proses pengintegrasian aplikasi ke dalam Aplikasi SEMARAK belum mencakup keseluruhan sampai dengan penilaian kinerja individu
2) Belum terbangunnya jejaring kelitbangan daerah, belum optimalnya diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Pada bidang inovasi dan teknologi, khususnya pelaksanaan KRENOVA, inovasi-inovasi yang dihasilkan masih berupa prototype sehingga masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan langsung ke masyarakat. Selain itu, fasilitasi dan pendampingan perangkat daerah masih bersifat parsial.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Proses pengembangan aplikasi SEMARAK dilaksanakan pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi
2) Merintis jurnal kelitbangan daerah sebagai salah satu wahana diseminasi hasil-hasil kelitbangan daerah, melakukan digitalisasi hasil-hasil kelitbangan dan membangun digital library untuk kemudian dapat dibangun jaringan dengan perpustakaan digital daerah dan perpustakaan-perpustakaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi guna akses hasil-hasil kelitbangan yang dilakukan non pemerintah daerah. Pada bidang inovasi dan teknologi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar sesama perangkat daerah dalam pemanfaatan dan pendampingan inovasi-inovasi hasil KRENOVA.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi perencanaan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal bahkan ada yang melebihi target. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Nomenklatur untuk masing-masing sub kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2022 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-*

gov dan *open-gov* terintegrasi, maka pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPEDA telah mengembangkan sistem evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja pembangunan Kabupaten Kebumen yang disingkat SEMARAK. Aplikasi Semarak merupakan integrasi dari aplikasi E-SAKIP, SIMPEL, dan SIMDALEV.

e. Capaian Kinerja Urusan

Sasaran program urusan penunjang perencanaan yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2022 adalah meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Capaian kinerja urusan perencanaan BAPPEDA tahun 2022 sebesar 100%, yaitu terlaksananya:

1) Fasilitasi dan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan
   a). Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
   b). Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,
   c). Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2) Tersusunnya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 86 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2022

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan selama periode 2022 antara lain penyusunan dokumen kajian daerah, pelaksanaan kegiatan KRENOVA dan fasilitasi riset-riset daerah.

Tabel 3. 87 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

No	Indikator	2021	2022
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	75%	77,08%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2022

2. Fungsi Keuangan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang Keuangan dilaksanakanmelalui 3 (tiga) program prioritas yang meliputi:

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 88 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Keuangan**	**1 BPKPD**		**A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan regulasi	dok	10	10	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	dok	4	4	100		
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	dok	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	dok	2	2	100		
			sda	d Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga	dok	2	2	100		
			sda	e Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Keg	5	5	100		
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Keg	4	4	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang terlayani penccairan Belanja Gaji berdasar penerbitan SP2D	Opd	52	52	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah								
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	opd	9	9	100		
			sda	c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan Rekonsiliasi DTH.RTH, dan Verifikasi SPM non Gaji	dok	52	52	100		
			sda	d Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dok	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyampaian pelaporan keuangan SKPD tepat waktu	dok	1.357	1.357	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD	dok	1.355	1.355	100		
			sda	b Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah dokumen LKPD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dok	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
			sda	c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keg	3	3	100		
			sda	d Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Bimtek Akuntansi	keg	1	1	100		
				e Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan BLUD	keg	1	1	100		
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan	keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengelolaan Keuangan Daerah						
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	b Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus, Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan keuangan untuk operasional TPQ, Jumlah Desa		449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang mendapat kawasan perdesaan(5 kawasan) pengembangan produk unggulan 5 awasan (wisata, anyaman pandan, peternakan sapi, batik dan gula semut) dan terlaksananya revitalisasi bumdesma sebagai pengelola ekonomi kawasan						
			sda	c Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah penyediaan belanja tidak terduga		1	1	100		
			sda	d Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Alokasi BHPD, BHRD, Bagi hasil pihak ketiga untuk Perhutani dan KPIPW Serayu Bogowonto Sempor		449	449	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**100**	100		
				1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	dok	63	63	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan BMD OPD	keg	2	2	100		
				b Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMD	dok	3	3	100		
			sda	c Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit BMD yang difasilitasi Pengamanannya	unit	156	156	100		
			sda	d Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan,	jenis	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD						
				e Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Laporan BMD	keg	2	2	100		
				f Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun	dok	2	2	100		
				g Pembinaan Pengelolaan Barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	keg	1	1	100		
		2 BPKPD		**A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	116,43	116,43		
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	11	11	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Desa yang termonitor dan terevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Desa	460	460	100		
			sda	b Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan, sosialisasi dan keberatan	Kec	26	26	100		
			sda	c Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Basis Data Pajak Daerah	Obyek	1.356.791	1.356.791	100		
			sda	d Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OPD pengelola pendapatan	OPD	55	55	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sda	e Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	wajib pajak	1.354.791	1.354.791	100		
			sda	f Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih di 11 jenis pajak daerah	orang	1.354.791	1.354.791	100		

b. Permasalahan

Meskipun hampir semua indikator kinerja program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2022 dapat terealisasi, masih ditemukan beberapa kendala/ permasalahan sebagai berikut:

1) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
2) Kurang cermatnya OPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
3) Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini OPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
4) Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.
2) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
3) Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing OPD.
4) Melakukan sosialisasi tentang implementasi penerapan SIPD.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi keuangan adalah 103,33% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 103,33% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2022 indikator Opini Badan

Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2021 terealisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD yang ke-8 kalinya dan 5 tahun terakhir meraih WTP secara berturut-turut yakni tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 3. 89 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			T.Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2020	WTP	WTP atas LKPD 2021	100%	WTP	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen 2022.

Berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 163/S/XVIII.SMG/05/2022 Tanggal 17 Mei 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, BPK RI memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi :

a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai.
c) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai TargetKinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalitas ASN dengan penerapan sistem merit melalui Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem Merit meliputi 8 aspek yaitu: perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN, pembagian karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian; penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yang meliputi:

1) Program Kepegawaian Daerah; dan
2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapatdilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. 90 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Kepegawaian**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1**	**A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan**	**%**	**90**	**99**	**110**		
				1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN"	Kegiatan	7	7	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pengadaan ASN							
				b Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN"	Dokumen	600	701	116		
				c Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Kepegawaian	Dokumen	2	2	100		
				2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kegiatan	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	Kegiatan	3	3	100		
				3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	Kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	Orang	386	294	76	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan tergantung usulan dari OPD	Membuat surat edaran terkait dengan aturan ijin belajar, tugas belajar dan usulan utk ujian PI dan ujian dinas
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Dokumen	200	370	185		
				4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Pendidikan dan Pelatihan**			**B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya**	**%**	**70,04**	**71,34**	**101**		
				1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Penialian dan Evaluasi	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jenis	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	100	100		
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jenis	5	5	100		

b. Permasalahan

1) Perencanaan Kebutuhan ASN
   a) Proses untuk melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja cukup lama, namun tenggat waktu yang diberikan Badan Kepegawaian Negara kurang lebih hanya 1 (satu) bulan;
   b) Penyampaian Usulan kebutuhan ASN dari masing-masing perangkat daerah berjalan lambat;
   c) Peta jabatan yang belum dimutakhirkan sesuai kondisi saat ini dan mempertimbangkan dampak transformasi digital;
2) Pengadaan ASN
   a) Pengadaan ASN di Kabupaten Kebumen mengikuti kebijakan nasional berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan) sehingga pengadaan tenaga teknis formasinya amat terbatas
   b) Pelaksanaan pengadaan menyesuaikan jadwal secara nasional dan pada tahun 2022 dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Ini berakibat pada tahapan proses yang tidak selesai di akhir tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023
3) Sistem Informasi
   a) Belum dilaksanakan pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
   b) Belum tersusunnya Perbup SIMPEG
   c) SIMPEG belum terintegrasi dengan SIASN
4) Manajemen Kinerja
   a) Dengan adanya perubahan Penilian Kinerja maka diperlukan Perubahan dalam Sistem manajemen Kinerja
   b) Pengembangan Kompetensi ASN belum memenuhi 20 jam dalam 1 tahun, sehingga Indeks Profesionalisme ASN dilingkungan Pemerintah kabupaten masih Rendah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Perencanaan Kebutuhan ASN
   a) Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta perangkat daerah dalam rangka

mempercepat penyusunan peta jabatan dan analisis beban kerja serta kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah;

b) Menyampaikan surat edaran ke masing-masing perangkat daerah dalam rangka penyampaian usulan kebutuhan ASN agar tepat waktu sesuai *timeline* yang ditentukan

c) Melakukan koordinasi ke Bagian Organisasi terkait penyusunan peta jabatan yang mempertimbangkan dampak adanya transformasi digital

2) Pengadaan ASN

a) Menyampaikan masukan pada saat evaluasi pelaksanaan pengadaan agar diberikan formasi tenaga teknis yang mencukupi sesuai usulan yang diajukan

b) Mengupayakan setiap tahapan proses pengadaan ASN tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh panselnas

3) Sistem Informasi

a) Perencanaan pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

b) Penyusunan dan penerapan Perbup SIMPEG dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

c) Integrasi Sistem Aplikasi Kepegawaian dengan SIASN

d) Penyusunan SE pembaharuan data SIMPEG bagi semua ASN

4) Manajemen Kinerja

a) Mengintergrasi Sistem manajemen ASN di pemerintah kabupaten Kebumen

b) Mengembangkan Aplikasi SINAU ,sehingga diharapkan semua PNS berhak mendapatkn Pengembangan Kompetensi selama 20 JP selama 1 tahun.

c) Membuat Surat edaran ke Perangkat daerah untuk melakukan pendataan PNS yang sudah mengikuti diklat.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian dapat diketahui rata-rata capaian kinerja

program adalah 100% atau kategori Hasil Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 85,17%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 103,66% atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan ditunjukkan dengan indikator capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 91 Perkembangan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	95,05	90,00	99,00	110,00	93,99
Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	97,40	70,04	71,34	101,00	77,21

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka realisasi Capaian Indikator Kinerja yang diampu BKPSDM tahun 2022 pada :

1. Indikator Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan mengalami kenaikan karena pengadaan ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Indikator Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural mengalami penurunan dari 97,40% menjadi 71,34% karena dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pasca penanggulangan bencana Covid 2019 dan pada tahun 2022 jumlah pejabat yang mendapatkan promosi jabatan masih banyak yang belum mengikuti diklatpim, sehingga presentase jumlah pejabat struktural yang seharusnya sudah mengikuti diklatpim belum sesuai dengan jenjang eselonnya.

   Adapun uraiannya sebagai berikut :

1) Capaian Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan

Pada tahun 2022 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan memperoleh capaian sebesar 110,00% yang diperoleh dari target sebesar 90,00% dapat terealisasi sebesar 99,00%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sejumlah 11.843 orang, sebanyak 11.746 orang sudah sesuai dengan jabatannya. Sedangkan 97 orang belum sesuai dengan formasi jabatannya.

2) Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

BKPSDM Kabupaten Kebumen sudah mengirim Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan ke lembaga diklat sebanyak 13 orang, Sampai dengan tahun 2022 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV sesuai jenjang jabatannya sebanyak 371 orang dari total Jumlah Pejabat struktural yang ada sebanyak 520 orang atau masih ada 141 pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 101%. Kabupaten Kebumen belum dapat mengirimkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim secara keseluruhan mengingat anggaran yang tersedia dan kuota diklat di lembaga penyelenggara diklat yang terbatas.

Target Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN adalah 600 orang dengan realisasi 701 dokumen disebabkan karena ada penambahan capaian realisasi pemberhentian selain karena PNS mencapai Pensiun BUP, PNS meninggal dunia, Pensiun Atas Permintaan Sendiri dan Pensiun karena Uzur.

Target Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan ada kenaikan 170 dokumen dari target awal 200 dokumen menjadi 370 dokumen atau naik sebesar 185% disebabkan karena jumlah usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang jabatan Fungsional, Alih Jenjang Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan dalam jabatan tidak bisa diprediksi secara tepat. Penerbitan berdasarkan usulan dari OPD, dimana PNS yang diusulkan karena telah mendapatkan Penetapan Angka Kredit sesuai yang dipersyaratkan.

3.1.5. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dijalankan oleh Inspektorat.

1. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan adalah Level Kapabilitas APIP sedangkan indikator kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah nilai persepsi korupsi. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan fungsi pengawasan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 92 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inspektorat Kabupaten Kebumen	**INSPEKTORAT**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah**	**A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Nilai Leveling APIP**	**Nilai**	**3**	**3**	**100**		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Obyek	144	268	186		
				A Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	OPD/BUMD	4	8	200		
				B Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Paket	41	85	207		
				C Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kali	5	5	100		
						OPD	30	30	100		
				D Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kali	8	28	350		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						OPD	38	78	205		
				E Sub Kegiatan Pengawasan Dea	Jumlah Pengawasan Desa	Desa	10	14	140		
				F Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	Kali	1	1	100		
				G Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindak Lanju Auditi yang dimonitoring dan evaluasi	Obrik	20	52	260		
				2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	Obrik	41	60	146		
				A Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang diselesaikan	Kasus	5	5	100		
				B Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Obyek	36	55	152		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	**B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Persepsi Korupsi**	**Nilai**	**3,34**	**3,74**	**112**		
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen	5	5	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Pengawasan	dan Fasilitasi Pengawasan						
				A Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Dokumen	3	3	100		
				B Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengawasan	Dokumen	2	2	100		
				2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	OPD	26	26	100		
				A Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi	OPD	5	24	480		
					Jumlah Penilaian	OPD	10	17	170		
				B Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	7	7	100		
				C Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	OPD/DESA	24	24	100		
				D Sub Kegiatan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan intergritas	Jumlah Fasilitasi	OPD	12	24	200	Karena amanat pencanangan Zona Intergritas Kepada Seluruh Perangkat Daerah	

b. Permasalahan

1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi dari target kegiatan adalah 26 perangkat daerah realisasi 26 perangkat daerah. Sehingga capaiannya 100%. Pendampingan dan Asistensi di laksanakan di Badan Dinas, Setda, Setwan, Satpol PP dan dua RSUD di Kabupaten Kebumen.
2) Untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal realisasi melebihi target dikarenakan terdapat tugas-tugas pengawasan yang diluar rencana program kerja pengawasan untuk menindaklanjuti, mandatori dan perintah pimpinan.
3) Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu realisasi melebihi target dikarenakan adanya pengawasan yang diluar rencana program pengawasan, menindak lanjuti aduan perangkat daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
4) Banyaknya tugas mandatory tidak dibarengi dengan komposisi SDM Pemeriksa.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1). Untuk melaksanakan tugas - tugas urusan pengawasan, upaya yang dilaksanakan adalah dengan etos kerja dan meningkatkan kerjasama tim.
2). Mengajukan kebutuhan pegawai Aparat Pengawas

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Dalam menyusun perjanjian kinerja tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah mengacu pada target kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam DPA tahun anggaran 2022 dan DPPA tahun anggaran 2022. Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian kinerja program penyelenggaraan pengawasan adalah 100% yaitu dari target indikator kinerja level kapabilitas APIP adalah level 3 realisasi level 3 sehingga capaian kinerjanya 100%

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdapat 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dari target 114 obyek pemeriksaan terealisasi 268 obyek pemeriksaan sehingga capaian kinerjanya 186% sedangkan untuk

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target 41 obyek pemeriksaan terealisasi 60 obyek pemeriksaan sehingga capaian kinerjanya 146%

Adapun untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target indikator kinerja adalah nilai persepsi korupsi dengan target 3,34 terealisasi 3,74 sehingga capaian kinerjanya 112%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdapat 2 kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. Untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan target kinerja 5 dokumen terealisasi 5 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100% sedangkan untuk Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dari target 26 perangkat daerah terealisasi 26 perangkat daerah sehingga capain kinerja 100%.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka target program dan kegiatan dapat tercapai.

e. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 93 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Maturitas SPIP	Nilai	2,66	3,10	3,13	101	3,50

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kebumen 2022

Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan Target Nilai maturitas SPIP adalah 3,10 dan terealisasi 3,13 sehingga capaian kinerjanya 101%

3.1.6. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

1. Kecamatan dan Kelurahan

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai TargetKinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut :

Tabel 3. 94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	1 Adimulyo	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	89,00	95,81	107,65%	Nihil	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	9	9	100	Nihil	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100	Nihil	
2	Kewilayahan	1 Adimulyo	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan	B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	Nihil	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	PEMERINTAHAN UMUM							
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100	Nihil	
				1 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100	Nihil	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Pemeliharaan Keutuhan Negara							
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	Keg	6	6	100	Nihil	
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	23	23	100	Nihil	
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan	Dok	2	2	100	Nihil	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah dengan Pembangunan Desa	pembangunan desa (Profil dan IPMD)						
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100	Nihil	
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Keg	2	2	100	Nihil	
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100	Nihil	
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	Keg	2	2	100	Nihil	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Kewilayahan	1 Adimulyo	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	D Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	97	97%	Anggaran minim untuk sarana prasarana yang masih belum memadai	Mengusulkan penambahan anggaran tambahan terhadap program dan kegiatan untuk menunjang pemenuhan target RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2026
				1 Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	11	11	100%	nihil	
				a Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	dok	5	5	100%	-	
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	dok	6	6	100%	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah yang disusun						
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100%	-	
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapatkan gaji dan tunjangan kerja	orang	21	21	100%	-	
				b Pelaksanaan Penatausahaanda n Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (GU, TU Dll)	dok	4	4	100%	-	
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100%		
				a Peneyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	jenis	4	4	100%		
				b Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan minum rapat	bulan	12	12	100%	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100%	-	
				d Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%	-	
				e Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan Penyediaan bahan/material	bulan	12	12	100%	-	
				f Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	12	100%	-	
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12	100%	-	
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100%	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100%	-	
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100%	-	
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	bulan	12	12	100%	-	
				4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	unit	25	24	96%	Anggaran minim untuk sarana prasarana yang masih belum memadai	Mengusulkan penambahan anggaran tambahan terhadap program dan kegiatan untuk menunjang pemenuhan target RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2026

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Paket Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit	11	11	100%	-	
				b Pemeliharaan Peralatandan Mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan Peralatandan Mesin lainnya	unit	12	12	100%	-	
				c Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100%	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Alian	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah	%	100	100	100		

				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan	jumlah kegiatan fasilitasi ,	keg	7	7	100		

					Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa i						
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	16	16	100		
				b	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Keg	1	1	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	1	100		

				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes, Jumlah Kegitan Pra Musrenbangcam, Jumlah Kegiatan Musrenbangcam	Desa Keg	16 2	16 2	100		
				f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Pemuda dan UKS , Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat, Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKS	Keg	4	4	100		
				g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako) , Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes	Keg	2	2	100		
				D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusanp emerintah daerah	%	100	99,99	99,99	Ada sub kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu pemeliharaan mesin ketik	Akan dilaksanakan tahun depan

						KABUPATEN/KOTA						
				1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	11	11	100	
					a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024)	Dokumen	6	6	100	
					b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkjip, profil)	Dokumen	5	5	100	
				2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100	
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	Orang	16	16	100	

					b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangn SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
					b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
					c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
					d	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		

					e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100	
					f	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100	
					g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100	
				4		Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	4	4	100	
					a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	4	100	
				5		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100	

					a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyedinaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
					b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyedinaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
					c	Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	43	42	97,67	Ada 1 sarpras yang tdk dilakukan perbaikan	akan dilaksanakan tahun depan
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	13	13	100		

				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Unit	6	6	100	
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	24	23	95,83	Pemeliharaan mesin ketik tidak terlaksana	Sebagai bahan evaluasi anggaran dan kegiatan tahun berikutnya

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI KESALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Ambal	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	85	85.5	100,59		
				1 Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	8	8	100		
				a Sub Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah pelayaan perijinan yang dilaksanakan	jenis	8	8	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan non perizinan	Jumlah jenis permohonan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, SKCK	jenis	8	8	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Cakupan pelayanan penunjang urusan	Bln					

					DAN KETERTIBAN UMUM	Pemerintah Daerah					
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa				
				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparat dan warga masyarakat di wilayah kecamatan Ambal	Keg					
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
						Indeks kondusivitas kecamatan						
				1	Kegiatan Penyelenggara Urusan Peemrintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	keg	2	2	100		

					a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan UUD pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah Kegiatan dalam Rangka HUT RI	Kegiatan	2	2	100		
				D		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase desa dengan indeks desa membangun dan katagori maju dan mandiri	%	24,05	6,25	25,98	Belum meningkat sarpras, dan pendanaan yang memadai	menekan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, menambah sarpras
				1		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	desa	32	32	100		
					a	Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah desa yang terfasilitasi keuangan desa dan Pemberdayaan	Desa	32	32	100		

					Aset Desa	Aset Desa					
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Rakor sinkronisasi dan perencaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	kali	4	4	100		
				c	Sub Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Orang	72	72	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Perencaan Pembangunan Partisipatif	Jumah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel	Desa	32	32	100		
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Paket kegiatan yang dilaksanakan	Paket	4	4	100		
				f	Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi TKP2KDES	Desa	32	32	100		

				E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra 2026, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	Dokumen	5	5	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan petrangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji,tunjangan dan tamsil	0rang	17	17	100		

				b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	dokumen	4	4	100		
				3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (kabel,lampu, terminal saklar)	jenis	4	4	100		
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggadaan	bulan	12	12	100		
				d	Penyediaan bahan bancaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan per uud ngan	bulan	12	12	100		
				e	Penyediaan Bahan /Material	jumlah bulan penyediaan bahan/Material	bulan	12	12	100		
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan	bulan	12	12	100		

					dan Konsultasi SKPD	konsultasi SKPD yang diselenggarkan					
				g	Penataan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Fasilitasi Arsip	bulan	12	12	100	
				4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	8	8	100	
				a	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur	unit	8	8	100	
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan Jasa surat menyurat	bulan	12	12	100	
				b	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100	
				6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pemeliharaan barang milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, Pajak,Perizinan,Kendaraan Dinas	Jumlah Unit penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan	unit	24	24	100	

					Operasional atau lapangan	pajak dan perizinan kendaraan dinasoperasional atau lapangan					
				b	Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	13	13	100	
				c	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit pemeliharaan dan mesin lainnya	unit	1	1	100	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBJAKAN	URUSAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Ayah	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan	%	83,5	89,83	107		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	9	9	100		

				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100		
				1	penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	3	3	100		
				a	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara republik indonesia Tahun 1945, pelestarian Bineka tunggal ika serta	Jumlah Kegiatan Dalam rangka HUT RI dan hari jadi	Keg	3	3	100		

					pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia						
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	prosentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	24,05%	55,55%	230		
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Keg	6	6	100		
				a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendaya gunaan aset desa	Desa	18	18	100		
				b	fasilitasi sinkronisasi perencanaan	jumlah dokumen sinkronisasi percepatan	dokumen	2	2	100		

					pembangunan daerah dan pembangunan desa	pembangunan daerah dan pembangunan desa					
				b	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				c	Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Musren bangdes dan musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan sosial Masyarakat, jumlah kegiatan pembinaan UKS, Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keg	4	4	100		
				e	Koordinasi Pendampingan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	Keg	2	2	100		

					Desa di wilayahnya	penanggulangan kemiskinan					
				D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	10	10	100		
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				b	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKPJ, LKJIP, LPPD LK SKPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	4	4	100		

				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	orang	20	17	85	mutasi 3 0rang	
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	bulan	12	12	100		
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4	4	100		

				b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kamtor	bulan	12	12	100		
				e	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Orang/kali	3	3	100		
				f	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	100		
				4	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan jasa	bulan	12	12	100		

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah					
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100	
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor	bulan	12	12	100	
				5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	31	31	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	unit	9	9	100	

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional					
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	10	10	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	10	10	100		
				d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	unit	2	2	100		

No.	URUSAN / PEMERINTAHAN	OPD / UNIT	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5 Bonorowo	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100		
				a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (	Dokumen	5	5	100		

						Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP,Renstra 2026)						
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Dokumen	6	6	100		
				2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksanany a kegiatan administrasi Keuangan	bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatka n Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatka n Tamsil	Orang	16	16	100		

				b	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		

				c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100	Belanja kegiatan sesuai dengan kebutuhan	
				d	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100	Pagu anggaran lebih besar daripada belanja	
				e	Penyediaan bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100		
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100		

					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	10	100	
				a	Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	4	4	100	Terjadi kesalahan rekening
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	Bulan	12	12	1000	Belanja sesuai dengan kebutuhan
				b	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber	Bulan	12	12	100	Pagu anggaran lebih besar daripada belanja

						daya air dan listrik						
				c	**Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor**	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
					Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	Unit	23	23	100		
				a	**Penyediaan Jasa, Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional**	Jumlah bulan/unit Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	unit	9	9	100		
				b	**Pemeliharaan Mebel**	Jumlah unit Pemeliharaan mebel	unit	14	14	100		
				c	**Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya**	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan	unit	12	12	100	Belanja sesuai dengan kerusak	

						dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja					an	
				d	**Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedug Kantor dan Bangunan lainnya**	Jumlah unit Pemeliharaan srutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	2	2	100		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100		Tidak sesuai dengan RKA (Karnaval)	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	100			

				-	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Jenis	9	9	100		

					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	9	9	100		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan(KK,KTP,Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang,Rekom SKCK,Ijin Keramaian, KIA,Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	24,05	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Kegiatan	6	6	100		

					Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan					
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Desa	11	11	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Kali	1	1	100		

					umum						
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100	Perubahan kegiatan	
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		

	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 Buayan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	87	93,13	107		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan	Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP,KK,Kartu Kelahiran, Surat Kematian , Pindah Datang)	Jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		

				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	Keg	2	2	100		
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indeks desa membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan	Keg	6	6	100		

					Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan					
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	20	20	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugasKepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	20	20	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	Keg	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Keg	2	2	100		
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, BUMDes)	Keg	4	4	100		

					f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes)	Keg	2	2	100		
				D		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		
					1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100		
					a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun (renja, RKA,DPA,RKAP,DPPA,Renstra 2026	dokumen	5	5	100		
					b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun (LKJIP. SAKIP, LAKIP,LKPJ,LPPD, Simdalev)	dokumen	6	6	100		
					2	Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
					a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan tunjangan dan	orang	14	14	100		

					Jumlah ASN Yang mendapatkan Tamsil						
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (TU,GU,UP,LS)	dokumen	4	4	100		
				3 . Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b . Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	Bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlahbulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		

				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi penatausahaan arsip Dinamis	Bulan	12	12	100		
				4	Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	1	1	100		
				a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (ruang tamu)	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	unit	1	1	100		
				5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat -menyurat	Bulan	12	12	100		
				b	Penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		

				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	16	16	100		
				a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	10	10	100		
				b	Pemeliharaan Mebelair	Jumlah unit pemeliharaan mebelair	unit	2	2	100		
				b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	3	3	100		
				a	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7 Buluspesantren	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	%	88	88	100	-	
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jenis	8	8	100	-	
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	Jenis	8	8	100	-	
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	-	

				1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100	-	
				a	Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahu 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuha NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	2	2	100		
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan indeks Desa Membangun Maju dan Mandiri	%	24,5	24,5	100	-	
				1	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	keg	6	6	100	-	

				a Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuanagan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	21	21	100	-	
				b Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pembangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Dok	2	2	100	-	
				c Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100	-	
				d Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembangunan Parsitipatif	Keg	2	2	100	-	
				e Fasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UKS,Bumdes,dan Sosmasy)	Keg	7	7	100	-	
				f Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (SEMBAKo dan TKP2KDes)	Keg	2	2	100	-	
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	100	100	-	

					DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah					
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100	-
				a	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	100	-
				b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	6	6	100	-
				2	Kegiatan Administrasi Keuan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100	
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlahn Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Bulan Penyediaan	bulan	12	12	100	

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100	
				c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100	
				d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	bulan	12	12	100	
				e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	bulan	12	12	100	
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	100	
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12	100	
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100	
				b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	bulan	12	12	100	

					dan Listrik						
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	23	23	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	10	10	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
							TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		8 Gombong	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	%	85	88,14	103,6			
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100			

					Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100			
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan	%	84	88,14	104,9			
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan	kelurahan	2	2	100			
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	kali	4	4	100			
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	paket	20	20	100			

				c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	kegiatan	6	6	100			
				d	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan	dokumen	2	2	100			
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100			
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan	2	2	100			
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	2	2	100			

					1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	24,05	25	103,9			
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kegiatan	6	6	100			
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan	Desa/Kel	14	14	100			
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	dokumen	2	2	100			

					Desa	Desa						
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1	100			
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	kegiatan	2	2	100			
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa(PKK,Kepemudaan,Bumdes,UKS)	kegiatan	12	12	100			
				f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi Kegiatan Sembako dan TKP2Kdes/Kel	Desa/Kel	14	14	100			
				E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100			
				1	Perencanan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	dokumen	11	11	100			

					perangkat daerah							
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	6	6	100			
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	5	5	100			
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100			
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	orang/bl	28	28	100			
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	4	4	100			
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100			

				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(kabel, lampu, terminal, saklar)	Jenis	4	4	100			
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100			
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100			
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	100			
				e Penyediaan Bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100			
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	100			
				g Sub Kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pengelolaan arsip	bulan	12	12	100			

				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	2	2	100			
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2	2	100			
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100			
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100			
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listriklatan dan mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100			

				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100			
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	37	37	100			
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional komunikasi, sumber daya air, dan listriklatan dan mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	unit	9	9	100			
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit	unit	7	7	100			
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan	unit	17	17	100			

					perbaikan peralatan kerjarasioanlko munikasi, sumber daya air dan listriklata dan Mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah							
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorin / pemeliharaan perbaikan Peralatan kerjarasionalko munikasi, sumber daya dan listriklatan dan Mesin lainnya dan konsultasi ke luar daerah	unit	4	4	100			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9 Karanganyar	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	t terhad Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	85,00	86,00	101,17		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.	Keg	9	9	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis	9	9	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek konduksifitas Kecamatan	%	100	100	100		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah .	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan	kegiatan	4	4	100		

					Kepala Daerah.						
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Repubril Indonesia Tahun 1945.	Jumlah kegiatan dlam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	Keg	4	4	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	24,05	100		
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Keg	6	6	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasililitasiPengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	desa	7	7	100		
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan	dok	2	2	100		

					dengan Pembangunan Desa	pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa SKPD					
				c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pelatihan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	33	33	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif .	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Musrenbangdes/kec	Keg	2	2	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	keg	4	4	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa/Kelurahan difasilitasi Kegiatan Pendampingan Penanggulangan Kemisikinan	Desa/Kelurahan	11	11	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 Karanggayam	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	11	11	100		
				1 Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev	Dokumen	6	6	100		

				2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	1	100	
				a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	orang	14	14	100	
				b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU, LS, UP)	Jenis	4	4	100	
				3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1	1	100	
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100	
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100	
				c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Bulan	12	12	100	
				d	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah bulan penyediaan	Bulan	12	12	100	

					dan Peraturan Perundang-undangan	barang cetakan dan penggandaan					
				e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100	
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang penyelenggaraan rapat koordinasi dengan konsultasi SKPD	kali	1	1	100	
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatusahaan arsip dinamis	Bulan	12	12	100	
				4	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Jumlah Unit *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Bulan	1	1	100	Perubahan
				a	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	
				5	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	12	100	

				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100	
				b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	
				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100	
				6	*Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah daerah	Unit	19	19	100	
				a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/ operasional	Unit	9	9	100	
				b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan	Unit	8	8	100	

					peralatan kerja						
				c Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung kantor	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				a Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan(KTP,KK,Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keraimaian, KIA, Legalisasi Umum)	jenis	9	9	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		

					AN UMUM						
				1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum seseui Penugasan Kepala Daerah	Keg	2	2	100		
				a	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dala rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Keg	2	2	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa dengan Indeks Desa	%	100	100	100		

					PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Membangun Kategori Maju dan Mandiri						
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasiitasi, Rekomindasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kegiatan	6	6	100		
				a	Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dab Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	19	19	100		
				b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen SinkronisasiPercepatan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dok	2	2	100		
				c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kali	1	1	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan	Keg	2	2	100		

					Pembangunan Partisipatif	Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam					
				e	Fasilitasi Penyusunan Program danPelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes/kel dan Bansos Sembako)	Keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan	11 Karangsambung	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Presentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan yang disusun**	Dok	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja , RKA, DPA,RKAP dan DPPA)	Dok	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	6	6	100		

					(LKJIP,SAKIP,/ LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)						
				2 **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	12	17	140		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola administrasi	Dok	4	4	100		
				3 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerang	Jenis	4	4	100		

					an bangunan kantor						
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (Alat tulis kantor)	Bulan	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordiasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	Bulan	12	12	100		
				4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah**	Jenis	12	12	100		

					Daerah						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100		
				5 **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	38	38	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	20	20	100		

				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100		
				d	Sub Kegiatan pemelihaaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1	100		
				B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	%	82	88,57	108		
				1	**Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	Jenis	5	5	100		
				a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Jenis Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	Jenis	5	5	100		
				C	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	%	100	100	100		

				1	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara& Resepsi HUT RI , Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	keg	2	2	100		
				D	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri**	%	100	42	42	Karena Keterbatasan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan di Tingkat Desa	Usul Bimtek Pengelolaan Keuangan desa ke Dinas PMD
				1	**Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi**	keg	6	6	100		

					pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	**rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan**					
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	14	14	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	dok	2	2	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	keg	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam)	keg	2	2	100		

				e	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	keg	4	4	100		
				f	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	keg	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12 Kebumen	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	90,5	92,97	100		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis	4	4	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Jenis Pelayanan non Periziinan yang	jenis	4	4	100		

					terkait dengan Nonperizinan	dilaksanakan					
				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100	
				1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100	
				a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	keg	2	2	100	
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun	%	24,05	33,33	100	

					DESA	Katagori Maju dan Mandiri					
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keg	8	8	100		
				a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pegelolaan keuangan desa dan pemberdayaguna an aset desa	Desa	24	24	100		
				b	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan	Desa	12	12	100		
				c	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	2	2	100		
				d	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum	keg	1	1	100		
				e	Fasilitasi	Jumlah kegiatan	keg	2	2	100		

					Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	musrenbangcam yang difasilitasi					
				f	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial masyarakat yang terfasilitasi	keg	5	5	100	
				g	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes dan Pendampingan Desa (Bansos) yang terfasilitasi	keg	2	2	100	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	Dokumen	13	13	100	
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Pernagkat daerah yang disusun)	Dokumen	6	6	100	
				b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	7	7	100	

					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang disusun					
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	40	40	100	
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	100	
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100	
				a	Sub kegiatan Penyediaan	Jumlah unit /jenis komponen	Jenis	4	4	100	

					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan angunan kantor (Kabel, Lampu, terminal Saklar					
				b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f.	Sub kegiatan penyelenggaraaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah	bulan	12	12	100		
				g.	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bulan	12	12	100		

				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemeintahan daerah	unit	4	4	100		
				a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (Sofa Tamu, lemari bufer dan kipas angin)	Paket	1	1	100		
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		

				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	101	101	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	29	29	100		
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	37	37	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	12	12	100		
				D	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Indeks Kepuasan masyarakata terhadap pelayanan publik	%	89,26	91,87	102,9		

					KELURAHAN	di kelurahan					
				1	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan	kelurahan	5	5	100		
				a	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbangkel	kali	10	10	100		
				b	Pembangunan sarana dan prasarana lainnya	Jumlah pembangunan sarpras kelurahan (Tamanwinangun 18 pkt, jembatan, pengaspalan 2 jln, pos paud, 8 pavingisasi, 2 drainase, sumur bor, sal air,pasar rt5 rw7, gang mushola mubalighin rt 5, kebumen30 pkt, normal sal 11 drainase, 11 jln setapak, drainase-jln, lpju, sal air, 2 biopori 2 pavingisasi; bumirejo 6 paket pengaspalan jalan; panjer 12	paket	76	76	100		

					paket, 7sal drainase, 5 jln; selang 10 pkt, 3 jln, 2 rabat, 2 drainase, PAUD, Pengaspalan, tong sampah)						
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kali	27	27	100		
				d Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan	dokumen	14	14	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13 Klirong	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamtan	%	84,65	86,04	101,64		

				1	Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	jenis	5	5	100		
				a	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahaan Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait non perizinan	jenis	5	5	100		
				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a	Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	2	2	100		

					Republik Indonesia tahu 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuha NKRI						
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan indeks Desa Membangun Maju dan Mandiri	%	24,5	24,65	100		
				a	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	keg	6	6	100		
				b	Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuanagan desa dan pendayagunaan aste desa	desa	24	24	100		
				c	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	Jumlah desa terfasilitasi Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pemangunan desa	desa	24	24	100		
				d	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan	keg	1	1	100		

					ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum						
				e	Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi perencanaan dan pembanguna Parsitipatif	keg	2	2	100		
				f	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksaaan program pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa (PKK,Kepemudaan,UKS,Bumdes,dan Sosmasy)	keg	4	4	100		
				g	Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasiliatasi Penanggulangan Kemiskinan (SEMBAKo dan TKP2KDes)	keg	2	2	100		
				D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	9	9	100		
				a	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	100		

				b	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	4	4	100		
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12	100		
				3	Kegiatan Admninistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Admninistrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	100		
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	paket	1	1	100		

				c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12	100		
				e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	paket	3	3	100		
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang/kali	8	8	100		
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	14	14	100		
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat	paket	1	1	100		

				b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	37	37	100		
				a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	12	12	100		
				b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	unit	10	10	100		
				c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	12	12	100		

				d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14 Kutowinangun	1 Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi melalui e-gov dan Peningkatan Kapabilitas Aparatur	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		-
				1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		-
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	18	18	100		-
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan	Dokumen	4	4	100		-

					Keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD					
				2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	100		
				a	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	3	100		
				3	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d	Penyediaan Bahan	Jumlah Bulan	Bulan	12	12	100		

						Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
					e	Penyediaan Bahan material	Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
					f	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	Bulan	12	12	100		
					g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
					b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100		
					c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100		
				B		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	presentase Desa dengan Indeks Membangun Kategori Maju dan	%	24,05	24.05	100		-

					DESA	Mandiri						
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	mlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha	kegiatan	5	5	100		-
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	19	19	100		-
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen singkronnisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	dokumen	2	2	100		
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa(pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)	Kegiatan	4	4	100		

					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	kegiatan	2	2	100		
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	100	86.29	86.29		-
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		-
				a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		-
				D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		
				E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan Penunjang	%	100	100	100		

					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah					
				1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	30	30	100		
				b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan mebel	Unit	10	10	100		
				c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Unit	10	10	100		
				d.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	1	100		

				F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	100		
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	5	5	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15 Kuwarasan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek KepuasanMasyarakat terhadap pelayan publik kecamatan	%	86	91,48	106,37		

				1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan non Perizinan	Jumlah bulan Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100		
				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	1	1	100		
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	%	100	100	100		

				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	1	1	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya kegiatan - kegiatan	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi	Kegiatan	6	6	100		

					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pembinaan, pengawasan pemerintahan					
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	22	22	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (IPMD dan Profil)	Dokumen	1	1	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, Pembinaan Sosial Masyarakat, Bumdes, Usaha Kesehatan Sekolah)	Kegiatan	5	5	100		
				e	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi Kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	2	2	100		

						(Sembako dan TKP2Kdes)					
				f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	100	
				E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah bulan penyediaan Administrasi umum perangat daerah	Bulan	12	12	100	
				a	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100	
				c	Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100	

				d	Sub Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100	
				e	Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan KOnsultasi Luar Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100	
				f	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan Arsip	Jumlah bulan Fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	100	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan	16 Mirit	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	%		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA,RKAP dan DPPA)	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD,	Dokumen	6	6	100		

						Dalev dan SPIP)						
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah						
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	Orang	16	16	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	Dokumen	4	4	100		
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				a	Sub kegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi	Bulan	12	12	100		

					Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor					
				b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100	
				c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100	
				d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	Bulan	12	12	100	
				e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100	
				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah					

				a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan Rak Arsip)	Paket	1	1	100	
				b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound Syistem Portable dan CCTV	Unit	1	1	100	
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	

				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100	
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	19	19	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	5	5	100	
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100	

		16 Mirit	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	indeks	85,12	92,03	108,12		
				1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum)	Jenis	9	9	100		
				B	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	keg	2	2	100		

						Kepala Daerah					
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	82,00	84,37	102,89		

				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	keg	6	6	100		
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan lama Fasilitasi APBDes)	Desa	22	22	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		

				f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Data Kemiskinan dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17 Padureso	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	86	78,48%	91,26	Pada Triwulan ke-4 Kurang responden mengisi SKM	Rapat Evaluasi agar tidak terulang di tahun 2023
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran	jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100%	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	Kegiatan	2	2	100		

					Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	33,33%	138,59		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	Kegiatan	6	6	100		

					Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan					
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	9	9	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Desa	2	2	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, UKS BUMDesa)	Kegiatan	4	4	100		

					f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (sembako dan TKP2KDes)	Kegiatan	2	2	100		
				D		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
					a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		
					b	Sub Kegiatan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKjIP, SPIP, LPPD)	Dokumen	6	6	100		
				2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		

				a	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	11	11	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU,TU,UP,LS)	Dokumen	4	3	75	Tidak mengajukan TU karena akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan	Pengajuan dengan mekanisme GU dimaksimalkan
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor (Kabel, lampu, Terminal, Saklar)	Jenis	4	4	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bulan	3	3	100		

					undangan	Perundang-undangan					
				e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Arsip	Bulan	12	12	100		
				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	4	100		
				a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pengadaan peralatan Kantor	Unit	4	4	100		
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bulan	12	12	100		

				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Unit	19	19	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	8	8	100	
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	3	3	100	
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	4	4	100	

				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		18 Pejagoan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamtan	%	91	84.45	92.80	triwuan 1 belum memulai survey	untuk memulai survey sejak awal tahun
				1 Pelaksanaan Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat	jenis	4	4	100		
				a Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah pelayanan Non Perijinan yang Dilaksanakan	jenis	4	4	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARA	Indeks Kondusivitas	%	100	100	100		

					AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan					
				1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100	
				a	Pembinaaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	keg	2	2	100	
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa dengan indeks membangun kategori maju dan mandiri	%	24.05	38.46	159,92	
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	keg	6	6	100	

					Pengawasan Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan					
				a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100		
				b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				c	Fasilitasi Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kali	1	1	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam	keg	2	2	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Kepemudaan, UKS,Bumdes, Sosmas)	keg	5	5	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (sembako dan	keg	2	2	100		

					TKP2KDes)					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19 Petanahan	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Yang Disusun (Renstra, Renja, Rka, Dpa, Dppa, Rkap, Renstra 2026)	dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Data Perangkat Daerah Yang Disusun	dokumen	5	5	100		
				2 Administrasi	Jumlah Bulan	bulan	12	12	100		

					Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan Dan Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tamsil	orang	17	17	100		
				b	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Keuangan (TU,GU,LS,UP)	dokumen	4	4	100		
				3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	4	4	100		
				b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	bulan	12	12	100		
				c	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan	bulan	12	12	100		

					Dan Penganggaran						
				d Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100		
				f Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	bulan	12	12	100		
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit	37	37	100		

					Urusan Pemerintahan Daerah						
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	unit	10	10	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	unit	15	15	100		
				c Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	91	100	109,89		
				1 Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		

					Dilimpahkan kepada Camat						
				a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivits Kecamatan	Persentase	100	100	100		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
				a	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian	Kegiatan	2	2	100		

					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.						
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	persentase	100	95,24	95,24		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Kegiatan	7	7	100		
				a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		
				b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan	dokumen	21	21	100		

					Pembangunan Desa	pembangunan desa					
				c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	desa	21	21	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Kegiatan	4	4	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2Kdes/Kel dan Bansos Sembako)	Kegiatan	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20 Poncowarno	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	persen	85,50	91,22	106,69		
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	5	5	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		

					a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	kegiatan	2	2	100		
				C		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	persen	24,05	54,54	226,77		
					1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	kegiatan	6	6	100		
					a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	desa	11	11	100		
					b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		

				c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali	1	1	100		
				d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	kegiatan	4	4	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)	kegiatan	2	2	100		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
				1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	11	100		
				a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		

					a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	16	13	81,25	3 orang pensiun	
					b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	jenis	4	3	75	pengajuan engan ekanisme TU dak irekomendasikan, kan empengaruhi inerja euanga	
				3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
					a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
					b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	bulan	12	12	100		
					c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
					d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100		

				e	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	bulan	12	12	100			
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang	8	8	100			
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	bulan	12	12	100			
				4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	1	1	100			
				a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1	1	100			
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100			
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100			
				b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100			
				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100			
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	unit	24	24	100			

					urusan pemerintah daerah						
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21 Prembun	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	100	90,04	90,04	Target yang dientry pada DPA tidak sesuai dengan Renja	Pengentryan agar lebih cermat
				1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat	Jenis	7	7	100		
				a Sub Kegiatan, pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jumlah jenispelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP,KK,Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang)	Jenis	7	7	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100	100		

				1	Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	keg	1	1	100		
				a	Sub Kegiatan ,Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	jJumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval,Resepsi HUT RI)	keg	1	1	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun katgori maju dan mandiri	%	100	61,53	61,53	8 desa kategaori maju dari total 13 desa	
				1	Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Kegiatan	7	7	100		

				a	Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	13	13	100		
				b	Sub Kegiatan,Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kegiatan	1	1	100		
				c	Sub Kegiatan, Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen singkronisasi percepatan pembangunan derah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				d	Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumah kegiatan fasilitasi penyelengggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				e	Sub Kegiatan, Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	jumlah Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				f	Sub kegiatan, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kegiatan	4	4	100		

					masyarakat desa						
					Sub Kegiatan, Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako)	kegiatan	2	2	100		
				E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan playanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100		
				1.	Kegiatan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	11	11	100		
				a.	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	dokumen	5	5	100		
				b	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, SAKIP,LKPJ,LKJiP, SPIP, LPPD)	dokumen	6	6	100		
				2	Kegiatan ,Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumalh ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	orang	17	18	105,88	Bulan September bertambah 1	

										pegawai	
				b	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU,TU,UP,LS)	dokumen	4	4	100		
				3	Kegiatan Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas	orang	17	17	100		
				a	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	0rang	17	17	100		
				4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor (kabel,lampu,terminal, saklar)	jenis	4	4	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan	bulan	12	12	100		

					peraturan perundang-undangan	perundang-undangan					
				e	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	jumlah bulan penyediaan bahan /material	bulan	12	12	100	
				f	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggaraan	kegiatan	4	4	100	
				g	Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	bulan	12	12	100	
				5	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	13	13	100	
				a	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	16	16	100	
				6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	100	
				a	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100	
				b	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100	

				c	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100		
				7	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	37	37	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	24	14	58,33	Kendaraan kepala desa ikut dimasukan pemeliharaan kecamatan	pengentryan agar lebih cermat
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	11	11	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22 PURING	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra 2026)	dok	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	dok	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	Orang	16	16	100		

						Tunjangan ASN	dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil						
					b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	dok	4	4	100		
					3	Administasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100		
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
					b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100		
					c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100		
					d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	bulan	12	12	100		
					e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100		
					f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100		

						SKPD							
					g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	bulan	12	12	100		
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	1	1	100	Perubahan	
					a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	1	1	100		
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjanng urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
					a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
					b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
					c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100		
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan oemerintahan daerah	unit	19	19	100		

					a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	14	14	100		
					b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	1	1	100		
					c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	100		
					d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	2	2	100		
				B		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
				1		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		
					a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian,	jenis	7	7	100	terjadi kerusakan sarpras pelayanan yang terinstal	mengkoordinasikan perbaikan sarpras dengan

						Pindah Datang, Rekom SKCK, Izin Keramaian)					aplikasi SIAK	dinas terkait.
				C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugsan Kepala Daerah	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	keg	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	2	2	100	Kurangnya frekuensi, sasaran kegiatan	Mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi remaja

					Indonesia						
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi dan Terawasi	%	100	100	100	adanya perbedaan pemahaman aturan	sosialisasi aturan tsb dan turunan lainnya yang saling berkaitan
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desaa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	23	23	100	adanya perubahan aturan	Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan keuangan dan pendataan aset
				b	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	keg	2	2	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dok	2	2	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan	keg	1	1	100		

					Ketertiban Umum	Ketertiban Umum					
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penye;enggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	Keg	2	2	100	Juknis Musrenbangdesbelum mencakup semua usulan yang dapat diusulken ke OPD	Koordinasi dengan OPD terkait
				f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100	belum tersinkronisasi penyusunan anggaran lintas sektoral khususnya pembinaan UKS dan Doter Kecil	pembahasan bersama pelaksanaan kegiatan khususnya mengenait pembiayaan dengan anggaran yang tersedia.
				g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa (Bansos Sembako).	Keg	2	2	100	banyaknya kegiatan fasilitasi dan pemutakhiran data tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia.	beberapa kegiatan fasilitasi yang mendesak pelaksanaannya terpaksa digabung dengan kegiatan lain

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23 Rowokele	1 Mewujudkan Pelayanan dikecamatan yang baik dan berkualitas	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	indek	85,00	86,86	12,18		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Terlaksananya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	presen	100	100	100		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan non perizinan yangdilaksanakan (KTP,KK,Kartu kelahiran, Surat kematian ,Pindaj Datang, KIA	jenis	6	6	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indekz Kondusivitas Kecamatan	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai	Kegiatan	2	2	100		

					Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	penugasan Kepala Daerah					
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	kegiatan	2	2	100		
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan indes desa membangun Katagori Maju dan Mandiri	indeks	54,54	81,81	150		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	kegiatan	6	6	100		

				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	desa	11	11	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				e	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES, soaial Masyarakat)	kegiatan	4	4	100		
				f	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penaggulangan kemiskinan TKP2Kdes/kel dan	dokumen	2	2	100		

						bansos sembako)						
				4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABBUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100		
				1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen	11	11	100		
				a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun (renja, RKA,DPA,RKAP,DPPA,Renstra 2026	dokumen	5	5	100		
				b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun (LKJIP. SAKIP, LAKIP,LKPJ,LPPD, Dalev, SPIP)	dokumen	6	6	100		
				2	Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan tunjangan dan Jumlah ASN Yang mendapatkan Tamsil	dokumen	15	15	100		
				b	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	dokumen	4	4	100		

					Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan (TU,GU,UP,LS)					
				3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	100		
				b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12	12	100		
				c	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100		
				g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip Dinamis	Bulan	12	12	100		

				4	Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	unit	3	3	100	
				a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	unit	2	2	100	
				b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya (ruang tamu)	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1	1	100	
				5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100	
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat -menyurat	Bulan	12	12	100	
				b	Penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	
				c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100	
				6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	unit	16	16	100	

					pemerintahan daerah	pemerintahan daerah					
				a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	12	12	100		
				b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	3	3	100		
				a	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24 Sadang	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	82,5	87,61	106		

				1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100		
				a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100		
				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	Kegiatan	2	2	100		

					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	24,05	57,14	238	
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	6	6	100		
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	7	7	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100		

					Pembangunan Desa						
				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentrama dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Kegiatan	2	2	100		
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa(Pembinaan PKK,Sosmas,UKS dan BUMDes)	Kegiatan	4	4	100		
				f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP 2 Kdes dan Rakor sembako)	Kegiatan	2	2	100		
				D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	100	100		

				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100		
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100		
				b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100		
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	13	13	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100		
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Jenis komponen instalasi	Jenis	4	4	100		

					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor					
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12	100		
				f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	100		
				g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	1	100		
				a	Sub Kegiatan	Jumlah Unit	Unit	1	1	100		

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Bulan	12	12	100		
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	21	21	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	9	9	100		

				b	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	4	4	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	100		
				d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25 Sempor	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	11	11	100		

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	yang tersusun					
				a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	5	5	100		
				b	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP,SPIP, LPPD)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	6	6	100		
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	orang	16	16	100		
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	dokumen	4	4	100		
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	100		

				a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4	4	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100		
				e	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/ kali	4	4	100		
				f	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	100		
				3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	4	4	100		

					Daerah						
				a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	unit	4	4	100		
				4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100		
				b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100		
				c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	bulan	12	12	100		
				5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	unit	10	10	100		

					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional					
				b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	20	20	100		
				c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	7	7	100		
				d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	unit	2	2	100		
				e	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan banguinan lainnya	unit	5	5	100		
				B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100		

					a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen Perekaman (KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran)	Dokumen	5	5	100		
				C		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Kebumen**	%	100	100	100		
				1		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen)	kegiatan	2	2	100		
					a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	kegiatan	2	2	100		

					1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi**	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	16	16	100		
				b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100		

				c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	1	1	100		
				d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam	kegiatan	2	2	100		
				e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa)	kegiatan	5	5	100		
				e	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes)	kali	16	16	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26 Sruweng	1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	100	85.85	85,85	Ada 3 unsur yang nilainya rendah yaitu : Waktu Pelayanan, Produk, Layanan Persyaratan	Dari ke 3 unsur tersebut akan di sesuaikan dengan SOP dan disosialisasikan ke 21 desa
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jenis	9	9	100		
				a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	Jenis	9	9	100		
				B PROGRAM PENYELENGGAR	Persentase terselelnggaranya	%	100	100	100		

					AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	urusan pemerintahan umum					
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100		
				1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	2	2	100		
				C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Desa dengan Indek Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	%	24,05	57,14	237 ,59		

				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi ,rekomendasi dankordinasipembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	keg	6	6	100		
				a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	21	21	100		
				2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	3	3	100		
				a	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	2	2	100		
				b	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100		
				c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	Desa	21	21	100		

					Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	Keg	1	1	100		
					Jumlah kegiatan musrenbangcam	Keg	1	1	100		
				3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Keg	4	4	100		
				a Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDesa)dan Dansos Sembanko)	Keg	1	1	100		
				D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100		
				1 Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	11	11	100		
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (renja,rka,dpa,dppa, rkap,renstra 2024)	Dokumen	6	6	100		

				b.	Evaluasi Kinerja Perangfkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev,lkpj,sakip,lkjip,profil)	Dokumen	5	5	100		
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan petrangkat daerah	bulan	12	12	100		
				a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji,tunjangan dan tamsil	Orang	15	15	100		
				b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	Dokumen	4	4	100		
				3	Administrasi Umum Perangfkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan	bulan	12	12	100		
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi liostrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100		
				b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12	100		
				c.	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah bulan penyediaan barang	Bulan	12	12	100		

					dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan						
				d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangf-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100		
				e.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100		
				f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	100		
				g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	Bulan	12	12	100		
				4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	0	0	0	Tidak ada pengadaan barang	
				a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	0	0	0		
				5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	12	12	0		

				a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100	
				b.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	
				c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	Bulan	12	12	100	
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	0	0	
				a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	11	11	100	
				b.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	1	1	100	
				c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100	

				. d . Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan /rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kewilayahan	1 Kelurahan Kebumen		A Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisioasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kegiatan musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	presentase terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pembangunan	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	12	12	100		

					Sarana dan Prasarana Kelurahan	drainase(RT 04/ RW 7, RT 2/ RW 1 , Gg Cempaka RT 2/ RW 3,Jln Teratai RW 3 , RT 1/ RW 7 Jln Manggis, Jln sawo RW 5 , Jl Mangga RT 02/ RW7 ,Jl. sawo RT 02/ RW 7 , Jumlah paket pekerjaan rabat beton jalan RT 02/ RW 3, , RT 05/ RW 7, Rt 03/ RW 7), Jumlah Paket Pekerjaan Pembuatan Gorong gorong air Limbah (RT 02/ II)						
				b	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2K, Jumlah Kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, Jumlah Posyandu yang mendapat fasilitasi PMT, Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bank sampah Kelurahan, Jumah Unit RTLH P. Yudianto RT.3/5, P. Heru Kusumadi	Kegiatan Kelompok Paket	5 7 6	5 7 6	100		

					RT.6/5, P. Nanang Setiawan RT.6/5, B. Rukimah RT.6/5, P. Tasmin RT.2/2, P. Sugito RT.2/2., Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK						
				c Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dokumen	3	3	100		
				B Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	jumlah kegiatan penyediaan operasional dan akomodasi bagi para petugas PPKM Mikro dan Jogo Tonggo di Wilayah Kelurahan	Kegiatan	1	1	100		

					Kecamatan	Kebumen					
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	jumlah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga yang positif Covid-19 dan pencegahan Covid-19 di Wilayah Kelurahan Kebumen	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Kelurahan Karanganyar		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	%	100	100	100		

					Ketertiban Umum						
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Bulan	1	1	100		
				b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan jalan (pengaspala jalan), rabat beton dan saluran irigasi	Bulan	4	4	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Julah pelatihan pemadaman kebakaran,menjahit ,kewirausahaaan,penglahn sampah,hidrophonik,setting gambar,leaflet dan jumlah pengadaan APE PAUD	Paket	1	1	100		
				d. Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kelurahan	Dokumen	1	1	100	-	
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIB	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		

					AN UMUM						
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Kelurahan Gombong		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan/Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	Kegiatan	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	Paket	6	5	83	Kode rekening belanja bansos jamban di DPA tidak sesuai Perbup jadi tidak sinkron sehingga tidak dilaksanakan/ diserap	Untuk lebih dicermati antara DPA dan Perbup supaya sama dan Kegiatan tersebut bisa diusulkan

											lagi lewat dinas terkait di tahun depan
				c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	100		
				d	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan	Dokumen	5	5	100		
				B	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penanganan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase penanganan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan penanganan posko PPKM Kelurahan Gombong	Bulan	9	9	100		
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah bulan penanganan posko PPKM Kelurahan Gombong	Bulan	9	9	100		

				Tokoh Masyarakat							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Kelurahan Wonokriyo		A PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian Negara , TNI dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam	Orang	85	85	100		

						Tokoh Masyarakat	penanganan covid 19					
				B		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	74,65	75		
					1	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	74,65	75		
					a	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pekerjaan fisik yang tertangani	unit / paket / lokasi	26	26	100		
					b	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga/pokmas/unit/KK RTM yang terfasilitasi	lembaga /pokmas /unit/KK RTM	18	9	50	pekerjaan perbaikan RTLH 7 unit dan jambanisasi 10 unit tidak bisa terlaksana karena masih adanya rincian / rekening belanja dalam DPPA tidak sesuai dengan Perbup Bansos	mengusahakan usulan penerbitan SK Bupati tetapi tidak dikabulkan
					c	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan	Dokumen	5	5	100		

					masyarakat di kelurahan						
No.	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**OPD / UNIT KERJA**	**KEBIJAKAN**	**URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**	**SATUAN**	**TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**			**PERMASALAHAN**	**UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN**
							TARGET	**REALISASI**	**%**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		5 Kelurahan Plarangan		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat di Kelurahan; Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan; Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah; Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan Desa	% Dok %	100 3 100	100 3 83	100 100 83		

				1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	94	Terdapat kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi tidak dapat diserap karena terkendala pandemi Covid-19. Serta tidak diperbolehkan mengumpulkan masa.	Menunda dan menunggu peraturan/ kebijakan pemda untuk mengatur hal kerumunan masa supaya kegiatan tetap terlaksana (Pada awal tahun 2021 belum muncul kebijakan tersebut)
				a	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pra Musrenbangkel; Jumlah Kegiatan Musrenbangkel; Jumlah Dokumen RKP Kelurahan yang Disusun	Kegiatan Dokumen	2 1	2 1	100 100		

				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi; Jumlah Unit Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Unit	10	10	100		
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan; Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Fasilitasi	Kegiatan	6	5	83%	Terdapat kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi tidak dapat diserap karena terkendala pandemi Covid-19. Serta tidak diperbolehkan mengumpulkan masa.	- Menunggu peraturan/ kebijakan pemda untuk mengatur hal kerumunan masa supaya kegiatan tetap terlaksana. (Pada awal bulan tahun 2021 belum

						TKP2KDes/Kel; Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI dan Hari Jadi						muncul kebijakan tersebut)
				B	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibann Umum	%	100	100	100		
				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertila; se Kecamatan	Kegiatan	3	3	100		
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	3	3	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 Kelurahan Selang		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbangkel Jumlah kegiatan pra musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		

				b	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumla tenaga pengadministrasi keuangan dan umum Jumlah paket pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan (PAUD) Jumlah unit pengdaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras transortasi (jalan pemukiman)	orang paket ruas	2 1 4	2 1 4	100 100 100		
				c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi TKP2KKel Jumlah Kegiatan Pembiaan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW dan LKMK Jumlah Pelaksanaan HUT RI Jumlah Pengelolaan	kegiatan lokasi meja tenis	8 10 5	9 10 0	112,5 100 0	karena harus ada SK dari Bupati	diusulkan/ dibuatkan SK dari Bupati

						Kegiatan Ketentraman Ketertiban Umum (Linmas) Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Jumantik dan Gizi Masyarakat) Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menegah Jumlah Posyandu yang mendapat Fasilitasi PMT Jumlah Paket Sarpras Olahraga						
				d	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	dokumen	5	5	100		
				B	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan	%	100	100	100		

					KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum					
				1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	
				a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertila; se Kecamatan	kegiatan	1	1	100	
				b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	1	100	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7 Kelurahan Bumirejo		A Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan yang Berperan dalam pembangunan Desa	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	%	100	100	100		
				a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pramusrenbangkel dan musrenbangkel	Kegiatan	2	2	100		
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Kegiatan	15	15	100		

					c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitasi TKP2KDes/Kel,Jumlah kegiatan forum kesehatan kelurahan,Jumlah Kegiatan Kepemudaan,Linmas, Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan,, PKK,Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan	8	8	100		
					d	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Sarpras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	1	100		
				B		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Satgas tindak Covid - 19						
				2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Satgas tindak Covid - 19						
					a	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Satgas Covid-19 dan warga masyarakat yang Terkena Covid-19	Kegiatan	12	12	100		

					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
				b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Satgas Covid-19 dan warga masyarakat yang Terkena Covid-19	Warga	100	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Kel Panjaitan		A PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANA DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		

				b Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Bulan	8	8	100		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemeberdayaan Masyaraakat	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpelihatanya saluran darinase dan terpeliharanya jalan	Kegiatan	7	6	85	RTLH tidak dapat terealisasi karena kesalahan rek	sudah berkonsultasi ke Bag Hukum dan BPKAD
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksana kegiatan pembinaan linmas,dan lembaga kemasyarakatan,pe	Bulan	12	12	100		

					mbinaan PKK,dan terlaksanya kegiatan posyandu						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Kelurahan Panjer		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbangkel Jumlah kegiatan pra musrenbangkel	Kegiatan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana	Jumlah Paket Pengaspalan di Jalan Sriti RT 001	Paket	4	4	100		

					dan Prasarana Kelurahan	RW 005 (P=110 M) Jumlah Paket Pengaspalan di Jalan Sriti RT 002, 003, 004 RW 003 (P=240 M) Jumlah Paket Perbaikan Rabat Beton/Jalan Setapak RT 003 RW 002 (P=200 M) Jumlah Paket Perbaikan Rabat Beton/Jalan Setapak RT 003 RW 007 (P=200 M) Jumlah Pengadaan LPJU di wilayah Kelurahan Panjer						
				c	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Maysrakat Perdesaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan PKK yang terlaksana Jumlah Kegiatan Revitalisasi Posyandu yang terlaksana Jumlah pendataan penduduk miskin di wilayah kelurahan panjer	Kegiatan	10	10	100		

						Jumlah pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum Jumlah pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Jumlah pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan Jumlah peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan Jumlah Petugas Linmas Kelurahan Panjer yang terlatih Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang terlaksana						
				2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	%	100	100	100	-	-

				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jumlah Pertemuan Satgas PPKM MIKRO Kelurahan Panjer yang tercukupi	Kali	4	4	100	-	-
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Satgas JOGO TONGGO dan Pemberian Bansos Covid-9 Keluraha Panjer yang tercukupi	Kali	6	6	100	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 Kelurahan Tamanwinangun		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan	%	100	100	100		

					Masyarakat Desa dan Kelurahan					
				a Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pra musrenbangkel dan musrenbangkel	kegiatan	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Paket	4	4	100		
					Jumlah KK miskin penerima bantuan jamban keluarga	Unit	4	4	0	refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah Unit pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Ruas	7	7	100		
					Pembangunan talud jalan RT 03 RW 01 Kelurahan Tamanwinangun	Paket	1	1	100		

					(126 juta)					
					Rabat Beton / Jalan RT. 05 / RW. 02 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen (50 juta)	Meter	200	200	100		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	Unit	4	4	0	refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pos posyandu yang perlu peningkatan gizi (10 posyandu)	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah posyandu yang mendapat pelayanan kesehatan	Kelompok	12	12	100		
					Jumlah Petugas Pengelola Sarana dan Prasarana Persampahan	Orang/ Bulan	24	24	100		
					Jumlah pengadaan perlengkapan olahraga	Paket	1	0	0	refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
					Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI dan Hari Jadi	Paket	1	1	100		
					Jumlah pelatihan pengendalian keamanan dan	Kegiatan	2	2	100		

					keyamanan lingkungan						
					Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan	1	1	100		
					Jumlah pembinaan kelembagaan RT/RW	Kali	5	5	100		
					Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Kali	1	1	100		
					Jumlah kegiatan pembinaan PKK	Kali	3	2	66	refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	Diusulkan kembali di tahun berikutnya
				d Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Dokumen	2	2	100		
				B PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		
				1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		

				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Operasional dan Akomodasi bagi para Petugas PPKM Mikro dan Jogo Tonggo di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun	Kegiatan	1	1	100		
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga yang positif Covid 19 dan pencegahan Covid 19 di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun	Kegiatan	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD / UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 Kelurahan Jatiluhur		A PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		

				1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		
				a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel	Keg	2	2	100		
				b.	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	Terpelihatanya saluran darinase dan terpeliharanya jalan	Paket	3	3	100		
				c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksana kegiatan pembinaan linmas,dan lembaga kemasyarakatan,pembinaan PKK,dan terlaksanya kegiatan posyandu dan verpal data kemiskinan	Kegiatan	13	13	100		
				B	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya							

					Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum						
				a	Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100		
				b	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Prosentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100		

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

1) Refocusing anggaran dan pembatasan aktivitas karena adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
2) Untuk Kecamatan Gombong belum bisa cetak KTP sendiri;
3) Di Kelurahan Gombong terdapat Kode rekening belanja bansos jambandi DPA tidak sesuai Perbup jadi tidak sinkron sehingga tidak dapat dilaksanakan.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

1) Beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual, kemudian untuk kegiatan yang terkena refocusing anggaran akan dianggarkan kembalidi tahun berikutnya;
2) Mengusulkan untuk dapat dicukupi peralatan cetak KTP;
3) Mencermati antara DPA dan Perbup supaya sinkron dan mengusulkan kembali di tahun berikutnya.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program masuk kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.7. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yang meliputi:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila;
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut :

Tabel 3. 95 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Badan Kesbangpol**		**A PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**jumlah per 100.000 penduduk**	**21,43**	240,12	1.120,49	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan	Meningkatnya rasio elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan karena adanya sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan nilai-nilai luhur kebangsaan, serta adanya pembentukan Kampung Pancasila sehingga target rasio elemen masuarakat yang mendaptkan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sebanyak 334 orang realisasi sebanyak 3270 orang

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen Tahun 2022	Kegiatan	**23**	23	100		
				B PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	**Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses**	**%**	**67,59**	0	0	Tahun 2022 tidak ada Pemilu, Anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam politik dengan diselenggarakannya pendidikan politik.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**pemilihan umum**					dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemeritahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah serta pematauan situasi politik di gunakan untuk sosialisasi forum diskusi politik dan bantuan keuangan parpol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilu	Pendidikan politik bagi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum-forum diskusi politik. Adapun sasaran forum diskusi politik adalah masyarakat umum serta calon pemilih pemilih pemula.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	kegiatan	**3**	**3**	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	kegiatan	**4**	5	125		
				C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**100**	100	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kegiatan	**2**	2	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	Orang	**150**	150	100		
			sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Dokumen data base ormas,/LSM dan Partai Politik	dokumen	1	1	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**jumlah per 100.000 penduduk**	**32,14**	**265,82**	827	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.	**Peningkatan Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang signifikan disebabkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan sosiliasi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dari target 438 orang terealisasi 3.620 orang.**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**lokasi**	**5**	**59**	1.180	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan	**Penambahan lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya karena adanya penambahan anggaran.**
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	lokasi	3	59	1.966	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan	Penambahan jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah karena adanya penambahan anggaran.

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sda	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan narkoba dan pemilihan duta anti narkoba	lokasi	2	2	100		
				E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi**	**%**	**60,71**	100	164	Realisasi melebihi target yang telah ditetapkan	**Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi telah 100% ditangani.**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**%**	**5**	**5**	100		
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dan Penciptaan Kondusivitas Wilayah	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Rakor FKDM Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Rakor Forkopimda dan Forkopimcam	kali	**4**	4	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewaspadaan, serta penanganan konflik							
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Rakor Timdu penanganan konflik tingkat kecamatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik	kali	**2**	2	100		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD /UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik	dokumen	**1**	1	100		

Berdasarkan Tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2022 di atas dapat diketahui permasalahan dan upaya untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

b. Permasalahan

Permasalahan dalam bidang politik yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan umum Kepala Daerah juga masih rendah serta terjadinya konflik politik dalam proses pemilu/pemilihan umum Kepada Daerah.

c. Upaya Mengatasi Permasalahan

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam politik dengan diselenggarakannya pendidikan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui forum-forum diskusi politik yang berlokasi di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen. Adapun sasaran forum diskusi politik adalah tokoh-tokoh masyarakat serta calon pemilih pemula.

d. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogrampada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pemerintahan umum diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 461,30 % atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 316 %. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 145,98 % atau kategori sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan unsur pemerintahan umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 96 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	KINERJA 2022			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	%	-	60,71	100	164	78,57

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kebumen 2022

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain:

1) Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani;
2) Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah serta Puskomin (Pusat Komunikasi) yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik;
3) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

3.1.8. Evaluasi Capaian

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 apabila dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2021-2026 dari 8 indikotor kinerja terdapat 2 IKU Daerah yang tidak mencapai target antara lain :

1. Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dari target 20,50-21,00% dengan realisasi 18,72% atau capaian kinerja 91,32%
2. Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dari target 59,9% dengan realisasi 59,19% atau capaian kinerja 98,8%

Sedangkan 6 IKU Daerah yang telah mencapai target pada tahun 2022 antara lain :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Indeks Pembangunan Manusia
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Tingkat Kemiskinan
6. Indeks Kesalehan Sosial

Turunan dari IKU Daerah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Sasaran dari masing-masing misi yang secara terinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 97 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	**2**	**3**		**4**			**5**
	MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi						
1	**Tujuan**						
	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33	62,81	102,41%
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00	87,69	105,65%
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	Nilai	67,00	65,49	97,75%
		2	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	100%
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel		Indeks SPBE	indeks	3,43	3,44	100,29%
	MISI 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						
2	**Tujuan**						
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	indeks	70,57	70,79	100,31%
	Sasaran						
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	tahun	73,60	73,7	100,14%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,74	7,85	101,42%
		2	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,54	13,36	98,67%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,25	93,05	99,8%
		2	Cakupan Perlindungan Anak	%	100,00	100,00	100,0%

	MISI 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan						
3	**Tujuan**						
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05-5,36	4,50	111,11%
	Sasaran						
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.362,92	8.143,66	151,85%
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,72	7.101,87	163,65%
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier		PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.674,74	17.356,42	148,67%
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.184,58	4.109,00	98,19%
4	**Tujuan**						
	Meningkatkan pemerataan pembangunan		Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,50-21,00	18,72	91,32%
	Sasaran						
1	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan	%	16,00-17,00	16,41	103,47%
2	Berkurangnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,51-5,58	5,92	93,91%
	MISI 4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
5	**Tujuan**						
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	59,9	59,19	98,8%
	Sasaran						
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	55,34	102,84%

2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,10	68,17	92,00%
	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat						
6	**Tujuan**						
	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial	indeks	76,00-76,50	80,36	105,05%
	Sasaran						
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	100,00	164,72%
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Persentase budaya yang dilestarikan	%	25,05	34,89	139,28%
7	**Tujuan**						
	Mewujudkan kondusitivas wilayah		Indeks Kondusivitas Wilayah	%	100,00	100,00	100,00%
	Sasaran						
1	Meningkatnya ketertiban masyarakat		Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00%
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100,00	100,00%

Tabel 3. 98 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	**Lebih dari 100%**	**Baik Sekali (BS)**
2	**Lebih dari 85% sd. 100%**	**Baik (B)**
3	**Lebih dari 65 % sd. 85%**	**Cukup (C)**
4	**Lebih dari 50% s.d 60 %**	**Kurang (K)**
5	**Kurang dari 50 %**	**Sangat Kurang (SK)**

Sumber Data : Permenpan 53 Tahun 2014

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

A. Tujuan Pertama : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan pertama sebagai berikut:

Tabel 3. 99 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	59,54	61,33	62,81	102,41%	86	90,60 %

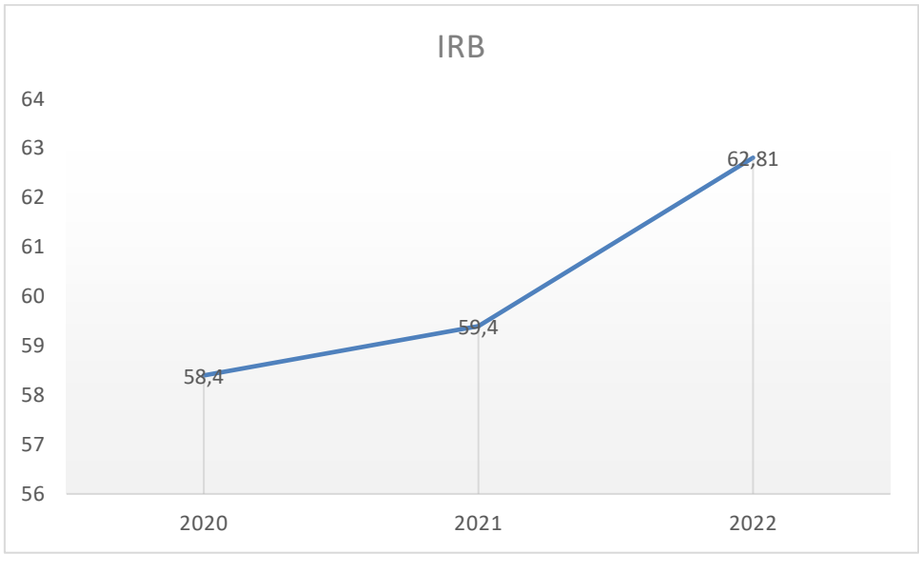
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen, 2022

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 62,81 dengan capaian kinerja 102,41 % atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja IRB tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90,60 %

Nilai IRB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 3. 100 Realisasi IRB 2020-2022



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen, 2022

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemkab Kebumen. Adapun rekomendasi untuk meningkatkan indeks re antara lain:

1. Menyusun rencana agen perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
2. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area perubahan pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi aplikasi ELEGAN sampai dengan seluruh PD. Selain itu, perlu mengintegrasikan ELEGAN dengan JDIH Kabupaten Kebumen;
4. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan dapat mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
5. Melaksanakan assessment terhadap seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal;
6. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integrasi ditingkat unit kerja.
8. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menyusun laporan implementasi masing-masing kebijakan pengawasan internal dan integritas.

Atas rekomendasi tersebut, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi kedepan antaralain:

1. Fasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana implementasi manajemen perubahan pada perangkat daerah
2. Sosialisasi dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area perubahan pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja
3. Integrasi ELEGAN dengan JDIH Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi ELEGAN
4. Fasilitasi penyusunan penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 kepada seluruh perangkat daerah

5. Assessment terhadap seluruh pegawai akan dilaksanakan secara bertahap dan bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat
6. Melaksanakan perubahan kebijakan terkait Standar Pelayanan dan menyusun rencana tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat
7. Pendampingan dan fasilitasi pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah serta menyusun laporan implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas.

Tujuan Pertama diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan Pertama : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), rumusan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja IKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 101 Capaian IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,02	83,00	87,69	105,65%	86	101,97%

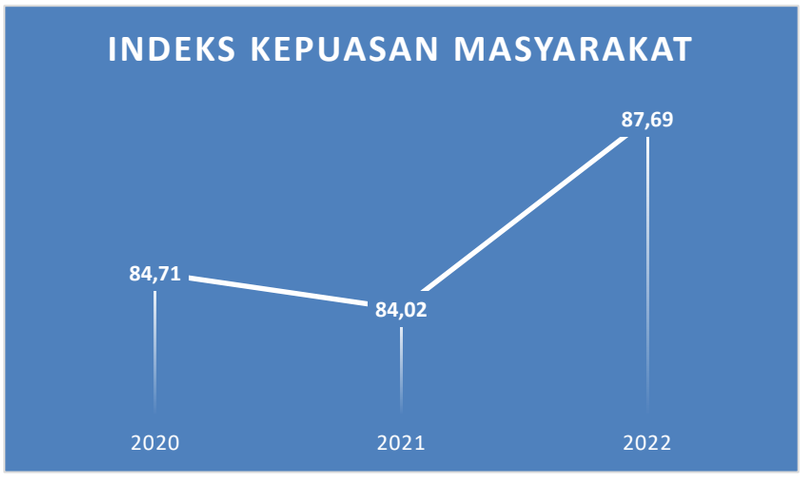
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

IKM Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 87,69 dengan capaian kinerja 106,54 % atau kategori capaian **Baik Sekali.**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja IKM tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 101,97 %

Nilai IKM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 3 Capaian IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

Nilai IKM telah mencapai target yang telah ditetapkan namun demikian masih ada 3 (unsur) dari 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang masih perlu perbaikan. Adapun unsur yang masih perlu perbaikan dan rencana tindaklanjutnya antaralain:

1. Unsur Waktu Pelayanan : Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan kepastian waktu pelayanan, dengan senantiasa memberikan keterbukaan informasi publik, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan sesuai ketentuan;
2. Unsur Sarana dan Prasarana : Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan public dengan ketersediaan sarana *front office*, ruang tunggu yang nyaman: kursi tunggu, nomor antrian, monitor/ televisi, AC/kipas angin, toilet bersih, area parker serta menyediakan fasilitas khusus bagi disabilitas/ pengguna berkebutuhan khusus;
3. Unsur Prosedur : Penguatan unsur prosedur pelayanan dengan menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan baik secara manual melalui papan informasi, booklet, phamflet maupun secara elektronik melalui website, sosial media, dll.

b. Sasaran 2 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB dan Opini BPK yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Realisasi dan capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 102 Capaian Nilai SAKIP dan Opini BPK KAbupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Nilai SAKIP	65,18	67,00	65,49	97,75%	77	85,05%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi 65,49 dengan capaian kinerja 97,75 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 sedikit lebih tinggi dikarena Perubahan Indikator Evaluasi Penilaian berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mereviu kembali pohon kinerja/ logical framework yang telah disusun dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan reviu teradap dokumen perencanaan agar sasaran dapat lebih berorientasi hasil dan indikator kinerja yang digunakan memenuhi kriteria SMART. Selain itu, baik Pemda maupun PD dapat memastikan keselarasan antar dokumen RPJMD/Rentra, PK dan IKU
3. Menyempurnakan IKU PD dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja. Selain itu, perlu memastikan formulasi perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja
4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja;
5. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya;
6. Meningkatkan kesetaraan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan informasi yang memadai tentang analissi faktor pengungkit capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan (langkah kerja/target) yang spesifik untuk perencanaan tahun berikutnya;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut PD atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi internal dan pelaporannya.

Sedangakan realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan dan mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dicapai pada tahun 2021. Opini tersebut diberikan atas penyajian dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang telah memenuhi lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, dalam hal ini termasuk tidak boleh ada pagu minus, sehingga harus cermat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.

Selain itu, penyajian laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. Ada pula Sistem Pengendalian Internal di lingkungan entitas pelaporan, serta penatausahaan barang milik daerah.

Dari sisi pelaksanaan APBD, penghargaan WTP merupakan bukti nyata, bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik kepada masyarakat. Komitmen mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara secara transparan dan akuntabel, serta telah sesuai kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan tercapainya Opini WTP dari BPK pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen mampu mempertahankan capaian tersebut selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen, karena untuk mempertahankan opini tersebut diperlukan komitmen, kerja keras, semangat, dan sinergi tiada henti serta dukungan semua pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Guna mempertahankan Opini WTP tersebut pemerintah Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK, diantaranya :

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memvalidasi dan memutakhirkan data kepesertaan penerima bantuan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPJS terkait penggunaan data hasil pemutakhiran sebagai dasar pembayaran asuransi kesehatan dimasa berikutnya : dan

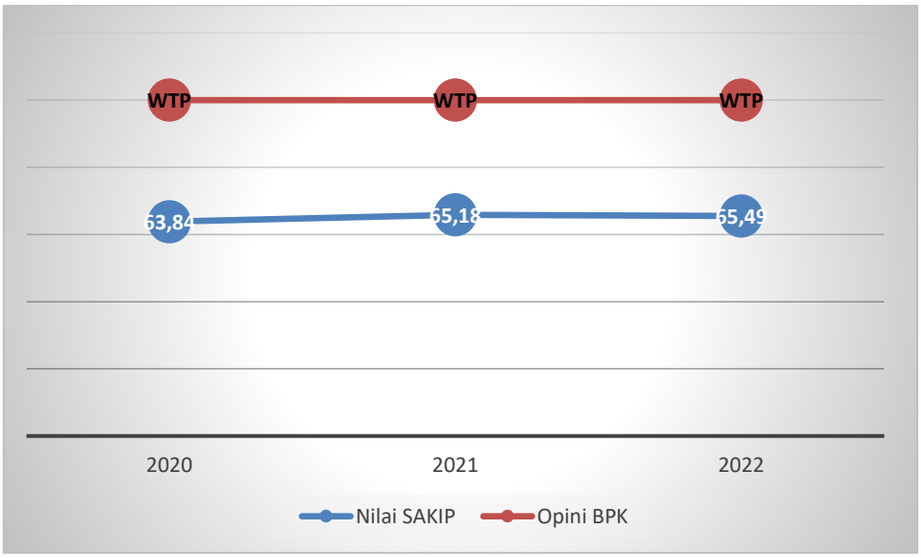
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk melengkapi informasi atas aset tetap dalam KIB, melakukan penatausahaan sertifikat tanah dengan tertib, serta menyesuaikan kodifikasi barang antara SIMDA BMD dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan terhadap rekomendasi tersebut diantaranya :

1. Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi bersama antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan guna memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut dapat tepat sasaran.
2. Melaksanakan pensertifikatan tanah pada tahun 2022 dan 2023, serta melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah pada tahun 2023.

Adapun grafik perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen tahun 2021 s.d. 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3. 4 Perkembangan Nilai SAKIP dan Opini BPK Kabupaten Kebumen Tahun 2021 s.d. 2022



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

c. Sasaran 3 dari Tujuan Pertama : Terwujudnya birokrasi yang kapabel

Terwujudnya birokrasi yang kapabel diukur dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementertian PAN dan RB.

Realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 103 Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks SPBE	3,05	3,43	3,44	100,29%	3,6	95,56%

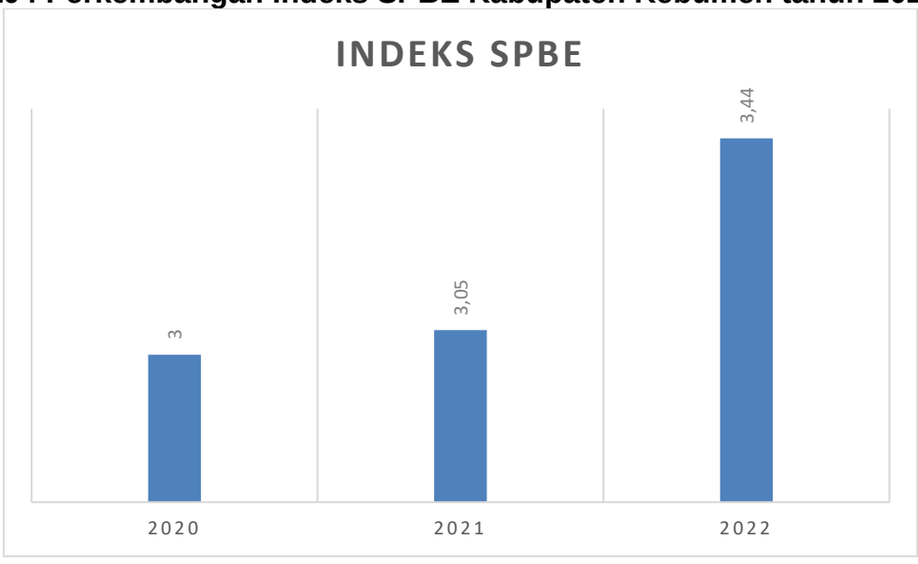
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

Indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 3,44 dengan capaian kinerja 100,29 % atau kategori capaian **Baik Sekali**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks SPBE tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 95,56 %

Indeks SPBE dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3. 104 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2020 s.d. 2022



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

Indeks SPBE tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun demikian masih ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti terkait pelaksanaan SPBE. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen SPBE
2. Melakukan Audit TIK

Terhadap rekomendasi di atas **solusi atau rencana tindak lanjut** yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen SPBE
2. Melakuan audit internal TIK

B. Tujuan Kedua : Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

Tabel 3. 105 Capaian IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,05	70,57	70,79	100,31%	72,5	97,64%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kebumen, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 70,79 dengan capaian kinerja 100,31 % atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja IPM tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 97,64 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

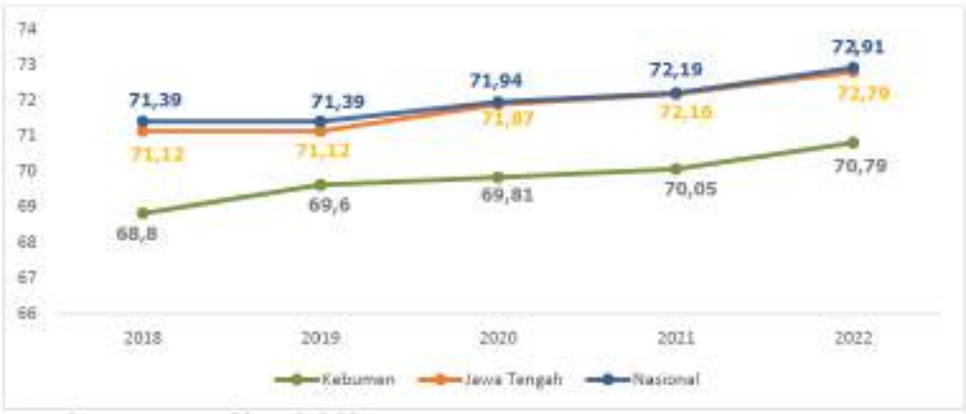
IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,99 yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,8 dan pada tahun 2022 sebesar 70,79 atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49. Hal ini menunjukan kondisi tingkat

kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 5 tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi.

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:

Grafik 3. 5 Perkembangan Indeks Pembengunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Tujuan Kedua diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Adapun realisasi dan capaian dari indikator kinerja tujuan kedua sebagai berikut:

Tabel 3. 106 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2022

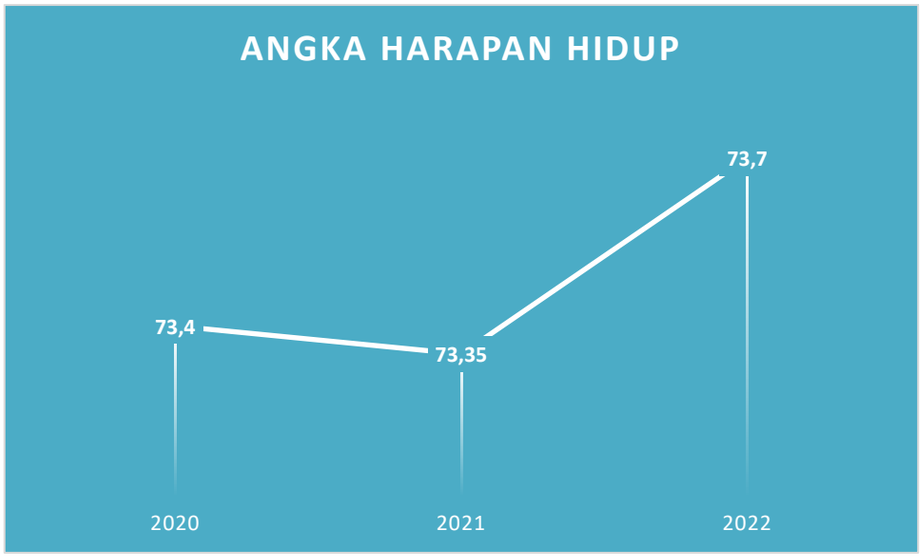
No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Angka Harapan Hidup	73,35	73,60	73,70	100,14%	74	99,59%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 73,70 dengan capaian kinerja 100,14 % atau kategori capaian Sangat Baik. Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja AHH tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 99,59 %

Angka Harapan Hidup dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 6 Realisasi Angka Harapan Hidup 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang akan datang antara lain:

1. Pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upayan kesehatan masyarakat dengan integrasi paket pelayanan kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan standarisasi dan peningkatan pelayanan dasar untuk memperkuat layanan primer

3. Penguatan kampanye dan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan penguatan peran kader sebagai agen pemberdayaan dan revitalisasi struktur layanan primer di Puskesmas, posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya
5. Peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dengan pembangunan rumah sakit menjadi Rumah Sakit dengan layanan unggulan khusus nya pada stroke hipertensi, cancer, urologi.

b. Sasaran 2 dari Tujuan Kedua : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 107 Capaian RLS dan HLS Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,55	7,74	7,85	101,42%	8,14	96,44%
2	Harapan Lama Sekolah	13,35	13,54	13,36	98,67%	13,94	95,84%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019).

Realisasi dari indikator kinerja RLS telah mencapai target dengan realisasi 7,85 tahun atau dengan capaian 101,42% atau kategori capaian **Sangat Baik**, sedangkan realisasi dari indikator kinerja HLS belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi 13,36 atau dengan capaian 98,67% atau ketegori capaian **Baik**.

Permasalahan tidak tercapainya target Harapan Lama Sekolah (HLS) antara lain:

1. Kemiskinan
2. Putus Sekolah
3. Tidak bersekolah diusia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (bekerja, mengikuti orangtua bekerja di luar kota, dan kemauan bersekolah rendah)
4. Pernikahan dini

5. Usia sekolah hanya mengaji di pondok pesantren dan tidak bersekolah di sekolah formal/nonformal

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Pengumpulan data untuk Anak Tidak Sekolah- Anak tidak melanjutkan dan Anak Putus Sekolah
2. Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah utamanya di Pondok Pesantren
3. Beasiswa Kurang Mampu (BKM) untuk siswa kelas 6 SD/MI dan siswa 9 SMP/MTs (diberikan dalam rangka membantu melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya)
4. Meningkatkan layanan bidang Pendidikan Non Formal lembaga pendidikan nonformal (SKB dan PKBM)

c. Sasaran 3 dari Tujuan Kedua : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Cakupan Perlindungan Anak. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 108 Capaian IPG dan CPA Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Pembangunan Gender	93,05	93,25	93,05	99,79%	93,65	99,36%
2	Cakupan Perlindungan Anak	100	100,00	100,00	100%	100	100,00%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Realisasi dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 93,05 tahun atau dengan capaian 99,79 % atau kategori capaian **Baik**, sedangkan realisasi dari indikator kinerja Cakupan Perlindungan Anak telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100% atau dengan capaian 100% atau ketegori capaian **Baik**.

Permasalahan dalam upaya mencapai target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan Perlindungan Anak (CPA) antara lain:

1. Umur Harapan Hidup pada laki-laki lebih rendah
2. Rata-rata lama sekolah pada Perempuan masih rendah
3. Pengeluaran perkapita pada perempuan masih rendah

4. Masih tingginya perkawinan di usia anak
5. Masih banyaknya kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan pola hidup sehat pada laki-laki (tidak merokok, begadang, minum minuman beralkohol)
2. Meningkatkan upaya Gerakan Ayo Bersekolah untuk mencegah Angka Putus Sekolah (APS)
3. Meningkatkan upaya dalam peningkatan ekonomi bagi perempuan (pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan)
4. Melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak ke masyarakat dan ke sekolah
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi lembaga layanan dr Tingkat. Kabupaten, Kecamatan dan Desa
6. Melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak (Sekolah Ramah Anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Puskesmas Ramah Anak)

C. Tujuan Ketiga : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah diukur dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi. Realiasi dan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 109 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,71	4,05-5,36	4,50	111,11%	5,00-5,50	90,00%

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target, dengan realisasi 4,5 dengan capaian kinerja 111,11 % atau kategori capaian **Sangat Baik.**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 90%.

Tujuan Ketiga diturunkan menjadi 4 (emat) sasaran yang secara rinci sebagai berikut:

Sasaran 1 dari Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer

Sasaran 2 dari Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder

Sasaran 3 dari Tujuan ketiga : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier

Sasaran 4 dari Tujuan ketiga : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah

Sedangkan Indikator Kinerja masing-masing Sasaran secara berurutan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 110 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	PDRB ADHK Sektor Primer	5.090,09	5.362,9	8.143,7	151,85%	6.643,72	122,58%
2	PDRB ADHK Sektor Sekunder	4.118,94	4.339,7	7.101,9	163,65%	5.376,15	132,10%
3	PDRB ADHK Sektor Tersier	11.080,81	11.674,7	17.356,4	148,67%	14.462,95	83,33%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	3.971,70	4.184,6	4.109,0	98,19%	5.183,96	79,26%

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 3,71 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,45 persen. Kemudian pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 5,79 persen, masih berada di bawah capaian Jawa Tengah sebesar 5,39 persen.

Tahun 2022, berdasarkan angka realisasi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu 58,46 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28,31 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 17,73 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -1,18 persen. Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan tertanganinya kasus Covid-19 melalui program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah.

Struktur PDRB Kabupaten Kebumen yang ditunjukkan dari distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2022 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 21,78 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,38 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,74 persen. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04 persen.

D. Tujuan Keempat : Meningkatkan pemerataan pembangunan

Meningkatkan pemerataan pembangunan diukur dengan indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia). Realiasi dan capaian indikator kinerja Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 111 Ketimpangan Pendapatan

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	20,45	20,50-21,00	18,72	91,32%	22	85,09%

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 18,72 dengan capaian kinerja 91,32 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Ketimpangan Pendapatan tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 85,09 %

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu 18,72 persen yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Tujuan Keempat diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan keempat : Berkurangnya penduduk miskin

Sasaran Berkurangnya penduduk miskin diukur dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 112 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Tingkat Kemiskinan	17,83	16,00-17,00	16,41	103,47%	13,00-13,50	78,44%

Sumber Data : BPS

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 16,41 dengan capaian kinerja 103,47 % atau kategori capaian baik sekali.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan tahun 2022 lebih rendah dengan realisasi 16,41 (semakin rendah tingkat kemiskinan capaian semakin baik) dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 78,44 %

Tingkat Kemiskinan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahuhn 2022



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen

Apabila dilihat pada Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen semakin menurun, ini menandakan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan terus berlanjut. Realisasi target tingkat kemiskinan tahun 2022 tercapai, namun masih ada beberapa tantangan atau permasalahan dalam upaya mencapai target Tingkat Kemiskinan kedepan, antara lain:

1. masih kurangnya lapangan pekerjaan
2. rendahnya pendapatan perkapita masyarakat
3. masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan
4. tingginya pengeluaran masyarakat miskin
5. update calon data peserta KPM yang diusulkan belum tersistem, terarah dan berkelanjutan

6. pemberdayaan masyarakat miskin belum optimal

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain:

1. memperluas lapangan pekerjaan
2. menumbuhkan kewirausahaan masyarakat
3. mendorong pembangunan di kantong-kantong kemiskinan
4. perlu dibangun sistem updating data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lebih baik
5. optimalisasi pemberdayaan bagi masyarakat miskin

b. Sasaran 2 dari Tujuan keempat : Berkurangnya pengangguran

Sasaran Berkurangnya pengangguran diukur dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Realiasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 113 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,03	5,51-5,58	5,92	93,90%	5,10-5,20	75,67%

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 5,92 dengan capaian kinerja 93,90 % atau kategori capaian **Baik**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan tahun 2022 lebih tinggi 1,42 dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 78,44%

Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2022

Permasalahan dalam upaya mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain:

1. Kondisi Pencari Kerja setiap Tahun Rata-rata diatas 14.000 orang,sementara jumlah lowongan pekerjaan tidak banyak sehingga disparitis antara jumlah lowongan kerja yang harus disediakan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja akan menyebabkan banyak pencari tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Era Revolusi Industri 4.0 berdampak positif dan negatif kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan, Era tersebut memang memunculkan jenis jabatan/pekerjaan baru namun juga menghilangkan jenis/pekerjaan lama yang sudah ada.Teknologi Informasi sangat berpengaruh terhadap proses produksi di perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia menjadi dilakukan secara Komputerisasi.Oleh karena itu Pencari Kerja juga harus respon terhadap perkembangan Zaman.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antara lain :

1. Bersinergi dengan Sekolah dan Universitas dalam upaya mendorong transformasi/paradigma dalam era sekarang dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ketenagakerjaan melalui Rakor dengan Kepala Sekolah SMA/SMK/MA yang nantinya diimplementasikan dalam kurikulum yang bisa link dengan dunia kerja
2. Memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta Career Development center (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi agar berupaya bagaimana alumni dapat bekerja
3. Intervensi Pencari Kerja dengan kegiatan Mini Job Fair, Job Fair,serta Job Canvasing (mencari lowongan kerja dan memasarkan tenaga kerja) kepada perusahaan,
4. Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri ke Pencari Kerja dan Masyarakat

5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dengan bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten
6. Memaksimalkan Website dan Media Sosial Dinas Tenaga Kerja dalam menginformasikan tentang kegiatan Disnaker dan layanan kerja secara updat

E. Tujuan Kelima : Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	56,06	59,90	59,19	98,81%	71,82	82,41%

Sumber : DISPERKIMHUB, DPUPR dan DLHKP Kab. Kebumen

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi 59,19 dengan capaian kinerja 98,81% atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 82,41%

Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dihitung dari rumusan 0,7 x (indeks kualitas infrastruktur daerah (dalam %)) + 0,3 x (p (dalam %)). Adapun perhitungan rincian sebagai berikut:

Rincian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	2	3	4 = (2*3)
Indeks kualitas infrastruktur daerah	55,34	0,7	38,74
Indeks kualitas lingkungan hidup	68,17	0,3	20,45
Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			59,19

Sumber : DISPERKIMHUB, DPUPR dan DLHKP Kab. Kebumen

Secara rinci penjelasan perhitungan Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan dari indikator sasaran berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan kelima : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Realiasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	52,47	53,81	55,34	102,84%	70,69	78,29%

Sumber : DISPERKIMHUB dan DPUPR Kab. Kebumen

Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 55,34 dengan capaian kinerja 102,84 % atau kategori capaian **Sangat Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 78,29 %

Indeks Kualitas Daerah didapat dari rumus perhitungan akumulasi indeks infrastruktur pekerjaan umum, indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dan indeks infrastruktur perhubungan dibagi 3. Secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Nama Indeks	Realisasi 2021	Realisasi 2022
A	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	58,41	57,22
B	Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	27,12	35,26
C	Indeks infrastruktur perhubungan	71,89	73,55
	Indeks kualitas infrastruktur daerah = (A+B+C)/3	52,47	55,34

Sumber: DPU dan DISPERKIMHUB Kab. Kebumen

Realisasi Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian masih ada beberapa tantangan atau permasalahan dalam mencapai target, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efeketif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
2. Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
3. Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
4. Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
5. Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau

6. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
7. Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Anggaran untuk penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi beberapa kewenangan yaitu kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk masing- masing kewenangan belum sesuai dengan yang direncanakan.
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sedot tinja sehingga terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dari limbah domestik.
10. Sedangkan untuk pencapaian target cakupan rumah layak huni terkendala dengan ketersediaan anggaran.
11. Masih kurangnya perlengkapan jalan sehingga masih sering terjadi kemacetan dan kecelakaan yang mengancam keselamatan transportasi dan mengurangi kenyamanan masyarakat berlalulintas.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

1. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan Operasi dan pemeliharan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
3. Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar Desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
4. Mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase secara optimal serta berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Untuk penanganan kawasan kumuh diupayakan dengan meningkatkan alokasi anggaran melalui usulan kepada instansi di tingkat provinsi maupun pusat, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten diprioritaskan untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Sedangkan untuk pencapaian cakupan rumah layak huni teah dilakukan pendataan Kembali dengan aplikasi Si Rumah

b. Sasaran 2 dari Tujuan kelima : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

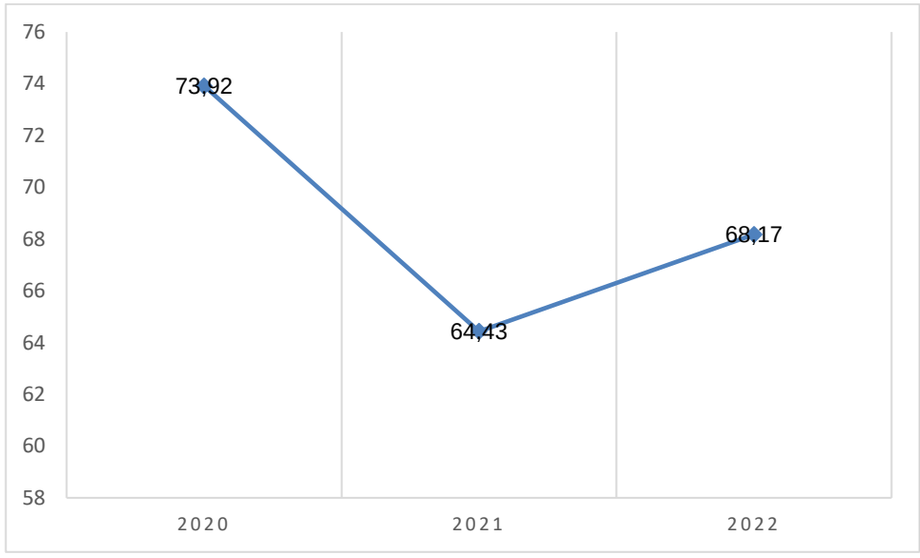
No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,43	74,10	68,17	92,00%	74,45	91,56%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi 68,17 dengan capaian kinerja 92 % atau kategori capaian **Baik.**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 91,56%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik IKLH Kabupaten Kebumen 2020-2022

Realisasi IKLH Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada tahun 2021 dan naik pada tahun 2022 hal ini dikarenakan ada perubahan dalam sistem evaluasi IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Permalahan dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode laporan IKLH yang pada tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari kementerian LHK. Kendala dari input data dengan aplikasi antara lain

- adanya batasan waktu input serta verifikasi data yang dilakukan oleh provinsi da pusat.
- Penurunan nilai IKA cukup signifikan karena dari hasil input data yang dilakukan Dinas Perkim LH Kabupaten Kebumen, dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi yang berasal dari data waduk / embung karena kurangnya parameter pokok IKA.
- Penurunan nilai IKL dipengaruhi oleh input data Kabupaten yang sebagian besar tidak teverifikasi karena kurangnya peta dan koordinat lokasi lahan.

Solusi atau Strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki indikator kualitas lingkungan hidup terdiri Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan(IKL) agar dari predikat sedang naik menjadi baik antaralain :

a. Perbaikan nilai IKA dilakukan antara lain dengan meningkatkan jumlah data terverivikasi yaitu

dengan menambah parameter pengujian pada lokasi waduk dan embung yaitu nitrogen total dan klorofil.

b. Agar diperoleh data yang lebih valid dan representatif tentang mutu lingkungan hidup, maka sangat direkomendasikan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan intensitas pemantauan kualitas lingkungan.
c. Untuk perbaikan nilai IKU, dengan cara mengkaji kembali lokasi pantau untuk kawasan padat penduduk dan transportasi, agar nilai IKU yang dihasilkan sesuai kriteria.
d. Perbaikan nilai IKL dengan cara melakukan penambahan data koordinat dan peta RTH sempada sungai, pantau, dan jalan yang dapat menambah luasan RTH.

F. Tujuan Keenam : Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat

Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kesalehan Sosial	75,70	76,00-76,50	80,36	105,05%	80,00-80,50	74,45

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kebumen

Indeks Kesalehan Sosial pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 80,36 dengan capaian kinerja 105,05 % atau kategori capaian **Sangat Baik.**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Kesalehan Sosial tahun 2022 lebih tinggi dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 74,45%.

Indeks Kesalehan Sosial dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Permasalahan dalam upaya mencapai target Indeks Kesalehan Sosial antara lain:

1. Masih ada kesenjangan antara nilai-nilai kesalehan yang terkandung dalam ajaran agama dengan cara pandang sosial dan perilaku sosial pemeluknya.
2. Nilai-nilai luhur dalam ajaran agama belum secara optimal menjadi landasan berperilaku sosial yang baik.
3. Perilaku sosial yang berbasiskan nilai-nilai dalam ajaran agama belum sepenuhnya menjadi daya dorong untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan target kinerja yang akan datang antarlain:

1. peran sosial tokoh agama, Lembaga keagamaan, dan hubungan antar tokoh agama itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kegiatan moderasi beragama tentunya penting juga menjadi bagian dari program pembangunan di bidang Pendidikan.
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah terlaksana di Kabupaten Kebumen yang sudah berjalan harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperluas bahan kajian keagamaan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

3. Kepedulian sosial perlu lebih ditingkatkan melalui kordinasi dengan dinas terkait dan organisasi masyarakat keagamaan, termasuk dalam kegiatan penggalangan dana dan mobilisasi relawan saat terjadi bencana. Untuk meningkatkan kepedulian sosial perlu ditingkatkan kegiatan Desa Tanggap Bencana tidak hanya untuk mengatasi masalah internal di desanya sendiri tapi juga terlibat aktif dalam kegiatan bencana di daerah lain. Sosialisasi penggalangan dana untuk daerah yang terkena bencana.
4. Permasalahan sampah dan pengelolaannya merupakan tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah dengan mendorong masyarakat desa untuk aktif dalam pengelolaan sampah termasuk program daur ulang sampah.
5. Hasil IKS 2 tahun di Kabupaten Kebumen dapat menjadi dasar kelayakan dan menjadi faktor pendorong investasi (ex terlaksananya KIE/Kebumen Internasional Expo) dapat ditingkatkan agar memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya di Kabupaten Kebumen & pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen.
6. Mempertahankan tingkat solidaritas antar umat beragama melalui forum-forum komunikasi antar umat beragama dan kegiatan bakti sosial bersama.
7. Peningkatan penggunaan media sosial perlu pengarahan dan sosialisasi yang terus menerus untuk menguatkan moderasi beragama di media sosial, bijak bermedia sosial, bijak menanggapi berita-berita hoaks yang dapat memicu perpecahan antar umat beragama.

Tujuan Keenam diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan keenam : Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan

Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan diukur dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kesalehan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100	60,71	100,00	164,72%	78,57	127,28%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen, 2022.

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 164,72 % atau kategori capaian **Sangat Baik.**

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang

SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi tahun 2022 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 127,28%.

Rumusan Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi didapat dari Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani (JKD) dibagi Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi (JKT) dikalikan 100%.

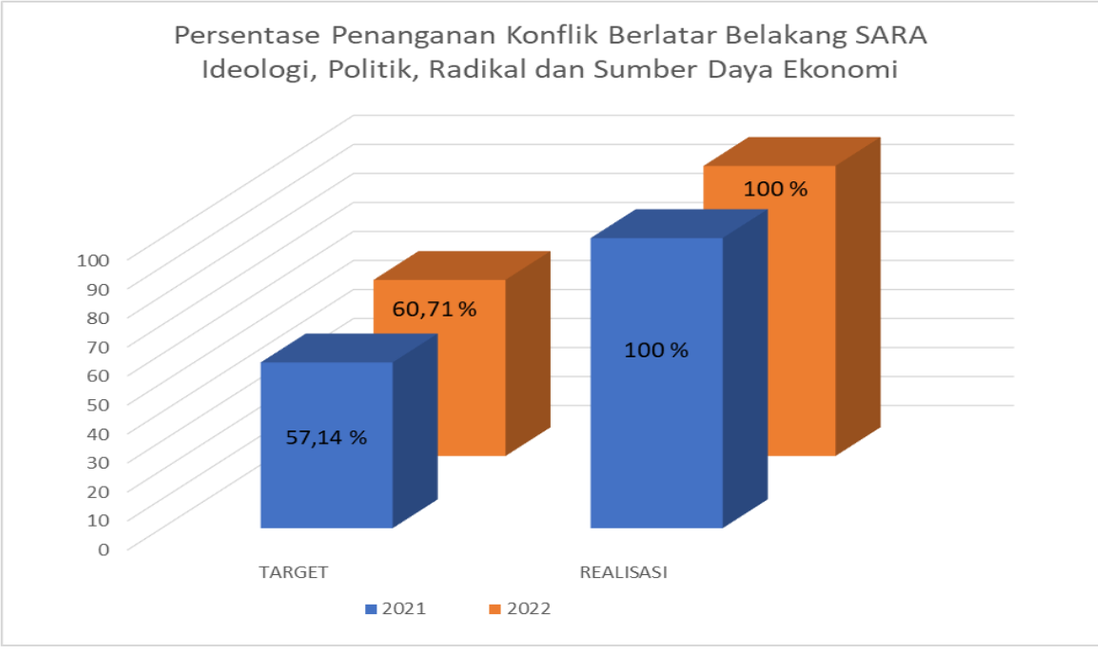
Secara rinci perbandingan jumlah konflik yang ditangani sebagai berikut sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Terjadi	Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani
2020	0	0
2021	5	5
2022	40	40

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen, 2022.

Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Indikator Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	2021	57,14 %	100%	175,01%
	2022	60,71%	100%	164,72%



Permasalahan dalam upaya mencapai target Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi antara lain:

1. Belum maksimalnya fungsi intelijen dalam merealisasikan sistem deteksi dini, cegah dini dan laporan cepat kepada penentu kebijakan serta belum terbentuknya jejaring informasi melalui pembentukan

FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di tingkat Desa dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah.

2. Meningkatnya potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan daerah seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi.
3. Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan target kinerja yang akan datang antara lain:

1. Telah terbentuknya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani.
2. Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta peningkatan peran Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna dalam pencegahan dini maupun dalam penanganan konflik.
3. Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.
4. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan fasilitasi dan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
5. Fasilitasi penanganan konflik sosial dan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.

b. Sasaran kedua dari tujuan ke enam : Meningkatnya pembangunan kebudayaan

Meningkatnya pembangunan kebudayaan diukur dengan indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan, dengan, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase budaya yang dilestarikan	30,00	25,05	34,89	139,28%	43,05	81,04%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen 2022

Persentase budaya yang dilestarikan pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 34,89% dengan capaian kinerja 139,28% atau kategori capaian Baik Sekali.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase budaya yang dilestarikan tahun 2022 lebih tinggi dengan realisasi 34,89% dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 81,04 %.

Rumusan Persentase Budaya yang dilestarikan adalah persentase kesenian yang dikembangkan ditambah persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi 2 (dua). Sehingga realisasi dari pencapaian Indikator kinerja Persentase Budaya yang dilestarikan secara rinci masing-masing sub indikator sebagai berikut:

Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan , dengan Rumus : jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata	Capaian %
2020	20	91	21,98
2021	0	91	0
2022	35	130	26,92

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen 2022

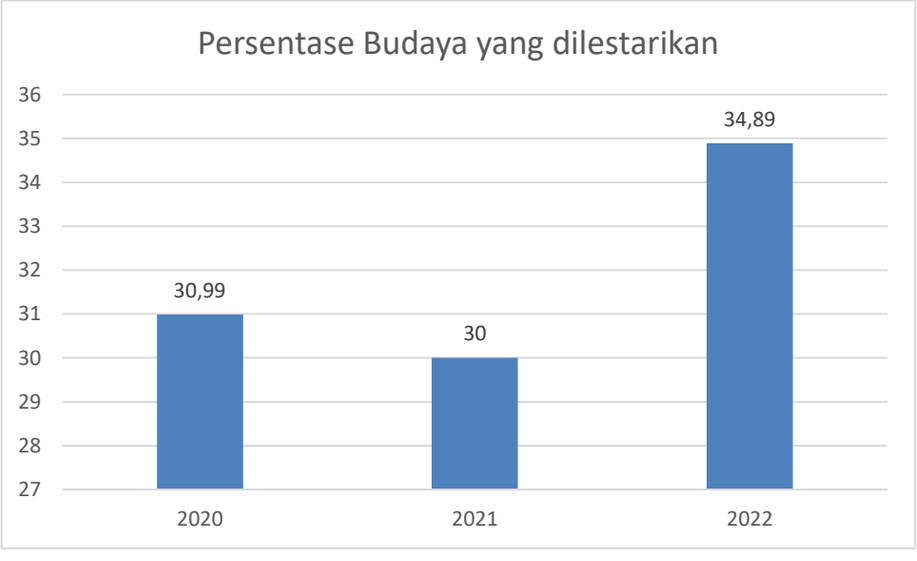
Dari tabel diatas pada tahun 2020 yang terpasang papan nama ada 20 objek cagar budaya/diduga cagar budaya dari 91 objek yang terdata. Pada tahun 2021 karena ada pandemi Covid19 jadi hampir semua kegiatan terhenti, karena ada recofusing anggaran. Dan ditahun 2022 objek yang terpasang papan nama sejumlah 35 objek cagar budaya/ diduga cagar budaya , dari 130 objek yang terdata. Jadi jumlah yang objek cagar budaya/ diduga cagar budaya yg sudah terpasang sampai dengan tahun 2022 sejumlah 55 objek cagar budaya/diduga cagar budaya.

Indikator persentase kesenian yang dikembangkan, dengan rumus: Jumlah kebudayaan /jumlah kegiatan x 100%, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah kebudayaan	Jumlah kegiatan	Capaian %
2020	2	5	40,00
2021	3	5	60,00
2022	3	7	42,86

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen 2022

Dari dua sub indikator di atas apabila simpulkan menjadi Persentase Budaya yang dilestarikan dapat digambarkan menjadi grafik sebagai berikut:



Grafik 3... Presentase Budaya yang dilestarikan

Tercapainya target Presentase Budaya yang dilestarikan bukan berarti tidak mempunyai tantangan/ permasalaha dalam mencapai target yang ditetapkan. Adapun Permasalahan dalam upaya mencapai target, adapun solusi atau upaya untuk mempertahankan dan atau mencapai target yang akan datang antara lain:

1. Intensif dalam menggali potensi budaya/ cagar budaya
2. Mengembangkan dan menata pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
3. Sering menggelar atraksi budaya/ event budaya daerah

G. Tujuan Ketujuh : Mewujudkan kondusitivas wilayah

Mewujudkan kondusitivas wilayah diukur dengan indikator kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah. Realisasi dan capaian indikator Indeks Kondusivitas Wilayah yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kondusivitas Wilayah	100	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Indeks Kondusivitas Wilayah pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Kondusivitas Wilayah tahun 2022 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %.

Perhitungan Indeks Kondusivitas Wilayah diperoleh dari persentase penegakan peraturan daerah ditambah persentase desa tangguh bencana dibagi dua. Secara terperinci permasalahan dan solusi mencapai target dijelaskan pada dua sasaran strategis berikut:

a. Sasaran 1 dari Tujuan Ketujuh : Meningkatnya ketertiban masyarakat

Meningkatnya ketertiban masyarakat diukur dengan indikator Persentase Penegakan Perda. Realisasi dan capaian indikator Persentase Penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Penegakan Perda	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Kinerja Penegakan Perda tahun 2022 dengan hasil 22 jenis perda yang ditegakkan, dengan 5525 kasus yang ditegakkan, atau realisasi 100%. Rincian kasus yang ditegakkan adalah sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 3. 20 Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

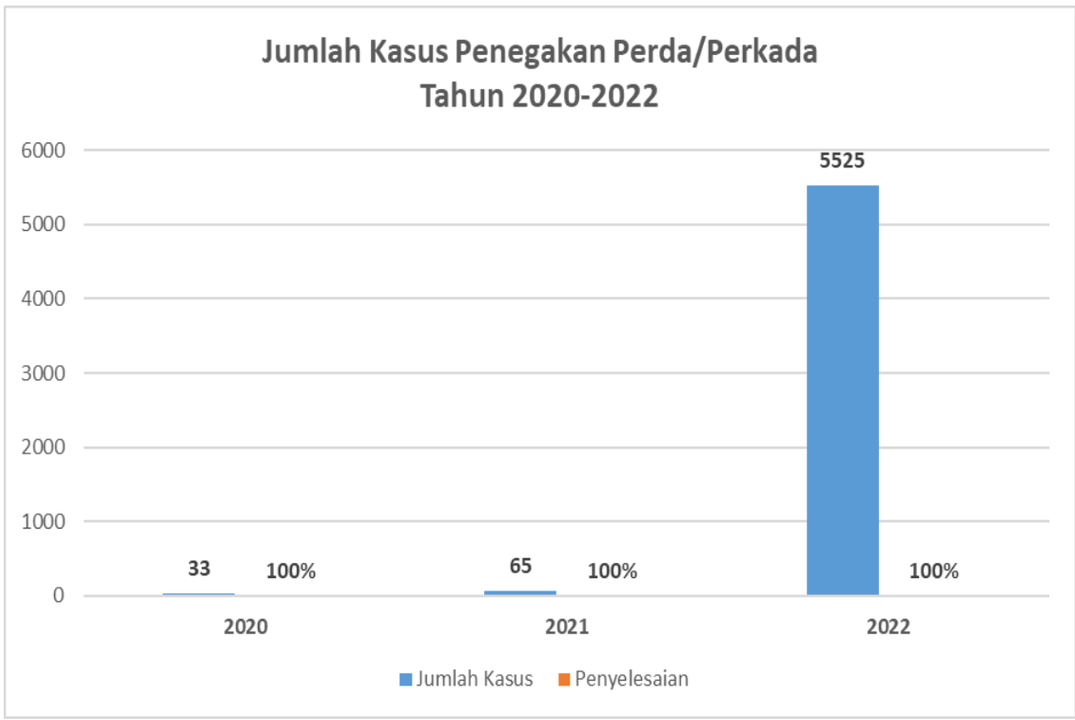
No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
1	Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan	21	0
2	Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Dan Tatacara Tanda Daftar Gudang	21	0
3	Perda Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri	21	0
4	Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan, Minuman Dan Izin Pengobatan Tradisional	21	0
5	Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha	21	0
6	Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel	7	0
7	Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran	21	0
8	Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan	1	0
9	Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame	21	0
10	Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	21	0
11	Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir	3	0
12	Perda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung	21	0
13	Perda Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi	3	0
14	Perda Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	21	0
15	Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7	0
16	Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	50	0
17	Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	4	0
18	Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	1	0
19	Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan	1	0
20	Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan	59	0

	Pedagang Kaki Lima		
21	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	5178	2
22	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan	1	0
		5.525	2

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2022

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Penegakan Perda tahun 2022 lebih tinggi, dimana pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditegakkan adalah 65 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 5525 kasus dengan demikian terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditegakkan sebanyak 5460 kasus. Namun demikian dari seluruh kasus yang ditangani telah terselesaikan secara keseluruhan (100%) dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %

Persentase Penegakan Perda dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah 100% pada tiap tahunnya, dengan jumlah kasus yang ditangani tiap tahun bersifat fluktuatif, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Pada tahun 2022 jumlah kasus penegakan Perda/Perkada yang ditangani meningkat signifikan, hal ini sebagian besar hal ini sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran reklame/spanduk/banner yang melanggar Perda yaitu pelanggaran terkait penempatan pemasangan reklame yang tidak sesuai peruntukannya dan banyaknya reklame yang sudah melewati masa tayangnya namun tidak diturunkan. Sehingga kenaikan angka jumlah pelanggaran Perda tersebut disebabkan oleh peningkatan operasi penertiban reklame di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen yang sangat massif, dan hal ini bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah, serta upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Namun demikian, seluruh kasus pelanggaran Perda dan Perkada tersebut telah ditangani sehingga cakupan penyelesaian kasus pelanggaran perda di Kabupaten Kebumen berjalan optimal karena realisasinya mencapai 100%.

Permasalahan dalam upaya mencapai target Persentase Penegakan Perda antaralain:

1. Belum ada efek jera bagi pelanggar ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat (pemasangan spanduk/reklame) sehingga kasus yang terjadi terulang kembali..
2. Belum ada solusi yang komprehensif bagi pelaku pelanggar ketertiban umum (ODGJ yang meresahkan, anak punk, pengemis, badut, pengamen di lampu merah, PKL diatas trotoar)
3. Belum seluruh wilayah Kabupaten Kebumen terjangkau waktu tanggap pemadaman kebakaran di bawah 15 menit.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antarlain:

1. Perlunya penindakan yang lebih tegas dengan melibatkan seluruh stakeholder
2. Perlunya program yang menjadi solusi pengentasan permasalahan sosial/ekonomi para pelaku pelanggar Trantibum yang melibatkan seluruh OPD pengampu leading sector.
3. Perlunya pendirian pos pemadam kebakaran di wilayah yang belum terjangkau waktu tanggap 15 menit, dan pelibatan masyarakat dalam penanganan pemadam kebakaran melalui pelatihan dan perekrutan relawan kebakaran yang diimbangi dengan pemenuhan peralatan pemadam kebakaran pada kantor instansi negeri/swasta.

b. Sasaran 2 dari Tujuan Ketujuh : Terwujudnya wilayah tangguh bencana

Terwujudnya wilayah tangguh bencana diukur dengan indikator kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana. Realisasi dan capaian Persentase Desa Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%

Persentase Desa Tangguh Bencana pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100 % atau kategori capaian **Baik**.

Apabila dibandingkan tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana tahun 2022 relatif sama dan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100 %.

Persentase Desa Tangguh Bencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tahun	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah Desa	Capaian %
2020	70	70	100,00
2021	390	70	100,00
2022	60	70	100,00

Permasalahan dalam upaya mencapai target Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2021 sebanyak 390 desa, baru dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi tentang konsep destana saja, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitasnya. Dalam tahun 2022, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas destana pada 60 desa

sasaran. Meskipun sudah terbentuk desa tangguh bencana di seluruh desa di kabupaten kebumen, namun secara kwalitas masih belum tercermin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana oleh desa, dilihat dari ketergantungan desa dalam penanganan bencana terutama pada saat darurat dan pasca bencana masih sangat tergantung oleh pemerintah Kabupaten.

Solusi atau upaya untuk mempertahankan dan mencapai target yang akan datang antar lain:

1. Untuk meningkatkan ketangguhan dalam penanganan bencana di desa, upaya yang dilakukan antara lain dengan mensinergkan kegiatan pada OPD terkait penanggulangan bencana.
2. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan bencana dengan menyesuaikan kondisi kerawanan bencana pada masing masing desa di Kabupaten Kebumen.

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

3.2.1. Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masih menyisakan berbagai masalah. Disisi lain, ketegangan geopolitik internasional semakin meningkat dengan terjadinya invasi Rusia atas Ukraina yang menyebabkan terganggunya pasokan kebutuhan barang dan jasa khususnya pangan dan energi. Kedua hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kenaikan inflasi yang cukup tinggi yang dialami secara global. Menurut Dana Moneter International (IMF) pada *World Economic Outlook* di Oktober 2022 memproyeksikan inflasi global pada Tahun 2022 sebesar 8,8% meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 4,7%. Inflasi global pada Tahun 2023 diproyeksikan oleh IMF dapat menurun menjadi 6,5% dan kembali menurun menjadi 4,1% pada Tahun 2024.

Sementara itu berdasarkan rilis BPS, inflasi pada tahun 2022 di Indonesia telah mencapai 5,51%. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Indonesia pada Tahun 2023 masih berada di atas 4%, sementara lembaga keuangan Danareksa memperkirakan inflasi Indonesia pada Tahun 2024 juga masih berada di atas 4%. Angka ini jelas lebih tinggi dibandingkan sasaran inflasi yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 yaitu sebesar 3±1% pada Tahun 2022 dan 2023 serta 2,5±1% pada Tahun 2024. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi ini akan mempengaruhi perekonomian daerah utamanya akan berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan serta meningkatnya garis kemiskinan yang akan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Kualitas pelayanan publik

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (*public service*). Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik tidaknya administrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden pada Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa dalam mempercepat tercapainya suatu tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi diseluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa di setiap instansi pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan suatu perubahan yang signifikan pada elemen birokrasi diantaranya, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Dari 8 (delapan) area perubahan yang diharapkan, perubahan pada peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan inti dari reformasi sebagai keluaran yang secara otomatis akan menjadi peningkatan semua unsur reformasi birokrasi. Meskipun beberapa tahun terakhir Kabupaten Kebumen mempunyai tren kenaikan dalam kualitas pelayanan publik dan indeks reformasi birokrasi, namun upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat dioptimalkan melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan.

2. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dapat dilihat salah satunya menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan sebesar 1,99 yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,8 dan pada tahun 2022 sebesar 70,79 atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir dan sudah termasuk dalam kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91.

Berdasarkan komponen-komponen pembentuk IPM, khususnya Angka Harapan Hidup (AHH), selama kurun waktu 2018-2022, AHH di Kabupaten Kebumen mempunyai tren kenaikan yang positif yaitu mempunyai rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 0,15 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen semakin membaik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih terdapatnya kasus kematian ibu dan bayi. Selain itu, masalah lain yang berkaitan dengan kualitas dan daya saing SDM yaitu dengan masih ditemukannya kasus gizi kurang, gizi buruk dan balita stunting serta tingginya kasus kesakitan yang disebabkan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Sementara itu pada komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada tahun 2022 Kabupaten Kebumen mempunyai HLS dan RLS yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah sebesar 13,36 tahun, lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah (12,81) maupun Nasional (13,10). Namun demikian RLS Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 7,85 yaitu masih dibawah RLS Provinsi Jawa Tengah (7,93) dan Nasional (8,69). Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah antara lain rendahnya RLS serta masih terdapatnya anak putus sekolah tingkat SMP/MTs.

3. Kestabilan ekonomi

Stabilitas ekonomi suatu wilayah dapat dicapai ketika indikator makro ekonomi tumbuh atau berubah dalam sifat yang menguntungkan dan tidak terjadi perubahan fluktuatif dari waktu ke waktu. Beberapa indikator makro ekonomi tersebut di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tercapainya stabilitas ekonomi, maka tujuan makro ekonomi lainnya dapat tercapai, seperti harga dan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya ketidakpastian kondisi nasional hingga global yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi sewaktu-waktu, diperlukan tindakan antisipasi demi menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Kebumen.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kebumen telah menunjukkan peningkatan kembali sejak pandemi Covid-19, meskipun secara kumulatif dalam kurun waktu 5 tahun pertumbuhan ekonomi masih menurun dari angka pertumbuhan tahun 2018 yakni 5,53 ke tahun 2022 yang sebesar 4,50*. PDRB per kapita Kabupaten Kebumen pun masih tergolong stabil perkembangannya dalam 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan sektor-sektor

ekonomi mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 dan perlu terus didorong untuk dapat mendukung perkembangan dan kestabilan perekonomian Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen bukan termasuk kabupaten yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai sumber perhitungan inflasi wilayah. Untuk itu perhitungan inflasi mengikuti daerah terdekat yaitu Kab. Banyumas. Nilai inflasi dari tahun 2021 ke 2022 cenderung mengalami peningkatan besar dari 2,18 menjadi 6,49. Hal ini perlu diantisipasi demi mencegah risiko buruk inflasi ke depan seperti berkurangnya daya beli masyarakat dan rendahnya suku bunga bank.

Dalam aspek pemenuhan kebutuhan rumah tangga, ketersediaan pangan masih dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu dipertahankan selain juga mendorong untuk dapat menciptakan industri yang berorientasi ekspor. Perlu didukung pula peningkatan kualitas produk dan perluasan jangkauan pasar bagi UMKM agar dapat mencapai kenaikan kelas bagi UMKM. Salah satu langkah yang telah dilakukan dalam mendorong dan menciptakan kondisi Kabupaten Kebumen yang ramah investasi yakni penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam aspek sumber daya manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat serta tingkat pengangguran terbuka relatif menurun. Hal itu dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang aktif dalam mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Kebumen. Meski demikian, masih diperlukan upaya pengurangan jumlah pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain pengembangan UMKM, Kabupaten Kebumen juga tengah bergeliat dalam sektor ekonomi kreatif (ekraf). Telah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kebumen pada tahun 2021 yang berfungsi untuk mensinkronkan antara pelaku dan komunitas ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Pengembangan ekraf perlu didorong demi tumbuhnya kewirausahaan di kalangan muda serta ikut memberi dampak positif bagi pengurangan jumlah pengangguran terbuka hingga menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka Panjang yang secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Sampai pada tahun 2022, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor yang diselesaikan memberikan dampak yang signifikan, salah satunya adalah

dengan pembangunan koridor jalan Soekarno-Hatta yang merupakan penataan pengembangan koridor Jalan Satu Arah. Hal ini juga berimbas pada aktivitas ekonomi yaitu pemindahan pasar pagi dari pusat pasar (Pasar Tumenggungan) ke Stanplat Colt yang buka dari pukul 01.00 WIB - 08.00 WIB.

Perubahan iklim merupakan ancaman yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan yang akan berdampak pada ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, mencakup antara lain produksi dan distribusi pangan, ketersediaan air dan energi. Langkah antisipatif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan Embung Krakal Alian dengan anggaran Rp 1,6 M, pemeliharaan Embung Kalirejo, Karanggayam dengan anggaran Rp 200 juta. Selain itu pembangunan jaringan irigasi tanah desa dengan total anggaran Rp 794 juta. Pemeliharaan jaringan irigasi di 4 Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen Rp 1.316.000.0000 Rehabilitasi jaringan irigasi Rp 3.571.119.000 untuk 10 Daerah Irigasi yang tersebar di Kabupaten Kebumen. Selain itu perubahan iklim juga dipengaruhi oleh Indek Pengelolaan Pencemaran Udara yang di hitung didasarkan pada pengelolaan gas hasil sampah. Di Kabupaten Kebumen, untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah ada penangkap Gas Metana (CH_4) yang dimanfaatkan untuk memasak oleh 35 KK masyarakat sekitar.

5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Asshiddiqie, 2007). Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal dan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pada tahun 2024, Indonesia kembali akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD, yang selanjutnya juga akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pemilukada) untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Momentum penyelenggaraan pemilu/pemilukada tersebut perlu menjadi perhatian khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka memfasilitasi pelaksanaannya. Beberapa hal seperti alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada, pemantapan kondusivitas wilayah dan

sinergitas antarlembaga menjadi isu penting yang harus dipersiapkan dengan baik.

Terkait dengan kondusivitas wilayah, berikut adalah beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian antara lain optimalisasi jumlah sumberdaya aparatur penegak disipilin yang memadai; penurunan tindak kriminalitas melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan unsur perlindungan masyarakat; peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat; serta menjaga kondisi harmonis antar partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, kondusitivas wilayah juga perlu didukung dengan peningkatan upaya dan sinergitas dalam penanggulangan bencana mengingat bahwa Kabupaten Kebumen adalah salah satu wilayah rawan bencana, sehingga semua pihak yang terkait dengan kebencanaan serta masyarakat lebih siap dan tanggap dalam penanggulangan bencana

3.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian. Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
    a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
    b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;

c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
   b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
   c. peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan
   d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian. perikanan dan kelautan;
   b. peningkatan skala ekonomi koperasi. industri/usaha mikro. kecil dan menengah;
   c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
   d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi. pasokan dan ketersediaan barang;
   e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   f. penguatan ketahanan pangan; dan
   g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
   b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
   c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
   d. peningkatan kelayakan hunian;
   e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
   f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui upaya:
   a. peningkatan kewaspadaan dini;
   b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
   c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
   d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah

kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi pada tahun 2024 dirumuskan dengan fokus beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan agrobisnis
2. Pengembangan ekonomi kreatif
3. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Kebumen Jaya
4. Pengembangan Infrastruktur pendukung perekonomian
5. Pengembangan Koridor Perkotaan Kebumen
6. Pengembangan Eduwisata Pandan Kuning
7. Geopark Kebumen
8. Penanganan Stunting

3.2.4. Inovasi Daerah

Beberapa inovasi daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan visi misi daerah. Inovasi juga diaksanakan dengan langkah-langkah kolaboratif baik dengan kelompok masyarakat, instansi provinsi, pemerintah pusat, badan usaha maupun perguruan tinggi dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Inkubasi Kewirausahaan

Inkubasi kewirausahaan merupakan suatu proses pembinaan, pelayanan, Pendampingan, pembimbingan dan pengembangan yang diberikan kepada wirausahawan, calon wirausahawan atau peserta inkubasi (tenant) dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula. Dengan adanya inkubasi kewirausahaan diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Selain itu juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam mengggerakan perekonomian dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Inkubator wirausaha berperan penting dan strategis dalam melahirkan wirausaha yang kreatif dan inovatif. karena melalui inkubator akan muncul wirausaha-wirausaha baru berbasis IPTEK.

Pengembangan inkusbasi kewirausahaan merupakan bagian untuk mendukung misi ke-3 yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”. Salah program unggulan dalam misi ke-3 ini adalah Kebumen Ekonomi Handal dengan

program inkubasi wirausaha. Peran wirausaha dalam menumbuhkan kembali perekonomian Kabupaten Kebumen adalah dalam hal produk dan jasa yang bisa memberikan efek ekonomi berjenjang. Adanya inkubasi wirausaha diharapkan mampu melahirkan inovasi dan ide-ide baru disektor usaha. Adanya pandemi covid berdampak pada perubahan social, sehingga para pelaku wirausaha juga harus bisa beradaptasi dan melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi.

Rintisan inkubasi wirausaha telah dimulai pada tahun 2021, dan akan terus ditingkatkan pada tahun 2024 untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda yang Tangguh, kreatif, professional dan berdaya saing di daerah. Pada tahun 2024 perlu fokus pada program inkubasi untuk memfasilitasi pembinaan wirausaha muda melalui inkubator wirausaha yang dilakukan secara holistik mulai dari pengenalan potensi, pengolahan bahan baku awal, proses *trial and error* produk hingga menjadi sebuah produk jadi dan bisa melakukan pemasaran secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan secara komprehensif. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Fase awal yaitu pemetaan Potensi Wilayah: dilakukan untuk menentukan potensi unggulan yang melimpah untuk keberlanjutan usaha serta melakukan analisa terhadap nilai tambah komoditas yang ditemukan dan daya saing dari komoditas tersebut.
b. Penyusunan rencana kegiatan: dilakukan untuk menyusun seluruh proses yang akan dilaksanakan diwilayah setempat yang disesuaikan dengan komoditas yang telah ditentukan misalnya mulai dari pengenalan produk hingga penyusunan rencana tindak lanjut pengembangan bisnis.
c. Pelaksanaan Kegiatan
    1) Pengenalan Produk dan Pelatihan Produksi
    2) Pelatihan Pemasaran baik secara online maupun offline
    3) Pelatihan Pembuatan label, logo dan kemasan
    4) Pelatihan Pembukuan
    5) Fasilitasi Perijinan
    6) Praktek Produksi dan Pemasaran serta evaluasi berkala
    7) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

d. Fase Akhir: dilakukan evaluasi atau pencatatan terhadap perkembangan bisnis tenant

Selanjutnya memasuki tahap selanjutnya yaitu proses bisnis dan mempersiapkan tenant untuk dapat melakukan produksi masal dan

meningkatkan kemampuan untuk membangun jaringan bisnis. Pelatihan lanjutan pengembangan bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan teknologi dan bisnis maupun promosi produk.

2. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu

Kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 menunjukkan tren yang positif. Salah satu Kawasan objek wisata andalannya adalah kawasan wisata pantai selatan. Objek wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan suguhan pemandangan yang khas. Mulai dari pemandangan laut; pesisir pantai, kawasan karst, budaya, dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah berencana akan fokus pada pengembangan Kawasan pantai selatan yang diharapkan dapat mendorong peran pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah serta menyerap tenaga kerja lokal. Pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pembangunan sektor lain seperti infrastruktur, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, pembangunan manusia serta penyerapan tenaga kerja.

Terdapat setidaknya dua strategi yang perlu dilakukan agar kontribusi pariwisata Pantai Selatan terhadap perekonomian semakin meningkat, yaitu melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan omzet pelaku ekonomi kreatif. Dalam dokumen rencana pengembangan kawasan wisata terpadu disebutkan bahwa strategi peningkatan kunjungan wisatawan dapat dicapai dengan pengembangan arah kebijakan peningkatan akses menuju destinasi wisata, peningkatan daya tarik wisata, optimalisasi pengelolaan kelembagaan pariwisata, peningkatan pemasaran destinasi wisata, dan kerjasama optimalisasi pengembangan pariwisata. Sementara itu, strategi peningkatan omzet pelaku ekonomi kreatif dapat dicapai melalui arah kebijakan peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif.

Pengembangan Kawasan wisata terpadu merujuk pada rangkaian beberapa objek wisata dalam pola perjalanan yang terencana dengan tema, narasi atau cerita tertentu sehingga dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bermakna dalam kegiatan pariwisata. Terdapat setidaknya 16 obyek wisata yang direncanakan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan yang akan dibagi menjadi beberapa zona pengembangan yaitu utama, pendukung, dan penghubung. Adapun yang ditetapkan menjadi zona utama yaitu Pantai Petanahan dan Pandan Kuning. Zona utama ini sekaligus menjadi prioritas utama pembangunan dan diharapkan dapat menjadi penarik masuknya investor, baik di zona pendukung maupun

penghubung. Sedangkan Zona Pendukung yaitu Pantai Tanggulangin yang sekaligus sebagai start poin dan Pantai Suwuk sebagai end poin. Sementara 12 objek wisata lainnya masuk dalam zona penghubung. Pembagian zonasi tersebut juga sekaligus sebagai pembagi prioritas pembangunan masing-masing kawasan wisata.

Selain itu konsep pengembangan kawasan wisata terpadu dilaksanakan dengan pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Kawasan ini diharapkan akan memberikan suguhan keindahan dan atraksi yang unik, wisata edukasi dan didukung dengan aksesibilitas yang baik maupun ketersediaan fasilitas layanan pendukung di sekitar kawasan penting dalam rangka pengembangan destinasi wisata.

Kebijakan Pengembangan Kawasan wisata terpadu merupakan salah satu inovasi daerah dalam meningkatkan PAD. Pengembangan Kawasan wisata terpadu diharapkan berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Selama kurun waktu 2016-2020 rata-rata kontribusi PAD terhadap kemampuan keuangan daerah sebesar 13.99%. dengan rata-rata pertumbuhan menunjukkan tren positif yaitu tumbuh sebesar 9.33%.

3. Pemanfaatan Aset Daerah untuk Kegiatan Produktif

Melihat potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta melihat tantangan dan permasalahan utama pembangunan daerah perlu sebuah terobosan dalam pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. BUMD/BUMN dan swasta. Permasalahan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mendorong Pemerintah Daerah berinovasi dalam rangka peningkatan kemandirian daerah melalui PAD. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Harapannya BMD yang idle dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah. Menurut PP No 27 Tahun 2014 pada pasal 27 disebutkan terdapat beberapa bentuk pemanfaatan barang milik negara yaitu berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Terdapat dua kerjasama yang telah dijalin yaitu pemanfaatan BMD untuk

pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan dan pembangunan perusahaan sarung tangan.

Salah satu inovasi optimalisasi potensi kelautan dan perikanan dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan industri yang terintegrasi berbasis kelautan dan perikanan di pesisir selatan Kebumen melalui Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK). Upaya ini didorong dengan pemanfaatan teknologi dalam budidaya udang vanamei yang sementara ini sebagian besar dilakukan secara semi intensif/tradisional. BUBK dibangun diatas lahan 100 hektar milik Pemerintah Daerah menjadi yang pertama di Indonesia atau menjadi percontohan nasional. Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas udang vanamei dari kondisi eksisting yang diperkirakan sebesar 8-10 ton/ha/siklus menjadi 40 ton/ha/siklus. Model BUBK selain dikelola secara modern juga tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan ekosistem di sekiitarnya. Selain meningkatkan produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan, BUBK akan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang dilatih secara professional, serta diharapkan mampu menumbuhkan sentra ekonomi baru di wilayah Kebumen Bagian Selatan.

Optimalisasi pemanfaaatan BMD dengan perjanjian sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan perusahaan sarung tangan PT. JJ Gloves Indo asal Korea Selatan. Perusahaan tersebut direncanakan akan memulai pembangunan pada Tahun 2023 dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Dalam rangka persiapan operasional perusahaan telah dilakukan kerjasama dalam penyiapan SDM yang telah dilatih oleh BLK Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang telah dicanangkan ini diharapkan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif daerah serta dapat menimbulkan efek multiplier kepada masyarakat dalam peningkatan ekonomi. pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

4. Pengembangan Puskesos SLRT “Rumah Harapan”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara

komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Sebagai langkah tindak lanjut pada September 2015 telah dilaunching Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) “RUMAH HARAPAN” Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015. Saat itu UPT P2K memberikan 4 (empat) jenis layanan bagi warga miskin yaitu Pendidikan, Kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Saat ini Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial. mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator di lapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 10 (sepuluh) jenis layanan yaitu rekomendasi kartu indonesia sehat PBI dan badan amil zakat nasional, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program sembako, Program penanganan orang terlantar, rekomendasi adopsi anak, dan pendirian LKS serta layanan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Puskesos berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan PUSKESOS antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesos SLRT, dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan : Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perangkat daerah lainnya serta media (cetak dan elektronik). Saat ini Puskesos Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesos di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program *Quick Win Smart City* Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesos merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesos diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesos pada tingkat desa dapat

mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat.

5. Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi dunia sempat berkontraksi saat pandemi Covid-19 termasuk Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh kisaran -1.46% pada Tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.71. Hampir seluruh sektor perekonomian terkena dampak pandemi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kebumen menggagas sebuah terobosan baru untuk kembali menggerakkan perekonomian daerah dengan event berskala international yaitu Kebumen International Expo yang dilaksanakan pada Akhir Juni hingga Awal Juli 2022. Selain itu adalah perhelatan Kebumen Beach Half Marathon dan Kebumen Mendegam yang dilaksanakan di penghujung tahun 2022 juga memberikan dampat positif pada perputaran ekonomi masyarakat.

Event-event yang diselenggarakan sangat efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Event berskala nasional dan internasional dapat menjadi lokomotif perekonomian daerah karena menjadi wadah promosi produk-produk unggulan UMKM, menarik datangnya wisatawan sekaligus investor masuk ke Kabupaten Kebumen. Artinya dengan adanya event maka mampu meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat memberikan terbukanya peluang pasar dan jaringan bagi pelaku UMKM, Ekonomi Kreatif sehingga dapat meningkatkan omsetnya. Pemerintah dalam hal ini tidak harus menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan event, namun menjadi fasilitator, regulator dan penghubung dari para stakeholder berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan event-event beskala besar di daerah.

3.3. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2022

Tabel 3. 114 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2021 dan Rencana tindak lanjut

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN	SOLUSI
A.	1. Rata-rata lama sekolah baru sebatas 7,55 tahun, artinya rata-rata lama sekolah di Kebumen masih dibawah wajib belajar 9 tahun dan hal ini harus menjadi perhatian	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sosialisasi dan optimalisasi Gerakan Kembali ke sekolah	- Sebagian penduduk usia sekolah yang ada di pondok pesantren hanya mengaji dan tidak bersekolah - Pernikahan dini - Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah	- Memberikan edukasi melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan melalui gerakan kembali ke sekolah secara berkelanjutan - Penguatan peran sekolah nonformal/kesetaraan (SKB dan PKBM)
			Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) peruntukkan untuk anak kelas 6 SD/MI dan 9 SMP/MTs	- Faktor kemiskinan dan perpindahan penduduk kebumen yang bekerja di luarkota membawa serta anak dan keluarga keluar dari Kebumen	- Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) peruntukkan untuk anak kelas 6 SD/MI dan 9 SMP/MTs yang berkelanjutan
	2. Pengangkatan guru PPPK dengan anggaran kurang lebih 115 M agar bisa berdampak pada kualitas, mutu dan prestasi pendidikan di Kabupaten Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Seleksi guru PPPK	Kabupaten Kebumen kekurangan guru ASN yang akhirnya sekolah mengangkat GTT. Untuk memenuhi kebutuhan guru yang sesuia standar maka tahun 2021 disediakan formasi guru PPPK sejumlah 2355, akan tetapi GTT yang lolos seleksi hanya sejumlah 1907	Untuk memenuhi kebutuhan ASN pada tahun 2022 dibuka kembali formasi sejumlah 488 untuk memenuhi kebutuhan guru.

	3. Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk lebih memperhatikan sekolah swasta SD/MI maupun SMP/MTs dari segi bangunan, sarpras maupun mutu	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Supporting untuk sekolah berdasarkan skala prioritas	- Kemampuan anggaran terbatas	- Bantuan bangunan, sarpras maupun mutu berdasarkan skala prioritas
B	1. Penanganan serius terhadap angka kematian ibu dan kematian bayi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi melalui program P4K, Kelas ibu dan balita serta jejaring layanan K1-K4 secara maksimal - Pelatihan standar persalinan bidan dan penanganan bayi baru lahir untuk tenaga kesehatan lain - Meningkatkan layanan rujukan persalinan	- Anggaran terbatas sehingga Belum semua nakes mendapat pelatihan	- Koordinasi penyelenggaran pelatihan
	2. Penanganan gizi buruk angka 0,03%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Untuk tenaga kesehtan; - pelatihan tatalaksa gizi buruk Pelatihan PMBA - Pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk	- Anggaran terbatas sehingga Belum semua nakes mendapat pelatihan	- Koordinasi penyelenggaran pelatihan
	3. Indeks kepuasan masyarakat tidak banyak perubahan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Meningkatkan sosialisasi penilaian kepuasan masyarakat bagi pengguna layanan - Belum puasnya masyarakat terhadap pelayanan dari petugas	- Belum optimalnya sosialisasi penilaian indek kepuasan masyarakat - Belum optimalnya pelayanan prima	- Meningkatkan sosialisasi penilaian kepuasan masyarakat bagi pengguna layanan pada produk layanan public - Meningkatakan kompetensi petugas dengan pelayanan prima
	4. Dokumen RBA dan Pendukung BLUD tidak pernah diberikan oleh DPRD	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Mendasar PMD 79/2018 tentang BLUD, BLUD menyusun RBA dengan telaah oleh tim TAPD (dilakukan verifikasi) - RBA diintegrasikan / konsolidasi dan merupakan kesatuan RKA - BLUD selalu mengirim RBA ke PPKD	-	- Koordinasi dengan PPKD

C	1. Argobisnis merupakan tema yang ada baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Tetapi dalam tema, hal ini bias terlihat dari infrastruktur dalam rangka pengembangan agrobisnis yang belum ditanganin secara serius, salah satunya ada pada indikator capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik yang baru mencapai 75,17 % dan tidak memenuhi target yang ada. Dengan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan maka pembangunan yang dilaksanakan akan tidak berarti dan tidak berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Menginventarisir jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang mengalami rusak berat	- Tingginya curah hujan yang menyebabkan peningkatan debit air dan menyebabkan kerusakan baru di beberapa titik jaringan irigasi	- Pengajuan penambahan anggaran untuk penanganan Jaringan Irigasi
	2. Dalam penyelenggaraa penerbitan IMB dan SLF dari 500 pemohon hanya 213 yang bisa terlayani alasannya adalah karena belum ada Perda PBG dan perda restribusi PBG, kami menyayangkan hal tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat dan adanya potensi kerugian daerah karena hilangnya pendapatan ini disebabkan karena pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mengabaikan peraturan-peraturan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Melakukan pencermatan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan pelasanaan undang-undangan nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung	- Adanya peraturan baru terkait PBG dan SLF	- Menyusun peraturan perda PBG dan Perda Retribusi PBG

	diatasnya. Kedepan terhadap mandate regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk segera disikapi.				
	3. Terhadap kesalahan perhitungan pada kegiatan pelebaran jalan di dokumen, hal ini mencerminkan ketidakseriusan OPD dalam menyusun dokumen LKPJ	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Inventarisasi data paket	- Adanya penambahan lokasi penanganan jalan	- Penyesuaian pemetaan lokasi sesuai dengan kemampuan anggaran
	4. Berdasarkan dokumen LKPJ yang diterima oleh DPRD terhadap bantuan semen yang tidak bisa dilaksanakan pemecahan masalahanya adalah akan dianggarkan kembali ditahun berjalan dan tahun berikutnya, kami meminta untuk bisa dilaksanakan hal tersebut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Menginventarisir data usulan semen yang belum terakomodir ditahun 2021	- Kemampuan anggaran	- Diusulkan dalam penganngaran tahun 2022
	5. DPRD merekomendasikan pemerintah daerah segera menyelesaikan revisi peraturan daerah nomor 23 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah tahun 2011-2031 dan segera menyusun peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pengajuan RTRW Evaluasi Praloket Kementerian ATR BPN - Pengajuan Asistensi Peta Dasar Ke BIG Untuk RDTR	- Kewenangan Kementerian	- Revisi RTRW Kabupaten Kebumen : sudah dilakukan evaluasi praloket dengan Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2022 sudah melakukan konsultansi evaluasi sebanyak 5 kali, sampai saat ini masih menunggu jadwal konsultasi selanjutnya, dan target tahun ini sudah mendapatkan persetujuan substansi - RDTR Prembun : sudah dilakukan penyusunan NA

					dan Raperbup, sudah dilakukan penyusunan KLHS, sudah mendapatkan Berita Acara Orthofikasi Citra dari BIG, sudah dilakukan 2 kali Konsultasi Publik, sudah dilakukan pembahasan batas wilayah dengan Kabupaten yang berbatasan, sudah dilakukan pembahasan luas kavling, sekarang sampai pada tahap asistensi peta dasar dengan BIG, dan untuk percepatan kami akan melakukan evaluasi dengan tim kementerian ATR/BPN sebelum proses lintas sektor. - RDTR Kebumen : sudah dilakukan penyusunan NA dan Raperbup, sudah dilakukan penyusunan KLHS, sudah dilakukan 2 kali Konsultasi Publik, sudah dilakukan pembahasan luas kavling, sekarang sampai pada tahap asistensi orthofikasi citra dengan BIG, dan untuk percepatan kami akan melakukan evaluasi dengan tim kementerian ATR/BPN sebelum proses lintas sektor.

D	1. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan tidak bisa mencapai target, dari target 83,3% hanya tercapai 50,91%. DPRD memberikan rekomendasi untuk ditangani secara serius dan melakukan upaya koordinasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan.	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan	- Dalam kewenangan, penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi wewenang. Kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/kota, 10-15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi, dan lebih dari 15 Ha ditangani Pemerintah Pusat. Penanganan kawasan kumuh di tahun 2021 target 83,3% dan terealisasi sebesar 50,91%. Sampai tahun 2022 luas kawasan kumuh yang belum tertangani 288,12 Ha atau 83,93% dari total kawasan kumuh seluas 343,27 Ha. Koordinasi dengan provinsi dan pusat terus dilakukan, pembahasan penuntasan kawasan kumuh dilakukan oleh Pokja PKP dan telah terkomunikasikan dengan BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) dan Disperkim Prov. Jawa Tengah. - Kendala yang dihadapi dalam penangan kawasan kumuh karena merupakan penanganan yang komplek dari sarana lingkungan, air minum, persampahan, RTLH dan antisipasi kebakaran. Bantuan dari pusat berupa DAK juga menyasar ke kawasan kumuh dalam bentuk bantuan jamban, persampahan dan air minum dan sanitasi. Anggaran penanganan setiap tahun dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kebumen, namun masih membutuhkan peningkatan anggaran di tahun 2023 dan 2024 untuk pembangunan fisik.	- Persentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan tidak bisa mencapai target, dari target 83,3% hanya tercapai 50,91%. DPRD merekomendasi untuk ditangani secara serius dan melakukan upaya koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan.	- Memprioritaskan untuk penuntasan kawasan kumuh perkotaan sesuai dengan kewenangan masing-masing - Mengusulkan alokasi bantuan keuangan sarpras tematik ke Provinsi (akan diprioritaskan terhadap Kabupaten yang terdapat kemiskinan ekstrim) - Mengusulkan melalui DAK Sanitasi ke Kementerian PUPR

E	1. salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial adalah terkait dengan permasalahan data yang belum komprehensif dan valid, selain itu juga data kemiskinan belum bisa dijadikan satu data, padahal kita ketahui bahwa program unggulan Bupati adalah satu data. DPRD merekomendasikan agar data kemiskinan untuk segera diselesaikan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- melaksanakan pemutakhiran DTKS/Bansos yang pengesahannya dilakukan setiap bulan melalui asman Sekda	- belum adanya bimtek dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG sehingga apabila terjadi permasalahan penyelesaiannya kurang maksimal dan bimtek baru dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023	- melakukan koordinasi dengan pusdatin dan Kabupaten/kota lain dalam menghadapi setiap kendala yang muncul dalam pengoprasian aplikasi SIKS-NG
	2. Terkait dengan Kartu Kebumen Sejahtera (KKS) sebagai program unggulan Bupati yang disampaikan pada saat kampanye DPRD merekomendasikan untuk dilakukan evaluasi (diteruskan atau dihentikan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- pada tahun 2022 KKS hanya sebagai identitas atau penanda bahwa pemilik kartu adalah peserta KIS PBI APBD	- data peserta KIS PBI APBD yang bersifat dinamis menyebabkan tidak semua yang sudah terdaftar (pendaftar baru) menerima KKS	- dilakukan evaluasi sesuai dengan tujuan awal KKS sebagai pengontrol bansos APBD
	3. Persentase penanganan PMKS merupakan salah satu indikator yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial dari capaian yang ada dalam dokumen LKPJ cakupan persentase penanganan PMKS tahun 2021 hanya 89,18% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sudah mencapai 96,12% terhadap hal tersebut ke kedepan untuk lebih ditingkatkan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Perubahan indicator yang mempengaruhi capaian PMKS	- adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaanya hanya 1 tahun (2020)	- Indikator presentase penanganan PMKS ditahun selanjutnya diganti menjadi indakor SPM Sosial sesuai dengan Perbup no 154/2021 tentang IKU pemerintah daerah dan perangkat daerah kab. Kebumen thn 2021-2026 dan permensos No. 9/2018 ttg Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

F	1. Andalalin adalah analisis dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau sebuah usaha tertentu yang hasilnya akan dituangkan dalam dokumen andalalin atau sebuah perencanaan lalulintas pengaturan lalu lintas tahun 2019 tentang. Di Kabupaten Kebumen Andalalin diatur melalui Perda no. 19 tahun 2017 tentang analisa dampak lalu lintas, dalam LKPJ ditahun 2021 rakor penilaian hasil Andalalin hanya terrealisasi sebangayk 56%. DPRD merekomendasikan untuk lebih ditingkatkan pengawasan dan penerapan Perda tersebut . Karena seperti yang ketahui terjadi perubahan di jalan dan koridor perkotaan dan juga banyak berdiri banyak bangunan dan fasilitas publik seperti mall, pom bensin dan lain sebagainya.	Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan	- pengawasan andalalin sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas. Capaian tahun 2021 sebesar 56%. Jumlah kejadian kecelakaan tahun 2021 sebanyak 649 kasus, tahun 2022 sebanyak 895 kasus atau meningkat 246 kejadian. Pengawasan andalalin di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, hal ini adanya anggaran yang dialokasikan untuk koordinasi, pengamanan dan untuk pemenuhan sarana-prasarana seperti LPJU, Marka jalan, APILL serta perangkat lain yang menunjang keselamatan jalan baik di kawasan perkotaan maupun jalan-jalan kewenangan Kabupaten. Masih perlu peningkatan program ini baik melalui sosialisasi berlalu lintas kepada masyarakat maupun penambahan sarana-prasarana lalu lintas.	- kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya andalalin dalam pembangunan atau pendirian usaha - anggaran yang disediakan sifatnya penyediaan - terkait dengan tingginya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kebumen disebabkan sebanyak 28% faktor manusia, 20% faktor alam, 18% faktor kendaraan yang digunakan dan 15% faktor jalan. Sehingga faktor manusia mendominasi penyebab kecelakaan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri	- mengoptimalkan tim andalalin dan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya andalalin
G	1. Penyelenggaraan pendampingan UMKM pada tahun 2021 banyak yang tidak terealisasi, dari target yang ada hanya terealisasi sebanyak 40%. Mengingat UMKM merupakan potensi yang penting dalam pengembangan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi pada penanggulangan kemiskinan, kami meminta untuk kegiatan pendampingan dan bantuan UMKM yang belum bisa dilaksanakan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Pada tahun 2021 ada program bantuan sosial tunai untuk UMKM akibat dampak Covid-19 dengan nominal per orang Rp. 750.000 dengan target 5500 UMKM dan realisasinya sebanyak 3.360 UMKM sehingga terdapat sejumlah 2.140 UMKM yang tidak terealisasi atau dikembalikan dikarenakan ada data ganda, sudah menerima bantuan lain seperti PKH, ada dua penerima dalam satu KK, ada yang sudah pindah dan ada yang sudah meninggal. Tindak lanjut dalam konteks	- Untuk bantuan sosial tunai bagi UMKM dampak covid-19 pada tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan karena terbentur regulasi bantuan sosial tunai yakni sudah tidak ada krisis sosial karena pandemi covid-19 sudah mereda dan tidak anggaran yang memadai	- Penambahan anggaran untuk bantuan alat produksi usaha/Hibah alat produksi untuk menunjang pengembangan usaha UMKM atau penambahan anggaran untuk pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM secara general dan berjenjang disetiap wilayah kemiskinan

	ditahun 2021 untuk dianggarkan dan dilaksanakan tahun 2022 dan 2023.		pendampingan UMKM yaitu diberi pelatihan pengembangan usaha (kewirausahaan)		
H	1. Salah satu permasalahan dalam urusan penaganan modal adalah pengadan lahan. pengadaan lahan yang dibutuhkan olah masing-masing investor dengan kriteria yang dibutuhkan berbeda-beda tidak bisa terpenuhi karena terbatasnya informasi ketersediaan lahan sehingga menyebabkan kesulitasn untuk memenuhi pengadaan lahan. Perlunya mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar lebih memudahkan dalam memberikan informasi ketersediaan lahan.	DPMPTSP	- Telah diinventarisasi pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja - Koordinasi secara berkala guna pembahasan RDTR pada OPD terkait	- Tenggang waktu dalam proses revisi dan persetujuan dokumen pada Menteri yang membutuhkan waktu - Proses dan alur pengajuan dikoordinir oleh DPUPR	- Koordinasi lebih intens pada penyusunan RDTR perkotaan untuk wilayah Karanganyar dan wilayah Gombong
	2. Kami mendukung adanya upaya penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), penilaian kepuasan masyarakat kami harapkan untuk selalu dilakukan dengan harapan mereka puas atas pelayanan yang diberikan, inovasi juga harus dikembangkan dalam urusan penanaman modal dan perizinan berusaha.	DPMPTSP	- Telah diinventarisasi pada dokumen Rencana Strategis - Meningkatkan layanan di MPP dengan softskill petugas dan sarana prasarana penunjang pelayanan	- Keterbatasan anggaran dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan	- Memaksimalkan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Telah dilaksanakan Inovasi Layanan Perizinan Jemput Bola untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta pendampingan dalam input di aplikasi - Telah dilaksanakan Inovasi Galaksi (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi) untuk memudahkan investor

					mengetahui peluang investasi di Kabupaten Kebumen
I	1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga selama ini alokasi sumberdaya kegiatan dan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk bidang olahraga, kami meminta untuk bidang kepemudaan juga lebih diperhatikan, khususnya adalah bagaimana memerankan pemuda dalam proses pembangunan, peningkatan ekoniomi dan penanggulangan kemiskinan.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Mengusulkan alokasi anggaran untuk bidang Kepemudaan kepada TAPD	- Alokasi Sumber Daya Kegiatan dan Anggaran lebih banyak untuk bidang olahraga, dan kurang teralokasi untuk anggaran Kepemudaan	- Memetakan prtioritas organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan peran dalam pembangunan serta ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
J	1. Permasalahan dalam sistem informasi kepegawaian adalah sistem penggajian belum terintegrasi secara sempurna dengan SIMPEG,	BKPSDM	- Integrasi antara SIM Gaji dan SIMPEG	- Tahun 2022 belum bisa diintegrasikan karena SIM Gaji dari PT TASPEN menggunakan sistem Desktop sehingga tidak dapat diintegrasikan dengan SIMPEG yang berbasis WEB. PT TASPEN baru mengembangan SIM GAJI berbasis WEB pada pertengahan Tahun 2022.	- Integrasi antara SIM Gaji dan SIMPEG sedang dalam proses koordinasi dengan PT. TASPEN agar integrasi tersebut bisa dilaksanakan tahun 2023, dan akan terus diupayakan supaya hasil integrasi dapat berjalan optimal.
	2. Tidak sinkronnya SIMPEG dan sistem penggajian menggambarkan tidak sinkronnya belanja pegawai dengan data riil jumlah pegawai sehingga belanja pegawai selama ini selalu meningkat tetapi di realisasi selalu memberikan SILPA yang besar, DPRD merekomendasikan utk segera mengitegrasikan sistem penggajian dengan SIMPEG	BKPSDM	- Integrasi antara SIM Gaji dan SIMPEG	- Tahun 2022 belum bisa diintegrasikan karena SIM Gaji dari PT TASPEN menggunakan sistem Desktop sehingga tidak dapat diintegrasikan dengan SIMPEG yang berbasis WEB. PT TASPEN baru mengembangan SIM GAJI berbasis WEB pada pertengahan Tahun 2022.	- Integrasi antara SIM Gaji dan SIMPEG sedang dalam proses koordinasi dengan PT. TASPEN agar integrasi tersebut bisa dilaksanakan tahun 2023, dan akan terus diupayakan supaya hasil integrasi dapat berjalan optimal.

K	1. Fasilitasi Pendirian Bumdes tidak hanya menekankan pada jumlah yang terbentuk, tetapi adalah bagaimana Bumdes bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian desa, pendapatan asli desa dan peningkatan pengelolaan potensi desa, serta menjadi tulangpunggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Fasilitasi Kerjasama Bumdes dengan Pihak Ketiga	- Belum semua BUMDES terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi, operasional dan managerial.	- Memberikan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDES secara bertahap. - Fasilitasi Kerjasama Bumdesa dengan Pihak ketiga.
L	1. Kampung Garam merupakan salah satu inovasi dan program unggulan yang dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir, inovasi yang sudah dilaksanakan tentunya harus terus dikembangkan, maka DPRD meminta terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan inovasi kampung garam untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	- Pendmapingan Kelompok Usaha Garam (Kugar) untuk lebih meningkatkan produksi dan diversifikasi olahan garam serta rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan - Beberapa tunnel petambak garam mengalami kerusakan dikarenakan faktor alam	- Masih terkendala dalam pemasaran garam industri - Penambahan anggaran	- MoU atau kerjasama dengan pabrik dan industri yang membutuhkan garam
	2. Terhadap pengembangan shrimp estate harus memberikan dampak positif terhadap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kebumen, maka DPRD meminta untuk bisa disiapkan secara baik dan serius, baik dari segi SDM masyarakat maupun regulasi atau kebijakan tingkat daerah yang dibutuhkan.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	- Telah dilaksanakan pelatihan teknis tambak udang bagi masyarakat di Desa Jogosimo Kecamatan Klirong, Desa Tegalretno dan Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan - Telah disusun Perda TPI dan saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Bupati tentang TPI	-	- Telah beroperasinya kawasan shrimp estate dan diupayakan fasilitasi anggaran dan pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

	3. Adanya permasalahan perjanjian sewa penggunaan lahan tambak udang, bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama pembayaran dilakukan di awal tahun tetapi pada pelaksanaannya terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan faktanya sampai dengan bulan April banyak yang tidak membayar. DPRD merekomendasikan dinas terkait bersama dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	- Telah dilakukan upaya-upaya penagihan dengan memberikan surat tagihan 3 kali, Sosialisasi pembayaran non tunai serta pendekatan sosial lainnya	- Banyak petambak yang proses budidaya udangnya mengalami gagal panen dan merugi	- Memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran bagi para petambak untuk membayar sesuai ketentuan yang ada
M	1. Rencana pengelolaan wisata milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan BUMDES atau BUMDES Bersama, Dinas Pariwisata akan melaksanakan kajian lebih mendalam, DPRD menyayangkan eksekutif belum mempunyai konsep, kajian dan dasar hukum yang jelas terkait rencana kerja sama pariwisata daerah dengan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Terhadap rencana pengelolaan wisata milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan BUMDES atau BUMDESMA Dinas Pariwisata akan melaksanakan kajian lebih mendalam. Sejauh ini regulasi mengenai pengelolaan barang milik daerah sudah diatur dengan Perda Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , dimana disebutkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan : a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerja Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	- Legalitas Bumdes belum ada	- koordinasi dengan lintas dinas (Dinas PMD)
	2. Kunjungan wisata yang semakin menurun berdampak pada pendapatan retribusi sektor pariwisata, jika dibandingkan dengan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Terhadap pertanyaan tentang kunjungan wisata di Obyek Wisata yang dikelola oleh Kab. Kebumen, Dinas Pariwisata akan terus berupaya meningkatkan kreasi dan inovasinya	- Tren kunjungan wisatawan mengarah pada objek wisata yang baru	- membuat spot-spot yang lebih menarik dan melaksanakan event-event

	objek wisata diwilayah lain atau dengan obyek wisata yang dikelola oleh desa, kondisi obyek wisata milik daerah seperti tidak ada pengembangan dan tidak ada inovasi. Padahal investasi rehab, sarpras dan promosi yang dikeluarkan dengan beban APBD cukup tinggi. Dengan tidak tercapainya target pengelolaan ke BUMDes atau BUMDes Bersama dengan pola kerjasama. DPRD merekomendasikan untuk wisata milik daerah untuk tetap dipertahankan dalam pengelolaanya dan melakukan inovasi serta pengembangan untuk bias meningkatkab pengunjung		supaya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus meningkatkan PAD dari obyek wisata yang dikelola daerah. Adapun wacana Kerjasama dengan pihak lain akan dikaji dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. - memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan obyek wisata serta promosi melalui sosial media.		diobyek wisata yang dikelola Pemda
N	1. Bila mengacu pada Permendagri nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Maka kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga harus ada persetujuan DPRD. DPRD merekomendasikan setiap kerjasama yang dimaksud harus mengerti pada tahapan-tahapan sesuai dengan Permendagri nomor 22 tahun 2020 pasal 6 huruf e dan pasal 28 huruf e.	Sekretariat Daerah	- Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana Kerjasama Daerah Dengah Daerah (KSDD) dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah yang membebani masyarakat dan daerah dan atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalannya sebagaimana sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1) Permendagri nomor 22 tahun 2020 - Sampai saat ini KSDD dan KSDPK yang dilaksanakan belum terdapat kerjasama sebagaimana tersebut diatas	-	- Apabila terdapat KSDD dan KSDPK yang memenuhi sebagaimana pasal 11 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1) Permendagri No. 22 tahun 2020 akan dimintakan persetujuan DPRD

	2. Terhadap kesalahan penyajian data bantuan tempat ibadah, kedepan untuk lebih cermat dan lebih teliti dan menyajikan dalam dokumen LKPJ	Sekretariat Daerah	- Akan dilakukan penegasan verifikasi data terhadap OPD penyedia data	- Terdapat kesalahan penyajian data bantuan tempat ibadah dalam dokumen LKPJ.	- Sepakat dengan rekomendasi DPRD, akan disajikan data yang akurat
	3. Dalam hal proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilingkungan pemerintah daerah. DPRD sangat setuju sekali dengan kebijakan Bupati sebagaimana supervisi KPK bahwa untuk dilakukan pemaketan pengadaan dengan metode konsolidasi, DPRD merekomendasikan untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2022 agar konsisten dengan kebijakan Bupati.	Sekretariat Daerah	- Memerintahkan OPD untuk melakukan pemaketan pengadaan dengan metode konsolidasi	- Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah belum semua dilakukan pemaketan pengadaan barang dan jasa dengan metode konsolidasi. - Paket pekerjaan terlalu banyak sehingga akan lebih efektif dengan dilakukan konsolidasi	- Dilakukan konsolidasi terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
	4. Adanya peraturan diatas yang menerangkan terkait retribusi yang sedang diomnibuslaw, maka rancangan peraturan daerah terkait dengan pengajuan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang tidak bisa dibahas ditahun 2022, sehingga asumsi pendapatan ditahun 2023 yang direncanakan 4 Miliyar tidak bisa direalisasikan justru pemerintah daerah akan mengalami kerugian dari hasil sewa sebesar 140 juta/tahun. Untuk itu DPRD merekomendasikan pemerintah daerah segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut.	Sekretariat Daerah	- Berdasarkan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah diatur dalam satu peraturan Daerah	- Pembahasan raperda sudah diajukan untuk dibahas tahun 2022 tapi tidak bisa karena ada ketentuan omnibus low , jika tetap ditempuh akan percuma karena akan di tolak oleh kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri saat evaluasi raperda	- Kabupaten Kebumen sedang menyusun raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan sedang dalam tahap pembahasan Bersama dengan DPRD

O	5. Terkait dengan silpa tahun 2021 yang bukan mandatori dengan asumsi kurang lebih 31 miliyar, yang mana akan digunakan pada perubahan tahun 2022. Maka DPRD merekomendasikan dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022 agar dikonsultasikan dan dibahas dengan DPRD sesuai dengan amanat Perda No.4 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.	BAPPEDA	- Dilakukan perhitungan terhadap silpa tahun 2021	- Silpa tahun 2021 yang bukan mandatori dengan asumsi kurang lebih 31 miliar, yang mana akan digunakan pada perubahan tahun 2022, maka dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022 agar dikonsultasikan dan dibahas dengan DPRD.	- Setuju dengan rekomendasi DPRD, dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022 akan dikonsultasikan dan dibahas dengan DPRD sesuai dengan amanat Perda No.4 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannyakepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA- 090.02.4.039600/2022 tanggal 4 Februari 2022. Tugas Pembantuan di Kabupaten Kebumen padatahun 2022 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlahanggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) untuk pembangunan Pasar Kutowinangun II di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 4.000.000.000,- terealisasi Rp. 3.996.689.600,- atau sebesar 99,92%.

Tabel 4. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANA ANPENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIANKEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2022	Program Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustri andan Perdagang anKab. Kebumen	4.000.000.000	3.996.689.600	99,92	2	100	

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

Tabel 4. 2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DANRINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERITP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	10.087.758.000	10.087.758.000	100	100	100	DINAS PMD
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	2.206.830.000	2.206.830.000	100	100	100	DINAS PMD
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	169.948.912.000	169.946.366.500	100	99.98 - Tidak terealisasi sebesar Rp2,545,500.00 - Karena ada perangkat desa yang meninggal dunia	99,98	DINAS PMD
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	416.756.373.000	416.756.373.000	100	100	100	DINAS PMD

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DANRINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERITP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASIANGGARAN	(%)	REALISASICAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	163 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	30.945.910.000	30.945.910.000	100	100	100	DINAS PMD
6	Bantuan Keuangan Operasional TPQ	449 Desa	BPKAD SELAKUPPKD	2.245.000.000	2.240.000.000	99,8	Terealisasi 448 desa, 1 Desa tidak mencairkan karena tidak memiliki TPQ dengan ijin operasional yaitu Desa Karangglonggong Kec. Klirong.	99,8	BAGIAN KESRA

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kebumen, 2022

4.2. Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memperhatikan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan mencapai 99% dimana tidak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 dan capaian kinerjanya serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen.

Sistematika penulisan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup positif yang ditandai adanya peningkatan indikator-indikator kinerja dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan perolehan hasil yang optimal.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga ***Allah Subhanahuwata'ala*** senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN

INOVASI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

NO	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	**Pengembangan Inkubasi Kewirausahaan**	Inkubasi kewirausahaan merupakan suatu proses pembinaan. pelayanan. pendampingan. pembimbingan dan pengembangan yang diberikan kepada wirausahawan. calon wirausahawan atau peserta inkubasi (tenant) dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula. Inkubator wirausaha berperan penting dan strategis dalam melahirkan wirausaha yang kreatif dan inovatif. karena melalui inkubator akan mcul wirausaha-wirausaha baru berbasis IPTEK.
2	**Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu**	Pemerintah Daerah berencana akan fokus pada pengembangan Kawasan pantai selatan yang diharapkan dapat mendorong peran pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah serta menyerap tenaga kerja lokal. Pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pembangunan sektor lain seperti infrastruktur. perindustrian dan perdagangan. koperasi dan UMKM. pembangunan manusia serta penyerapan tenaga kerja. Kebijakan Pengembangan Kawasan wisata terpadu merupakan salah satu inovasi daerah dalam meningkatkan PAD. Pengembangan Kawasan wisata terpadu diharapkan berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Selama kurun waktu 2016-2020 rata-rata kontribusi PAD terhadap kemampuan keuangan daerah sebesar 13.99%. dengan rata-rata pertumbuhan menunjukkan tren positif yaitu tumbuh sebesar 9.33%.
3	**Pemanfaatan Aset Daerah untuk Kegiatan Produktif**	Salah satu inovasi optimalisasi potensi kelautan dan perikanan dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan industri yang terintegrasi berbasis kelautan dan perikanan di pesisir selatan Kebumen melalui Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK). Upaya ini didorong dengan pemanfaatan teknologi dalam budidaya udang vanamei yang sementara ini sebagian besar dilakukan secara semi intensif/tradisional. BUBK dibangun diatas lahan 100 hektar milik Pemerintah Daerah menjadi yang pertama di Indonesia atau menjadi percontohan nasional. Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas udang vanamei dari kondisi eksisting yang diperkirakan sebesar 8-10 ton/ha/siklus menjadi 40 ton/ha/siklus. Model BUBK selain dikelola secara modern juga tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan ekosistem di sekiitarnya. Selain meningkatkan produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan. BUBK akan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang dilatih secara profesional. serta diharapkan mampu menumbuhkan sentra ekonomi baru di wilayah Kebumen Bagian Selatan. Optimalisasi pemanfaaatan BMD dengan perjanjian sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan perusahaan sarung tangan PT. JJ Gloves Indo asal Korea Selatan. Perusahaan tersebut direncanakan akan memulai pembangunan pada Tahun 2023 dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Dalam rangka persiapan operasional perusahaan telah dilakukan kerjasama dalam penyiapan SDM yang telah dilatih oleh BLK Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

NO	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
4	**Pengembangan Puskesos SLRT "Rumah Harapan"**	Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan PUSKESOS antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder. menyusun rencana aksi pengembangan Puskesos SLRT. dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi. pihak swasta. organisasi masyarakat sipil. dan perangkat daerah lainnya serta media (cetak dan elektronik). Saat ini Puskesos Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesos di tingkat desa.
5	**Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah**	Pada Tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kebumen menggagas sebuah terobosan baru untuk kembali menggerakkan perekonomian daerah dengan event berskala international yaitu Kebumen International Expo yang dilaksanakan pada Akhir Juni hingga Awal Juli 2022. Selain itu adalah perhelatan Kebumen Beach Half Marathon dan Kebumen mendegam yang dilaksanakan di penghujung tahun 2022 juga memberikan dampat positif pada perputaran ekonomi masyarakat. Event-event yang diselenggarakan sangat efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Event berskala nasional dan internasional dapat menjadi lokomotif perekonomian daerah karena menjadi wadah promosi produk-produk unggulan UMKM. menarik datangnya wisatawan sekaligus investor masuk ke Kabupaten Kebumen. Artinya dengan adanya event maka mampu meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat memberikan terbukanya peluang pasar dan jaringan bagi pelaku UMKM. Ekonomi Kreatif sehingga dapat meningkatkan omsetnya. Pemerintah dalam hal ini tidak harus menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan event. namun menjadi fasilitator. regulator dan hub dari para stakeholder berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan event-event beskala besar di daerah.

PRESTASI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

NO	INSTANSI	PRESTASI
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	➢ Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori nilai B ➢ Penghargaan untuk Zona Integritas, DPMPTSP dengan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) Tahun 2022 ➢ Penghargaan untuk Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, DPMPTSP Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022
2.	ɛmenterian Keuangan	➢ Pemerintah Daerah Terbaik Kinerja Penyaluran Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
3.	ɛmenterian Komunikasi dan Informatika	➢ Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kebumen menuju informative
4.	ɛmenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	➢ Kabupaten Kreatif Indonesia Tahun 2022
5.	ɛmenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	➢ Kabupaten Layak Anak kategori Madya
6.	ɛmenterian Lingkungan Hidup & Kehutanan	➢ Sekolah Adiwiyata Nasional
7.	ıdan Koordinasi Penanaman Modal (B KPM)	➢ Penghargaan untuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB)
8.	ıdan Pemeriksa Keuangan (BPK)	➢ predikat WTP selama 5 (lima) kali berturut turut
9.	ɔmisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	➢ Anugerah KPAI Tahun 2022